

**Dipanggil
untuk Transformasi**
Diakonia Oikoumenis



**Dipanggil
untuk Transformasi**

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.
(sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

Sanksi Pelanggaran

Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dipanggil untuk Transformasi *Diakonia Oikoumenis*

BPK Gunung Mulia



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633
www.bpkgunungmulia.com

DIPANGGIL UNTUK TRANSFORMASI

Diakonia Oikoumenis

Copyright © 2022 oleh BPK Gunung Mulia

This edition is published under license from WCC Publications

All rights reserved

Hak Cipta Terjemahan Indonesia oleh

PT BPK Gunung Mulia

Jl. Kwitang 22–23, Jakarta 10420

E-mail: publishing@bpgm.com

Website: <http://www.bpggunungmulia.com>

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Cetakan ke-1: 2023

World Council of Churches (WCC) tidak bertanggung jawab atas hasil terjemahan buku ini

Editor: Veronica B. Vonny dan Hana Pattinama

Penerjemah: David Sihite

Tata Letak: Wahyu Dwi Hantoro

Desain Sampul: Hendry Kusumawijaya

Katalog dalam terbitan (KDT)

BPK Gunung Mulia

Dipanggil untuk transformasi : diakonia oikoumenis / oleh BPK Gunung Mulia ;

– Cet. 1. – Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.

xx, 261 hlm. ; 23 cm.

1. Diakonia Oikoumenis. 2. Mitra Oikoumenis—WCC & ACT Alliance.

I. Judul.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal World Council of Churches	xi
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal ACT Alliance	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
Bab 1 — Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Cara Membaca Dokumen Ini	2
1.3 Apa yang Kita Pahami tentang Diakonia Oikoumenis?	4
1.4 Konteks Dokumen Ini	9
1.5 Teks-Teks Diakonia Oikoumenis yang Ada	14
1.6 Ikhtisar Dokumen	17
Bab 2 — Sejarah Diakonia Oikoumenis	20
2.1 Pendahuluan	20
2.2 Gereja Mula-Mula	21
2.3 Era Misionaris	26
2.4 Bantuan Antar-Gereja	31
2.5 Diakonia Oikoumenis dan Bantuan Pembangunan	33
2.6 Munculnya Sebuah Paradigma Baru	39
2.7 Pembentukan ACT Alliance	44
2.8 Kesimpulan	48

Bab 3 — Diakonia dalam Gerakan Oikoumenis Polisentris	
Masa Kini	50
3.1 Pendahuluan	50
3.2 Diakonia dari Pinggiran	53
3.3 Busan 2013	58
3.4 Diakonia dan Ziarah Keadilan dan Perdamaian	59
3.5 Kesimpulan	60
Bab 4 — Refleksi Teologis tentang Diakonia	62
4.1 Pendahuluan	62
4.2 Referensi Alkitab: Kata-Kata <i>Diak-</i>	64
4.3 Diakonia dalam Perspektif Trinitarian	68
4.4 Diakonia sebagai Bagian Integral dari Eksistensi dan Misi Gereja	73
4.5 Diakonia sebagai Pemuridan	75
4.6 Diakonia dan Pewartaan	79
4.7 Kesimpulan	82
Bab 5 — Perubahan Lanskap Aksi Diakonia	84
5.1 Pendahuluan	84
5.2 Wajah-Wajah Baru Kemiskinan di Dunia Saat Ini	85
5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Lingkup Sosial-Politik bagi Diakonia	88
5.4 Migrasi dan Pengungsi	93
5.5 Keadilan Ekonomi	95
5.6 Keadilan Iklim	99
5.7 Keadilan Gender	103
5.8 Keadilan Kesehatan	107
5.9 Kesimpulan	111

Bab 6 — Kekhasan Praktik Diakonia	114
6.1 Pendahuluan	114
6.2 Tujuan Aksi Diakonia	115
6.3 Keterkaitan antara apa sebenarnya gereja dan apa yang dilakukan gereja	118
6.4 Diakonia sebagai Aksi Berbasis Iman dan Hak	120
6.5 Kekhasan organisasi berbasis iman	122
6.6 Aset-Aset Diakonia	125
6.7 Bahasa Diakonal	130
6.8 Profesionalisme Diakonia	132
6.9 Kesimpulan	134
 Bab 7 — Tantangan Kontemporer	 136
7.1 Pendahuluan	136
7.2 Sumber Daya yang Terbatas—Berbagi Sumber Daya	137
7.3 Karya Diakonia Bilateral atau Multilateral?	140
7.4 Kerja Sama dan Kemitraan dalam Diakonia Oikoumenis	144
7.5 Kerja Sama dengan Organisasi Sekuler	147
7.6 <i>Diapraxis</i> —Kerja Sama dengan Orang-Orang dari Agama Lain	149
7.7 Advokasi: Diakonia Profetis	151
7.8 Pelecehan dalam Lembaga Diakonia	153
7.9 Kesimpulan	154
 Bab 8 — Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Konfesional	 156
8.1 Pendahuluan	156
8.2 Pemahaman Ortodoks tentang Diakonia Oikoumenis	157
8.3 Pemahaman Lutheran tentang Diakonia Oikoumenis	159
8.4 Pemahaman Reformed tentang Diakonia Oikoumenis	161
8.5 Pemahaman Anglikan tentang Diakonia Oikoumenis	163
8.6 Pemahaman Methodis tentang Diakonia Oikoumenis	165
8.7 Pemahaman Pentakosta tentang Diakonia	167

8.8	Pemahaman Baptis tentang Diakonia	168
8.9	Pemahaman Gereja Katolik Roma tentang Diakonia Oikoumenis	170
8.10	Pemahaman Lembaga-Lembaga Gereja di Afrika tentang Diakonia Oikoumenis	174
8.11	Pemahaman Gereja-Gereja Perdamaian tentang Diakonia Oikoumenis	176
Bab 9	— Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Regional	177
9.1	Pendahuluan	177
9.2	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Amerika Latin	177
9.3	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Kepulauan Karibia	179
9.4	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Eropa	182
9.5	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Afrika	185
9.6	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Asia	188
9.7	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Timur Tengah	193
9.8	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Pasifik	195
9.9	Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Amerika Utara	197
Bab 10	— Langkah Selanjutnya	202
10.1	Pendahuluan	202
10.2	Mengenal Momen <i>Kairos</i>	203
10.3	Penegasan Diakonia sebagai Visi dan Mandat Bersama	204
10.5	Penegasan atas Keberagaman Karunia	205
10.5	Penegasan atas Keadilan sebagai Prioritas	206
10.6	Penguatan Struktur Aksi Bersama	207
10.7	Penguatan Jejaring Kerja Sama	207
10.8	Penguatan Komunikasi	208
10.9	Penguatan Kapasitas Diakonal	209
10.10	Praktik Diakonia dan Kode Etik	211
10.11	Krisis Lingkungan dan Ekodiakonia	213
10.12	Kesimpulan	214

Adendum — Karya Diakonia Gereja-Gereja dalam Konteks	
COVID-19	215
Dasar Pemikiran	215
Bagian 1: Gambaran Umum	217
Bagian 2: Contoh-Contoh	242
Kontributor	254
Kelompok Referensi Diakonia Oikoumenis (2015–2018)	254
Kelompok Referensi Diakonia Oikoumenis (2018–2022)	255
Kontributor lain (yang belum terdaftar dalam Kelompok Referensi)	255
Staf WCC	256
Deskripsi dan Kredit Foto	257

KATA PENGANTAR

Kisah Para Rasul pasal 6 menggambarkan tentang pemanggilan para diaken perdana—Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus. Hampir dua ribu tahun kemudian, panggilan untuk melayani dalam nama Kristus masih sangat relevan, penting, dan mendesak. Menemukan cara terbaik untuk melakukannya di tengah perubahan zaman adalah alasan penulisan dokumen ini.

Dipanggil untuk Transformasi—Diakonia Oikoumenis berawal dari sebuah konferensi yang diadakan di Malawi pada 2014, yang membahas kejelasan hubungan antara gereja dan pelayanan-pelayanan khusus. Sejak saat itu, terdapat beberapa perkembangan lebih lanjut—termasuk peluncuran Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh PBB pada 2015 dan pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Keduanya menuntut respons serta keterlibatan gereja-gereja dan lembaga diakonianya. Agar efektif, keterlibatan tersebut memerlukan koordinasi, kerja sama, dan gotong royong—yang dilakukan dalam semangat doa dan cinta kasih kristiani—yang turut menekankan tentang diakonia oikoumenis.

Dokumen ini bertujuan untuk menguraikan garis besar pelayanan diakonia secara teologis dan praktis. Dokumen ini ditawarkan sebagai sarana untuk memfasilitasi pembelajaran dan mendorong praktik-praktik yang bermanfaat. Dokumen ini menyoroti diakonia profetis yang membahas pembangunan perdamaian, keadilan iklim, keadilan gender, keadilan rasial, kesehatan, dan pemulihan. Dokumen ini juga bertujuan untuk membahas berbagai praktik

diakonia dan latar belakang teologis diakonia, termasuk membahas teologi-teologi yang menyesatkan.

Dokumen utama telah disiapkan sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Alih-alih mengubah dokumen tersebut, Komite Eksekutif Dewan Gereja-gereja se-Dunia merasa perlu dibuat sebuah adendum tentang respons diakonia terhadap COVID-19. Baik dokumen utama maupun adendum dapat dibaca dalam dokumen ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dokumen ini.

Kesaksian dan pelayanan sangat penting bagi gereja: misi, diakonia, dan oikoumenisme adalah satu kesatuan dan merupakan inti dari apa artinya menjadi gereja. Dewan Gereja-gereja se-Dunia dan ACT Alliance bekerja sama untuk menghasilkan dokumen ini, yang kami tawarkan kepada gereja-gereja di seluruh dunia dan pelayanan diakonianya. Kami berharap, upaya ini akan mengarah pada sebuah bentuk pertukaran gagasan lintas konfesi dan lintas batas untuk melayani orang-orang yang membutuhkan.

Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca
Sekretaris Jenderal
Dewan Gereja-gereja se-Dunia

KATA PENGANTAR

Dengan penuh apresiasi dan sukacita, kami mempersembahkan dokumen *Dipanggil untuk Transformasi—Diakonia Oikoumenis* ini, yang merupakan hasil upaya bersama ACT Alliance dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC) untuk memperjelas pemahaman bersama tentang diakonia oikoumenis serta menjelaskan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Dokumen ini menguraikan berbagai komponen teologis dan disusun berdasarkan praktik gereja-gereja dan organisasi-organisasi oikoumenis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dokumen ini juga memperlihatkan titik temu antara gereja dan pelayanan-pelayanan khusus untuk memandu berbagai aksi, praktik, dan pengembangan kebijakan. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas institusional konstituen masing-masing.

Memahami diakonia oikoumenis dalam konteks keberagaman konfesi (Bab 8) dan dalam konteks geografis yang beragam (Bab 9) sangat penting di tengah pandemi, konflik, eksklusi, dan krisis iklim. Komitmen bersama terhadap diakonia menjadi pertanda baik untuk memperkuat kerja sama antara gereja-gereja anggota WCC dan anggota ACT, sambil tetap melestarikan pemahaman bersama yang mengikat konstituen masing-masing dalam berbagai konteks.

Dokumen ini memberikan sebuah ‘acuan dasar’ yang baru untuk refleksi dan praktik diakonia bersama—yang menjelaskan tradisi gereja kita yang telah berusia ratusan tahun dalam kerangka kerja kontemporer Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (Bab 5.3) dan komitmen terhadap ‘pelokalan’, mendorong kepemimpinan lokal serta respons yang dimotori oleh komunitas.

Dokumen ini mempersiapkan kita untuk keterlibatan yang diperlukan dalam ‘jejaring kerja sama’ (Bab 10.7)—dan membantu kita untuk mengembangkan sebuah bahasa yang merangsang sistem pembangunan internasional dan kemanusiaan yang selama ini minim literasi agama, namun untungnya kini mulai berubah dengan adanya diskusi tentang ‘agama dan pembangunan’.

Diakonia merupakan ‘bagian integral dari keberadaan dan misi gereja’ (Bab 4.4). Tidak ada gereja tanpa diakonia, dan tidak ada diakonia tanpa ‘kekhasan aksinya yang berbasis iman’. Dalam konteks ini, tidak ada kontradiksi antara pendekatan berbasis iman dan berbasis hak dalam diakonia, karena keduanya saling menguatkan: “Aksi berbasis iman dan berbasis hak saling meneguhkan satu sama lain”.

Diakonia oikoumenis menegaskan dasar penting dari keadilan gender, dengan mengakui bahwa keadilan gender sangat diperlukan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup bermartabat dan bebas, dan menjadi subjek dalam kehidupan mereka sendiri.”

Pemahaman kita akan ‘panggilan untuk melakukan transformasi’ disertai dengan pemahaman bahwa panggilan ini (*vocatio*) mencakup kebutuhan bagi kita untuk terlibat bersama dengan kaum miskin, terpinggirkan dan dikucilkan melalui advokasi (*ad-vocatio*) dan jika perlu, provokasi (*pro-vocatio*): “diakonia akan mendorong munculnya perlawanan dan pertentangan, namun selalu yakin bahwa hal tersebut bersifat transformatif, yang mengajak kita untuk melihat, bertindak, dan menilai dengan cara-cara yang baru”.

ACT Alliance berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini dan mengapresiasi kerja sama dengan WCC dalam menyusun dan membagikan dokumen ini untuk peningkatan kerja sama yang efektif dalam melayani orang-orang yang membutuhkan dan dalam upaya mewujudkan keadilan.

Rudelmar Bueno de Faria

Sekretaris Jenderal

ACT Alliance

RINGKASAN EKSEKUTIF

Gagasan untuk mengembangkan teks tentang diakonia oikoumenis ini muncul pada September 2014 selama Konsultasi Internasional tentang Hubungan antara Gereja-gereja dan Pelayanan Khusus yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC) dan ACT Alliance, yang diadakan di Malawi. Dokumen ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman tentang diakonia oikoumenis dan menyediakan sebuah platform bersama untuk bertindak dan berefleksi bersama-sama. Dokumen ini menguraikan komponen-komponen teologis dari diakonia dan menawarkan materi praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan diakonia. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai bahan pendidikan dan pelatihan diakonia oikoumenis, untuk memperkuat kapasitas institusional konstituen masing-masing gereja, dan untuk mendorong dialog dan kerja sama antara gereja, mitra oikoumenis, dan WCC.

Proses penyusunan dokumen ini didampingi oleh sebuah kelompok kerja yang beranggotakan WCC dan ACT Alliance, dan pada awalnya didampingi oleh Lutheran World Federation (LWF). Sebagaimana ditegaskan oleh Komite Eksekutif WCC dalam pertemuannya di Trondheim, Norwegia (Juni 2016), dokumen ini:

- mempertimbangkan pengalaman yang telah berakar kuat dalam praktik diakonia dan refleksi di dalam gerakan oikoumenis, khususnya oleh WCC dan LWF;
- mempertimbangkan kontribusi yang spesifik dari lembaga diakonia profesional dalam peran mereka sebagai anggota ACT Alliance;
- menanggapi isu-isu sosial dan politik yang relevan di dunia saat ini yang menantang gereja-gereja dan lembaga terkait dalam aksi diakonianya;
- memberikan wawasan teologis yang menekankan dasar trinitaris dan eklesiologis diakonia dan yang dapat mengarahkan gereja-gereja dan lembaga terkait dalam praktik diakonia mereka;
- mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kapasitas gereja-gereja dalam melakukan pelayanan diakonia dan dalam kerja sama dengan mitra oikoumenis mereka.

Dokumen ini menyusun konsep diakonia oikoumenis dari dua perspektif. *Pertama*, terkait dengan pemahaman teologis tentang diakonia sebagai dimensi integral dari sifat dan misi gereja. Perspektif ini menunjukkan bahwa diakonia adalah ekspresi penting dari hubungan yang kuat antara apa yang dimaksud dengan gereja dan apa yang dilakukan oleh gereja. Refleksi tentang diakonia oikoumenis membutuhkan pemahaman tentang kedua dimensi berikut: keberadaan gereja dan aksi bersama sebagai persekutuan lembaga-lembaga dan orang Kristen di seluruh dunia.

Perspektif yang *kedua* terkait hal praktis, yang menggambarkan bagaimana gereja-gereja terlibat dalam aksi diakonia lintas konfesi dan lintas batas geografis. Apa yang disajikan dalam dokumen ini berfokus pada gerakan oikoumenis dan perannya dalam mempromosikan dan mengoordinasikan karya diakonia. Sejak didirikan pada 1948, Dewan Gereja-gereja se-Dunia memainkan peranan penting. Sejak saat itu, WCC terlibat dalam sejumlah besar program dan proyek dengan profil diakonia yang jelas, meskipun tidak selalu menggunakan istilah “diakonia”. Sebagai bagian dari praksis diakonia oikoumenis, WCC mendorong gereja-gereja anggotanya untuk terlibat dalam diakonia oikoumenis dan untuk memperkuat kapasitas diakonalnya. Dalam kemitraan dengan LWF, WCC berkontribusi dalam pendirian ACT Alliance dengan tujuan membangun sebuah

platform yang terorganisasi untuk diakonia oikoumenis, mengekspresikan visi bersama gerakan oikoumenis dengan gereja-gereja anggotanya dan lembaga terkait untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan berkarya untuk dunia yang lebih baik.

Diakonia bertujuan untuk merespons tantangan kontekstual yang dihadapi ketika berada dalam lanskap yang terus berubah. Dokumen ini mencakup analisis lingkungan sosial dan politik di tempat diakonia oikoumenis diselenggarakan. Dokumen ini mengacu pada tren umum dalam dunia saat ini yang menantang aksi diakonia, dan pada saat yang sama menawarkan peluang untuk praktik yang inovatif. Dokumen ini juga menggambarkan perubahan lanskap oikoumenis yang memengaruhi diakonia oikoumenis.

Dokumen ini berisi sepuluh bab. Bab 1 menyajikan informasi latar belakang dan memaparkan definisi diakonia oikoumenis. Bab ini menguraikan beberapa tren utama dalam konteks kontemporer yang menantang para agen diakonia yang aktif untuk merefleksikan kekhasan aksi berbasis iman dan hak serta bagaimana dapat menjadi inovatif dalam praktiknya.

Bab 2 memaparkan sejarah diakonia oikoumenis. Bab ini menunjukkan bahwa sejarah diakonia oikoumenis dimulai dari iman dan praktik gereja mula-mula dan komitmennya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Praktik semacam itu berlanjut dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah gereja sebagai bagian integral dari pelayanan sosial para misionaris. Bab ini kemudian berfokus pada pengembangan diakonia dalam gerakan oikoumenis, yang dimulai dengan bantuan antargereja setelah perang dunia, kemudian diperluas mandatnya untuk memasukkan karya pembangunan dan untuk terlibat dalam advokasi publik. Bab ini ditutup dengan pemaparan tentang pembentukan ACT Alliance dan visinya untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi dalam bidang diakonia oikoumenis.

Bab 3 menjelaskan tentang tempat diakonia dalam gerakan oikoumenis polisentris masa kini. Titik acuan utamanya adalah sidang ke-10 WCC di Busan pada 2013 dan hasilnya, khususnya tantangan untuk merefleksikan diakonia dari perspektif pinggiran, dan sebagai bagian dari undangan untuk sebuah ziarah keadilan dan perdamaian.

Bab 4 menyajikan beberapa pokok refleksi teologis tentang diakonia. Bagian ini menggambarkan penggunaan istilah “diakonia” dan kosakata yang terkait di dalam kitab Perjanjian Baru, serta memaparkan istilah tersebut dalam perspektif trinitaris, eklesiologis, dan misiologis. Selanjutnya, bab ini mengulas peran diakonia sebagai sebuah dimensi kemuridan Kristen dan ditutup dengan pembahasan tentang hubungan antara diakonia dan pewartaan.

Bab 5 dimulai dengan menggambarkan perubahan lanskap aksi diakonia dan wajah baru kemiskinan di dunia saat ini. Bab ini menyajikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB sebagai platform yang relevan untuk keterlibatan diakonia. Bab ini menunjukkan beberapa tema spesifik sebagai area prioritas untuk aksi diakonia, seperti migrasi dan pengungsi, keadilan ekonomi, keadilan iklim, keadilan gender, dan keadilan kesehatan.

Bab 6 merefleksikan kekhasan praktik diakonia, yakni bagaimana identitasnya sebagai aksi yang berbasis iman dan hak membentuk misi, tujuan, dan metodenya. Bab ini menyajikan aset diakonia, baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud yang tersedia untuk aksi diakonia, dan menunjukkan manfaat dari pengembangan bahasa diakonia. Terakhir, bab ini menjelaskan pentingnya membangun kapasitas diakonia dan menyajikan elemen-elemen inti dari profesionalisme dalam diakonia.

Bab 7 menyajikan tantangan dan peluang kontemporer, yang memaparkan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari di bab-bab sebelumnya. Bab ini membahas tantangan dari sumber daya keuangan yang makin menyusut dan pentingnya praktik inovatif dalam berbagi sumber daya, serta menyoroti pentingnya kemitraan dan membangun jejaring. Terakhir, bab ini menekankan advokasi sebagai dimensi integral dari karya diakonia, yang menegaskan panggilan profetisnya.

Bab 8 membahas diakonia oikoumenis dalam konteks keberagaman konfesi, yang memperlihatkan area yang memiliki kesamaan dan ketidaksamaan di antara konfesi tersebut, yang kemudian mengarah pada proses saling belajar dan memahami dengan lebih baik.

Bab 9 membahas diakonia oikoumenis dalam konteks regional yang beragam, berdasarkan praktik serta tantangan sosial-ekonomi, sosial-politik, lingkungan hidup, dan tantangan-tantangan lainnya di setiap wilayah yang

dicakup oleh Organisasi Oikoumenis Regional (Regional Ecumenical Organisations/REOs).

Bab 10 menyimpulkan studi ini dengan memaparkan langkah selanjutnya. Bab ini mengundang gerakan oikoumenis, gereja-gereja anggotanya, dan lembaga-lembaga terkait untuk menegaskan visi dan mandat diakonia oikoumenis, dan akhirnya mengusulkan langkah-langkah untuk memperkuat struktur aksi bersama dan jejaring kerja sama.

B A B 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

G agasan untuk mengembangkan dokumen tentang diakonia oikoumenis muncul selama Konsultasi Internasional tentang Hubungan antara Gereja dan Pelayanan Khusus yang diadakan di Malawi pada September 2014. Laporan konsultasi tersebut mengusulkan beberapa poin aksi yang spesifik:

Agar WCC dan ACT Alliance bersama-sama mengembangkan, pada akhir 2016, sebuah dokumen yang memperjelas pemahaman bersama tentang diakonia oikoumenis, dan menjelaskan siapa kita dan apa yang kita lakukan. Dokumen ini harus membantu memperjelas pemahaman tentang diakonia oikoumenis. Dokumen ini harus menguraikan komponen-komponen teologis dan materi yang bersifat praktis. Dokumen ini juga harus dibangun dari latihan/tinjauan pembelajaran yang dilakukan pada 2015. Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pelatihan diakonia oikoumenis untuk memperkuat kapasitas institusional konstituen masing-masing.

Hal ini sesuai dengan berbagai temuan pada *Ecumenical Conversations* 21 selama Sidang Raya ke-10 WCC di Busan, Republik Korea, pada 2013:

Para peserta menegaskan bahwa gereja, mitra oikoumenis, dan WCC harus merespons konteks saat ini dengan mengembangkan bahasa diakonia yang sama. Kita berbasis iman dan hak dan kita perlu mengidentifikasi apa artinya hal ini dalam praktiknya, termasuk mendefinisikan mandat, nilai-nilai inti, dan aset diakonia kita.

Dokumen ini berusaha untuk memahami dan merespons kekhawatiran tersebut; dan bertujuan untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang diakonia oikoumenis yang mendorong dialog dan kerja sama antara gereja, mitra oikoumenis, dan WCC.

Komite eksekutif WCC dalam pertemuan di Trondheim, Norwegia, pada Juni 2016, menyetujui arahan umum dokumen ini dan menegaskan tujuannya, yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang diakonia oikoumenis yang:

- mempertimbangkan pengalaman panjang praktik dan refleksi diakonia dalam gerakan oikoumenis, khususnya oleh WCC dan LWF;
- mempertimbangkan kontribusi khusus lembaga diakonia profesional dalam perannya sebagai anggota ACT Alliance;
- merespons isu sosial dan politik yang relevan di dunia saat ini yang menantang gereja-gereja dan lembaga terkait dalam aksi diakonianya;
- menyediakan wawasan teologis yang menekankan dasar trinitaris dan eklesiologis diakonia dan yang dapat mengarahkan gereja-gereja dan lembaga terkait dalam praktik diakonianya;
- mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk memperkuat kapasitas diakonal gereja dalam kerja sama dengan mitra oikoumenis mereka.

1.2 Cara Membaca Dokumen Ini

Latar belakang yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya merupakan konteks yang ingin dibahas dalam dokumen ini: ajang internasional di mana WCC, LWF, dan ACT Alliance mengadakan kerja sama yang erat dalam menetapkan

agenda dan kegiatan yang mempromosikan martabat manusia, keadilan, dan perdamaian, dan pada saat yang sama mengakui jaringan yang lebih luas dari komunitas iman, mitra oikoumenis dan organisasi-organisasi diakonia dalam upaya tersebut. Dokumen ini berusaha untuk membahas isu-isu penting seperti lingkup global, termasuk ketegangan, tantangan, dan peluang, dengan menjelaskan upaya bersama dari gerakan oikoumenis yang luas sebagai 'diakonia oikoumenis'.

Di sisi lain, dokumen ini juga bertujuan untuk merefleksikan masalah yang sama dalam konteks lokal, sebagai arena keterlibatan gereja-gereja dalam berbagai jenis pelayanan diakonia atau sosial. Keragaman konteks membuat dokumen ini tidak mungkin memberikan jawaban yang memuaskan untuk semua masalah yang patut mendapatkan perhatian, meskipun beberapa tema dasar diharapkan dapat relevan dalam semua konteks. Diharapkan agar masalah ini kemudian dapat teratasi dalam proses penerapan, yakni dengan memberikan ruang yang layak untuk pengalaman dan tantangan lokal. Dokumen studi pendamping dimaksudkan untuk memfasilitasi proses tersebut. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk melihat bagaimana proses tersebut akan ditindaklanjuti dan bagaimana perangkat-perangkat praktis pelaksanaannya. Aspek pengembangan kapasitas dan pelatihan diakonia dapat menjadi salah satu isu yang perlu dibahas.

Pada tahap pengenalan dokumen ini, harus diakui bahwa istilah "oikoumenis" dan "diakonia" adalah istilah yang membutuhkan perhatian khusus. Kedua konsep tersebut sarat dengan nilai; keduanya mengungkapkan visi bagi gereja global dan misinya di dalam dunia. Pada saat yang sama, keduanya diperdebatkan. Menjadi oikoumenis tidaklah semudah yang mungkin dibahas dalam teks ini dan teks-teks gerakan oikoumenis lainnya. Gerakan oikoumenis tidak hanya ditandai oleh kepentingan bersama tetapi juga oleh ketegangan dan konflik. Realitas ini secara konstan menantang konsep diakonia oikoumenis.

Demikian pula, konsep diakonia diperdebatkan. Istilah ini umum digunakan di beberapa denominasi, dan lebih dikenal di sebagian wilayah dunia daripada di wilayah lain. Banyak lembaga yang terlibat dalam karya diakonia memilih untuk tidak menggunakan istilah tersebut, melainkan menggunakan istilah karya sosial atau pembangunan, dengan pertimbangan bahwa istilah

diakonia tidak mudah dipahami di dunia sekuler, atau istilah ini akan menimbulkan kesan ‘gerejawi’ yang terkesan jauh dari metode kerja profesional.

Harus diakui bahwa gerakan diakonia modern yang muncul di Jerman pada 1830-an telah membuka jalan untuk memahami diakonia sebagai pelayanan sosial gereja. Seperti yang akan dijelaskan dalam Bab 4, ada argumen biblis dan teologis untuk mengelaborasi teologi diakonia, tetapi tidak hanya dengan mengulangi istilah-istilah seperti yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Oleh karena itu, merefleksikan diakonia merupakan ajakan untuk memberikan ekspresi baru pada panggilan untuk menjadi bagian dari misi Allah bagi dunia, dan memahami panggilan (*vocatio*) itu sebagai advokasi (*ad-vocatio*) dan jika perlu provokasi (*pro-vocatio*); yang *pertama* menegaskan situasi dan kesejahteraan yang lain sebagai hal yang mendasar dalam pelaksanaan tugas kemuridan, yang *kedua* menyadari bahwa pendekatan semacam ini akan menimbulkan perlawanan dan pertentangan, tetapi tetap yakin bahwa hal tersebut bersifat transformatif, mendorong lahirnya (yang merupakan arti dari provokasi) cara-cara baru dalam melihat, menilai, dan bertindak.

1.3 Apa yang Kita Pahami tentang Diakonia Oikoumenis?

Dokumen ini menyusun konsep diakonia oikoumenis dari dua perspektif. *Pertama*, terkait dengan pemahaman teologis tentang diakonia, yang didasarkan pada sebuah refleksi yang berusaha memahami diakonia sebagai dimensi integral dari sifat dan misi gereja. Perspektif ini merefleksikan diakonia sebagai suatu konsep biblis dan teologis; tujuannya adalah untuk mengidentifikasi motif dan elemen normatif yang memandu pemahaman dan praktik diakonia. Salah satu motifnya adalah citra manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang lainnya adalah panggilan untuk welas asih dan keadilan, yang ketiga mengaitkan diakonia dengan panggilan manusia untuk mengelola ciptaan, dan dapat digambarkan sebagai diakonia ekologis, yang diekspresikan dalam dimensi profetis dan praktis.

Perspektif ini menyatakan bahwa diakonia mengungkapkan hubungan yang kuat antara apa yang dimaksud dengan gereja dan apa yang dilakukan oleh gereja. Refleksi tentang diakonia oikoumenis membutuhkan pemahaman tentang kedua dimensi tersebut, yakni keberadaan gereja-gereja dan aksi bersama sebagai persekutuan gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia. Gerakan Oikoumenis didorong oleh keyakinan bahwa persatuan dan tindakan berbagi berkaitan erat satu sama lain sebagai anugerah dan panggilan Allah yang penuh rahmat. Pada saat yang sama, komitmen terhadap persatuan dan tindakan berbagi ini tidak dapat dibatasi hanya pada kehidupan dan kesejahteraan gereja. Ini adalah panggilan untuk melayani di dunia, berpartisipasi dalam misi pemulihan dan rekonsiliasi Allah, dan menghadirkan tanda-tanda harapan, mengumandangkan pemerintahan Allah melalui perkataan dan perbuatan, keadilan dan perdamaian.

Perspektif *kedua* bersifat praktis, menggambarkan bagaimana gereja-gereja lintas konfesi dan lintas batas geografis terlibat dalam aksi diakonia. Apa yang disajikan di sini berfokus pada gerakan oikoumenis dan perannya dalam mempromosikan dan mengoordinasikan karya diakonia. Sejak didirikan pada 1948, Dewan Gereja-gereja se-Dunia berperan penting, yakni ketika membentuk Divisi Bantuan dan Pelayanan Gereja kepada para Pengungsi. Sejak saat itu, WCC terus terlibat dalam sejumlah besar program dan proyek dengan profil diakonia yang jelas, meski tidak selalu menggunakan istilah diakonia. Sebagai bagian dari praksis diakonianya, WCC telah mendorong gereja-gereja anggotanya untuk terlibat dalam diakonia oikoumenis dan untuk memperkuat kapasitas diakonia masing-masing. *Lutheran World Federation* juga terlibat aktif dalam diakonia oikoumenis, khususnya melalui badan *Lutheran World Service*. Baik WCC dan LWF berkontribusi besar pada pendirian ACT Alliance dengan tujuan membangun platform yang terorganisasi untuk diakonia oikoumenis, mengekspresikan visi bersama gerakan oikoumenis dengan gereja-gereja anggota dan lembaga terkait untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan berkarya untuk dunia yang lebih baik.

Konstitusi Dewan Gereja-gereja se-Dunia mendefinisikan diakonia (pelayanan) sebagai dimensi integral dari visi dan kehidupannya. Pasal III menyatakan:

Tujuan utama dari persekutuan gereja-gereja dalam Dewan Gereja-gereja se-Dunia adalah untuk mengajak satu sama lain menuju kesatuan yang nyata dalam satu iman dan persekutuan ekaristi, yang diekspresikan dalam ibadah dan kehidupan bersama di dalam Kristus, melalui kesaksian dan pelayanan kepada dunia, dan untuk terus melangkah maju menuju kesatuan tersebut agar dunia dapat percaya.

Lebih lanjut dinyatakan:

Dalam upaya mencapai *koinonia* dalam iman dan kehidupan, kesaksian dan pelayanan, gereja-gereja melalui WCC akan: ... menyatakan komitmen dalam diakonia untuk melayani kebutuhan manusia, meruntuhkan tembok pemisah antarmanusia, mendorong terbentuknya satu keluarga manusia dalam keadilan dan perdamaian, menjunjung tinggi integritas ciptaan, sehingga semua dapat merasakan kehidupan yang utuh.

Di sini istilah “diakonia” dan “pelayanan” digunakan secara bergantian, yang cukup umum dalam teks-teks gerakan oikoumenis. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya; istilah “diakonia” mengandung konotasi teologis yang lebih kuat, sementara “pelayanan” mengarah pada tindakan konkret. Hal ini dapat memberi kesan bahwa diakonia adalah konsep internal Kristen, yang tidak mudah diterapkan di arena publik tempat layanan diakonia diselenggarakan. Di sisi lain, istilah “pelayanan” kemungkinan juga memiliki konotasi yang problematis, terutama jika dikaitkan dengan pola tindakan yang memisahkan antara pemberi dan penerima manfaat, atau yang mengabaikan konteks sosial dan politik di wilayah pelayanan tersebut.

Dokumen ini menjelaskan diakonia oikoumenis sebagai aksi yang berbasis iman dan hak; bab-bab berikutnya akan menjelaskan makna dari istilah-istilah ini dan fungsi pentingnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia saat ini. Berbasis hak di satu sisi mengacu pada konsep alkitabiah tentang keadilan dan tradisi kenabian dalam mengungkap ketidakadilan sistemik serta membela hak-hak kaum miskin. Di sisi lain, hal ini mengacu pada hak asasi manusia dan peran sentralnya dalam pembentukan masyarakat yang adil. Komitmen terhadap hak asasi manusia telah meyakinkan para pelaku diakonia oikoumenis untuk menyertakan advokasi dalam karya mereka dengan tugas

memastikan para pemangku kewajiban dapat bekerja secara bertanggung jawab. Hal ini juga membantu kita untuk melihat bahwa diakonia berbeda dari karya amal, dan bahwa tujuannya bukan untuk menggantikan tanggung jawab pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah.

Pemahaman tentang diakonia sebagai aksi berbasis iman dan hak membuka kesempatan bagi kita untuk mendefinisikan berbagai kegiatan sebagai sebuah diakonia oikoumenis dalam kasus-kasus ketika istilah ini tidak digunakan; pemahaman ini juga memungkinkan kita untuk menyebut ACT Alliance sebagai sebuah konsorsium agen-agen diakonia, yang dibuktikan oleh fakta bahwa ACT dan sebagian besar anggotanya saat ini sedang dalam proses memasukkan terminologi diakonia dalam bahasa sehari-hari mereka.

Kamus *Gerakan Oikoumenis* mendefinisikan diakonia sebagai “tanggung jawab pelayanan Injil melalui perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai respons terhadap kebutuhan manusia”. Rumusan ini menunjukkan tiga komponen dalam memahami diakonia, yakni: aksi atau melakukan pelayanan, dengan perkataan dan perbuatan; dimotivasi oleh iman kristiani dan dilihat sebagai ekspresi kemuridan Kristen; respons diakonia mencerminkan realitas sosial dan dalam pelaksanaannya berupaya untuk meringankan penderitaan manusia serta menyuarakan keadilan, perdamaian, dan martabat manusia.

Definisi tersebut membuka kemungkinan untuk memandang diakonia oikoumenis sebagai salah satu ekspresi khusus dari diakonia yang dalam arti yang lebih luas adalah mandat yang diberikan kepada semua gereja, di tingkat lokal dan nasional, dan kepada setiap orang Kristen sebagai bagian integral dari kemuridan. Karena semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi “imamat kudus” (1Ptr. 2:5), mereka dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi Allah untuk pemulihan dan rekonsiliasi, untuk melayani sesama dan berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Panggilan ini dapat digambarkan sebagai “*diakoniat* semua orang percaya”, berdasarkan pemahaman bahwa Roh Allah dengan penuh kasih karunia memberdayakan dan melengkapi untuk kemuridan, dari yang termuda hingga yang tertua, laki-laki dan perempuan (Kis. 2:17). Dari sini dapat disimpulkan bahwa panggilan untuk berdiakonia pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari: keluarga

yang memperhatikan tiap anggota keluarganya, secara khusus anak-anak dan lanjut usia, lingkungan sekitar dan tempat kerja, masyarakat sipil, dan ruang lingkup lain untuk aksi sosial. Kegiatan diakonia yang diselenggarakan oleh jemaat lokal dan struktur-struktur gereja lainnya, termasuk para agen diakonia profesional, bergantung pada dan sebagian besar diemban oleh diakonat semua orang percaya. Hal ini juga berlaku bagi diakonia oikoumenis, yang merupakan hal yang sangat penting untuk menegaskan dan memperkuat ekspresi dasar dari kapasitas dan komitmen diakonia ini.

Studi ini menunjukkan bahwa ada beragam wujud dan bentuk kelembagaan dari keterlibatan dalam pelayanan sosial Kristen atau diakonia, tergantung konteks budaya, politik, dan sosial di mana gereja hadir—yang semuanya memiliki validitas dan legitimasi yang sama dan tidak boleh ditempatkan dalam urutan hierarkis kepentingan apa pun.

Ada sejumlah gereja yang melakukan pelayanan diakonia:

- a) Hanya di dalam gereja lokal/jemaat-jemaat, sebagai komitmen individu atau kelompok untuk memberikan pelayanan yang terbatas, dan sering kali secara sukarela, kepada yang membutuhkan;
- b) Di dalam dan melalui berbagai lembaga pusat kehidupan dan pelayanan komunitas Kristen, di luar jemaat-jemaat lokal (misalnya komunitas religius dalam tradisi gerejawi, seperti biara, persaudaraan perempuan, persaudaraan laki-laki, dan pusat-pusat spiritual);
- c) Baik dalam pelayanan sukarela gereja lokal, maupun dalam pelayanan khusus di tingkat regional (agen diakonia profesional), yang hanya didanai oleh sumber daya gereja lokal;
- d) Baik dalam pelayanan sukarela gereja lokal, maupun dalam pelayanan khusus di tingkat regional (agen diakonia profesional), memperoleh dana dari gereja lokal dan kontribusi dari mitra-mitra gereja di luar negeri (bantuan antargereja);
- e) Baik dalam pelayanan sukarela gereja lokal, maupun dalam pelayanan khusus di tingkat regional (agen diakonia profesional), serta kegiatan advokasi dan lobi diakonia di tingkat nasional dan internasional, didanai oleh gereja dan kontribusi yang berasal dari instansi pemerintah.

Poin utama dalam memvisualisasikan fase-fase ini atau fase serupa dalam pengembangan kompetensi diakonia dan tingkat profesionalitas yang berbeda adalah bahwa tidak satu fase pun dapat dianggap sebagai model normatif untuk yang lain, dan tidak ada satu pun yang dapat mengklaim berada di puncak hierarki normatif secara teologis.

1.4 Konteks Dokumen Ini

Diakonia bertujuan untuk merespons tantangan kontekstual yang dihadapi ketika berada dalam lanskap yang terus berubah. Oleh karena itu, refleksi atas diakonia mencakup analisis terhadap lingkungan sosial dan politik tempat karya diakonia diselenggarakan. Selanjutnya, kita akan menyoroti beberapa tren dasar dalam dunia sekarang ini yang menantang aksi diakonia, dan pada saat yang sama memberikan peluang untuk praktik yang inovatif. Terakhir, sekilas kita akan melihat perubahan lanskap oikoumenis yang secara simultan memengaruhi diakonia oikoumenis.

Perubahan paradigma pembangunan. Model pembangunan tradisional yang menawarkan bantuan kepada negara-negara “berkembang” yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi mulai digantikan dengan pendekatan baru yang mengintegrasikan lebih banyak dimensi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB berusaha menemukan solusi yang bersifat global atas tantangan global, dan PBB tidak hanya mengundang pemerintah tetapi juga masyarakat sipil dan para tokoh keagamaan untuk berkontribusi dalam merealisasikannya. Agenda SDG 2030 menyajikan platform publik yang baru bagi keterlibatan diakonia. Hal ini menjadi tantangan bagi diakonia oikoumenis untuk mengembangkan aksi strategis, dan untuk membekali gereja-gereja lokal dan mitra lainnya untuk mengambil peran aktif dalam kaitannya dengan agenda SDG.

Terbatasnya ruang lingkup masyarakat sipil. Ada kekhawatiran bahwa masyarakat sipil di seluruh dunia cenderung berada di bawah tekanan yang makin kuat. Tren ini terbukti melalui semakin meningkatnya pembatasan dan represi yang sistematis, yang memengaruhi organisasi hak sipil dan pembela hak asasi manusia di sejumlah negara. Regulasi LSM yang represif menjadi tantangan operasional bagi karya independen agen diakonia dan mitra

internasionalnya. Selain itu, undang-undang lain, seperti antiterorisme, keselamatan, keamanan, internet, dan media, turut membatasi ruang lingkup aksi masyarakat sipil. Semua ini mengakibatkan perubahan signifikan pada ketentuan-ketentuan yang makin sulit bagi karya para agen diakonia.

Meningkatnya rasa nasionalisme. Di berbagai belahan bumi, bentuk-bentuk baru politik kebangsaan bermunculan, yang sering kali menunjukkan egoisme dan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meruntuhkan prinsip-prinsip solidaritas global. Dalam beberapa kasus, nasionalisme yang meningkat ini muncul bersamaan dengan melemahnya peran negara dan meningkatnya ketidakpercayaan pada tatanan politik yang mapan. Hal ini sering kali terkait dengan xenofobia, yang mengarah pada rasisme dan ujaran kebencian. Tren ideologis ini menantang diakonia oikoumenis untuk terlibat dalam perdebatan publik, untuk mempromosikan pandangannya tentang martabat manusia, dan untuk membangun tatanan sipil yang didasarkan pada kepentingan bersama dan hak asasi manusia.

Agama dan pembangunan. Makin banyak yang mengakui peran agama dalam pembangunan dan peran para pemuka agama sebagai agen perubahan. Namun, peran ini ambigu: dalam beberapa kasus, keyakinan agama dan para pemuka agama justru dapat menyulut tindakan kekerasan dan menghambat pembangunan. Diakonia oikoumenis dihadapkan pada tantangan, bersama dengan agen sosial dan pembangunan lainnya, untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja sama dengan komunitas keagamaan dan para pemimpinnya. Kemampuan tersebut mencakup kritik yang sopan dan memadai terhadap agama, termasuk agamanya sendiri, memahami peran positif dan negatifnya dalam menggalakkan martabat manusia dan kebaikan bersama. Hal ini juga membutuhkan pembangunan kapasitas bagi karya diakonia.

Meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Ketidakadilan ekonomi terus tumbuh, baik dalam sebuah negara maupun secara global. Pada Januari 2017, Oxfam menerbitkan sebuah laporan yang menunjukkan bahwa delapan orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang setara dengan kekayaan 3,6 miliar orang paling miskin di dunia yang merupakan setengah dari populasi manusia. Ketimpangan yang makin meningkat ini mengandung banyak konsekuensi negatif; yang mengakibatkan sebagian besar populasi tidak

memiliki akses terhadap barang-barang dan layanan umum yang seharusnya menjamin hak-hak dan kesejahteraan dasar mereka. Oleh karena itu, keadilan ekonomi membutuhkan perhatian yang lebih dari para pelaku diakonia dan harus menjadi prioritas utama dalam agenda diakonia oikoumenis.

Lanskap penderitaan, ketidakadilan, dan peperangan. Agen-agen diakonia oikoumenis berbagi komitmen untuk merespons penderitaan manusia pada saat krisis dan perang. Politisasi bantuan dan memburuknya situasi keamanan telah berdampak pada syarat-syarat dalam respons keterlibatan ini. Para pelaku diakonia perlu menyeimbangkan antara kepentingan untuk menolong yang menderita dengan tanggung jawab untuk memperhatikan anggota staf mereka. Prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum hak asasi manusia internasional sebagai kerangka kerja bersama yang memandu keterlibatan tersebut makin mendapatkan tantangan. Pada saat yang sama, ada ekspektasi yang makin meningkat bahwa respons tersebut dapat dilakukan oleh aktor-aktor lokal tanpa dukungan finansial yang memadai dari komunitas internasional. Hal ini berpotensi mengarah pada situasi di mana akar penyebab kemiskinan dan penderitaan tidak ditangani, dengan fokus yang bergeser dari pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan masalah politik yang tetap tidak terpecahkan.

Migrasi paksa. Jumlah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dengan harapan akan masa depan yang lebih baik di tempat baru, sering kali di negara lain, makin meningkat. Salah satu faktor utama pendorongnya adalah situasi sosial dan politik yang tidak stabil; faktor lainnya adalah dampak dari perubahan iklim. Baik pengungsi, pencari suaka, orang-orang yang terpaksa mengungsi atau mereka yang dianggap sebagai “pengungsi ekonomi,” mereka menghadapi situasi yang ditandai dengan ketidakpastian dan keterbatasan hak. Banyak dari mereka yang dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia; saat tiba, mereka mengalami diskriminasi, xenofobia, dan rasisme. Situasi yang mereka alami menantang diakonia oikoumenis untuk bertindak inovatif, untuk terlibat dalam advokasi dan mendorong inklusivitas dalam gereja dan masyarakat.

Anak-anak dan remaja. Lebih dari seperempat populasi global berusia di bawah 15 tahun; dalam situasi krisis dan konflik, termasuk dalam golongan

yang paling rentan. Berinvestasi pada kesejahteraan anak-anak dan kaum muda akan menjamin perkembangan masyarakat yang lebih positif. Gereja dan agen diakonia dapat mengambil peran utama dalam memperjuangkan hak anak-anak, yang sesuai dengan pandangan kristiani tentang keluarga dan masyarakat sebagai ruang yang aman bagi anak-anak dan sebagai arena pengembangan bakat mereka. UNICEF menetapkan pandangan bahwa anak-anak seharusnya tidak dilihat hanya sebagai “kelompok rentan”, tetapi juga harus dilihat sebagai aktor yang memiliki hak yang sama yang dapat mengubah arah perkembangan sebuah negara jika diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan dan anggaran.

Krisis ekologis. Perubahan iklim dan masalah ekologis lainnya menyebabkan kerusakan ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam banyak kasus menyebabkan krisis pangan dan terbatasnya air bersih. Di satu sisi, hasil penting telah dicapai, terutama berkat karya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), tidak terkecuali pertemuan COP 21 di Paris pada 2015. Di sisi lain, politisi populis yang menolak bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia makin kuat pengaruhnya di banyak negara, yang justru melemahkan dukungan politik untuk menerapkan langkah-langkah yang telah diambil. Oleh karena itu, keadilan iklim harus terus menjadi isu utama dalam diakonia oikoumenis, misal bentuk baru dari “*ecodiakonia*” baik di tingkat advokasi dan kesaksian publik, maupun dalam mempromosikan dan menerapkan agenda ketahanan di tingkat lokal.

Lanskap gerakan oikoumenis juga berubah. Jika sebelumnya gerakan ini tampaknya bersifat vertikal dan terpusat, saat ini gerakan ini melihat dirinya bersifat polisentris, yang menegaskan model hubungan dan kerja sama yang bersifat horizontal. Gerakan ini juga mengakui konteks yang lebih luas dari gereja dan komunitas Kristen serta berkomitmen untuk membangun berbagai bentuk relasi baru yang menegaskan panggilan bersama gereja-gereja untuk bersaksi dan melayani.

Tema-tema berikut menunjukkan beberapa tantangan dan peluang kontemporer:

Advokasi dan diakonia profetis sebagai tanda-tanda pengharapan.

Advokasi gereja-gereja hanya dapat didasarkan pada pandangan profetis dalam iman Kristen, yakni pendekatan kritis yang bertujuan untuk transformasi dan

pengharapan. Gerakan Oikoumenis dipanggil untuk menjadi sebuah persekutuan pengharapan yang hidup, yang selalu “siap untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta penjelasan dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu” (1Ptr. 3:15). Hal ini harus dilakukan sebagai tanggung jawab bersama, dalam hal kritik diri dan analisis kritis, dan dalam tanda-tanda pengharapan, serta aksi bersama. Dalam pemahaman ini, diakonia oikoumenis juga harus dapat memberikan penjelasan tentang pengharapannya, dan bagaimana karyanya memberikan tanda-tanda pengharapan. Dengan demikian, diakonia oikoumenis harus menegaskan hak setiap orang untuk memiliki harapan, berkontribusi untuk membangun sebuah dunia yang “tidak meninggalkan siapa pun”, seperti yang dinyatakan dalam visi Agenda 2030.

Teologi Publik dan Diakonia. Ada kesadaran yang berkembang bahwa kesaksian dan advokasi publik merupakan bagian integral dari misi gereja dan karya diakonia. Hal ini telah mendorong pembentukan dan pengembangan berbagai model “teologi publik”. Tujuannya adalah untuk memperkuat gereja-gereja dalam tanggung jawab publik dan karya diakonianya, merespons konteks meningkatnya ekstremisme berbasis agama, kekerasan, dan korupsi.

Pada 2017, gereja-gereja memperingati 500 Tahun Reformasi sejak diterbitkannya 95 dalil Luther. Peristiwa itu menandai dimulainya Reformasi Lutheran, yang membayangkan pembaruan gereja berdasarkan keterpusatan pada kasih karunia Allah yang membebaskan di dalam Yesus Kristus dan panggilan untuk melayani sesama. Reformasi ini memperkenalkan praktik-praktik baru dalam menangani masalah kemiskinan, dan menyerukan kepada otoritas politik untuk menyediakan layanan dan pendidikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Doktrin tentang imamat am orang percaya menyatakan bahwa semua orang yang telah dibaptis diberdayakan untuk berpartisipasi dalam misi Allah dan bahwa arena utama untuk pelayanan adalah profesi sekuler seseorang, yang berkontribusi untuk kebaikan bersama. Cukup masuk akal untuk merumuskan kembali teologi panggilan ini sebagai diakonia semua orang percaya.

Ziarah Keadilan dan Perdamaian. Sidang Raya WCC di Busan pada 2013 mengajak gereja-gereja dan semua orang yang berkehendak baik untuk melakukan “ziarah keadilan dan perdamaian”. Tujuannya adalah mengajak

gereja-gereja untuk keluar dari zona nyaman dan merespons isu-isu yang sedang memanas di dunia saat ini, serta memunculkan tanda-tanda pengharapan. Ziarah ini menegaskan pengalaman bahwa persatuan dan pelayanan saling menguatkan, dan pandangan bahwa misi oikoumenis tidak dapat dibatasi hanya pada kesejahteraan gereja-gereja; mandatnya adalah untuk berpartisipasi dalam misi Allah, yang tujuannya adalah pemulihan dunia dan datangnya pemerintahan Allah. Panggilan untuk berdiakonia dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan Ziarah Keadilan dan Perdamaian dalam kehidupan gereja-gereja. Pada saat yang sama, Ziarah Keadilan dan Perdamaian mengilhami diakonia oikoumenis untuk memperbarui komitmennya terhadap keadilan dan perdamaian dalam kemitraan dengan gereja-gereja dan orang-orang yang berkehendak baik.

1.5 Teks-Teks Diakonia Oikoumenis yang Ada

Diakonia telah lama menjadi topik refleksi dalam gerakan oikoumenis; bagian ini menyajikan beberapa teks yang ada. Dokumen ini sebagian besar didasarkan pada teks-teks tersebut. Selain itu, dokumen ini juga dilengkapi dengan artikel-artikel penting dalam *Dictionary of the Ecumenical Movement*, dan penjelasan tentang “Diakonia in the Ecumenical Movement” oleh mendiang Richard D.N. Dickinson dalam buku *A History of the Ecumenical Movement*.

Pada 1961 Sidang Raya WCC di New Delhi menyoroti pentingnya pelayanan yang terprogram sebagai salah satu dari tiga pilar gerakan oikoumenis (bersamaan dengan kesatuan dan kesaksian). Pada 1964, Komisi Iman dan Tata Gereja mengorganisasi sebuah konsultasi di Jenewa tentang pelayanan diaken. Laporan tersebut menguraikan tidak hanya tentang peran pelayanan ini, tetapi juga hubungannya dengan diakonia, “pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan” dan kemudian menyatakan bahwa “Gereja tidak dapat benar-benar menjadi Gereja Yesus Kristus tanpa memberikan dirinya kepada diakonia semacam itu”. Dokumen *Baptisan*, *Ekaristi*, dan *Pelayanan* yang juga disiapkan oleh Komisi Iman dan Tata Gereja sebagian besar mencerminkan pemahaman ini.

Komisi WCC untuk Bantuan Antar-Gereja, Pelayanan Pengungsi dan Dunia (Commission on Inter-Church Aid, Refugee and World Service—CICARWS)

berperan penting dalam mendorong refleksi yang kreatif tentang diakonia dalam keluarga oikoumenis. Komisi ini mengorganisasi berbagai konsultasi, sering kali dari perspektif yang lebih praktis, dengan tujuan untuk menghubungkan refleksi teologis yang kritis dengan praktik yang inovatif. Pada 1966, WCC mengadakan konsultasi sedunia tentang bantuan antargereja, pengungsi, dan pelayanan dunia di Swanwick, Inggris, yang menambahkan gagasan tentang kemajuan sosial atau aksi sosial ke dalam konsep yang berlaku tentang karya dan pelayanan bantuan sosial.

Setelah sidang di Nairobi pada 1976, WCC memprakarsai sebuah proyek studi tentang *Ecumenical Sharing of Resources* (ESR) yang membahas pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul terkait jati diri dan identitas gereja-gereja yang dianggap sebagai gereja yang “menerima” dan kemitraan mereka dengan gereja-gereja yang “mengirim” atau “memberi”. Proyek studi ini memublikasikan sebuah panduan studi yang berjudul *Empty Hands: An Agenda for the Churches* pada 1980, dan kemudian pada konsultasi global tentang *koinonia* yang diadakan di El Escorial, Spanyol, pada 1987 yang merupakan puncak dari proses ESR.

Konsultasi tentang “Contemporary Understandings of Diakonia”, yang diselenggarakan di Jenewa pada 1982, dalam banyak hal menjadi tonggak sejarah. Konsultasi ini mengambil momentum dari proses ESR, dan juga dari konsultasi lain yang telah diselenggarakan oleh CICARWS, di Chania, Kreta, pada 1978, dengan tema “An Orthodox Approach to Diakonia”. Materi dari pertemuan-pertemuan ini sangat mengilhami Sidang Raya ke-6 WCC di Vancouver pada 1983 dan pandangannya tentang diakonia “sebagai pelayanan gereja untuk berbagi, pemulihan, dan rekonsiliasi”.

Kegiatan penting lainnya yang diselenggarakan oleh CICARWS adalah konsultasi global di Larnaca, Siprus, pada 1986. Kali ini, sejumlah besar peserta mewakili gereja-gereja dari negara-negara wilayah Selatan; yang memberikan penekanan yang lebih kuat pada peran gereja lokal dan dimensi profetis dari aksi diakonia.

Setelah tahun 1991, Unit IV WCC, khususnya Tim Diakonia dan Solidaritas, menerima mandat untuk membahas lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat dalam Konsultasi Larnaca. Pada 2002, Chris Ferguson dan Ofelia Ortega menghasilkan sebuah dokumen berjudul *Ecumenical Diakonia*, tetapi belum

diterbitkan dalam bahasa Inggris. Publikasi lain dari tahun yang sama, *From Inter-Church Aid to Jubilee*, memberikan penjelasan historis tentang diakonia oikoumenis. Selain itu, WCC juga telah menerbitkan dua buklet yang mengaitkan isu-isu kemiskinan dan pembangunan dengan diakonia: *Poverty: A Scandal Challenging the Churches—Current Contexts and Approaches in Diakonia and Development, A Study Guide* (2004), dan *Diakonia: Creating Harmony, Seeking Justice and Practicing Compassion* (2005). Pada 2010, William Temu menyusun sebuah dokumen berjudul *Mapping Prophetic Diakonia*. Dokumen ini menyajikan berbagai jenis karya diakonia di seluruh persekutuan Dewan Gereja-gereja se-Dunia. Dokumen tersebut diserahkan ke Global Consultation on Prophetic Diakonia, yang berlangsung di Utrecht, Belanda, pada Desember tahun itu; dan belum dipublikasikan.

Dalam rangka persiapan Sidang Raya ke-10 WCC di Busan, tiga program WCC, yakni Diakonia dan Solidaritas, Komunitas yang Adil dan Inklusif, serta Misi dan Penginjilan, bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi tentang diakonia di Kolombo, Sri Lanka, pada Juni 2013. Dokumen dari pertemuan ini, “Perspektif Teologis tentang Diakonia pada Abad ke-21”, dimasukkan ke dalam buku panduan untuk sidang raya di Busan. Setelah sidang raya, The Ecumenical Review menyunting seluruh edisi dengan judul *New Perspectives on Diakonia*, dengan laporan dan tanggapan.

Selain itu, Lutheran World Federation (LWF) turut memberikan kontribusi pada refleksi-refleksi tentang diakonia oikoumenis. Dalam persiapan Sidang Raya LWF ke-10 di Winnipeg (2003), diadakan sebuah konsultasi di Johannesburg, Afrika Selatan, pada November 2002, dengan topik “Prophetic Diakonia: ‘For the Healing of the World’”. Sidang di Winnipeg merekomendasikan karya lebih lanjut tentang diakonia, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Departemen Misi dan Pengembangan LWF melalui sebuah program yang disebut “Understanding Diakonia and Its Guiding Principles”. Program ini menyelenggarakan beberapa lokakarya di berbagai belahan bumi, dan konsultasi terakhir di Addis Ababa, Ethiopia, pada Oktober 2008. Berbagai temuan kemudian dirangkum dalam buku *Serving the Whole Person*; temuan-temuan tersebut juga tecermin dalam dokumen *Diakonia in Context*, yang diterima oleh Dewan LWF pada 2009. LWF juga melakukan proses studi yang berkaitan dengan pemahaman

dan peran pelayanan diaken, yang dilaporkan dalam publikasi berjudul *The Diaconal Ministry of the Church*.

1.6 Ikhtisar Dokumen

Bab 1 menyajikan latar belakang dokumen ini dan menjelaskan definisi diakonia oikoumenis. Bab ini juga menguraikan beberapa tren utama dalam konteks kontemporer di mana diakonia oikoumenis diselenggarakan, yang juga menjadi tantangan bagi para pelaku diakonia untuk merefleksikan kekhasan aksi berbasis iman dan hak asasi manusia dan menjadi inovatif dalam praktiknya. Terakhir, bab ini juga menyajikan sejumlah teks tentang diakonia yang telah dihasilkan dalam kerangka gerakan oikoumenis, khususnya oleh WCC dan LWF.

Bab 2 menjelaskan tentang *sejarah diakonia oikoumenis*. Dimulai dengan gereja mula-mula dan komitmennya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, sebuah praktik yang terus dilanjutkan dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah gereja, dan sebagai bagian integral dari misi penjangkauan. Bab ini kemudian berfokus pada perkembangan diakonia dalam gerakan oikoumenis, yang awalnya sebagai bantuan antargereja setelah perang dunia, kemudian diperluas mandatnya dengan memasukkan karya pembangunan dan terlibat dalam advokasi publik. Bab ini menunjukkan langkah-langkah penting dalam memperdalam pemahaman tentang diakonia oikoumenis, dengan tumbuhnya kesadaran akan dimensi eklesial dan profetisnya, dan, pada saat yang sama, pentingnya kompetensi profesional. Bab ini diakhiri dengan pemaparan tentang pembentukan ACT Alliance dan visinya untuk mengadakan koordinasi dan kerja sama dalam bidang diakonia oikoumenis.

Bab 3 menjelaskan diakonia dalam gerakan oikoumenis polisentris saat ini. Titik acuan utamanya adalah Sidang Raya WCC di Busan pada 2013 dan hasilnya. Sidang tersebut ditantang untuk merefleksikan diakonia dari perspektif kaum pinggiran, dan menyimpulkan refleksinya dengan mengundang semua orang yang berkehendak baik untuk melakukan ziarah keadilan dan perdamaian.

Bab 4 memaparkan refleksi teologis tentang diakonia. Bab ini membuat sketsa penggunaan istilah “diakonia” dan istilah-istilah terkait di dalam Per-

janjian Baru dan menyajikan konsepnya dalam perspektif trinitarian, eklesiologis, dan misiologis. Kemudian, diakonia dilihat sebagai dimensi kemuridan Kristen dan diakhiri dengan pembahasan tentang hubungan antara diakonia dan pewartaan.

Bab 5 dimulai dengan menggambarkan perubahan lanskap aksi diakonia dan wajah-wajah baru kemiskinan di dunia saat ini. Bab ini menyajikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB sebagai sebuah platform yang relevan untuk keterlibatan diakonia. Bab ini menunjukkan beberapa tema khusus sebagai bidang prioritas untuk aksi diakonia, seperti migrasi dan pengungsi, keadilan ekonomi, keadilan iklim, keadilan gender dan keadilan kesehatan.

Bab 6 merefleksikan kekhasan praktik diakonia, dan bagaimana identitasnya sebagai aksi yang berbasis iman dan hak yang membentuk misi, tujuan, dan metodenya. Bab ini juga menjelaskan aset-aset diakonia, baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud yang tersedia untuk aksi diakonia, dan menunjukkan manfaat yang diperoleh dari pengembangan bahasa diakonia. Terakhir, bab ini menunjukkan pentingnya membangun kapasitas diakonia dan menyajikan elemen-elemen inti yang harus dimasukkan ke dalam profil aktivitas diakonia profesional.

Bab 7 menjelaskan tentang tantangan dan peluang kontemporer, yang merangkum pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Bagian pertama membahas tantangan akibat menyusutnya sumber daya keuangan dan pentingnya praktik inovatif dalam berbagi sumber daya. Bagian kedua membahas tentang kemitraan dan pentingnya membangun jejaring, baik dengan organisasi sekuler dan dengan orang-orang dari agama lain. Bagian ketiga menggarisbawahi advokasi sebagai dimensi integral dari karya diakonia, yang menegaskan panggilan profetisnya.

Bab 8 berisi upaya untuk memahami konteks keberagaman konfesi, yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dalam pendekatan terhadap diakonia di dalam kekristenan.

Bab 9 mencoba untuk menunjukkan bagaimana berbagai tantangan sosial-ekonomi, sosial-politik, lingkungan, sejarah dan budaya yang berbeda dapat memengaruhi pendekatan diakonia. Isu-isu seperti konflik, ideologi politik, bencana alam, kekayaan, kemiskinan, warisan kolonial, dan status

hukum gereja adalah beberapa isu yang dapat berdampak langsung pada penyelenggaraan diakonia.

Bab 10 menyimpulkan dokumen ini dengan menunjukkan langkah selanjutnya. Dokumen ini mengundang gerakan oikoumenis, gereja-gereja anggotanya dan lembaga-lembaga terkait, untuk menegaskan visi dan mandat diakonia oikoumenis dan mengusulkan langkah-langkah untuk memperkuat struktur aksi bersama dan jaringan kerja sama. Sebagai tambahan, dokumen ini juga mengusulkan pembangunan kapasitas diakonia dan yang terakhir, memasukkan kode etik dalam karya diakonia.

B A B 2

Sejarah Diakonia Oikoumenis

2.1 Pendahuluan

Bab ini memaparkan garis besar sejarah diakonia oikoumenis, mulai dari gereja mula-mula dan kepeduliannya terhadap orang-orang yang membutuhkan, kemudian berlanjut ke era misionaris dan kesaksiannya terhadap misi yang holistik, khususnya melalui tradisi panjangnya dalam misi kesehatan.

Sejak awal gerakan oikoumenis, diakonia telah menjadi bagian integral dari mandat dan karyanya; bantuan antargereja telah menjadi tugas utama WCC sejak didirikan pada 1948. Sejak saat itu, tantangan dan perspektif baru telah membentuk diakonia oikoumenis, baik dalam praktik maupun pemahamannya. Tahun 1960-an menjadi awal dari upaya profesionalisasi dan keterlibatan dalam karya pembangunan; pada saat yang sama, gerakan ini juga mengangkat isu-isu keadilan dan solidaritas dengan orang-orang yang tertindas dan gerakan pembebasannya.

Diskusi selanjutnya menekankan dimensi gerejawi dari diakonia, secara khusus peran gereja lokal dalam pelaksanaan diakonia. Diskusi ini menekankan

diakonia sebagai bagian integral dari misi holistik gereja, khususnya dalam penekanan akan kekhasan karya diakonia. Dalam gerakan oikoumenis saat ini, diakonia ditegaskan berbasis iman dan hak.

Pembentukan ACT Alliance memberi kesempatan baru untuk memadukan diakonia oikoumenis, untuk menyatukan bentuk-bentuk kemitraan bilateral dan multilateral, yang mencakup penghargaan dan membuka ruang bagi gereja-gereja lokal dan sumber daya diakonianya. Pada saat yang sama, dan melalui ikatan organisasinya dengan WCC dan LWF, ACT Alliance memberikan gambaran yang nyata tentang komitmen diakonia dari gerakan oikoumenis.

2.2 Gereja Mula-Mula

Berdasarkan narasi Injil, Yesus mengamanatkan para murid untuk melanjutkan karya pelayanan-Nya dalam melayani orang-orang yang membutuhkan. “Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit; bangkitkanlah orang mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma” (Mat. 10:7–8).

“Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: ‘Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.’” (Mat. 20:25–28).

Gereja mula-mula mengintegrasikan mandat ini ke dalam keberadaan dan misinya. Kisah Para Rasul 2:44–45 menceritakan tentang jemaat yang didirikan di Yerusalem pada hari Pentakosta bahwa “semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing”. Kemudian, ketika sebuah jemaat didirikan di Antiokhia, yang menjadi tempat

pertama kali sebutan “orang Kristen” muncul, mereka merespons bencana kelaparan yang parah dan memberikan bantuan kepada para korban kelaparan (Kis. 11:27–30).

Dengan demikian, kepedulian terhadap orang miskin tetap menjadi tugas utama, seperti yang diutarakan oleh Paulus dalam perjumpaannya dengan para rasul di Yerusalem: “Mereka hanya meminta satu hal, yaitu supaya kita memperhatikan orang-orang yang miskin, dan itulah yang sebenarnya ingin sekali aku lakukan” (Gal. 2:10).

Dokumen-dokumen Perjanjian Baru memperlihatkan bahwa gereja mula-mula terlibat dalam kegiatan yang pada zaman kita sekarang ini disebut sebagai diakonia oikoumenis. Paulus dalam surat-suratnya (Rm. 15:31 dan 2Kor. 8–9) merujuk pada “diakonia”, dalam bentuk aksi bersama mengumpulkan uang, dari gereja-gereja di suatu wilayah untuk gereja di Yerusalem yang sedang mengalami masa-masa sulit. Seruannya kepada gereja di Korintus diuraikan dalam dua pasal penuh (2Kor. 8–9); seruan ini dapat dibaca sebagai sebuah paparan teologis tentang solidaritas oikoumenis dan diakonia (dan bahkan sebagai sebuah model untuk seruan ACT dalam konteks oikoumenis saat ini!).

Sementara, diakonia dalam pemikiran Yunani berarti kepedulian dan pelayanan filantropis kepada siapa pun yang membutuhkan, dalam Kitab Suci filantropi hanya bermakna memberikan pelayanan kepada orang-orang dari ras dan keyakinan yang sama. Filantropi (amal) dalam literatur Yunani kuno memiliki beberapa arti, tetapi makna aslinya adalah kasih yang memerlukan pengorbanan, tidak hanya kebaikan semata, dan kebajikan terhadap orang-orang dari bangsa yang sama.

Tindakan amal dalam diakonia, kasih dalam praktik, menjadi ciri khas gereja Kristen mula-mula. Kekristenan menembus batas-batas dan meruntuhkan tembok-tembok rasial dan etnis, dengan menyatakan bahwa “tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus” (Gal. 3:28). Dalam praktiknya, amal (filantropi) melampaui orang Yahudi, Yunani, dan Romawi. Hal ini menekankan bahwa “kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih” (1Yoh.

4:7–8). Kasih Allah menuntut manusia untuk saling mengasihani (1Yoh. 4:11). Tidak ada penjelasan yang lebih baik tentang sifat dan buah dari kasih Kristen selain pasal tiga belas dari Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. *Agape* didefinisikan sebagai kasih Allah yang diekspresikan melalui peristiwa penciptaan manusia di dalam Kristus dan sebagai kasih manusia kepada sesama, yang merupakan pelebur kebencian terhadap musuh.

Dalam sejarahnya, diakonia filantropis gereja sangat dipengaruhi oleh kasih pengorbanan Kristus (Yoh. 3:16) dan juga oleh ajaran-Nya seperti yang dapat kita baca dalam Injil Matius (25:31–46).

Patut diperhatikan bahwa Rasul Paulus memberikan argumen teologis ketika menyerukan jemaat di Korintus untuk mengambil bagian dalam apa yang ia sebut sebagai “pelayanan kepada orang-orang kudus” (2Kor. 8:4). Paulus tidak pernah meminta mereka untuk mengasihani orang miskin dan penderitaan mereka; sebaliknya, ia mengingatkan para pembacanya akan identitas dan misi mereka sebagai bagian dari persekutuan orang-orang percaya di dalam Kristus. Teladan dari gereja saudara mereka di Makedonia seharusnya meyakinkan mereka: meskipun miskin, mereka memohon “kesempatan untuk berbagi”. Di sini Paulus menghubungkan dua konsep persekutuan (*koinonia*) dan *diakonia*, yang menunjukkan hubungan yang hidup antara siapa mereka dan apa tugas panggilan mereka di dalam Kristus. Dengan demikian, berbagi memiliki dimensi ontologis dan praktis; bagi orang Kristen, hal ini merupakan ekspresi rasa saling memiliki dan kepedulian terhadap satu sama lain.

Dalam argumen selanjutnya, Paulus merujuk pada teladan “Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun Dia kaya, namun oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya oleh karena kemiskinan-Nya kamu menjadi kaya” (8:9). Hal ini bukan berarti bahwa mereka harus memberikan segalanya, atau mengambil peran untuk selalu peduli pada orang lain. Maksudnya adalah “supaya ada keseimbangan” (8:13–14) dan saling memperhatikan, karena menyadari bahwa tidak ada orang yang tidak memiliki kebutuhan, dan tidak ada pula orang yang tidak memiliki karunia.

Menariknya, diakonia, menurut Paulus, mengacu pada kegiatan penggalangan dana serta pengelolaan yang baik (8:19; Yunani: *diakonoumene*). Ia

memperkenalkan rekan kerjanya, Titus, sebagai administrator yang bertanggung jawab, yang karena itu pula mendapatkan kepercayaan dari seluruh mitra.

Kita tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang kegiatan semacam ini selain dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Fakta bahwa aksi ini serta penafsirannya oleh Paulus dimasukkan dalam kesaksian para rasul menunjukkan pentingnya kegiatan tersebut. Kesaksian ini memberikan rangsangan yang kuat untuk merefleksikan apa artinya menjadi gereja, bahkan pada masa kini.

Kepekaan Paulus terhadap orang miskin sejalan dengan ajaran Yesus dan gereja mula-mula. Paulus memahami bahwa ajaran Kristus menembus batas-batas sosiologis dan memahami bahwa gereja terdiri dari orang-orang miskin dan kaya (Gal. 3:28; Kol. 3:11; lihat 1Kor. 1:27–29). Seruannya tentang pengumpulan dana untuk gereja Yerusalem menunjukkan pemahaman akan hal tersebut dengan cara yang nyata (Rm. 15:26; 1Kor. 16:3; 2Kor. 8–9; Gal. 2:10).

Prinsip utama dalam Perjanjian Baru adalah kesetaraan manusia di hadapan Allah, pernyataan yang paling tegas mengenai kesetaraan antara orang kaya dan orang miskin disampaikan oleh Yakobus, yang menekankan keberpihakan Allah terhadap orang miskin dan iman mereka (2:5). Paulus menegaskan bahwa membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin merupakan suatu dosa terhadap Allah (2:9) dan suatu penghinaan terhadap orang miskin (2:6).

Ada banyak kisah yang menceritakan bahwa gereja mula-mula terus melayani orang miskin dan menderita, meskipun tidak menggunakan istilah diakonia dalam pelayanan tersebut. Cara mereka mempraktikkan keramahtamahan dan mengunjungi orang sakit, bahkan pada masa-masa wabah yang mematikan, memunculkan kekaguman publik dan mendorong banyak orang untuk bergabung dengan gereja. Pada kenyataannya, banyak orang melihat apa yang kita sebut sebagai karya diakonia dan penjangkauan gereja mula-mula sebagai faktor utama yang menjadi daya tarik yang kuat dan sukses dalam tiga abad pertama karya para misionaris. Di bawah kepemimpinan Santo Lawrence, yang dikenal sebagai “pembela kaum miskin”, para diaken di Roma mengembangkan sebuah kegiatan penjangkauan amal yang luas pada pertengahan abad ketiga. Dalam rangka menolong orang-orang dari bahaya kelaparan, Santo Basilius Agung (abad ke-4) mendirikan sebuah lembaga filantropi yang sangat

besar, yang ia tempatkan di bawah naungan sebuah komunitas biara. Lembaga ini menyediakan obat-obatan, makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, pakaian layak pakai, dan semua layanan gereja dan kehidupan komunal, agar mereka dapat merasakan kasih Allah dan perhatian dari gereja-Nya. Ini adalah rumah sakit sesungguhnya, yang disebut oleh rekannya, Santo Gregorius, sebagai sebuah kota kesalehan yang sejati, “Kota Baru”. Santo Fabiola (sekitar tahun 399) mendirikan sebuah rumah sakit di Roma. Rumah sakit tersebut “menampung semua orang sakit dari jalanan dan jalan raya” dan ia “secara pribadi merawat orang-orang yang malang dan miskin yang menderita akibat kelaparan dan penyakit, serta membersihkan nanah dari luka yang bahkan tidak mampu dilihat oleh orang lain”.

Menurut tradisi gereja mula-mula, “diaken” secara harfiah berarti pelayan. Diaken adalah para pelayan (hamba) di meja Tuhan (lih. Lukas 14:16–24; Yohanes 2:1–11). Oleh karena itu, mereka biasanya dapat dijumpai di sekitar altar untuk membantu imam selama liturgi. Diaken juga dianggap sebagai representasi malaikat di dunia ini yang menjadi perantara antara Allah dan manusia (Ibrani 1:14). Jadi, para diaken sering kali menjadi perantara yang menghubungkan kaum awam dengan para imam dan uskup, atau mewakili kepentingan gereja terhadap umat. Selain itu, para diaken adalah bagian dari struktur pelayanan di banyak gereja, yang membantu para gembala, imam, dan uskup pada momen-momen tertentu dalam ibadah dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat orang miskin dan orang sakit.

Sebuah penjelasan yang komprehensif tentang karya pastoral dan diakonia para diaken mula-mula, yang dipandang sebagai sebuah komponen penting dalam struktur pelayanan dari setiap gereja lokal, telah dirumuskan dalam tata gereja Syria dari abad ke-5, yang disebut “*Testamentum Domini*”: “Hendaklah diaken hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh uskup untuk diwartakan, dan hendaklah ia menjadi penasihat seluruh rohaniwan dan seluruh anggota tubuh Kristus, yang melayani orang-orang sakit, yang melayani orang-orang asing, yang membantu para janda, yang menjadi bapa para yatim piatu, yang mengunjungi rumah orang-orang yang berkekurangan, supaya jangan ada orang yang berada dalam penderitaan, penyakit atau kesengsaraan. Hendaklah ia pergi ke rumah para katekumen, supaya ia meneguhkan mereka yang ragu-

ragu dan mengajar mereka yang tidak berpengetahuan. Hendaklah ia memberi pakaian kepada orang-orang yang telah meninggal, menghiasi mereka, menguburkan orang-orang asing, menuntun mereka yang berpindah dari tempat tinggalnya, atau pergi ke tempat pengasingan. Dalam rangka menolong orang-orang yang membutuhkan, hendaklah ia memberitahunya kepada gereja, dan janganlah ia menyusahkan uskup, tetapi hanya pada hari pertama dalam minggu itu hendaklah ia memberitahukan tentang segala sesuatu, supaya uskup mengetahuinya.”

Ini adalah sebuah kesaksian yang berharga dari tradisi gereja ortodoks mula-mula bahwa para diaken diharapkan terlibat dalam spektrum pelayanan sosial yang luas mewakili gereja lokal. Pelayanan ini meliputi kunjungan kepada orang sakit, pelayanan pastoral kepada para migran, merawat anak-anak yang terlantar, mengajar kaum muda dan para katekumen yang berusia lebih muda, menyediakan liturgi pemakaman serta terlibat dalam pendampingan di penjara dan komunikasi publik terkait dengan kebutuhan orang miskin.

Menariknya, penelitian patristik yang komprehensif menunjukkan bahwa tata gereja mula-mula mencantumkan referensi yang jelas tentang perempuan yang melayani dan diurapi sebagai diaken di beberapa gereja lokal, baik di gereja-gereja yang berbahasa Yunani, maupun di gereja-gereja yang menggunakan bahasa-bahasa Timur (kecuali Mesir dan Etiopia).

Belakangan, biara-biara menjadi pusat keramahtamahan dan kepedulian. Seiring dengan penyebaran agama Kristen, ordo-ordo religius memperluas jaringan mereka dan mendirikan rumah sakit serta layanan lainnya di wilayah-wilayah baru di Eropa dan sekitarnya. Selama berabad-abad, ordo-ordo religius telah menjadi wadah spiritual, benteng pertahanan organisasi dan tulang punggung gerejawi bagi karya diakonia gereja.

2.3 Era Misionaris

Sejak awal, gereja telah terlibat dalam karya misi yang membawa iman Kristen melintasi batas-batas geografis, sosial, dan budaya. Gerakan misionaris adalah konteks di mana gerakan oikoumenis, termasuk diakonia oikoumenis, tumbuh dan berkembang.

Misi gereja-gereja Timur terutama ditujukan ke Eropa Timur dan Asia; gereja-gereja Barat mengirimkan misionaris ke Eropa Barat dan Utara, Afrika, dan sebagian besar belahan bumi lainnya. Meskipun kegiatan misi menunjukkan wujud yang beragam selama berabad-abad, biasanya kegiatan tersebut mencakup kepedulian terhadap orang sakit dan menderita, dengan kata lain, apa yang saat ini dapat kita sebut sebagai praktik diakonia.

Gerakan misionaris modern bermula di Eropa dan Amerika Utara dan berkembang dalam berbagai bentuk baik pada masa prakolonial maupun pada masa kolonial. Sebagian besar misionaris pergi ke Afrika dan Asia, sebuah proses yang telah dimulai sejak abad ke-18 (seperti David Livingstone di Afrika Selatan dan Misi Herrnhuter). Pada masa kolonial, dalam banyak kasus, pembentukan ladang misi berjalan paralel dengan perluasan kekuasaan kolonial Barat. Bagi mereka yang diinjili dan yang dijajah, hal tersebut menciptakan ikatan imperialistik yang kurang menyenangkan; sering kali para misionaris dianggap sebagai bagian dari pemerintahan kolonial, yang kurang menyadari akan hak istimewa dan fungsi mereka sendiri sebagai partisipan dalam pemerintahan kolonial, dan dianggap sebagai representasi nilai-nilai dan gaya hidup Barat yang kemudian dipaksakan kepada orang-orang yang diinjili. Namun, perlu ditegaskan bahwa, meskipun ada misionaris yang dengan sepenuh hati mendukung kekuasaan kolonial dan melakukan diskriminasi rasial terhadap orang Afrika, terdapat banyak contoh lain tentang peran para misionaris selama masa penjajahan, secara khusus sebagai pelopor dalam pembuatan naskah tertulis dari kamus-kamus dan terjemahan Alkitab serta mengkritik keras perilaku buruk para penguasa daerah jajahan. Melalui pelayanan mereka, masyarakat dididik dan diberdayakan untuk memimpin proses menuju kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, terlepas dari pengaruhnya yang besar terhadap pendidikan dan pembangunan sosial, bahkan saat ini dalam kerja sama pembangunan, karya misi tetap menjadi wilayah yang diperdebatkan dan sebuah fenomena dengan wajah yang khas, yang harus dianalisis secara hati-hati.

Gerakan Oikoumenis telah menegaskan pelayanan kesehatan sebagai dimensi utama misi gereja. Pada 1964 dan 1968, Dewan Gereja-gereja se-Dunia dan Lutheran World Federation bersama-sama mengadakan dua konsultasi

di Tübingen, Jerman, dengan fokus pada misi kesehatan di wilayah dunia bagian Selatan dan peran gereja dalam pemulihan. Sebagai tindak lanjut, WCC membentuk Christian Medical Commission (CMC) pada 1968 dengan tujuan membantu gereja-gereja anggota yang terlibat dalam karya kesehatan. CMC juga mengembangkan hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan berperan penting dalam mendorong pelayanan kesehatan dasar dan pendekatan-pendekatan yang holistik untuk kesehatan dan pemulihan.

Akan tetapi, sejarah gerakan misionaris modern harus menempatkan manfaat diakonia bagi mereka yang diinijili dalam konteks pengakuan yang lebih besar tentang imperialisme, kejahatan historis, dan kolonialisme; dan secara khusus, mengakui kejahatan tersebut dalam kaitannya dengan situasi penduduk asli di Barat, dan kelompok-kelompok minoritas. Pada 1993, pimpinan Gereja Anglikan di Kanada menyampaikan *Permohonan Maaf kepada Penduduk Asli* atas perlakuan mereka terhadap anak-anak penduduk asli di sekolah-sekolah berasrama. Kebijakan sekolah tersebut, yang dijalankan oleh badan misi gereja dalam kerja sama dengan pemerintah Kanada, bertujuan untuk menjauhkan anak-anak dari pengaruh budaya Aborigin dan membaurkan mereka ke dalam budaya Kanada yang dominan. Sejak tahun 1990-an, Gereja Anglikan dan gereja-gereja lain di Kanada telah berkomitmen untuk mengatasi dampak buruk akibat sistem pendidikan tersebut, dengan berupaya melakukan pemulihan dan rekonsiliasi. Demikian pula, pada 2014 dan 2016, Sidang Raya Gereja Presbiterian (Amerika Serikat) menyatakan permintaan maaf kepada penduduk asli di Amerika Serikat dan, bersama dengan denominasi historis lainnya di Amerika Serikat, menolak *Doctrine of Discovery* yang telah menjiwai dasar teologis dan budaya dari hubungan dan perlakuan yang rasial terhadap penduduk asli, termasuk “sekolah-sekolah Indian” yang dikelola oleh gereja. Tidak semua yang terlibat dalam karya serupa mengambil sikap yang sama beraninya. Situasi dan hak-hak penduduk asli dan kelompok-kelompok minoritas terus menjadi isu penting dalam agenda diakonia oikoumenis.

Sejak tahun 1960-an, banyak lembaga misi yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan melalui kerja sama dengan gereja-gereja mitra di negara-negara wilayah Selatan. Dalam kondisi ketika lembaga tersebut mendapatkan pendanaan dari pemerintah, mereka harus mengikuti persyaratan yang dite-

tapkan pemerintah untuk tidak mencampuradukkan penginjilan dan karya pembangunan. Proses ini menimbulkan perdebatan, terutama di antara para mitra di negara-negara wilayah Selatan, yang dalam banyak kasus memahami misi secara holistik, yaitu melaksanakan misi Allah melalui karya pembangunan dan pelayanan, seperti yang diakui kemudian. Pada 1974, gereja-gereja di Afrika yang diwakili oleh Konferensi Gereja-gereja se-Afrika di Lusaka, Zambia, menyampaikan sebuah seruan untuk melakukan ‘moratorium’ misionaris untuk memastikan bahwa gereja-gereja di Afrika dapat mempertahankan diri, mandiri, dan kesadaran akan identitas mereka di tengah ketegangan yang makin meningkat akibat dominasi negara-negara Barat dan ketergantungan Afrika terhadap hubungan antargereja di tingkat lokal dan global.

Istilah diakonia tidak menjadi bagian dalam bahasa sehari-hari misionaris, sebab istilah ini tidak banyak digunakan sampai dengan munculnya gerakan diakonia di Jerman pada abad ke-19, dan kemudian hanya terbatas pada karya diakon dan diakones. Belakangan ini, organisasi-organisasi misionaris dan badan-badan oikoumenis mulai menggunakannya saat mempresentasikan pendekatan holistik yang mereka anut. Berikut adalah contoh dari dokumen LWF, *Mission in Context* (2004); dokumen ini menyajikan misi secara holistik, yang mencakup pewartaan, diakonia, dan advokasi. Dokumen WCC *Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes*, yang dipresentasikan oleh Commission on World Mission and Evangelism (CWME) dalam mempersiapkan Sidang Raya di Busan, mengarah pada hal yang sama. Dokumen ini menegaskan:

... pemahaman tentang penginjilan yang didasarkan pada kehidupan gereja lokal yang mana penyembahan (*leiturgia*) terkait erat dengan kesaksian (*martyria*), pelayanan (diakonia), dan persekutuan (*koinonia*).

Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa:

Gereja dalam setiap konteks geo-politik dan sosio-ekonomi dipanggil untuk melayani (diakonia)—untuk menghidupi iman dan pengharapan komunitas umat Allah, bersaksi tentang apa yang telah Allah lakukan di dalam Yesus Kristus. Melalui pelayanan, gereja berpartisipasi dalam misi Allah, mengikuti teladan Sang Hamba. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas diakonia

yang memanifestasikan kuasa pelayanan di atas kuasa dominasi, memungkinkan dan memelihara berbagai peluang bagi kehidupan, dan bersaksi tentang kasih karunia Allah yang mengubah melalui berbagai bentuk pelayanan yang berpegang teguh pada janji pemerintahan Allah.

Terdapat pemahaman yang berkembang, juga di antara para pemimpin organisasi misionaris, bahwa misi dan diakonia berkaitan erat, dan bahwa karya diakonia itu sendiri merupakan ungkapan dari mandat misi. Ada pula pemahaman yang berkembang bahwa misi dan keadilan merupakan satu kesatuan. Beberapa pendapat, misalnya, dari perwakilan organisasi misi evangelis, akan terus mengklaim bahwa pewartaan adalah hal yang paling penting dalam karya misi, dengan konversi individu sebagai tujuan dasarnya. Pandangan ini menganggap diakonia sebagai aktivitas sekunder, yang bersifat fakultatif tergantung pada situasi yang ada, dan mungkin sebagai aktivitas yang mendukung tujuan misi yang “sesungguhnya”.

Sejarah diakonia oikoumenis melibatkan banyak aktor dan gagasan. Tidaklah mungkin untuk menuliskan semuanya dalam dokumen ini atau memberikan penjelasan tentang kontribusi penting mereka.

DIAKONIA *World Federation* adalah salah satunya, sebuah jejaring yang terdiri dari orang-orang yang berkomitmen pada pelayanan diakonia, sebagian besar adalah perempuan di seluruh penjuru dunia. Karya para anggota DIAKONIA *World Federation* meliputi berbagai bidang, mulai dari karya pelayanan kepada para perempuan dan pemuda yang hidup dengan AIDS sampai dengan karya pelayanan untuk perdamaian antara komunitas Kristen dan Muslim.

Lembaga-lembaga diakonia khusus juga melibatkan para pendeta maritim untuk memberikan pelayanan pastoral kepada para pelaut, termasuk para anggota International Christian Maritime Association (ICMA).

Oleh karena itu, tetap menjadi tugas utama dalam dunia kekristenan untuk merefleksikan secara teologis tentang hakikat misi yang sebenarnya, dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan tantangan-tantangan masa kini. Bab 4 akan menjelaskan refleksi teologis lebih lanjut tentang hal ini dari perspektif diakonia oikoumenis.

2.4 Bantuan Antar-Gereja

Pada abad ke-19, masalah urbanisasi dan industrialisasi menggerakkan gereja-gereja untuk bersama-sama menangani masalah-masalah sosial, menyadari bahwa struktur tradisional mereka tidak akan memadai dan bahwa mereka perlu bekerja sama dalam menghadapi tantangan tersebut. Urban Mission, YMCA, dan organisasi-organisasi serupa didirikan dengan profil interdenominasi dan diakonia yang jelas, dan para pemimpinnya banyak memberikan kontribusi dalam pembentukan gerakan oikoumenis. Diakonia menjadi pendorong dan dimensi utama dalam perwujudan oikoumenisme. The Life and Work Movement, sejak konferensi pertamanya di Stockholm pada 1925, mengungkapkan visi bahwa kesatuan Kristen dan isu-isu sosial saling berkaitan, dan bahwa gereja-gereja harus bertindak bersama.

Penderitaan di Eropa setelah Perang Dunia I meyakinkan para pemimpin gereja bahwa panggilan ini membutuhkan inisiatif baru dan struktur yang lebih kuat. Pada 1922, *European Central Bureau for Inter-Church Aid* (Biro Pusat Eropa untuk Bantuan Antar-Gereja) didirikan di Swiss, di bawah naungan Dewan Federal Gereja-gereja Kristus di Amerika dan Federasi Gereja-gereja Protestan Swiss, yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja lain di Eropa. Tujuannya adalah untuk mengelola bantuan kepada para pengungsi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan bantuan. Inisiatif ini menjadikan diakonia oikoumenis sebagai model kerja sama multilateral di antara gereja-gereja pada dekade-dekade berikutnya. Pada 1945, lembaga ini bergabung dengan Dewan Gereja-gereja se-Dunia, yang sedang dalam proses pembentukan, dan kemudian ditetapkan sebagai Departemen Bantuan Pengungsi dan Antar-Gereja.

Komite Sentral WCC, dalam pertemuan perdananya di Chichester, Inggris, pada 1949, satu tahun setelah sidang raya di Amsterdam, menekankan bahwa bantuan antargereja merupakan kewajiban tetap WCC, dan bukanlah sebuah tugas yang bersifat sementara. Dr. Visser 't Hooft, Sekretaris Jenderal WCC dari tahun 1948 hingga 1966, dengan tegas menyatakan pendapat ini dan menyerukan sebuah "sistem bantuan bersama" dengan pandangan bahwa praktik solidaritas merupakan bagian dari esensi hidup baru, "sebuah ujian terhadap

realitasnya”, mengacu pada 2 Korintus 8–9. Oleh karena itu, menurutnya, tidak akan ada persekutuan oikoumenis yang sehat tanpa adanya praktik solidaritas.

Bantuan antargereja dipandang sebagai bentuk kerja sama antargereja, dalam pengertian tentang kebersamaan dan dari perspektif bahwa konteks historis akan menentukan apakah sebuah gereja harus mengambil peran sebagai pemberi atau penerima. Divisi Bantuan Antar-Gereja dan Pelayanan kepada Pengungsi (Division of Inter-Church Aid and Service to Refugees/DICASR), saat departemen WCC berganti nama pada 1949, selama bertahun-tahun menjadikan pengungsi sebagai kelompok target khusus, tidak hanya di Eropa tetapi juga di belahan bumi lainnya. Selain itu, divisi ini juga mendukung proyek-proyek yang berkaitan dengan situasi gereja lokal, seperti memperbaiki bangunan yang rusak akibat perang, atau program-program yang akan memperkuat kapasitas internal gereja, seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial. Program-program ini terutama ditujukan kepada gereja-gereja minoritas serta gereja-gereja di Eropa Timur yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan komunis.

Beberapa gereja anggota WCC membentuk berbagai organisasi dengan tujuan untuk mendanai bantuan antar gereja. Organisasi-organisasi ini sering disebut sebagai “institusi terkait” karena kerja sama yang erat dengan gerakan oikoumenis dan mandat mereka untuk mendanai kegiatan-kegiatan DICASR. Folkekirkens Nødh-jælp (DanChurchAid) telah memulai karya semacam ini di Denmark pada 1922, sementara Christian Aid (Inggris dan Irlandia) baru didirikan pada 1945. Setelah Perang Dunia II, lebih banyak lagi organisasi yang didirikan, seperti Church World Service (Amerika Serikat) pada 1946, dan Norwegian Church Aid dan Swedish Lutherhjälpen pada 1947. Finn Church Aid, pada saat didirikan pada 1947, merupakan penerima bantuan dari luar negeri, yang melayani para korban perang di Finlandia; yang kemudian menjadi sebuah lembaga yang membantu orang-orang yang menderita di belahan bumi lainnya.

Kepemimpinan WCC pada saat itu sering kali berbicara tentang “bantuan antargereja”. Para pemimpin gereja yang menggunakan bahasa Jerman dan yang mewakili Eropa Utara lebih memilih istilah “diakonia”, yang mereka kenal baik di gereja-gereja asal mereka, juga berdasarkan pandangan bahwa bantuan tersebut tidak boleh dibatasi pada gereja dan anggota gereja, tetapi harus bermanfaat bagi orang-orang yang paling menderita. Sejak tahun 1830-an, apa

yang disebut sebagai gerakan diakonia modern telah mendorong pendirian lembaga-lembaga diakonia, pertama-tama di Jerman, kemudian di negara-negara lain, juga di luar Eropa. Mayoritas lembaga-lembaga tersebut saat ini berjalan dalam kerja sama yang erat dengan pemerintah lokal atau nasional yang membiayai kegiatan-kegiatan mereka. Sebagian besar dari lembaga-lembaga ini tidak terkait atau terwakili dalam gerakan global diakonia oikoumenis; lembaga-lembaga ini terkadang dianggap sebagai jenis yang “berbeda” dari diakonia. Namun, sering kali para pemimpin gereja dengan latar belakang seperti itulah yang melihat bantuan antargereja dan pelayanan pengungsi sebagai perluasan yang lazim dari jenis karya yang telah dikembangkan oleh para pelaku diakonia di gereja asal mereka.

Visser ‘t Hooft menyadari potensi penerapan istilah diakonia secara oikoumenis. Dalam sebuah konsultasi DICASR pada 1956, ia mempresentasikan sebuah pandangan bahwa misi gereja memiliki tiga aspek perwujudan: *kerygma*, *koinonia*, dan *diakonia*. Menurutnya, diakonia adalah “pelayanan, ekspresi iman dalam kasih dan belas kasihan Kristiani dan dalam melayani kebutuhan manusia”. Tiga serangkai *kerygma*, *koinonia*, dan *diakonia* ini kemudian sering digunakan sebagai cara untuk mengekspresikan kaitan antara hakikat gereja dan perutusannya yang holistik kepada dunia.

Sidang Raya WCC di New Delhi pada 1961 mengartikulasikan visi yang sama dalam menyatakan kesaksian, kesatuan, dan pelayanan (diakonia) sebagai tiga dimensi utama yang esensial dan tidak dapat dipisahkan dari gereja, dan dipanggil untuk terlibat dalam “pelayanan oikoumenis gereja-gereja”, integrasi International Missionary Council (IMC) dengan Dewan Gereja-gereja se-Dunia yang terjadi pada saat sidang ini tentu saja memberikan kontribusi bagi perwujudan visi tersebut.

2.5 Diakonia Oikoumenis dan Bantuan Pembangunan

Membantu orang-orang yang membutuhkan selalu disertai dengan perspektif di luar aksi yang dilakukan pada saat itu dan aksi selanjutnya. Bagi gereja-gereja yang terlibat dalam bantuan antargereja setelah Perang Dunia II, aksi ini bertujuan untuk rekonsiliasi dan membangun ikatan solidaritas yang baru di

antara negara-negara yang berperang satu sama lain. Upaya penanganan masalah pengungsi menyiratkan perlunya advokasi, yakni pembelaan terhadap martabat dan hak-hak sosial dan politik bagi orang-orang yang dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Bantuan kemanusiaan membutuhkan pendampingan jangka panjang; yang memotivasi lembaga-lembaga bantuan untuk terlibat dalam karya pembangunan.

Hingga tahun 1961, terdapat dua instrumen utama bagi bantuan antargereja dan kerja sama oikoumenis: CICARWS (Bantuan Antar-Gereja, Pelayanan Pengungsi dan Dunia, atau yang semula DICASR) dan IMC (Internasional Missionary Council, sejak tahun 1921). Agenda pokok pertama berfokus pada upaya pembangunan kembali di Eropa setelah Perang Dunia II dengan sasaran utamanya adalah bantuan antargereja, sedangkan kerja sama misioner merupakan agenda pokok yang kedua yang berfokus pada “jati diri gereja-gereja yang lebih muda” dan “dekolonisasi”. Sebuah kesadaran baru akan “tanggung jawab global” dari gereja-gereja dan negara-negara di wilayah Utara sangat memengaruhi diskursus dalam periode ini. Konsep “masyarakat yang bertanggung jawab”, yang telah diadopsi oleh WCC dalam sidang raya di Amsterdam pada 1948, kini diproyeksikan ke dalam lingkup global.

Tumbuhnya kesadaran akan hubungan timbal balik antara oikoumenisme dan diakonia pada 1950-an dan tahun 1960-an mendorong proses perluasan dan penggabungan secara bertahap kedua agenda tersebut dan instrumen-instrumen yang terkait, serta konseptualisasi diakonia oikoumenis. Pada 1957, sebuah konsultasi internasional yang diadakan di Berlin memperkenalkan konsep diakonia oikoumenis. Konsep ini merefleksikan kesadaran yang kuat akan kekristenan pascaperang dan komitmennya terhadap perdamaian dan perjuangan melawan kelaparan dalam skala global, serta menyatukan visi “masyarakat yang bertanggung jawab” dan komitmen gereja-gereja terhadap “diakonia sosial”, yang keduanya harus dipahami dalam perspektif global, sehingga muncullah penekanan baru terhadap “diakonia oikoumenis”.

DICASR dan mitra-mitra oikoumenisnya memulai karya mereka untuk merespons kebutuhan mendesak di Eropa setelah Perang Dunia II. Namun, pada 1954, Sidang Raya WCC di Evanston merekomendasikan DICASR untuk memberikan bantuan kepada gereja-gereja di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Ditetapkan seorang sekretaris untuk wilayah non-Eropa, yang kemudian mengarah pada pembentukan divisi CICARWS untuk Asia, Afrika dan Amerika Latin. Pada 1956, DICASR untuk pertama kalinya mempresentasikan sebuah “daftar proyek”, dan mengundang mitra-mitra donor di wilayah Utara untuk mendukungnya. Hal ini mengindikasikan pergeseran dari tindakan cepat ke tindakan pembangunan jangka panjang. Pada saat yang sama, hal ini membuka praktik baru dalam mengelola dan mengimplementasikan kegiatan; para pelaku pembangunan menjadi aktor kunci dalam tugas merancang proyek dan memastikan standar profesional pelaksanaannya.

Makin luasnya agenda DICASR mendorong perlunya memperjelas relasi dengan instrumen yang sudah ada dalam IMC terkait pembagian sumber daya. Pada 1958, setelah pembicaraan yang intens antara WCC dan IMC, Perjanjian *Bad Herrenalb* berhasil disusun. Perjanjian ini menetapkan peraturan tentang bagaimana proyek-proyek harus didukung, memastikan bahwa proyek-proyek tersebut akan menerima bantuan dana dari DICASR atau IMC. Integrasi IMC ke dalam WCC pada 1961 mendorong terbentuknya DWME (Department for World Mission and Evangelism), dan pada yang sama untuk pertama kalinya sebuah daftar proyek bersama disusun antara DICARWS dan DWME. Pemisahan yang sebelumnya terjadi antara agenda pembangunan di Utara dan agenda “pengembangan” atau kerja sama misioner di Selatan tidak lagi digunakan.

Pada 1960, DICASR berganti nama menjadi DICARWS (Division of Inter-Church Aid, Refugee and World Service). Fokusnya adalah untuk memperkuat “pelayanan dunia” yang dilakukan secara bersama-sama oleh gereja-gereja, seperti yang dinyatakan dalam mandatnya:

Tujuan dari divisi ini adalah untuk mengekspresikan solidaritas oikoumenis gereja-gereja melalui upaya saling membantu untuk memperkuat gereja-gereja dalam kehidupan dan misinya, dan terutama dalam pelayanan kepada dunia sekitarnya (diakonia).

Istilah-istilah kunci yang digunakan tetap seputar “bantuan”, “diakonia”, dan “pelayanan”, tetapi lambat laun istilah-istilah tersebut digantikan oleh konsep “pembangunan”. Dalam diskursus di kalangan DICARWS yang dipengaruhi oleh optimisme pembangunan pada 1960-an, “pelayanan dunia” cen-

derung berarti karya pembangunan dan diorientasikan oleh teori-teori pembangunan pada masa itu. Diakonia oikoumenis kemudian merefleksikan apa yang sedang terjadi di dunia sekuler; di sisi lain, diakonia oikoumenis juga berkontribusi aktif dalam pemahaman tentang pembangunan, khususnya dengan menyatakan bahwa pembangunan adalah sebuah persoalan keadilan, dan bukanlah sebuah persoalan amal. Konferensi WCC tentang Gereja dan Masyarakat di Jenewa tahun 1966 merupakan sebuah peristiwa penting dalam proses perwujudan kepedulian gerakan oikoumenis karena adanya kehadiran dan masukan dari negara-negara di wilayah Selatan. Contoh lain dari komitmen publiknya adalah kerja sama dengan WHO, terutama melalui WCC Christian Medical Commission, dalam merumuskan konsep-konsep kesehatan dan pelayanan kesehatan global.

Sidang Raya keempat WCC di Uppsala pada 1968 secara resmi menjadi awal dari keterlibatan gerakan oikoumenis secara internasional dan terorganisasi untuk kerja sama pembangunan. Beberapa tahun sebelum tahun 1968 sudah terlihat adanya peningkatan kerja sama antara CICARWS dengan badan-badan nasional dan internasional untuk bantuan antargereja. Implikasi dari transformasi bantuan antargereja menjadi bantuan pembangunan didiskusikan secara kritis sebelum dan selama pertemuan Uppsala. Apakah akan menggunakan dana pemerintah atau tidak untuk keterlibatan gereja dalam kerja sama pembangunan menjadi topik diskusi kritis di kalangan internal DICARWS pada 1961.

Tahun 1960-an, menurut PBB, merupakan “dekade pertama pembangunan”, yang menyatukan agen-agen publik dan kemanusiaan, termasuk lembaga-lembaga diakonia, dalam keterlibatan untuk dunia yang lebih baik. Keterlibatan tersebut mengarah pada perumusan teori-teori pembangunan dan kesadaran baru terkait tujuan dan metode kerja. Proses profesionalisasi karya pembangunan ini juga membawa konsekuensi bagi diakonia oikoumenis, yang membawa banyak manfaat. Proses ini meningkatkan kesadaran akan kualitas dan kompetensi ketika terlibat dalam karya pembangunan, mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan dan menangani isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan pergeseran dari model-model kegiatan amal yang bersifat belas kasihan ke praktik-praktik yang lebih partisipatif dan memberdayakan. Hal ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti peran

perempuan dalam masyarakat dan situasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Hal ini juga mendorong praktik-praktik administrasi yang bertanggung jawab, akuntabilitas dalam mengelola sumber daya keuangan, dan evaluasi diri yang jujur dan kritis.

Konsekuensinya adalah bahwa lembaga-lembaga diakonia, bersama dengan sebagian besar organisasi berbasis iman (FBO), mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para donatur publik, termasuk pemerintah. Secara umum, mereka mengakui bahwa FBO bertanggung jawab, profesional, dan efektif. Oleh karena itu, pemerintah di negara-negara di belahan bumi Utara makin banyak mendanai proyek-proyek yang dijalankan oleh para pelaku berbasis gereja, dengan syarat mereka mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan. Proyek-proyek tersebut harus bersifat “netral” secara keagamaan dan tidak digunakan untuk mempromosikan gereja.

Proses profesionalisasi yang dilakukan mengindikasikan bahwa proses tersebut juga membawa beberapa kerugian. Para pemegang proyek yang berorientasi pada standar profesional tidak selalu melihat nilai profesional dalam bekerja dengan gereja-gereja lokal. CICARWS (Commission of Inter-Church Aid, Refugee and World Service) dari tahun 1971, menetapkan mandatnya lebih sebagai pelayanan kepada dunia dibandingkan solidaritas antargereja, “untuk membantu memenuhi kebutuhan atas nama kemanusiaan dan tanpa membedakan keyakinan, kasta, ras, kebangsaan, atau politik”.

Sejak tahun 1960-an, lembaga-lembaga terkait mulai melaksanakan proyek-proyek mereka sendiri di negara-negara berkembang, mengabaikan struktur oikoumenis yang ada. Hal ini berarti terjadi pergeseran dari multilateralisme ke bilateralisme, dan sebagai konsekuensinya terjadi pergeseran dari kerja sama antargereja ke kerja sama pembangunan profesional. Dua lembaga penting muncul pada periode ini, Bread for the World di Jerman pada 1959, dan ICCO (awalnya singkatan dari Interchurch Coordination Committee for Development Projects), di Belanda pada 1964. Keduanya memiliki mandat yang jelas untuk melaksanakan berbagai kegiatan bantuan pembangunan atas nama gereja-gereja di negara asalnya.

Penerapan teori-teori pembangunan juga menyiratkan bahwa istilah-istilah yang berhubungan dengan gereja, seperti diakonia, secara umum tidak

lagi digunakan. Sebagian orang menyatakan bahwa dari sudut pandang profesional seharusnya tidak ada perbedaan antara agen-agen yang berbasis gereja dan agen-agen sekuler dalam mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan. Isu utamanya adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara, yang lain mempersoalkan sikap ini dan mempertanyakan alasan agen-agen yang berbasis gereja mempertahankan identitasnya, jika dalam praktiknya mereka mengabaikan pemahaman diri gereja-gereja yang mereka libatkan sebagai mitra dalam menjalankan tugas mereka. Pada 1972, Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) mengirimkan surat kepada LWF yang mempertanyakan keharusan agen-agen pembangunan yang berbasis gereja untuk memisahkan antara karya pembangunan dan penginjilan saat melaksanakan proyek-proyek yang didanai oleh LWF. Surat ini menjadi simbol reaksi orang Afrika terhadap apa yang mereka anggap sebagai pemaksaan antropologi dikotomis Barat dalam karya pembangunan, yaitu memandang iman sebagai masalah pribadi yang terpisah dari keterlibatan sosial.

Suara lainnya mempertanyakan sistem bantuan itu sendiri, dengan menyatakan bahwa sistem ini memperkuat kesenjangan antara negara-negara Utara dan Selatan, antara “pemberi bantuan” dan “penerima bantuan”. Konferensi Gereja dan Masyarakat WCC di Jenewa (1966) menyerukan kepada gereja-gereja untuk beralih dari bantuan langsung, dan sebagai gantinya mereka perlu menggalang pendanaan lokal dan berbagai inisiatif lokal. Sidang WCC di Uppsala (1968) menegaskan keprihatinan ini, dengan menegaskan keadilan, bukan tindakan amal, dan mengadvokasi peralihan kekuasaan dan partisipasi bersama. Pada 1971, WCC membentuk CCPD (Commission on the Churches’ Participation in Development) dengan tujuan untuk mendorong gerakan-gerakan masyarakat di seluruh dunia, dengan keyakinan bahwa refleksi dan aksi mereka akan lebih efektif dibandingkan dengan pemberian bantuan dalam memperjuangkan masyarakat yang adil dan partisipatif. Ketegangan yang tak terhindarkan menandai posisi ideologis dan struktural CICARWS dan CCPD. Di satu sisi, ketegangan tersebut berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan kompleksitas bantuan internasional, dan pentingnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis; di sisi lain, pemusatan perhatian pada prinsip-prinsip yang

menyeluruh ini mungkin memiliki konsekuensi bahwa posisi WCC sebagai koordinator dan pelaksana proyek-proyek konkret menjadi berkurang.

2.6 Munculnya Sebuah Paradigma Baru

Sejak tahun 1980-an, terdapat pemahaman yang berkembang, baik di kalangan tokoh-tokoh pembangunan berbasis iman maupun sekuler, bahwa paradigma pembangunan yang ada saat ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, antara lain karena terlalu berpusat pada aspek ekonomi.

James P. Grant, Direktur Eksekutif United Nations Children's Fund (UNICEF), mengungkapkan pandangan ini pada Konferensi Internasional tentang Populasi dan Pembangunan di Kairo pada 1994:

Sejak konferensi tentang populasi yang diadakan di Mexico City pada 1984, makin jelas bahwa pembangunan harus responsif terhadap paradigma baru. Bila ingin berkelanjutan saat ini, pembangunan tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berkelanjutan dalam hal lingkungan. Pembangunan juga harus berkelanjutan dalam arti kemanusiaan—pembangunan harus memutus belenggu kemiskinan pada separuh atau sepertiga lapisan masyarakat terbawah dan memperlambat pertumbuhan penduduk, sambil mempertahankan demokrasi, hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan perdamaian.

Paradigma baru diakonia oikoumenis yang saat ini sedang berkembang merupakan hasil pembelajaran dari diskusi ilmiah tentang pembangunan, dan juga dari refleksi teologis tentang sifat yang khas dari aksi diakonia. Terdapat tiga dimensi dasar yang mendapat perhatian khusus dalam paradigma baru ini, yang masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul pada periode sebelumnya.

Pertama, dimensi eklesiologis dari diakonia. Sementara diakonia oikoumenis di masa lalu sering kali dianggap sebagai aksi kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, kini penekanan diberikan pada karakter eklesialnya. Sidang Raya WCC di Vancouver pada 1983 dengan tegas menyatakan pemahaman ini:

Diakonia sebagai pelayanan gereja untuk berbagi, pemulihan, dan rekonsiliasi adalah karakter mendasar dari gereja. Diakonia menuntut individu dan gereja untuk memberi, yang bukan berasal dari apa yang mereka miliki, melainkan diri mereka sendiri. Diakonia secara terus-menerus menantang struktur-struktur gereja yang kaku, statis, dan berpusat pada diri sendiri dan mengubahnya menjadi instrumen-instrumen yang hidup dalam pelayanan gereja untuk berbagi dan pemulihan. Diakonia tidak dapat dibatasi dalam kerangka kerja institusional. Diakonia harus melampaui struktur dan batas-batas kelembagaan gereja yang sudah mapan dan menjadi aksi berbagi dan pemulihan oleh Roh Kudus melalui komunitas umat Allah di dalam dan bagi dunia.

Konsultasi CICARWS tentang “Pendekatan Ortodoks terhadap Diakonia”, yang diadakan di Chania, Kreta, pada 1978, membuka jalan untuk melihat diakonia sebagai “liturgi sesudah Liturgi”, sebagai “sebuah bagian integral dari kepedulian dan perhatian pastoral sebuah komunitas kristiani yang hidup bagi semua yang ada di dalam komunitas tersebut dan bagi semua yang berada dalam jangkauan pengetahuan dan kepedulian yang penuh kasih” Empat tahun kemudian, CIWARWS menyelenggarakan konsultasi lain di Jenewa, dengan tema “Pemahaman Kontemporer tentang Diakonia”. Konsultasi ini menegaskan dimensi eklesial, dengan menyatakan bahwa:

Diakonia merupakan hal yang esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan gereja. ... Jantung dari diakonia ada di dalam ekaristi; di sanalah asal muasalnya, ketika Kristus membagikan tubuh-Nya kepada kita dan dengan demikian memulihkan kita. Di dalam diakonia kita menjadi pengikut Tuhan.

Konsultasi tersebut menambahkan perspektif lain atas pandangan ini, yang menekankan peran gereja lokal:

Diakonia terbentuk di dalam gereja lokal, karena dalam konteks lokal, gereja menjadi hamba Tuhan, terbuka terhadap kebutuhan masyarakat di mana mereka hidup. ... Di dalam gereja lokal kita dapat menemukan bahwa diakonia tidak pernah menjadi sebuah hubungan subjek-objek, melainkan sebuah hubungan yang saling membutuhkan dalam sebuah komunitas yang saling memulihkan dan berbagi. Bentuk-bentuk kelembagaan diakonia, betapa pun

bermanfaatnya, tidak dapat mengambil alih tanggung jawab komunitas-komunitas Kristen lokal.

Perspektif eklesial tentang diakonia membuka konsep untuk menghubungkannya dengan “berbagi”, yang menjadi tema utama dalam WCC pada 1980-an, secara khusus dalam upaya berbagi sumber daya secara oikoumenis. Sebagaimana Kristus dengan sukarela membagikan karunia-karunia yang dimiliki kepada komunitas-Nya, orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup saling berbagi. Dengan demikian, diakonia oikoumenis menjadi sebuah tanda yang nyata dan instrumen yang efektif bagi panggilan gereja di dunia.

Kedua, dimensi profetis dari diakonia. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keadilan dan akar penyebab kemiskinan memengaruhi para pelaku diakonia. Jika sebelumnya mereka memandang karya yang diselenggarakan sebagai bentuk derma, bahkan sebagai bentuk pelayanan yang rendah hati, kini mereka juga menekankan pentingnya merespons isu-isu sosial dan politik yang sedang memanas. Aksi diakonia haruslah ditujukan dengan berbasis pada hak-hak asasi; aksi tersebut haruslah memperjuangkan martabat manusia dan mengupayakan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Konsultasi Kreta (1978), seraya menegaskan pemahaman ini, juga mengaitkannya dengan dimensi eklesial dari diakonia:

Tujuan dari diakonia Kristen adalah untuk mengalahkan kejahatan. Diakonia menawarkan pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ketika gereja gagal untuk menyampaikan kesaksian dan gagal untuk menjadi profetis, reaksi dunia akan berbentuk ketidakpedulian dan sikap apatis. Oleh karena itu, diakonia merupakan elemen penting dalam kehidupan dan perkembangan gereja.

Konsultasi Jenewa (1982) mengkritik pelayanan diakonia yang “mendukung kapitalisme domestik dan kolonialisme” dan tidak “melawan kejahatan sosial pokok dari sistem sosio-ekonomi yang dominan”. Konsultasi ini menyerukan sebuah diakonia yang membebaskan—“perhatian utama haruslah pada pemberdayaan manusia”—dan meminta gereja-gereja untuk memikirkan kembali prioritas-prioritas mereka, dan “terlibat dalam dan mendukung program-program untuk mewujudkan keadilan”.

Konsultasi Larnaca (1986) memperluas pandangan ini. Dalam banyak hal, konsultasi ini merupakan titik balik dalam proses penyusunan konsep diakonia oikoumenis.

Direktur CICARWS, Klaus Poser, menjelaskan hal ini dalam laporannya tentang konsultasi tersebut:

Relatif sedikit diskusi tentang pembangunan atau proyek; sebaliknya, diskusi berpusat pada perjuangan untuk kehidupan dan solidaritas untuk keadilan. Konsultasi ini menunjukkan bahwa manifestasi kasih kristiani memiliki bentuk yang beragam, dan menjadi saksi akan keutuhan diakonia dalam kemuridan Yesus Kristus.

Dengan demikian, diakonia diharapkan dapat bersifat politis dan profetis. Bersifat politis dalam arti bahwa diakonia mengenali konteks politik di mana ia berada dan mengembangkan bentuk-bentuk aksi yang menentang ketidakadilan dan mendukung proses-proses menuju masyarakat yang lebih adil. Bersifat profetis dalam arti bahwa ia diilhami oleh teladan para nabi Perjanjian Lama dan Yesus, yang membela martabat dan hak-hak orang-orang yang terisih dan mewartakan nilai-nilai pemerintahan Allah, yang di antaranya adalah keadilan dan perdamaian.

Ketiga, adanya paradigma baru yang kurang memperhatikan dimensi holistik diakonia. Konsultasi Kreta (1978) mendesak CICARWS untuk “memperhatikan yang lebih besar pada dimensi spiritual diakonia” dan untuk memperhatikan “fakta bahwa kewenangan lembaga-lembaga khusus seperti yang diterapkan dalam prosedur yang ada saat ini dapat menghalangi respons terhadap kebutuhan riil gereja-gereja”.

Secara khusus, mereka yang mewakili gereja-gereja di negara-negara Selatan mempertanyakan cara agen-agen diakonia melakukan tugasnya, karena mereka melihat tidak banyak perbedaan antara agen-agen tersebut dengan organisasi-organisasi sekuler. Mereka merasa bahwa adanya keharusan untuk memisahkan karya proyek dari kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan gereja merupakan suatu cara untuk mempromosikan pandangan dunia Barat. Sebaliknya, mereka menganjurkan pendekatan holistik ketika meng-

upayakan masyarakat yang lebih adil, yang harus mencakup dimensi materiel, sosial, dan spiritual dari realitas kehidupan manusia.

Perlu ditekankan bahwa ketiga dimensi dalam paradigma baru ini saling terkait dan saling mendukung. Dimensi eklesiologis menegaskan bahwa diakonia adalah bagian integral dari misi gereja sekaligus sebagai karakter holistik dari misi; diakonia mencakup pewartaan, kesaksian profetis, dan aksi diakonia.

CICARWS menjadi instrumen dalam memfasilitasi paradigma baru ini; pada saat yang sama perannya sebagai fasilitator aksi diakonia bersama menurun. Sidang di Canberra (1991) memutuskan untuk membubarkan CICARWS dan CCPD. Unit IV Sharing and Service yang baru dibentuk “tidak terlalu memikirkan bagaimana mempertahankan kata *diakonia*”; tugas utamanya adalah untuk membangun jejaring dari proses-proses refleksi.

Pada 2002, Diakonia dan Solidaritas didirikan sebagai sebuah program WCC. Kelompok ini menghasilkan beberapa naskah penting yang mendokumentasikan perkembangan diakonia oikoumenis. Dokumen *From Inter-Church Aid to Jubilee* memaparkan sejarahnya, dengan menyatakan bahwa konsep-konsepnya (bantuan antargereja, diakonia, berbagi, solidaritas) berubah dari waktu ke waktu, tetapi esensinya tetap sama:

Konstanta yang penting adalah pemahaman bahwa keyakinan teologis, spiritual, dan moral dari gerakan oikoumenis perlu diterjemahkan ke dalam aksi solidaritas yang tulus jika visi oikoumenisme ingin kredibel, relevan, dan berakar dalam kehidupan masyarakat.

Chris Ferguson dan Ofelia Ortega, mewakili WCC Regional Relation Team, menulis teks penting lainnya, *Diakonia Oikoumenis*. Mereka menegaskan paradigma baru diakonia, dengan menyajikannya sebagai sesuatu yang bersifat profetis, transformatif, dan pencari keadilan, yang berkontribusi pada apa yang dijelaskan sebagai “siklus pemberdayaan”:

Diakonia ini juga melibatkan partisipasi dalam perjuangan yang berkelanjutan bagi pembagian sumber daya yang adil dan merata. Pembagian tersebut menekankan tanggung jawab bersama dan akuntabilitas gereja-gereja dan mitra oikoumenis. Berbagi haruslah berpadu dengan keadilan, berkontribusi pada “siklus pemberdayaan”, sehingga “semua orang dapat mempunyai hidup

dalam segala kelimpahannya” (Yoh. 10:10) dan berbagi dalam pandangan Alkitab bahwa “setiap orang akan duduk di bawah pokok anggur dan pohon ara dan hidup dalam damai sejahtera dan tidak takut” (Mik. 4:4).

Pandangan ini jelas terinspirasi dari visi di dalam Alkitab tentang keadilan dan perdamaian serta etos berbagi dan kebersamaan. Di sisi lain, pandangan ini menyiratkan prinsip-prinsip panduan untuk aksi diakonia:

Diakonia sejati mengikuti teladan Kristus dan berakar pada Ekaristi yang mencakup keterlibatan dalam penderitaan dan kerusakan dunia. Diakonia sejati akan mendengar dan merespons tanda-tanda zaman dengan iman yang sama kepada Allah Kehidupan, namun diakonia sejati perlu menyertakan pengetahuan baru, dan suara-suara baru, serta merespons konteks yang beragam. Konteks kita memaksa kita untuk mengatasi dikotomi-dikotomi yang salah di masa lalu. Kita tidak dapat memahami atau mempraktikkan diakonia tanpa keadilan dan perdamaian. Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kesaksian profetis atau pelayanan rekonsiliasi. Misi harus mencakup diakonia yang transformatif.

2.7 Pembentukan ACT Alliance

Pada awal tahun 1990-an, ketika CICARWS tidak lagi eksis, para pemimpin agen diakonia dari negara-negara di belahan bumi Utara terus bertemu secara rutin, dengan perhatian yang makin besar untuk mengembangkan mekanisme kerja sama, terutama dalam merespons keadaan darurat. Pada 1995, Action by Churches Together (ACT International) didirikan, dengan kantor pusat di Jenewa. WCC dan LWF memainkan peran sentral dalam proses ini, dengan tujuan yang jelas untuk membangun sebuah struktur yang akan memberikan ruang bagi keterlibatan diakonia gereja-gereja anggotanya dan menegaskan komitmen diakonia gerakan oikoumenis.

Inisiatif penting lainnya yang bertujuan untuk mendorong aksi bersama oleh para mitra oikoumenis adalah Ecumenical Advocacy Alliance (EAA), yang dibentuk pada 2000. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengoordinasi-

kan advokasi global gereja-gereja dan lembaga-lembaga terkait dalam isu-isu tertentu, seperti HIV/AIDS dan ketahanan pangan.

Berbagai pengalaman yang baik dengan struktur semacam ini memotivasi para mitra untuk memperluas struktur ACT. Pada 2007, ACT Development dibentuk sebagai “aliansi global gereja-gereja dan organisasi-organisasi terkait yang diberi mandat untuk bekerja secara oikoumenis dalam pembangunan dan yang dipilih untuk bekerja bersama” dengan tujuan untuk “mendorong dan memfasilitasi kerja sama antara para partisipan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam pembangunan yang transformasional”. Dengan maksud untuk menyatukan ACT International dan ACT Development, pada 2010, badan-badan pengurus kedua organisasi tersebut memutuskan untuk menggabungkan kegiatan mereka dan membentuk ACT Alliance. Sekali lagi, pada saat itu, WCC dan LWF memainkan peran penting dan menegaskan tanggung jawab mereka atas struktur yang baru ini.

Pada 2016, ACT Alliance merupakan koalisi dari 140 gereja dan organisasi berbasis iman yang bekerja sama di lebih dari 100 negara. Aliansi ini menyalurkan dana sekitar 2,6 miliar dolar AS untuk kegiatannya setiap tahun di tiga bidang yang menjadi sasaran: bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan advokasi “untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat miskin dan terpinggirkan, tanpa memandang agama, politik, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau kebangsaan mereka, sesuai dengan aturan dan standar internasional yang paling tinggi”. Dokumen pendirian menyatakan nilai-nilai inti dari ACT Alliance dan para anggotanya, “yang didasarkan pada iman kristiani dan yang menjadi pedoman bagi karya kemanusiaan, pembangunan dan advokasi kita”:

Kami percaya bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.

Kami percaya bahwa Allah Bapa, yang dikenal melalui Putra-Nya Yesus Kristus dan dinyatakan melalui Roh Kudus dan Kitab Suci, adalah Allah yang penuh kasih yang berpihak pada mereka yang miskin dan tertindas.

Kami percaya bahwa gereja dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang penuh kemurahan kepada semua orang dan berupaya mewujudkan komunitas manusia yang diperdamaikan. Kesaksian ini akan lebih jelas

dikomunikasikan kepada dunia ketika kita bekerja bersama sebagai anggota dalam satu Tubuh Kristus.

Kami percaya bahwa bumi dan segala isinya adalah anugerah Tuhan, yang diberikan atas dasar kasih dan kepedulian terhadap semua makhluk ciptaan.

Kami percaya bahwa sumber daya yang tersedia bagi kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi merupakan pemberian dari Allah, dan panggilan kami untuk melayani mengajak kami untuk setia pada prinsip-prinsip penatalayanan yang baik.

Istilah “diakonia” tidak muncul dalam dokumen ini. Begitu pula dalam dokumen lain ACT Alliance, misalnya, dokumen kebijakan berjudul *The Changing Development Paradigm*, yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif ACT pada Januari 2013. Dokumen ini menganalisis konteks global di mana ACT Alliance berkiprah; dimulai dengan menegaskan secara singkat platform teologis dari dokumen pendirian, tetapi tidak menerapkan pendekatan teologis ini dalam analisis lebih lanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa sejauh ini, ACT belum memasukkan terminologi *diakonia* ke dalam bahasa sehari-hari. Sebaliknya, ACT memilih untuk menggunakan bahasa profesional untuk berkomunikasi dengan kalangan eksternal, sektor kemanusiaan, dan jaringan donor. Fokusnya adalah pada kompetensi profesional organisasi dan kemampuannya untuk menjawab tantangan dari lingkungan sosial-politik dan struktural.

Di sisi lain, penggunaan bahasa profesional mengandung risiko kurangnya komunikasi tentang ACT Alliance yang berbasis iman, khususnya hubungannya dengan jejaring gereja. Jika hal ini terjadi, gereja-gereja lokal mungkin akan menganggap ACT sebagai lembaga bantuan internasional, tanpa memiliki kejelasan akan perannya sebagai representasi lokal dari konstituen yang membentuknya.

Pada September 2014, WCC dan ACT Alliance bersama-sama mengadakan konsultasi di Malawi mengenai hubungan antara gereja dan pelayanan khusus, yang membahas ketegangan terkait dengan kegiatan anggota ACT Internasional, yang menyatakan bahwa mereka sering kali tidak melibatkan gereja-gereja lokal dan keterlibatan diakonalnya. Konsultasi ini menyadari perlunya memperkuat hubungan dan mengusulkan beberapa poin spesifik untuk aksi yang

dapat berkontribusi dalam meningkatkan hubungan antara gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan khusus. Di antaranya adalah gagasan untuk mengembangkan sebuah dokumen yang menjelaskan “pemahaman bersama tentang diakonia oikoumenis, dan mengartikulasikan siapa kita dan apa yang kita lakukan”.

Tidak ada kontradiksi antara kompetensi profesional ketika melakukan pelayanan diakonia dengan penegasan identitas diri sebagai agen berbasis iman. Namun, hal ini membutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjembatani konsep sekuler tentang pembangunan dengan pemahaman teologis tentang menjadi bagian dari misi Allah untuk pemulihan dan transformasi. ACT Alliance akan mendapatkan manfaat dengan menggunakan bahasa diakonia ketika menjelaskan identitasnya yang khas dan mandatnya, serta memperjelas perannya sebagai agen penting dalam bidang diakonia oikoumenis.

Pertemuan kedua ACT Alliance, di Punta Cana, Republik Dominika, pada 2014, memasukkan sebuah lokakarya mengenai diakonia, sebagai bagian dari diskusi mengenai bagaimana berkontribusi pada hubungan oikoumenis yang lebih kuat. Sekretaris Jenderal WCC, Olav Fykse Tveit, menegaskan hal ini saat memberikan sambutan pada pertemuan tersebut:

Istilah dalam Alkitab untuk pelayanan yang menjadi panggilan kita adalah *diakonia*. Kata ini, dan ungkapan yang kita hubungkan dengan kata ini, adalah dasar bersama dari apa yang kita lakukan sebagai WCC dan ACT Alliance.

Pembentukan ACT Alliance memberikan beberapa dampak penting. ACT memberikan para anggotanya peran yang terkoordinasi dalam sistem global yang terkait dengan PBB, dengan lebih banyak ruang untuk keahlian profesional dan interaksi pelayanan khusus dalam sektor kemanusiaan dan pembangunan yang terkait dengan PBB. Hal ini juga memperkuat suara gereja-gereja di ruang publik dan memberikan kontribusi pada pengakuan yang lebih luas terhadap peran agama dan organisasi masyarakat sipil dalam karya kemanusiaan dan pembangunan.

Selain itu, ACT Alliance memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelayanan-pelayanan khusus dalam gerakan oikoumenis yang lebih luas dan terhadap peran dan keterlibatan sosial profesional mereka. Sebelum ACT dibentuk, lembaga-lembaga tersebut sudah mulai bersikap lebih independen

dari WCC dan LWF, dengan melakukan hubungan bilateral; mereka terus menyalurkan sumber daya mereka kepada para pihak di luar gereja dan LSM, dengan tidak melibatkan gereja-gereja. Lembaga-lembaga tersebut juga merasa bahwa mereka tidak memiliki suara yang kuat dalam pengambilan keputusan di WCC, meskipun mereka adalah salah satu donatur terpenting bagi WCC. ACT Alliance menyediakan sebuah platform baru untuk menangani isu-isu ini dan untuk membangun hubungan yang mengakui perbedaan dan peran yang saling melengkapi antara lembaga-lembaga diakonia dalam satu gerakan oikoumenis. Hal ini terus menjadi tantangan untuk dilakukan dengan cara yang terus menegaskan mandat bersama antara lembaga-lembaga dan gereja-gereja, dan yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling berbagi sumber daya. Tugas penting lainnya adalah untuk meningkatkan struktur kerja sama dengan cara yang mengakui dan memperkuat keterlibatan diakonia gereja-gereja lokal, khususnya dalam isu-isu tanggung jawab sosial, advokasi dan diakonia profetis.

2.8 Kesimpulan

Bab ini mencatat bahwa sepanjang sejarah, diakonia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi gereja. Praktik diakonia berubah sesuai dengan zaman dan konteksnya. Berbagai kebutuhan mereka yang terpinggirkan dan menderita terus-menerus menantang para aktor diakonia untuk menjadi inovatif dan melintasi batas-batas sosial, etnis, dan geografis. Dengan demikian, diakonia memberikan kesaksian tentang mandat untuk berpartisipasi dalam misi Allah untuk pembebasan dan pemulihan dunia.

Oleh karena itu, diakonia diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan utama yang membentuk oikoumenisme dan agendanya. Para perancang gerakan oikoumenis mengaitkan visi kesatuan mereka dengan pemahaman misi sebagai aksi bersama dalam melayani orang-orang yang membutuhkan, dan mendorong pemulihan, keadilan, dan perdamaian di dalam dunia yang telah rusak.

Pemahaman tentang diakonia oikoumenis makin diperdalam selama beberapa dekade terakhir; untuk merespons tantangan dan pertanyaan-pertanyaan penting, diakonia oikoumenis mendapatkan wawasan baru dan belajar

untuk menunjukkan peran dan mandatnya dengan cara-cara yang baru, serta mengembangkan kerangka kerja organisasi yang baru agar relevan dan objektif dalam realitas sosial-politik saat ini.

Seperti yang disimpulkan dalam dokumen *From Inter-Church Aid to Jubilee*:

Sejarah diakonia oikoumenis dalam WCC tentu saja tidak lepas dari kontroversi, pergumulan, dan tantangan. Namun demikian, diakonia oikoumenis selalu menjadi refleksi, meskipun terbatas, dari kerinduan yang autentik akan kemuridan yang baru dari orang-orang Kristen yang terlibat dalam gerakan oikoumenis, yang menentang dan menghadapi ketidakadilan, penderitaan dan penindasan di dunia. Dengan demikian, pengalaman diakonia oikoumenis di WCC benar-benar bersifat profetis, dan menjadi sumber daya spiritual dan materiel bagi keluarga oikoumenis yang lebih luas.

B A B 3

Diakonia dalam Gerakan Oikoumenis Polisentris Masa Kini

3.1 Pendahuluan

Gerakan oikoumenis dewasa ini menampilkan dirinya sebagai gerakan yang bersifat polisentris. Dipengaruhi oleh berbagai macam tradisi dan pengalaman dalam kehidupan gereja-gereja anggotanya, gerakan ini membagikan visi kesatuan dan saling berbagi ketika dipanggil untuk menjadi mitra dalam misi Allah dalam membawa harapan dan masa depan bagi dunia.

Polisentris berarti mengakui adanya perubahan lanskap eklesial saat kita memasuki abad ke-21. Pusat gravitasi kekristenan telah bergeser ke arah negara-negara di belahan bumi Selatan. Sementara gereja-gereja di belahan bumi Utara, khususnya di Eropa, mengalami penurunan jumlah keanggotaan, kehidupan gereja di belahan bumi Selatan justru semarak dan jumlah keanggotaannya terus bertambah. Pergeseran ini juga berkaitan dengan pertumbuhan

gereja-gereja Karismatik dan Pentakosta, terutama gereja-gereja di luar rumpun oikoumenis tradisional.

Lanskap baru ini menantang Dewan Gereja-gereja se-Dunia dan badan-badan oikoumenis lainnya untuk mempertimbangkan kembali karya mereka dan menemukan cara-cara baru yang berhubungan dengan kekristenan, dengan mengakui sifat polisentrisnya. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas Kristen dunia. Istilah “Christian World Communion” (CWCs) menggambarkan gereja-gereja yang terorganisasi secara global atau kelompok-kelompok (rumpun) gereja yang memiliki akar sejarah dan teologi, konfesi, atau struktur yang sama. Sejak tahun 1997, WCC terlibat dalam pembentukan Global Christian Forum (GCF), sebagai sebuah wadah yang menegaskan peran-peran yang berbeda dan saling melengkapi dari berbagai lembaga gerejawi dalam upaya menuju kesatuan Kristen. Dalam beberapa tahun terakhir, CWCs juga mendiskusikan hal ini di kalangan internal dan berpartisipasi dalam proses-proses yang berkaitan dengan ajakan untuk menata ulang gerakan oikoumenis.

Proses pendekatan terhadap lanskap oikoumenis yang lebih luas juga mencakup pembangunan kembali hubungan dengan gerakan Lausanne, yang sebelumnya sangat kritis terhadap WCC dan secara khusus dalam pemahamannya tentang misi. Dalam pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan, saat kongres ketiga Gerakan Lausanne pada 2010, delegasi WCC turut diundang, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Olav Fykse Tveit. Dalam pidatonya, ia berbicara tentang “visi bersama umat Kristiani tentang misi Allah yang holistik”. Ia mengatakan, “Marilah kita tetap membuka jalan, dan terus berdialog, sehingga kita dapat belajar satu sama lain bagaimana kita bersama-sama dapat berpartisipasi dalam misi Allah dengan menghargai yang lain sebagai satu Tubuh Kristus.”

Konsep misi yang holistik sangat penting dalam proses pendekatan ulang ini. Gerakan Lausanne mempertegas pemahamannya akan apa yang disebut sebagai “misi integral”:

Misi integral adalah pewartaan dan demonstrasi Injil. Ini bukan hanya berarti bahwa penginjilan dan keterlibatan sosial harus dilakukan secara bersamaan. Sebaliknya, dalam misi integral, pewartaan kita memiliki konsekuensi-

konsekuensi sosial ketika kita mengajak orang-orang untuk mengasihi dan bertobat dalam seluruh bidang kehidupan.

Dalam banyak hal, pemahaman ini sesuai dengan konsep misi holistik yang dikembangkan dalam gerakan oikoumenis. Perlu dicatat bahwa dokumen hasil pertemuan di Cape Town tidak menggunakan terminologi “diakonia”; dokumen tersebut membahas tentang “pelayanan” tanpa memberikan definisi istilah tersebut secara teologis. Namun, hal yang serupa juga terdapat dalam dokumen *Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes* yang dipersiapkan oleh Commission on World Mission and Evangelism (CWME) untuk Sidang Raya WCC di Busan.

Harus diakui bahwa dokumen ini memang menyebutkan istilah “diakonia” dalam dua konteks, tetapi hanya sebatas permukaan dan tanpa merefleksikan signifikansi teologis dari istilah tersebut. Tampaknya jelas bahwa dialog lebih lanjut akan bermanfaat jika penggunaan istilah diakonia diterapkan secara serius dan manfaat yang terkandung di dalamnya ketika berbicara tentang pelayanan sosial gereja. Refleksi semacam itu juga dapat berkontribusi pada komunikasi dan kerja sama yang lebih baik dalam pelaksanaan diakonia oikoumenis; gerakan oikoumenis, khususnya WCC dan LWF, dalam kerja sama dengan ACT Alliance dapat mengambil peran utama dalam memfasilitasi dialog tersebut.

Istilah “lanskap yang berubah”, seperti yang dibahas dalam Bab 1, mengacu pada proses sosial dan politik global yang kompleks dan saling terkait. Bab 5 akan membahas lebih lanjut tentang hal ini dan menyajikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh gerakan oikoumenis dan secara khusus komitmen diakonalnya. Continuation Committee on Ecumenism in the Twenty-First Century, dalam laporannya kepada Sidang Raya WCC di Busan, menekankan beberapa tren di dunia saat ini yang menantang gerakan oikoumenis, dengan menyatakan:

Diakonia adalah respons langsung terhadap penderitaan yang terjadi di dunia. Diakonia adalah mitra yang selaras dengan misi di abad ke-21. Keadilan terkait dengan diakonia karena diakonia dapat berjalan dengan baik ketika keadilan ditegakkan. Keadilan bergumul dengan isu-isu mendasar yang membutuhkan diakonia. Diakonia tanpa keadilan akan menjadi anemia. Keadilan tanpa diakonia akan menjadi hampa dan bahkan merusak.

Dengan mengingat hal ini, laporan ini mempertahankan sebuah pemahaman yang holistik tentang keberadaan dan misi gereja:

Penyembahan (*latreia*) dan pewartaan (*kerygma*) sangat penting untuk memelihara persekutuan dalam gerakan oikoumenis melalui kasih dan doa. Persekutuan (*koinonia*), kesaksian (*martyria*), dan pelayanan (diakonia) merupakan ruang untuk membentuk interaksi antara berbagai kelompok aktor dalam gerakan oikoumenis. Semuanya merupakan komponen penting yang melekat pada kehidupan gereja.

Seperti yang akan dipaparkan selanjutnya, Sidang Raya di Busan berusaha merespons tantangan-tantangan ini dengan mengundang “umat kristiani dan orang-orang yang berkehendak baik di mana pun untuk bergabung dalam sebuah ziarah keadilan dan perdamaian”. Dengan demikian, sidang raya tersebut mengajak gerakan oikoumenis untuk memulai sebuah perjalanan transformatif yang akan membawa gerakan oikoumenis melampaui struktur dan pandangan tradisional, dengan menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk kesejahteraan gereja-gereja, tetapi juga untuk kesejahteraan dunia, dengan keadilan dan perdamaian sebagai isu utama.

3.2 Diakonia dari Pinggiran

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, perubahan yang signifikan dalam refleksi diakonia selama lima puluh tahun terakhir adalah perhatian yang serius terhadap keadilan sebagai prinsip diakonia. Realitas yang kompleks dari dunia yang terpolarisasi dan terfragmentasi saat ini makin memperkuat desakan bagi para pelaku diakonia untuk melawan dan mentransformasi struktur-struktur yang melanggengkan ketidakadilan, penderitaan, penindasan, dan eksploitasi terhadap manusia dan ciptaan. Diakonia berbasis iman karena identitasnya yang khas, dan dalam pelaksanaannya diakonia juga berkewajiban untuk berbasis hak.

Pendekatan ini dibahas dalam *Conference on Theology of Diakonia for the 21st Century* yang diselenggarakan di Kolombo, Sri Lanka pada Juni 2012, oleh tiga departemen WCC (Keadilan dan Diakonia, Komunitas yang Adil dan

Inklusif, Misi dan Penginjilan). Konferensi ini merupakan bagian dari persiapan Sidang Raya ke-10 WCC di Busan 2013, dan laporannya disertakan dalam Buku Panduan yang dibagikan kepada seluruh delegasi di Sidang Raya Busan.

Konferensi Kolombo menggunakan pendekatan baru dalam merefleksikan diakonia sebagai upaya “untuk mengimajinasikan kembali diakonia dari sudut pandang orang-orang yang, dalam banyak kasus, secara tradisional dianggap sebagai penerima atau objek diakonia gereja-gereja—masyarakat yang rentan dan terpinggirkan”. Menyadari bahwa banyak model diakonia yang ada saat ini dirancang dan dipraktikkan oleh para agen yang berada di belahan bumi Utara, konferensi ini ingin mengeksplorasi sebuah pendekatan alternatif, dengan bertanya, “bagaimana diakonia jika dilihat dari perspektif belahan bumi Selatan yang memiliki dinamika kehidupan yang sangat berbeda”.

Alih-alih menampilkan orang-orang yang terpinggirkan sebagai objek atau kelompok sasaran aksi diakonia, konferensi ini berbicara tentang “diakonia orang-orang yang terpinggirkan”. Di satu sisi, hal ini merujuk pada bagaimana orang-orang yang terpinggirkan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik; di sisi lain, hal ini merujuk pada kisah-kisah Alkitab tentang “perhatian dan kepedulian Allah kepada orang-orang yang berada dalam situasi penindasan dan keterbatasan. Ini adalah diakonia Allah: diakonia pembebasan sekaligus pemulihan martabat, dan memastikan keadilan dan perdamaian”.

Dari perspektif ini, diakonia “merupakan pelayanan yang memungkinkan perayaan kehidupan bagi semua orang. Diakonia adalah iman yang membawa perubahan, mentransformasi orang dan situasi sehingga pemerintahan Allah dapat menjadi nyata dalam kehidupan semua orang, di sini dan saat ini”.

Konferensi Kolombo berfokus pada diakonia sebagai aksi “dari bawah”; pada saat yang sama, konferensi ini menantang organisasi-organisasi oikoumenis untuk mendampingi gereja-gereja lokal, dan untuk “memfasilitasi dialog dengan lembaga-lembaga diakonia internasional untuk meningkatkan pola kerja sama antargereja dan untuk memperkuat akuntabilitas bersama”. Selain itu, konferensi ini memilih untuk menggunakan pengalaman, perspektif, dan visi dari kelompok yang terpinggirkan sebagai titik tolak dalam mengupayakan pola-pola baru dalam praktik diakonia oikoumenis, dengan mempertimbangkan bahwa pusat kekristenan dunia telah bergeser ke negara-negara di belahan bumi

Selatan. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan wawasan dari apa yang sering dianggap sebagai “pinggiran”—kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan—tetapi juga untuk mengakui iman dan keterlibatan diakonia mereka, dan pentingnya peran strategis mereka dalam upaya mentransformasikan diakonia oikoumenis “dari cara-cara yang bersifat menggurui menjadi pendampingan yang sifatnya mendukung”.

Konferensi ini menyoroti beberapa argumen teologis untuk pendekatan ini. Konferensi ini mengulas kesaksian Alkitab yang “mengarah kepada Allah yang selalu hadir dalam pergumulan mereka yang tersisih karena ketidakadilan di dalam masyarakat” dan menempatkan Yesus di antara mereka yang terpinggirkan pada zamannya. “Karena itu, kaum pinggiran merupakan ruang yang istimewa bagi belas kasih dan keadilan Allah dan kehadiran Allah dalam kerentanan dan perlawanan.”

Lebih lanjut, dokumen ini menolak tren untuk melihat kaum pinggiran hanya sebagai kelompok yang hina dan tidak berdaya; sebaliknya, dokumen ini menegaskan perlunya pengakuan atas tuntutan, legitimasi hak-hak dan kekuatan kaum pinggiran untuk mentransformasi dunia. “Mereka melawan ketidakadilan dan penindasan dengan cara mereka sendiri dan melalui perjuangan mereka untuk kehidupan, keadilan, martabat dan hak bagi diri mereka sendiri dan bagi semua orang, mereka menyingkapkan kehadiran dan kuasa Allah dalam hidup mereka.”

Dengan demikian, diakonia dari kaum pinggiran merupakan sebuah kesempatan yang unik bagi diakonia di semua level—lokal, nasional, dan internasional—untuk menegaskan potensinya yang memberdayakan dan transformatif, dan untuk memperbarui keterlibatan gereja-gereja dalam mewujudkan misi Allah bagi dunia. Diakonia mengakui bahwa “setiap komunitas Kristen dalam setiap konteks geo-politik dan sosio-ekonomi dipanggil untuk menjadi komunitas diakonia, bersaksi tentang anugerah Allah yang mengubah melalui berbagai aksi pelayanan yang berpegang teguh pada janji pemerintahan Allah”.

Laporan dari Konferensi Kolombo disimpulkan dengan menunjukkan berbagai tantangan dan kesempatan. Laporan ini menantang jemaat-jemaat lokal untuk “menyadari realitas sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan

dan masyarakat di mana mereka hadir sebagai komunitas diakonia” dan merekomendasikan agar mereka “mengakui dan menegaskan signifikansi teologis dari diakonia melalui penyembahan dan pewartaan”.

Dokumen ini menantang badan-badan gereja yang lebih besar untuk “mendorong, mendukung, dan mendampingi gereja-gereja lokal ketika merespons berbagai masalah mereka dengan mengembangkan dan mengimplementasikan karya diakonia”. Lebih lanjut, dokumen ini menunjukkan pentingnya tugas untuk “mengakui, memperkuat dan mendukung suara-suara kenabian dan gerakan-gerakan yang berjuang untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, keadilan dan hak-hak kelompok-kelompok yang terpinggirkan”. Dalam menyikapi lembaga-lembaga teologi, laporan ini mendorong mereka untuk “memperkenalkan diakonia sebagai sebuah disiplin ilmu” dan untuk “memulai studi dan penelitian lanjutan tentang praktik-praktik diakonia yang relevan”.

Terakhir, laporan ini ditujukan kepada WCC dan organisasi-organisasi internasional yang serupa dan menantang mereka untuk “mengakui diakonia sebagai sebuah ekspresi eklesial yang mendasar, bahwa panggilan utama organisasi-organisasi tersebut tidak hanya untuk melakukan aksi-aksi diakonia tertentu atas nama gereja-gereja, tetapi juga untuk mendukung berbagai gagasan yang dimiliki oleh gereja-gereja. Hal ini juga dapat mencakup pengembangan kapasitas, meningkatkan kemitraan dan penggalangan sumber daya bilamana diperlukan”.

Para agen diakonia oikoumenis makin sadar akan tantangan-tantangan ini dan berusaha untuk menempatkannya sebagai prioritas utama dalam agenda mereka. Sejak “revolusi” kualitas dan akuntabilitas dalam karya pembangunan dan kemanusiaan dimulai, WCC, LWF, dan kemudian ACT Alliance telah memulai karya-karya di sektor kemanusiaan dan pembangunan dengan meningkatkan fokus pada penduduk yang terkena dampak. Hal ini berarti perubahan dalam praktik internal para pegiat diakonia ketika berkomunikasi dan terlibat dengan penduduk yang terkena dampak, mengakui suara mereka dalam desain dan implementasi karya kemanusiaan. Pada 2015, Core Humanitarian Standard (CHS) diluncurkan untuk memfasilitasi tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak krisis. ACT Alliance mengembangkan inisiatif seperti CHS, *Sphere standards* (seperangkat prinsip

dan standar kemanusiaan minimum), dan praktik diakonia berbasis hak yang bertujuan agar masyarakat yang terkena dampak dapat mengetahui apa yang telah menjadi komitmen para pegiat dan memastikan bahwa organisasi-organisasi tersebut bertanggung jawab. Dalam konteks reformasi pendekatan kemanusiaan multilateral dan dalam merancang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030, bersama dengan para anggotanya, aliansi ini menyuarakan fokus yang sama.

Diakonia dari pinggiran juga memiliki konotasi dan dimensi lain bagi persekutuan oikoumenis gereja-gereja, karena hal ini dapat merujuk pada konteks yang lebih luas dari lanskap kekristenan global yang terus berubah.

Sejarah diakonia oikoumenis tidak berhenti pada era misionaris, tidak juga pada pembentukan perangkat-perangkat yang dilembagakan untuk diakonia oikoumenis dan kemunculan ACT Alliance sebagai lembaga yang memayungi secara global. Ini adalah “sejarah kita”, sejarah diakonia yang terorganisasi secara profesional di dalam rumpun gereja-gereja oikoumenis.

Terdapat juga fenomena berkembangnya beberapa jenis gereja baru dalam lanskap kekristenan dunia yang terus berubah, terutama berkembangnya gereja-gereja independen, karismatik, dan Pentakosta. Meskipun perkembangan ini tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang ideal, karena ada banyak aspek yang dipertanyakan dalam keseluruhan prosesnya, dapat dilihat bahwa proses pembelajaran mengenai pelayanan sosial Kristen dan diakonia tidak hanya terjadi pada kekristenan arus utama. Banyak gereja baru yang berlatar belakang karismatik atau independen memiliki sejarah pembelajaran yang berbeda dalam hal diakonia sosial. Hal ini sering kali tidak diungkapkan dalam istilah klasik “bahasa pembangunan”, dan juga tidak didanai atau disokong oleh mitra negara. Sebagian besar dari diakonia sosial ini adalah bantuan sosial informal dan sistem pelayanan sosial dasar yang dilakukan oleh gereja-gereja lokal (bukan oleh lembaga-lembaga). Diakonia dan penginjilan tidak berlawanan dalam pemahaman mereka, tetapi perlu dijaga sebagai satu kesatuan yang utuh. Dimensi spiritual dari pembangunan sama pentingnya dengan dimensi sosial atau materi. Daripada berbicara tentang pembangunan atau diakonia oikoumenis, mereka lebih memilih untuk menggunakan terminologi misi integral, layanan sosial, kerja sosial, dan pelayanan sosial. Sebagai akibatnya, ada sebuah

proses pembaruan yang sedang berlangsung di beberapa gereja Pentakosta, yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “gerakan Injil sosial karismatik” yang menemukan kembali signifikansi sosial dari Injil dan perlunya pelatihan dan profesionalisme dalam pelayanan sosial gereja. Kesempatan belajar dan kepentingan gereja-gereja ini perlu ditanggapi dengan serius. Diakonia dari pinggiran menawarkan potensi baru sekaligus tantangan krusial yang membutuhkan pemikiran teologis yang berkelanjutan.

3.3 Busan 2013

Pada Sidang Raya ke-10 yang diselenggarakan di Busan, Republik Korea, *Ecumenical Conversation 21* mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan diakonia oikoumenis dengan tema “Compelled to Serve: Diakonia and Development in a Rapidly Changing World”. Tujuannya adalah mengundang gereja-gereja dan mitra oikoumenis untuk melakukan analisis yang lebih dalam tentang diakonia dan pembangunan di dunia yang berubah dengan cepat dan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangannya; untuk merefleksikan secara teologis implikasi dari paradigma pembangunan yang berubah, yang di dalamnya gerakan oikoumenis didorong untuk terlibat dan bersaksi serta melayani Allah.

Dalam laporan hasil Percakapan Oikoumenis ini, para peserta menegaskan bahwa gereja-gereja, mitra oikoumenis, dan WCC harus merespons tanda-tanda zaman dengan mengembangkan sebuah bahasa diakonia yang sama. Kita berbasis iman dan berbasis hak dan kita perlu mengidentifikasi apa artinya hal ini dalam praktiknya, termasuk mendefinisikan mandat dan nilai-nilai hakiki kita serta memetakan aset-aset diakonia kita.

Para peserta juga menegaskan peran penting jemaat-jemaat lokal dan mendesak gereja-gereja, mitra oikoumenis, dan WCC untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan jemaat-jemaat lokal dan mendukung karya diakonia di tingkat akar rumput. Selain itu, mereka juga menekankan perlunya merespons: dampak sosial dari ketidakadilan gender, ekonomi, dan iklim melalui jejaring, pengembangan kapasitas untuk analisis kebijakan dan advokasi transnasional dalam rangka mempromosikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

3.4 Diakonia dan Ziarah Keadilan dan Perdamaian

Sidang WCC di Busan pada 2013 menyimpulkan hasil pertemuan dengan sepakat mengundang “umat kristiani dan orang-orang yang berkehendak baik di mana pun untuk bergabung dalam sebuah ziarah keadilan dan perdamaian”. Kata “ziarah” dipilih untuk menegaskan bahwa ini adalah sebuah perjalanan dengan makna spiritual yang dalam dan dengan konotasi teologis. Pada saat yang sama, kata ini menunjukkan pergeseran dari pemahaman yang statis ke pemahaman yang lebih dinamis tentang kesatuan. Hal yang menjadi perhatian bukanlah struktur kelembagaan, melainkan panggilan gereja untuk berpartisipasi dalam misi Allah bagi dunia dengan meneladani Yesus, yang berarti: “bertemu dengan-Nya ketika orang-orang mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan peperangan”.

Pemahaman tentang ziarah sebagai “perjalanan transformatif yang merupakan undangan Allah kepada kita” dengan jelas menegaskan diakonia sebagai praktik sosial yang merespons tanda-tanda zaman. Hal ini berkaitan dengan program kerja WCC dalam hal keadilan ekonomi dan ekologi. Komite Sentral WCC, ketika bertemu di Kreta pada 2012, menyetujui dokumen *Economy of Life* dan *An Ecumenical Call to Just Peace*, dan merekomendasikan pelaksanaan ziarah keadilan dan perdamaian berdasarkan rekomendasi dari kedua dokumen tersebut. Sebagai program prioritas selama tujuh tahun, Ziarah Keadilan dan Perdamaian akan menggabungkan gagasan-gagasan berbasis komunitas dan advokasi nasional dan internasional untuk Keadilan dan Perdamaian, dengan berfokus pada:

- ekonomi yang menghargai kehidupan;
- perubahan iklim;
- pembangunan perdamaian dan rekonsiliasi tanpa kekerasan;
- martabat manusia.

Undangan untuk berziarah ini tidak menggunakan istilah “diakonia”; undangan ini menggunakan kata “pelayanan” sebanyak tiga kali, yang selalu berkaitan dengan misi. Akan tetapi, hal ini dengan jelas mencerminkan sifat diakonia dari menjadi gereja dan menggambarkan janji Allah tentang keadilan

dan perdamaian dengan cara yang menegaskan pentingnya aksi diakonia. Untuk menghubungkan antara diakonia dan ziarah masih menjadi pekerjaan rumah. Diakonia oikoumenis kemudian mendapat manfaat dari partisipasi dalam proses memobilisasi gereja-gereja untuk berziarah; demikian pula, ziarah akan memperoleh kekuatan dan relevansinya ketika dikaitkan dengan keprihatinan dan kegiatan diakonia, dan dengan demikian menghindari penafsiran yang membatasinya hanya sebagai latihan spiritual.

Jemaat-jemaat lokal, sebagai komunitas diakonia dengan karisma dan kekuatannya yang unik, merupakan subjek dari Ziarah Keadilan dan Perdamaian. WCC, bersama dengan mitra-mitra oikoumenisnya, berada dalam posisi yang penting untuk memfasilitasi interaksi yang dinamis antara yang global dan yang lokal, dan untuk memperluas jejaring para peziarah melalui pengakuan dan dukungan, dorongan dan pendampingan terhadap ekspresi diakonia transformatif dan profetis di tingkat lokal.

Ziarah Keadilan dan Perdamaian memperkaya gerakan oikoumenis dan gereja-gereja dengan pengalaman-pengalaman baru tentang solidaritas, berbagi, dan berefleksi bersama melalui pendampingan bersama. Ini adalah praktik-praktik dasar diakonia. Ini adalah cara untuk bergerak bersama ketika berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

3.5 Kesimpulan

Bab ini telah memaparkan bahwa diakonia merupakan bagian dari “meja” yang telah menjadi komitmen WCC untuk “mempersiapkannya” bagi gereja-gereja serta organisasi-organisasi dan komunitas-komunitas lain termasuk persekutuan-persekutuan Kristen sedunia, pelayanan-pelayanan khusus, organisasi-organisasi lintas agama dan gerakan-gerakan sosial. Pernyataan Sidang Raya ke-10 tentang Kesatuan menegaskan pemahaman bahwa pelayanan (diakonia) merupakan bagian integral dari eksistensi dan pengutusan gereja:

Sebagai hamba, Gereja dipanggil untuk menghadirkan rancangan Allah yang kudus, penuh kasih, dan mengukuhkan kehidupan bagi dunia yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Pada dasarnya, gereja bersifat misioner, dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi atas karunia persekutuan yang dikehendaki Allah

bagi seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan di dalam Kerajaan Allah. Dalam karya misi holistiknya—penginjilan dan diakonia yang dilakukan dengan meneladani Kristus—gereja berpartisipasi dalamewartakan karya keselamatan Allah kepada dunia. Dalam kuasa Roh Kudus, gereja memberitakan kabar baik dengan cara-cara yang menggerakkan respons dalam konteks, bahasa, dan budaya yang beragam, untuk mengupayakan keadilan Allah, dan untuk bekerja demi damai sejahtera Allah. Umat Kristen dipanggil untuk sedapat mungkin bekerja sama dengan umat beragama lain atau pun yang tidak beragama, demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan ciptaan.

Panggilan untuk menjadi komunitas diakonia menegaskan bahwa aksi diakonia tidak dapat dibatasi pada upaya pemulihan saja, tetapi juga harus bersifat preventif dan kreatif. Aksi diakonia harus mencakup pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, advokasi melalui percakapan dengan para penguasa, serta pelayanan dan advokasi berkaitan dengan ciptaan. Sebagai advokasi untuk keadilan dan perdamaian, aksi diakonia harus mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, terlibat dalam tindakan transformatif dan profetis, dan mengatasi akar penyebab ketidakadilan yang tertanam dalam sistem dan struktur yang menindas. Sebagai bentuk kepedulian dan advokasi terhadap ciptaan, aksi diakonia harus berusaha membangun persekutuan, khususnya dengan orang-orang dari agama lain, ketika membahas keadilan iklim baik di tingkat global maupun lokal, serta mengedepankan keberlanjutan dan mitigasi.

Ziarah Keadilan dan Perdamaian, yang tujuannya adalah bersama-sama memelihara praktik dan spiritualitas, memberikan sebuah kesempatan yang istimewa untuk memperbaiki diakonia oikoumenis sebagai mandat bersama dalam upaya transformasi untuk keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan.

B A B 4

Refleksi Teologis tentang Diakonia

4.1 Pendahuluan

A da dua pendekatan dasar dalam merefleksikan diakonia: *Pertama*, fokusnya pada praktik diakonia, kegiatan, dan proyek yang dijalankan oleh agen-agen yang memperlihatkan diri dan/atau pelayanan mereka secara diakonal. Bantuan antargereja, pelayanan pengungsi, bantuan kemanusiaan, karya pembangunan, dan advokasi adalah contoh-contoh penting dari praktik diakonia oikoumenis. Bab 2 menjelaskan posisi sentral dari pelayanan-pelayanan tersebut dalam kehidupan gerakan oikoumenis; selain itu, bab ini juga merujuk pada beberapa pertanyaan kritis yang muncul dari praktik diakonia, dan menyatakan bahwa aksi diakonia haruslah bersifat profetis, yang mengedepankan keadilan dan perdamaian.

Pendekatan lainnya bertitik tolak pada dasar biblis dan teologis dari diakonia. Perjanjian Baru menggunakan tiga kata yang dikenal sebagai kata diakonia (*diakonia*, *dia-konein* – kata kerja: ‘melakukan diakonia’, dan *diakonos* – ‘orang yang melakukan diakonia’) kira-kira sebanyak 100 kali. Kata-kata ini

merupakan kata kunci dalam bagian Alkitab yang membahas karakteristik pelayanan Yesus dan bagaimana teladan-Nya menjadi model bagi kehidupan dan pelayanan para pengikut-Nya. Karena itu, kata-kata tersebut memberikan rangsangan yang kuat bagi kita dalam merefleksikan sifat dan misi gereja saat ini. Kata-kata tersebut juga dapat membantu kita untuk menyikapi berbagai pola pemahaman tentang diakonia yang terbentuk dalam konteks Atlantik Utara di masa lalu dan merangsang sebuah pemahaman baru tentang mandat dan peran gereja pada masa kini, khususnya terkait dengan tantangan untuk melihat diakonia dari sudut pandang kaum pinggiran dan memperkuat komitmen profetis serta transformatifnya.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Bab 2 memaparkan bahwa praktik diakonia membutuhkan refleksi teologis; dengan cara yang sama, percakapan teologis mengenai diakonia hanya akan menjadi relevan jika dikaitkan dengan praktik. Hal ini menjadi prinsip yang menuntun kita untuk lebih mencermati beberapa pandangan biblis dan teologis yang mendasari pemahaman diakonia dalam bab ini.

Merefleksikan relevansi yang esensial dan makna biblis dari diakonia sebagai warisan yang paling kuno dan mengikat dalam pelayanan sosial Kristen yang berakar dalam tradisi Alkitab, tidak berarti mengurangi pentingnya tradisi bahasa lain. Hal ini juga tidak menghalangi kita untuk menerapkan kepekaan interkultural dan interdenominasi dalam hal tradisi bahasa yang berbeda yang menggambarkan fenomena serupa tentang komitmen sosial dalam gereja-gereja Kristen. Ada banyak terminologi yang digunakan. Di beberapa wilayah kekristenan, terminologi “diakonia” merupakan terminologi yang baru dan belum banyak digunakan.

Gereja-gereja di Asia sering berbicara tentang pelayanan sosial Kristen, atau pelayanan sosial. Dalam tradisi lain, termasuk dalam beberapa konteks Ortodoks, orang Kristen berbicara tentang “Filantropi Kristiani” atau “Komitmen dan Kepedulian Sosial”. Di tempat lain, bahasa yang digunakan adalah “misi holistik atau integral”. Diakonia tidak hanya menjadi istilah yang dikenal untuk pelayanan sosial Kristen, tetapi juga telah menjadi sebuah merek dalam bidang komersial, sebagai penyedia layanan kristiani, seperti diakonia di Gereja-gereja Protestan, yang bersaing dengan penyedia layanan sosial keagamaan atau

sekuler lainnya. Kita perlu menyadari bahwa orang Kristen menggunakan terminologi yang berbeda dalam konteks mereka saat ini untuk menggambarkan fenomena yang sama, tergantung pada sejarah budaya, politik, dan misi yang berkaitan dengannya. Namun demikian, semua tradisi Kristen memiliki satu tradisi Alkitab yang sama dan dapat dijadikan inspirasi untuk memperdalam pemahaman bersama dan pandangan teologis tentang praktik sosial Kristen yang menghubungkan antara warisan budaya kristiani dan visi mandat dan panggilan diakonia dengan proses pembelajaran dan tantangan kontemporer.

4.2 Referensi Alkitab: Kata-Kata *Diak-*

Kata *diakonia* dalam bahasa Yunani sering diterjemahkan sebagai “pelayanan”, yaitu kepedulian terhadap orang sakit dan orang miskin. Pemahaman ini mencerminkan pandangan gerakan diakonia yang muncul di Jerman pada abad ke-19 dan berbagai jenis pelayanan karitatif yang dikembangkan. Gerakan ini menekankan ketaatan pribadi pada teladan Yesus; yang mengidealkan kerendahan hati dan pemberian diri ketika melayani orang-orang yang membutuhkan.

Penelitian terbaru secara kritis mempertimbangkan pemahaman ini. John N. Collins, peneliti dari Australia, membuktikan bahwa kata *diak-* itu sendiri pada mulanya tidak memiliki konotasi karitatif, atau pelayanan sukarela kepada orang miskin. Dalam bahasa Yunani kuno, *diakonia* lebih berarti ‘penugasan’, atau ‘tugas’, sebagai pembawa pesan atau perantara. Istilah ini tidak menunjukkan jenis kegiatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut, fokusnya adalah pada relasi dengan orang yang dilayani oleh diakonos dan siapa yang memberi wewenang dan instruksi untuk melaksanakannya.

Penggunaan kata-kata *diak-* dalam Perjanjian Baru harus ditafsirkan berdasarkan pemahaman ini. Dalam Injil Markus, Yesus menegaskan bahwa Ia “datang bukan untuk dilayani (*diakonethenai*), melainkan untuk melayani (*diakonesai*) dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Markus 10:45). Hal ini dikatakan Yesus ketika Ia dan murid-murid-Nya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan dua orang dari mereka, yang diliputi kekhawatiran akan apa yang akan terjadi, datang kepada-Nya untuk meminta kedudukan istimewa (10:37). Yesus dengan tegas menolak pandangan

seperti ini dalam pelayanan mesianis-Nya; misi-Nya adalah untuk berjalan di jalan salib, bukan untuk menempuh jalan yang mudah menuju kemuliaan, jalan yang digoda oleh Iblis (Matius 4:1-11).

Yesus menginterpretasikan pelayanan-Nya dengan merujuk kepada Anak Manusia, pembawa pesan yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman (Daniel 7:13), yang menegaskan bahwa Ia datang dari atas. Namun, Ia mengaitkan penglihatan ini dengan tokoh mesianis lainnya dalam Perjanjian Lama, yaitu Hamba Tuhan yang menderita (Yesaya 53). Tidak seperti para penguasa dunia ini, Ia tidak akan mendirikan kerajaan-Nya dengan menggunakan kekuasaan dari atas. Misi-Nya, atau diakonia, adalah berinkarnasi di tengah-tengah realitas manusia, berkeliling, mengajar, “memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit dan segala sengsara di antara bangsa itu” (Matius 4:23). Ini merupakan sebuah pelayanan yang transformatif dan memberdayakan. Namun, para penguasa agama dan politik menganggap pelayanan tersebut sebagai tindakan perlawanan, yang membahayakan tatanan yang sudah mapan, dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk membunuh-Nya. Orang-orang Kristen perdana menafsirkan jalan salib yang ditempuh-Nya, yaitu mengecam ketidakadilan dan menyatakan dalam kata-kata dan perbuatan martabat orang-orang yang tersingkir, sebagai bagian integral dari pelayanan mesianis-Nya. Hal ini menyiratkan bahwa Ia “telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan termasuk dalam golongan pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk para pemberontak” (Yesaya 53:12).

Yesus memanggil murid-murid-Nya untuk mengikut-Nya di jalan salib (Lukas 9:23). “Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikianlah Aku mengutus kamu” (Yohanes 20:21), kata-Nya ketika bertemu dengan mereka setelah kebangkitan. Rasul Paulus mengulangi panggilan ini, dengan mengingatkan para pembacanya untuk “memiliki pola pikir yang sama dengan Kristus Yesus” dalam relasi mereka satu sama lain. Yesus “telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib!” (Filipi 2:5-8).

Ayat-ayat tersebut menekankan dimensi relasional dari misi para murid dan teladan yang ditunjukkan Yesus kepada mereka dalam perkataan dan

perbuatan. Misi tersebut mencakup pewartaan dan aksi, pemberitaan tentang pemerintahan Allah dan praktik pemulihan relasi yang rusak serta menegaskan martabat orang-orang yang terpinggirkan. Dalam istilah masa kini, kita menjelaskannya sebagai misi yang holistik. Tradisi oikoumenis menggunakan istilah *diakonia* untuk mempertahankan dimensi sosial dan profetis dari misi gereja, menegaskannya sebagai bagian intrinsik dari kabar baik yang dibawa Yesus ke dunia (Lukas 4:16–21), sebagai otoritas mesianis (*exousia*) yang memiliki kuasa untuk membangkitkan, mengampuni, merangkul dan memberdayakan (Markus 1:27; Lukas 5:24).

Yohanes 1:12 menegaskan bahwa otoritas Yesus sebagai Mesias membuat semua orang yang menerima-Nya, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, menerima “hak (*exousia*) untuk menjadi anak-anak Allah” (NIV, beberapa penerjemah lain mengartikan “kuasa untuk menjadi”). Narasi dalam Kisah Para Rasul 6:1–6, yang ditafsirkan dalam konteks dokumen ini, menggarisbawahi dimensi diakonal dari pesan tersebut, yang menunjuk pada karunia untuk menjadi bagian dari komunitas. Kisah ini menceritakan tentang sebuah kelompok yang rentan yang diabaikan dalam “diakonia sehari-hari”. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai “distribusi harian makanan” (misalnya terjemahan NRSV), tetapi tidak ada indikasi bahwa ini merujuk pada kegiatan semacam itu. KJV membaca “pelayanan sehari-hari,” yang tampaknya lebih tepat. Dalam hal ini “diakonia” kemungkinan besar mengacu pada bagaimana komunitas mempraktikkan misi mereka sebagai pengikut Yesus, terutama yang berkaitan dengan persekutuan perjamuan makan, sikap inklusif, dan kebiasaan berbagi. Fakta bahwa para janda dengan latar belakang Helenis mengalami pengucilan, bertentangan dengan misi gereja. Oleh karena itu, para rasul memanggil seluruh jemaat untuk membahas masalah ini, mereka menegaskan tanggung jawab mereka untuk “pelayanan firman” (*te diakonia tou logou*), dan mengusulkan sebuah kelompok kepemimpinan baru yang terdiri dari tujuh orang untuk bertugas melayani di meja (*diakonein trapezais*), agar menjamin sebuah praksis yang lebih inklusif dan partisipatoris.

Kisah ini menekankan beberapa isu penting. *Pertama*, kisah ini menunjukkan inklusivitas dan saling berbagi sebagai ciri khas menjadi gereja. Komunitas menghadapi risiko kehilangan identitas kristiani dan diakonalnya jika

membiarkan terjadinya pengucilan; sebagaimana saat ini, isu-isu etnisitas, status sosial, gender, dan usia termasuk di antara isu-isu yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap beberapa kelompok. Dengan demikian, kisah ini menjadi dasar yang penting untuk memahami praktik diakonia sebagai praktik yang berbasis hak. *Kedua*, kisah ini menyatukan “diakonia perawatan” dan “diakonia meja perjamuan” sebagai dua dimensi fundamental dari misi gereja, yang secara alamiah terikat satu sama lain sebagai ekspresi identitasnya, dengan tujuan untuk saling meneguhkan dan memperkuat. *Ketiga*, identitas diakonia membutuhkan penataan dan pengelolaan. Kelompok yang terdiri dari tujuh orang, yang menurut tradisi merupakan diaken pertama, disahkan (ditahbiskan) di hadapan seluruh komunitas ketika mereka mengemban tugas mereka (6:6). *Keempat*, kepemimpinan gereja mencakup kepedulian terkait dengan “diakonia sehari-hari”.

Perlu dicatat bahwa *diakonia* (bahasa Latin: *ministerium*) dipilih sebagai istilah kunci untuk kepemimpinan di dalam gereja. Paulus menggunakan istilah diakonia ketika menegaskan hubungannya dengan Allah Tritunggal yang telah memanggilnya (Kis. 20:24; 2Kor. 3:8; 5:18–20), dan dengan Kristus yang telah memberikan otoritas kepadanya untuk menjadi *diakonos*-Nya (1Kor. 3:5; Ef. 3:7; Kol. 1:25). Bagi Paulus, hal yang paling penting adalah siapa yang telah memberinya *diakonia*-Nya; diakonia bukanlah sebuah pelayanan yang ia ciptakan sendiri, berdasarkan kehendak atau ambisinya sendiri. Ketika melakukan tugas ini, teladannya adalah diakonia Yesus, seperti yang Paulus ingatkan kepada para pembacanya ketika memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan pengumpulan dana untuk orang miskin di Yerusalem. Gerakan ini secara sederhana disebut diakonia (2Kor. 8:4; 9:1,12–13); kesediaan untuk berbagi dengan orang miskin ditunjukkan sebagai cara untuk menguji ketulusan kasih mereka, yang berorientasi pada teladan Yesus.

Dalam beberapa kasus, *diakonos* merujuk pada pelayanan diakonia yang spesifik. Instruksi dalam 1 Timotius 3:8–13 tidak memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh diaken. Instruksi tersebut justru berfokus pada kualitas rohani dan moral, serupa dengan instruksi bagi para penilik jemaat (3:1–7). Tampaknya para penilik jemaat dan diaken bersama-sama menjalankan fungsi kepemimpinan dalam jemaat mula-mula (Flp. 1:1).

Penyebutan diaken Phoebe tampaknya menegaskan hal ini: ia jelas memiliki peran kepemimpinan; tetapi ia memiliki reputasi sebagai “seorang yang berguna bagi banyak orang” (Rm. 16:1-2). Tidak ada indikasi dalam teks-teks Alkitab bahwa diaken hanya melayani orang-orang yang membutuhkan; mereka memiliki peran dalam seluruh pelayanan gereja yang mencakup ibadah dan pemberitaan Injil. Jika kita berpikir bahwa Stefanus dan tujuh orang yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 6 adalah diaken, Lukas menampilkan Stefanus dan Filipus sebagai penginjil.

Pembacaan Perjanjian Baru ini membuat kita memahami diakonia sebagai sebuah amanat untuk memenuhi sebuah tugas atau misi yang penting, lebih khusus lagi, misi Allah di dunia. Dari sudut pandang biblis, kasih Allah dan pengutusan ke dalam dunia adalah awal dari diakonia gereja. Hal ini akan mengarahkan kita pada pembahasan topik berikutnya, yaitu menghubungkan konsep Kristen tentang Allah Tritunggal dengan diakonia sebagai tugas dan pelayanan gereja.

4.3 Diakonia dalam Perspektif Trinitarian

Injil Lukas menceritakan bahwa ketika Yesus dibaptis, langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas-Nya. Sebuah suara terdengar dari surga: “Engkaulah Anak-Ku, yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan” (Lukas 3:21-22). Pada momen penting ini, saat Yesus akan memulai misi-Nya, Bapa surgawi menegaskan pengutusan mesianis Yesus, dan Roh Kudus memampukan-Nya untuk menempuh jalan salib. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal turut berkarya dalam pengutusan Yesus ke dalam dunia.

Hal ini mengungkapkan sebuah pemahaman yang melihat diakonia dalam perspektif trinitarian, dalam pengertian bahwa diakonia berakar dalam iman Kristen kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, kepada Yesus Kristus, Juruselamat dan Pembebas, dan kepada Roh Kudus, Sang Penolong dan Penopang Kehidupan.

Narasi Alkitab tentang penciptaan menyatakan kehendak baik Allah bagi segala sesuatu dan setiap orang yang telah dipanggil Allah ke dalam kehidupan. Penciptaan tidak hanya mengacu pada apa yang Allah lakukan sejak awal,

tetapi juga merupakan sebuah proses yang kontinu (*creatio continua*) untuk memelihara dan memperbarui kehidupan. Dalam kisah-kisah penciptaan, penciptaan manusia memiliki keunikan tersendiri; hanya laki-laki dan perempuan yang diciptakan menurut gambar Allah, yang memungkinkan mereka mengemban panggilan sebagai rekan sekerja Allah dalam memelihara ciptaan. Kata-kata dalam Kejadian 1:28 tentang “menaklukkan” bumi dan “berkuasalah” atas segala makhluk hidup sering kali ditafsirkan sebagai pemberian kuasa ilahi untuk mengeksploitasi alam, dengan cara menempatkan posisi manusia sebagai pusat dan menganggap ciptaan yang lain hanya sebagai objek. Pemahaman seperti ini jelas merupakan sebuah kekeliruan. Dalam konsep penciptaan, manusia bukanlah makhluk otonom yang dibiarkan menentukan nasibnya sendiri dan mengeksploitasi karunia-karunia ciptaan demi kepentingannya sendiri; setiap orang diciptakan untuk berperan sebagai pengurus dan pemelihara ciptaan Tuhan (Kej. 2:15). Perintah untuk “menaklukkan” dan “berkuasa” tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta tentang bagaimana ciptaan dipelihara; konsep diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan demikian mencakup hubungan komunikasi, sebagai mandat dan tanggung jawab.

Istilah kunci dalam bahasa Ibrani untuk peran ini adalah *‘abodah*, yang berarti karya atau pelayanan; yang digunakan dalam Kejadian 2:15. Kata *‘ebed*, hamba, orang yang melakukan *‘abodah*, muncul sebanyak 870 kali dalam Perjanjian Lama. Panggilan bagi bangsa Israel adalah untuk melayani Allah (Kel. 7:16); perjanjian ditetapkan agar umat dapat melayani Allah dan melakukan apa yang benar. *‘ebed-Yahweh*, atau hamba Allah, dinubuatkan sebagai penggenapan dari panggilan ini, sebagai orang yang membawa keadilan dan kedamaian bagi semua bangsa (Yes. 42:1-9). Cukup masuk akal untuk melihat benang merah dari *‘abodah* ke diakonia, dan dari penantian terhadap sosok *‘ebed-Yahweh* ke pelayanan Yesus, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Markus 10:45.

Dengan demikian, aksi diakonia meliputi kepedulian terhadap ciptaan dan komitmen untuk memajukan martabat dan keadilan manusia, dalam solidaritas dengan mereka yang miskin dan terpinggirkan, bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik. Mengingat dampak serius dari perubahan

iklim dan ancaman terhadap ekosistem akibat polusi dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, diakonia harus memprioritaskan penatalayanan ekologis dan terlibat dalam aksi untuk keadilan iklim dan penggunaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Kerja sama antaragama menjadi strategi utama dalam upaya ini, yang menegaskan pesan Alkitab bahwa Sang Pencipta telah memanggil dan memberdayakan setiap manusia, tanpa memandang latar belakang agama dan status sosial, untuk menjadi penatalayan dan pemelihara ciptaan.

Dari perspektif teologis, tindakan tersebut menyatakan, “Bumi dan segala isinya adalah milik TUHAN, dunia serta yang diam di dalamnya” (Mzm. 24:1). Di sisi lain, aksi diakonia juga menyadari realitas kuasa-kuasa jahat, ketidakadilan dan maut yang terus berusaha merusak ciptaan Allah dan memperhamba laki-laki dan perempuan. Panggilan diakonia adalah panggilan untuk melawan kejahatan, mengancam kekuatan-kekuatannya, dan untuk memperjuangkan keadilan, dan bertindak dengan berani sebagai tanda pengharapan—yang didasarkan pada iman kepada Allah Kehidupan yang memberikan masa depan yang penuh harapan (Yer. 29:11). Pengharapan ini merangkul ciptaan yang menderita secara keseluruhan, seperti yang ditegaskan dalam Roma 8:20–21, “ciptaan itu sendiri akan dimerdekan dari perbudakan kebinasaan dan akan dibawa masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan sebagai anak-anak Allah.”

Yesus Kristus adalah inkarnasi sejati dari *‘ebed-Yahweh*. Menurut kesaksian Rasul Petrus, “Allah mengurapi Yesus, orang Nazaret itu, dengan Roh Kudus dan dengan kuasa, dan Ia berjalan berkeliling berbuat kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh Iblis, sebab Allah menyertai Dia” (Kisah Para Rasul 10:38). Yesus menegaskan dimensi profetis ini saat memulai pelayanan-Nya, ketika Ia berbicara kepada komunitas-Nya di Nazaret:

Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh karena Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan (Lukas 4:18–19).

Pelayanan Yesus mengandung beragam unsur yang memengaruhi pandangan teologis tentang diakonia. *Pertama*, pelayanan Yesus menyatakan kehendak dan kehadiran Allah yang penuh kuasa. Misalnya, ketika Petrus menyuruh seorang pengemis yang lumpuh untuk berdiri dan berjalan, ia melakukannya “dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret” (Kisah Para Rasul 3:6). *Kedua*, kehadiran-Nya di tengah-tengah realitas manusia, dengan kepekaan khusus terhadap penderitaan dan orang-orang yang terpinggirkan (Markus 5:25–34; 10:46–52). Oleh karena itu, gereja ditantang untuk peka terhadap situasi yang sama, dan dalam praktik diakonianya untuk memperhatikan suara-suara yang sering kali dibungkam. *Ketiga*, tindakan Yesus bersifat holistik dalam arti bahwa Ia merespons berbagai bentuk penderitaan dan ketidakadilan; hal ini menuntut diakonia untuk peka dan bersentuhan dengan aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual manusia dalam karyanya. *Keempat*, pelayanan Yesus dilakukan di ruang publik (Yohanes 18:20). Di satu sisi, hal ini berarti bahwa setiap orang, khususnya mereka yang miskin dan terpinggirkan, memiliki akses untuk menjangkau Dia dan kasih-Nya yang tulus; di sisi lain, hal ini menyiratkan kritik publik terhadap ideologi yang berlaku yang ditetapkan oleh otoritas agama dan politik. Dengan cara yang sama, diakonia gereja tidak dapat dibatasi pada zona nyaman gerejawi atau struktur kelembagaan, tetapi harus bersifat publik dan melibatkan advokasi dan aksi yang berani dalam berpihak pada mereka yang dipinggirkan. *Kelima*, diakonia dilaksanakan dalam rangka memberitakan pesan kedatangan kerajaan Allah dan karunia-karunia yang diberikan berupa “kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus” (Roma 14:17). Diakonia memberikan kesaksian akan janji yang sama, berbagai aksinya merupakan tanda-tanda dari apa yang diharapkan dan dinantikan oleh orang-orang Kristen di dunia ini.

Menurut Injil Lukas, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan mengurapi-Nya untuk pelayanan-Nya. Dalam perikop Lukas 4, pemberitaan kabar baik kepada orang miskin dihubungkan dengan kisah janda Sarfat (Lukas 4:25–26; 1 Raja-raja 17:7–24), yang hidup dalam krisis kemanusiaan yang memprihatinkan. Lukas beberapa kali kembali kepada tema Yesus yang melayani para janda dan membela hak-hak mereka (Lukas 7:11–17; 18:1–8; 20:45–47; 21:1–4). Demikian juga, kebebasan para tahanan dihubungkan dengan kisah tentang Naaman, yang

menderita kusta (Lukas 4:27; 2 Raja-raja 5:1-19). Meskipun tidak dikurung di dalam penjara, masyarakat telah mengucilkannya dan membuatnya diasingkan. Dalam beberapa peristiwa, Lukas memberitakan tindakan penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap para penderita kusta; Ia mendekati dan menyetujui mereka, serta memulihkan mereka dari stigma yang telah menyebabkan penderitaan yang begitu berat (Lukas 5:12-14; 17:11-19).

Dalam Kisah Para Rasul, Lukas menunjukkan bagaimana Roh yang sama, yang menuntun Yesus kepada orang-orang yang rentan pada zaman-Nya, juga menuntun gereja kepada para janda dan orang-orang yang terpinggirkan (Kisah Para Rasul 6:1-6; 9:36-42). Alih-alih kepada orang-orang yang menderita kusta, Roh Kudus menuntun Petrus dan Paulus kepada kelompok lain yang tidak tersentuh, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Motivasi Lukas ketika menulis kitab ini adalah “supaya kamu dapat mengetahui dengan pasti apa yang telah diajarkan kepadamu” (Lukas 1:4). Ia mengingatkan para pembacanya bahwa Roh Kudus telah menuntun gereja dengan cara-cara yang menakjubkan untuk membawa sukacita, pembebasan, dan rekonsiliasi kepada dunia yang telah rusak. Dengan demikian, mereka didorong untuk membuka diri terhadap panggilan Roh Kudus untuk melayani orang-orang yang sebelumnya tidak mereka pedulikan atau mereka anggap remeh.

Pada hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus memberi kuasa kepada para rasul untuk bersaksi di depan umum tentang “perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah” (Kisah Para Rasul 2:11). Pada kesempatan itu, Petrus mengutip Nabi Yoel, yang memaknai apa yang sedang mereka alami sebagai penggenapan janji Allah: “Dan atas hamba-hamba-Ku, baik laki-laki maupun perempuan, Aku akan mencurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat” (2:18). Penyebutan khusus hamba-hamba, baik laki-laki maupun perempuan, memperlihatkan dengan jelas karakteristik yang membebaskan dan memberdayakan dari karya Roh Kudus; yang mewujudkan kebenaran prinsip yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir (Mat. 20:16).

Dari perspektif ini, diakonia berkomitmen untuk menegaskan martabat dan kuasa orang-orang yang terlibat dalam karya diakonia, terutama mereka yang dianggap miskin dan tidak berdaya. Diakonia yang memberdayakan

berarti memilih praktik-praktik yang memungkinkan orang untuk menjadi subjek dalam proses berkarya demi masa depan yang lebih baik; hal ini dapat dipahami sebagai penerapan diakonia dari karunia Pentakosta yang mengalami “perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah” dalam bahasa sendiri, atau dengan kata lain, berakar pada konteks kehidupan dan karunia-karunia lokal.

Perjanjian Baru menggambarkan Roh Kudus sebagai penasihat dan penuntun ke dalam seluruh kebenaran (Yohanes 16:7–13), sebagai kehadiran Allah yang penuh perhatian dan pengantara di tengah-tengah pergumulan dan kelemahan manusia (Roma 8:26–27). Gambaran-gambaran ini sangat mendasar bagi spiritualitas diakonia, yang memperoleh kekuatannya di dalam pemeliharaan dan kuasa Allah, bahkan ketika hal ini dipahami dari sudut pandang salib (2 Kor. 12:9–10), dan hal ini sejalan dengan doa permohonan yang menjadi tema dari Sidang Raya ke-7 WCC di Canberra tahun 1991: “Come Holy Spirit, Renew The Whole Creation”.

4.4 Diakonia sebagai Bagian Integral dari Eksistensi dan Misi Gereja

Perspektif Trinitarian meletakkan dasar penting untuk memahami sifat diakonia gereja. Melalui pengutusan Yesus dan Roh Kudus, gereja dipanggil dan diutus untuk berpartisipasi dalam misi Allah bagi dunia.

Di dalam gerakan oikoumenis, para teolog Ortodoks memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan pemahaman ini. Laporan dari konsultasi “The Orthodox Approach to Diakonia” (1978) menyatakan:

Diakonia Kristen berakar pada ajaran Injil yang menyatakan bahwa kasih kepada Allah dan sesama merupakan konsekuensi langsung dari iman. Misi diakonia Gereja dan tugas setiap anggotanya untuk melayani berkaitan erat dengan pengertian Gereja dan bersumber dari teladan pengorbanan Tuhan kita, Imam Besar kita, yang, sesuai dengan kehendak Bapa, “datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Matius 20:28).

Pandangan ini tidak hanya mempertahankan relasi yang erat antara misi diakonia Yesus dan diakonia gereja, tetapi juga memperkuatnya—yang mengarah pada hubungan yang hidup antara liturgi dan diakonia, atau seperti yang dirumuskan dalam laporan bahwa diakonia Kristen “mengalir dari liturgi Ilahi”, diakonia adalah “liturgi pasca-Liturgi”.

Sidang Vancouver (1983) sangat dipengaruhi oleh “visi ekaristi” ini dan menegaskan bahwa diakonia adalah “pelayanan gereja untuk berbagi, memulihkan, dan rekonsiliasi adalah sifat dasar gereja”. Ketika orang-orang Kristen mengalami karunia-karunia yang penuh kasih karunia untuk berbagi, memulihkan, dan rekonsiliasi di meja Tuhan, mereka ditugaskan untuk menjalani gaya hidup dan praktik-praktik yang membawa karunia-karunia tersebut kepada dunia. Dengan kata lain, diakonia di dalam dunia “berakar dalam iman dan dipelihara melalui ekaristi”.

Dalam berbagai aspek, hal ini sesuai dengan ungkapan “melayani di meja” dalam Kisah Para Rasul 6:2. Diakonia adalah sebuah perwujudan nyata dari relasi antara keberadaan dan apa yang dilakukan oleh gereja.

Salah satu konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa diakonia tidak dapat menjadi sebuah aktivitas opsional dalam kehidupan gereja; diakonia adalah bagian intrinsik dari keberadaannya. Hal ini mengacu pada narasi penghakiman terakhir (Matius 25:31–46) yang menjelaskan “dalam hal ini” diakonia “sebagai sebuah penghakiman atas sejarah kita”.

Wawasan penting lainnya dari Konsultasi Ortodoks tahun 1978 adalah bahwa diakonia adalah “sebuah ungkapan kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus”. Karena setiap jemaat lokal adalah gereja dalam arti yang sesungguhnya ketika merayakan imannya, mereka juga diberi karunia penuh untuk mewujudkan mandat diakonia gereja. Karya oikoumenis didasarkan pada pengakuan atas jemaat lokal sebagai bagian yang fundamental dari tubuh gereja; dengan cara yang sama, diakonia oikoumenis harus mengakui karunia-karunia diakonia dan kapasitas gereja lokal dan mengupayakan kesatuan gereja.

Pemahaman ini tertanam dalam pemahaman tentang gereja secara sakramental, yang melihat gereja sebagai tanda dan pelayan dari rancangan Allah bagi dunia. Pemahaman ini menentang berbagai pandangan yang membatasi gereja dengan batasan-batasan sosial dan religiusnya, dan dengan demikian

sejalan dengan gagasan “gereja misional”. Risikonya adalah bahwa gambaran tentang gereja yang ideal dapat menghalangi pengamatan kritis tentang bagaimana gereja pada kenyataannya tampil sebagai sebuah lembaga sosial dan menjalankan mandat diakonianya. Makna *sacramentum* (bahasa Yunani: *mysterion*) menunjukkan adanya simultanitas antara karya Ilahi dan karya manusia dan harus mencakup kesadaran akan kelemahan manusia dan kebutuhan akan suara-suara kenabian yang mempertanyakan sikap dan praktik-praktik yang tidak tepat di dalam gereja.

Dengan pemikiran semacam ini, dapat dimengerti jika penggunaan istilah diakonia terbatas pada pelayanan kepedulian gereja dan orang-orang Kristen; istilah ini mengekspresikan keistimewaan dari tindakan yang didasarkan pada iman. Pada saat yang sama, penting untuk mengakui bahwa tidak hanya orang Kristen yang melakukan perbuatan baik; semua manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberdayakan untuk mengasahi dan memperjuangkan keadilan. Banyak dari mereka yang memiliki komitmen yang lebih besar daripada orang Kristen, sebagian dari mereka adalah orang-orang dari agama lain, sebagian lagi tidak beragama. Oleh karena itu, dalam aksi diakonia yang konkret, cukup masuk akal untuk bekerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik, dan mempromosikan jejaring solidaritas dan aksi bersama.

4.5 Diakonia sebagai Pemuridan

Dimensi eklesial diakonia mengandung pengertian bahwa setiap orang Kristen memiliki kewajiban untuk melayani. Hal ini sesuai dengan amanat agung untuk mengasahi Allah dan “sesama manusia seperti diri sendiri” (Matius 22:37-39) dan sejalan dengan ajakan Yesus untuk mengikuti-Nya. Hal ini menyiratkan sebuah gaya hidup yang peduli kepada orang lain, seperti yang diungkapkan dalam pengutusan para murid (Matius 28:20): untuk menjadikan mereka murid termasuk “mengajar mereka untuk taat pada segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu”.

Mengacu pada Yohanes 12:26, Yesus menghubungkan diakonia dan pemuridan: “Barangsiapa melayani (*diakone*) Aku, ia harus mengikut Aku, dan di mana Aku berada, di situ juga hamba-Ku (*diakonos*) berada.” Ungkapan “di

mana Aku berada” mengacu pada pengutusan Yesus ke dalam dunia dan pelayanan pemulihan yang dilakukan. Relasi dengan Yesus adalah sebuah anugerah sekaligus tugas; pengutusan-Nya juga merupakan pengutusan para murid ke dalam dunia, dengan janji pemeliharaan dan berkat Allah: “Barangsiapa melayani (*diakone*) Aku, ia akan dihormati oleh Bapa” (12:26b).

Kisah tentang Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya (Yohanes 13) menegaskan dualitas antara anugerah dan tugas dalam kemuridan diakonia, meskipun istilah *diak-* tidak digunakan dalam ayat ini. Perkataan Yesus, “Jikalau Aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam Aku” (13:8), menyatakan bahwa hanya dengan mengizinkan Yesus untuk melayaninya, Petrus dimasukkan ke dalam komunitas para pengikut-Nya. Ketika hal ini dapat dipahami dengan baik, maka perintah selanjutnya adalah, “Jadi jikalau Aku, yang adalah Tuhan dan Gurumu, telah membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu” (13:14-15).

Terdapat alasan yang kuat untuk membaca kisah ini sebagai rujukan terhadap ekaristi, karena Yohanes menempatkannya dalam bagian yang sama dengan Injil-Injil lain yang menceritakan tentang perjamuan terakhir. Hal ini sejalan dengan cara melihat diakonia sebagai “liturgi pasca Liturgi”, seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini juga sesuai dengan narasi Lukas tentang perjamuan terakhir; ketika para murid mulai mempercakapkan siapa yang dianggap paling besar di antara mereka, Yesus merespons dengan berkata: “Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka; dan orang-orang yang berkuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, dan pemimpin sebagai seorang pelayan (*hos o diakonon*). Sebab siapakah yang lebih besar, yang ada di meja makan atau seorang pelayan? Bukankah dia yang di meja makan? Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai seorang pelayan” (Lukas 22:25-27). Ungkapan “seorang pelayan” muncul sebanyak tiga kali di sini, mengacu pada pelayanan yang Yesus lakukan dengan cara yang khas, dan kemudian pada teladan yang perlu diikuti oleh para murid-Nya.

Kisah Yesus membasuh kaki para murid juga mengacu kepada baptisan, sakramen yang menyatukan orang percaya ke dalam tubuh Kristus dan dengan demikian mewujudkan relasi kasih dan kepedulian di dalam komunitas orang percaya. Cukup masuk akal untuk melihat baptisan sebagai penahbisan “diakoniat semua orang percaya”; mengacu pada tradisi kuno di dalam gereja, diaken memberikan sebuah lilin kepada orang yang baru dibaptis, sebagai sebuah pengingat akan panggilan untuk menjadi terang di dalam dunia (Matius 5:14-16). Baptisan tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang terpisah, atau hanya sebuah ritus peralihan. Sebaliknya, baptisan adalah sebuah tindakan pembaruan, baptisan mengumandangkan kebaruan hidup dalam diri orang yang dibaptis dan diberdayakan untuk melayani. Dokumen *Baptism, Eucharist, and Ministry* menekankan hal ini, yang menyatakan: “Allah menganugerahkan kepada semua orang yang dibaptis urapan dan janji Roh Kudus, memeteraikan mereka dan menanamkan di dalam hati mereka bagian yang mereka miliki sebagai putra-putri Allah. Roh Kudus memelihara kehidupan iman di dalam hati mereka hingga pada hari pembebasan ketika mereka akan memperoleh seluruhnya, untuk memuji kemuliaan Allah (2 Korintus 1:21-22; Efesus 1:13-14).”

Pada masa reformasi Lutheran, Martin Luther menekankan bahwa Allah memanggil orang Kristen untuk mewujudkan panggilan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, lingkungan, dan tempat kerja mereka, dan menolak pemahaman bahwa pemuridan mengharuskan mereka untuk bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan atau melakukan pelayanan keagamaan. Relasi dengan Kristus memberikan kebebasan penuh sebagai anak Allah; pada saat yang sama, hal ini mengisyaratkan panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam relasi dengan sesama. Hal ini sesuai dengan tradisi Ortodoks yang memandang pemuridan sebagai panggilan untuk menjadi “pembawa Kristus” (bahasa Yunani: *Christóforos*), yang berinkarnasi di dalam dunia sebagaimana Kristus berinkarnasi.

Pemuridan Kristen mengalami kasih karunia Allah dalam kedua relasi—kepada Allah dan kepada sesama—yang keduanya mengekspresikan kebaruan hidup di dalam Kristus. John Wesley, pendiri gereja Metodis, menggunakan istilah “kekudusan” ketika menyatakan bahwa keselamatan membutuhkan pembaruan baik bagi individu maupun dunia. Konversi dan pertobatan harus

disertai dengan “buah-buah yang sesuai dengan pertobatan” (Matius 3:8), tegasnya. Bagi kalangan Metodis dan gereja-gereja lain dalam tradisi ini, “kekudusan hati dan hidup” tetap merupakan panggilan untuk “karya-karya kesalehan” dan “karya-karya belas kasihan”. “Kasih kita kepada Allah selalu terkait dengan kasih kepada sesama, semangat untuk keadilan dan pembaruan dalam kehidupan dunia.”

Dalam sejarah gereja, diakonia selalu mengaitkan kasih kepada sesama dengan semangat untuk memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan. Dalam dunia kekristenan umum dipahami bahwa hal ini memiliki beragam bentuk yang saling melengkapi dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lain. Dimensi-dimensi yang berbeda dari mandat untuk gereja yang diakonal dan pemuridan yang diakonal ini tidak sepenuhnya sama di semua keadaan, tetapi tergantung pada konteks budaya, politik dan kelembagaan dari gereja-gereja yang beragam. Namun demikian, beragam dimensi dan bentuk pelayanan diakonia berikut ini dapat ditemukan dan diakui oleh mayoritas gereja-gereja di seluruh dunia—meskipun dengan tingkat profesionalitas dan kelembagaan yang berbeda:

- Diakonia sosial sebagai aksi individu untuk peduli, pemulihan, dan rekonsiliasi di dalam gereja atau komunitas lokal;
- Diakonia sebagai pendampingan secara formal bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan mereka yang menderita, oleh gereja atau lembaga-lembaga khusus diakonia;
- Diakonia sebagai karya komunitas dan pemberdayaan untuk memperkuat persaudaraan;
- Diakonia transformatif atau politis, yang mencakup upaya-upaya untuk mentransformasi kondisi-kondisi kehidupan dan sistem politik yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik, yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan advokasi dan lobi atas nama mereka yang menderita.
- Diakonia profetis, yang menanggapi masalah ketimpangan kekuasaan, akses, dan partisipasi dalam masyarakat, menyuarakan kebenaran pada penguasa, dan mengancam ketidakadilan struktural;

- Diakonia ekologis yang membahas isu-isu mendasar tentang pelestarian alam dan keadilan iklim.

Tujuan utama dari dialog oikoumenis tentang diakonia adalah untuk memungkinkan gereja-gereja agar dapat saling belajar satu sama lain dan dari berbagai fokus serta bentuk pelayanan diakonia mereka, agar dapat mengembangkan sebuah pemahaman yang komprehensif dan konsep yang luas tentang diakonia, sambil tetap memperhatikan konteks lokal dan kondisi kehidupan masing-masing.

4.6 Diakonia dan Pewartaan

Sebagai bagian integral dari misi gereja, diakonia memiliki makna tersendiri; aksi diakonia bertujuan untuk melayani sesama yang membutuhkan dan tidak boleh dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya merekrut anggota baru bagi gereja. Gerakan oikoumenis dengan tegas meninggalkan proselitisme dan menyerukan adanya relasi yang bertanggung jawab dalam misi. Ditegaskan bahwa praktik pemberian bantuan kemanusiaan atau kesempatan pendidikan sebagai sebuah ajakan untuk bergabung dengan gereja lain adalah contoh aksi yang tidak bertanggung jawab.

ACT Alliance, dalam dokumen pembentukannya dengan jelas menyatakan misi dan komitmennya yang berbasis keagamaan untuk “mengutamakan peran gereja-gereja lokal dan pelayanan mereka dalam merespons kebutuhan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat lokal,” serta memasukkan dalam *Code of Good Practice* suatu pernyataan non-propaganda. Ditegaskan bahwa “ACT Alliance tidak menggunakan bantuan kemanusiaan atau pembangunan atau program advokasi untuk kepentingan agama atau politik partisan tertentu”.

Hal ini berarti bahwa ACT Alliance dan para anggotanya:

- Menolak penggunaan bantuan apa pun, baik untuk individu atau komunitas, yang bertujuan untuk kepentingan agama atau politik partisan;
- Menolak penggunaan program-program mereka untuk kepentingan agama atau politik partisan;

- Menolak penggunaan cara-cara yang bersifat manipulatif, pemaksaan, kekerasan, atau eksploitasi atas ketidakberdayaan masyarakat untuk kepentingan agama atau politik partisan;
- Jujur dan transparan dengan identitas dan motivasinya ketika dipertanyakan dan memberikan informasi tentang tujuan organisasi dan programnya jika diminta;
- Meningkatkan keterlibatan dan program-programnya, jika dibutuhkan, dengan toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan perlindungan bagi mereka yang hak asasi manusianya dilanggar.

Ada banyak alasan eksternal di balik penetapan posisi yang tegas ini. Organisasi berbasis keagamaan sering kali dicurigai saat melakukan kegiatan di wilayah yang penduduknya beragama lain; khususnya, bagi lembaga-lembaga Kristen yang berkarya di negara-negara Muslim. Masalahnya tidak hanya menyangkut kepercayaan masyarakat dan aksesibilitas, tetapi juga keamanan para relawan.

Namun, yang tidak kalah penting adalah berbagai argumentasi internal. Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa Yesus membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa syarat. Ia tidak mengharuskan mereka untuk menjadi murid-Nya. Tindakan pemulihan dan kepedulian-Nya merupakan anugerah yang penuh kasih karunia; tindakan tersebut mengekspresikan kasih Allah yang bebas dan tanpa syarat untuk memulihkan martabat manusia; seperti yang ditegaskan oleh Yesus saat mengutus para murid-Nya untuk melakukan pelayanan kesembuhan: “Dengan cuma-cuma kamu telah menerima, dengan cuma-cuma pula kamu memberi” (Mat. 10:8). Dengan cara yang sama, aksi diakonia haruslah tanpa syarat dan tidak boleh direduksi menjadi sebuah agenda, baik yang terbuka maupun yang terselubung, untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik yang bersifat religius maupun politis.

Aksi diakonia biasanya menyiratkan praktik kekuasaan, baik secara struktural maupun personal, dan sering kali dalam hubungan yang asimetris. Ketika bertemu dengan orang-orang yang berada dalam situasi kehidupan yang rentan, selalu ada risiko penyalahgunaan kekuasaan, khususnya kekuasaan

keagamaan. Para pelaku diakonia harus peka terhadap risiko ini dan melindungi martabat dan integritas orang-orang yang mereka layani.

Di sisi lain, ada sebuah fakta bahwa semua keterlibatan sosial, termasuk karya pembangunan sekuler, menyiratkan adanya praktik kekuasaan dan penyebaran opini dan sistem nilai. Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran akan fakta yang tidak dapat disangkal ini. Persoalan lainnya adalah bagaimana mengembangkan literasi keagamaan di antara para pelaku pembangunan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi profesional mereka. Bagi para pelaku diakonia, hal ini berarti menghidupkan identitas diri dengan cara meningkatkan kemampuan untuk bertanggung jawab ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua yang terlibat. Bab 6 akan membahas hal ini lebih lanjut.

Oleh karena itu, diakonia tidak bisa berdiam diri ketika berhadapan dengan isu-isu agama atau ideologi. Prinsip ACT Alliance yang disebutkan di atas—untuk “jujur dan transparan mengenai identitas dan motivasi mereka ketika dipertanyakan”—mengisyaratkan sebuah sikap yang proaktif. Hal ini juga tidak berarti mengharapakan bahwa tidak akan ada yang bertanya. Wajar saja apabila aksi diakonia memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait motivasi dan tujuan. Oleh karena itu, dialog yang terjadi setelah aksi haruslah jujur dan transparan. Para pelaku diakonia harus siap menghadapi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari pelayanan mereka. Dalam beberapa kasus, orang-orang akan merespons aksi diakonia dengan simpati dan ingin mengetahui lebih baik tentang keyakinan yang memotivasi aksi tersebut. Dalam kasus-kasus lainnya, orang-orang akan curiga. Dalam kasus-kasus ekstrem, mereka mungkin bereaksi dengan kekerasan untuk menghentikan aksi tersebut. Demikianlah yang terjadi sejak zaman gereja mula-mula: diakonia gereja menimbulkan kekaguman sekaligus penolakan. Diakonia meyakinkan sejumlah orang untuk mengikuti iman Kristen, sementara yang lainnya bersikap skeptis atau menentang.

Dalam perspektif teologis, diakonia turut menyuarakan pewartaan kosmik tentang pemerintahan dan kehendak baik Allah bagi seluruh ciptaan: “Langit memberitakan kemuliaan Allah, dan langit memberitakan perbuatan tangannya” (Mzm. 19:1). Diakonia berpusat pada *martyria* dalam pengertian diakonia

bersaksi tentang iman kepada Allah Kehidupan dan menjawab panggilan untuk melayani Tuhan, dengan menyadari bahwa kesaksian ini dapat memicu perlawanan dan mengarah pada kemartiran. Meskipun demikian, kesaksian ini selalu bertujuan untuk memunculkan tanda-tanda pengharapan yang memberitakan pemerintahan (kerajaan) Allah yang akan datang, dengan janji akan keadilan dan perdamaian. Cara orang menafsirkan tanda-tanda ini merupakan sebuah kebebasan. Pewartaan dengan tujuan untuk meyakinkan orang agar mengubah iman mereka bukanlah bagian dari mandat diakonia.

Oleh karena itu, diakonia harus selalu siap memberikan penjelasan mengenai iman, visi dan sistem nilai yang dianutnya. Mengakui bahwa aksi berbasis iman dapat disalahartikan, diakonia harus dapat menjelaskan hakikat identitasnya yang khas dan kode etik yang menjadi landasannya.

Patut dicatat bahwa pada 2019, lembaga Jerman bernama Diakonie Deutschland dilibatkan dalam percakapan nasional tentang penguatan profil diakonia, dengan menekankan karakter kristiani dalam penyelenggaraan pelayanannya.

4.7 Kesimpulan

Bab ini menganalisis pemahaman tentang diakonia dari perspektif teologis. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang penggunaan kata-kata *diak-* dalam Perjanjian Baru, dan pertanyaan tentang bagaimana menerjemahkan dan menafsirkan kata-kata tersebut pada masa kini, khususnya dalam kaitannya dengan cara gereja-gereja saat ini menerapkan istilah diakonia sebagai praksis sosial Kristen. Bab ini juga menekankan dimensi profetis dari diakonia yang terkandung dalam pelayanan Yesus dan panggilan bagi para pengikut-Nya.

Pemahaman Alkitab menggarisbawahi bahwa diakonia memiliki konotasi kristologis yang kuat. Selain itu, Alkitab memberikan informasi mengenai pemahaman akan hakikat dan misi gereja. Dengan demikian, diakonia menghubungkan iman Kristen dengan Allah Tritunggal, dan dengan panggilan untuk berpartisipasi dalam misi Allah bagi dunia. Allah Sang Pencipta memanggil semua manusia, umat Kristen, dan semua orang yang berkehendak baik, untuk menjadi penatalayan ciptaan dan memperjuangkan martabat, keadilan,

dan perdamaian. Yesus Kristus, Juruselamat dan Pembebas, memberikan kepada para murid sebuah peran dalam pengutusan-Nya ke dunia dengan mandat untuk memulihkan, merangkul, dan memberdayakan (Yohanes 20:21). Roh Kudus, Sang Pemberi Kehidupan, menguatkan misi ini, memperlengkapi umat Allah sehingga mereka memiliki energi yang dibutuhkan dan kebijaksanaan untuk melayani sebagai agen perubahan.

Diakonia, dengan demikian, terbukti menjadi istilah biblis dan teologis yang penting, yang mengungkapkan wawasan mendasar yang dimiliki oleh komunitas oikoumenis, seperti yang dinyatakan oleh mantan Moderator WCC, His Holiness Aram Keshishian, dalam *Catholicos of the Great House of Cilicia*:

Diakonia adalah bagian dari hakikat gereja. Berada dalam persekutuan dengan Kristus berarti mengasihi sesama, bersama mereka yang sakit dan menderita. Ini tidak hanya menjadi “kewajiban moral” gereja, tetapi juga merupakan elemen konstitutifnya. Gereja tidak “memiliki” sebuah diakonia; gereja adalah diakonia, yaitu sebuah pemuridan yang terus-menerus dan berkomitmen kepada Kristus untuk membangun kembali komunitas dunia dan memperbaiki dunia yang telah rusak sesuai dengan rencana Allah. Melalui diakonia, gereja menjadi satu dengan Kristus dan pada saat yang sama menghadirkan Kristus ke dalam dunia. Diakonia adalah ekspresi kesatuan gereja dan implementasi dari pesan Injil.

Sebagai sebuah konsep teologis, diakonia menawarkan manfaat potensial dari penambahan perspektif baru dalam proses refleksi dan pembaruan yang sedang berlangsung dalam gerakan oikoumenis, khususnya dalam memahami untuk menjadi apa gereja dipanggil dan apa yang harus dilakukan bersama oleh gereja-gereja di dunia saat ini.

B A B 5

Perubahan Lanskap Aksi Diakonia

5.1 Pendahuluan

Pada Januari 2013, Komite Eksekutif ACT mengadopsi sebuah makalah berjudul *The Changing Development Paradigm*. Makalah ini menunjukkan beberapa perubahan mendasar dalam konteks pembangunan global. Sebagian besar dari perubahan tersebut berkaitan dengan proses globalisasi, yang digambarkan sebagai “cakupan yang makin luas, dampak yang makin dalam, dan percepatan arus dan interaksi antarwilayah dalam semua bidang kehidupan sosial, mulai dari ekonomi hingga ekologi, dari kultural hingga kriminal”. Makalah ini juga mengakui adanya perubahan mendasar terkait pemahaman tentang pembangunan dan meningkatnya skeptisisme terhadap konsep-konsep tradisional tentang bantuan. Makalah ini juga merefleksikan tentang dunia dengan masalah global yang makin banyak dan pada saat yang sama hanya sedikit perangkat global yang tersedia untuk menyelesaikannya.

Bab ini berusaha menyajikan beberapa elemen utama yang membenarkan deskripsi tentang “lanskap” tersebut sebagai sebuah paradigma yang sedang

berubah. Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang beberapa dampak globalisasi dan bentuk-bentuk baru kemiskinan yang ditimbulkan. Selanjutnya, dipaparkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai sebuah platform baru bagi kerja sama internasional, yang didasarkan pada keyakinan bahwa platform tersebut berisi agenda yang relevan bagi diakonia oikoumenis untuk memperbarui komitmen dan mengidentifikasi beragam bentuk dan area yang baru untuk aksi diakonia.

Bagi diakonia oikoumenis, paradigma baru ini menyiratkan sebuah kesadaran akan pergeseran dari konsep bantuan menjadi konsep keadilan, baik dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia saat ini maupun dalam menerapkan aksinya. Bagian kedua dari bab ini akan menyajikan beberapa perhatian utama dalam proses pergeseran dari bantuan pembangunan menuju praktik-praktik transformatif menuju keadilan, dengan fokus pada keadilan ekonomi, keadilan ekologis, keadilan gender, dan keadilan kesehatan.

5.2 Wajah-Wajah Baru Kemiskinan di Dunia Saat Ini

Globalisasi menyatukan dunia. Globalisasi adalah sebuah proses yang jelas memiliki banyak dampak positif, tetapi pada saat yang sama juga menyebabkan kesenjangan baru, terutama antara golongan yang kaya dan golongan yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu dampak serius dari globalisasi adalah bagaimana kekuatan ekonomi dan politik saat ini dijalankan, yang menyingkirkan peran otoritas lokal, nasional, dan internasional, serta mengikis legitimasi demokratisnya. Lebih dari itu, lembaga transnasional yang tidak perlu mempertanggungjawabkan cara mereka bertindak terus memperluas kekuasaan mereka.

Bagi para agen yang terlibat dalam karya pembangunan, termasuk para pelaku diakonia oikoumenis, hal ini berarti pergeseran dari konsep bantuan secara tradisional menjadi konsep perjuangan untuk keadilan. Wajah kemiskinan telah berubah; yang baru adalah bahwa kemiskinan yang meluas justru terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah. Dalam banyak kasus, kemiskinan yang terus meningkat merupakan hasil dari buruknya manajemen

politik, korupsi, peperangan, dan perubahan iklim, dan bukan karena kurangnya pembangunan.

Lebih dari satu miliar laki-laki, perempuan, dan anak-anak terus terbelenggu oleh kemiskinan. Dalam dua dekade terakhir, dunia mencapai kemajuan luar biasa dalam mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Tokoh-tokoh internasional memperkirakan bahwa kemiskinan ekstrem dapat dientaskan pada 2030. Namun, tugas untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem membutuhkan komitmen dari komunitas internasional dan kemauan untuk mengatasi penyebab utama kemiskinan. Upaya ini juga mencakup perubahan kebiasaan yang menyebabkan kemiskinan: keserakahan dan pemborosan, ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain, serta eksploitasi manusia dan alam. Hal ini ditegaskan oleh Bank Dunia melalui inisiatifnya tentang “Mengakhiri Kemiskinan Ekstrem: Sebuah Keharusan Moral dan Spiritual”, yang melibatkan WCC, bersama para pemimpin dari berbagai tradisi religius.

Sektor masyarakat sipil yang kuat memegang peranan penting dalam upaya ini. Sektor ini akan memobilisasi dan mengorganisasi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai hal yang penting bagi kehidupan mereka, serta mengupayakan keadilan bagi semua. Mereka mewakili struktur kekuasaan horizontal dalam masyarakat, yang mengimbangi kekuasaan vertikal dari elite kekuasaan. Di banyak tempat, komunitas-komunitas agama dan agen-agen diakonia dengan sadar mengambil peran sebagai agen di dalam masyarakat sipil, yang berusaha membangun kewarganegaraan yang aktif, dan terlibat dalam jejaring yang memperjuangkan masyarakat yang adil, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sistem PBB dan banyak negara mengakui pentingnya organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSOs*) dan pembela hak asasi manusia (*human rights defenders/HRDs*), khususnya peran mereka dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Di sejumlah negara, ruang gerak warga negara dan masyarakat sipil dibatasi dan terancam. Berbagai laporan menyebutkan adanya penahanan sewenang-wenang, bahkan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para tokoh masyarakat sipil; pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mempersulit kegiatan LSM internasional. Hal ini juga berdampak kepada para aktor berbasis iman. Di salah satu negara di mana

beberapa anggota ACT Alliance berkiprah, 17 organisasi harus mengubah orientasi mereka dan tidak memasukkan isu-isu hak asasi manusia ke dalam program-program mereka karena dibatasi oleh undang-undang LSM yang ada.

Pada saat laporan tentang terorisme dan peperangan sering mendominasi pemberitaan, isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat miskin di dunia kurang mendapat perhatian. Banyak pemerintah mengalihkan dana ODA (*official development assistance*) yang semula berupa bantuan pembangunan menjadi bantuan kemanusiaan di daerah yang sedang berkonflik. Dalam beberapa kasus, hal semacam ini tampak lebih merupakan sebuah masalah kepentingan politik dan ekonomi masing-masing daripada mendorong perubahan dan kebaikan bersama.

Dalam persiapan untuk *World Humanitarian Summit* (WHS) pada 2016, ACT Alliance menyampaikan visinya tentang sistem kemanusiaan di dunia yang “mengalami risiko bencana yang lebih besar dan makin meningkatnya jumlah konflik karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, pesatnya urbanisasi, kemiskinan, kerusakan ekosistem, dan berkurangnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan Hukum Kemanusiaan Internasional”. Dengan penekanan yang kuat pada penempatan manusia sebagai pusat, sistem ini membayangkan “pendekatan dari bawah ke atas, di mana masyarakat yang berdaya lenting menentukan kebutuhan mereka sendiri dan para aktor lokal (termasuk orang-orang yang berisiko) memegang kendali atas respons”.

Visi ini mengakui peran yang berbeda dari komunitas keagamaan dan para pemuka agama dalam mengupayakan dunia yang lebih baik. Berdasarkan pengalaman di lapangan, ACT Alliance mengusulkan agar berbagai organisasi berbasis iman (FBOs) yang bekerja sama dengan komunitas lokal dapat menggunakan kekuatan yang khas—kekuatan yang menyatukan dan memulihkan dari keyakinan bersama—untuk mewujudkan ketahanan terhadap bencana. Pada saat yang sama, disadari pula bahwa tradisi keagamaan dapat disalahgunakan untuk menciptakan kebencian dan kecurigaan, dan dalam beberapa konteks tradisi tersebut menolak perubahan dan menghambat penegakan hak asasi dan kebebasan.

Menyediakan ruang yang aman bagi orang-orang dari berbagai tradisi keagamaan untuk bertemu dan bekerja sama demi kesejahteraan semua orang

dapat membantu mengurangi rasa saling curiga dan menjadi sarana untuk mengatasi konflik. Untuk alasan ini, diakonia internasional memasukkan “*diapraxis*” ke dalam agendanya (bdk. Bab 7.6); ini masih menjadi tugas penting dalam mengembangkan strategi dan metode lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas di dalam bidang ini.

5.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Lingkup Sosial-Politik bagi Diakonia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*The Sustainable Development Goals/SDGs*)—yang umumnya dikenal sebagai *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*—merupakan rangkaian yang terdiri dari 17 tujuan global dan 169 sasaran, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. SDGs bermaksud untuk melanjutkan delapan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang ditetapkan pada 2000. SDGs merupakan kelanjutan dari *United Nations Millennium Declaration*, yang menegaskan “tanggung jawab bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan di tingkat global” dan tugas kepemimpinan politik global untuk “semua orang di dunia, terutama mereka yang paling rentan, dan khususnya anak-anak, pemilik masa depan”.

Ada beberapa perbedaan utama antara MDGs dan SDGs. MDGs hanya berjumlah delapan, dan berfokus pada isu-isu pembangunan di negara-negara belahan dunia Selatan. SDGs berjumlah 17, dengan 169 sasaran yang berhubungan, dan berupaya mengatasi tantangan global yang dihadapi dunia. Selain itu, SDGs disajikan secara global, dengan relevansi baik untuk negara-negara belahan dunia Utara maupun Selatan. MDGs terwujud pada saat itu, yang ditandai dengan antusiasme memasuki milenium baru; sebagaimana harapan untuk memulai era baru. Konteks di mana SDGs diterapkan berbeda, yang lebih dicirikan oleh krisis politik dan pesimisme. MDGs dirumuskan oleh beberapa ahli, sedangkan SDGs merupakan hasil dari proses perundingan dengan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil dan komunitas keagamaan.

Dari sudut pandang kritis, dapat dikatakan bahwa fokus agenda SDGs terlalu luas, mengandung terlalu banyak tujuan dan target. Ketika membahas isu-isu seperti kemiskinan, agenda ini kurang memiliki pendekatan yang menganalisis akar permasalahan dan mempertanyakan model-model politik dan ekonomi yang ada. Terdapat kelemahan yang menonjol dalam SDGs, yaitu tidak adanya referensi terhadap Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples/UNDRIP*). UNDRIP adalah pemahaman yang sangat penting bagi seluruh penjuru dunia. Pelayanan diakonia, pembangunan ekonomi, karya misionaris, dan kolonialisme telah dan terus memberikan dampak yang sangat besar terhadap masyarakat adat di seluruh dunia. Pemanfaatan sumber daya alam, kepemilikan dan penggunaan lahan, serta pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan hak-hak masyarakat adat.

Agenda SDG—sebagai dokumen yang dihasilkan dari kesepakatan politik antarpemerintah—juga memiliki ketegangan dan pertentangan yang belum terpecahkan terkait dengan kesepahaman tentang keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Agenda SDG tidak cukup memuaskan dalam menjawab pertanyaan tentang pertumbuhan seperti apa yang layak, yang bertanggung jawab secara etis untuk masa depan seluruh umat manusia dan dapat diselaraskan dengan keterbatasan planet ini, yang kini tampak makin jelas daripada sebelumnya. Karenanya, terdapat kontradiksi antara tujuan-tujuan ekonomi (No. 1–11) dan tujuan ekologi (No. 13–15) dari agenda SDG. Jika tujuan ekonomi ingin dicapai dengan pola pertumbuhan ekonomi yang tidak berubah, maka tujuan ekologi tidak akan tercapai sama sekali. Pemahaman yang memadai akan kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan ekonomi, ekologi, dan peradaban manusia dalam sebuah upaya yang komprehensif menuju diakonia sosial dan ekologi masih menjadi persoalan. Maka dari itu, mandat dan jangkauan keterlibatan sosial dan teologis gereja secara publik jauh melampaui agenda SDG saat ini. Keterlibatan tersebut mempertanyakan pemahaman tentang martabat manusia menurut Injil dan konsep alternatif tentang pertumbuhan ekonomi yang belum dijawab oleh dokumen kesepakatan politik ini (yang bahkan saat ini masih dipertanyakan oleh beberapa pemimpin nasional). Kita perlu mengingat kembali, dan tidak kehilangan fokus, bahwa gerakan oikoumenis

telah memberikan sebuah alternatif bagi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Alternatif ini didasarkan pada keadilan, dengan fokus pada masyarakat yang berkelanjutan yang menjunjung tinggi martabat manusia—yang melindungi hak-hak asasi manusia dan keberlanjutan masyarakat—dan planet sebagai fokusnya. Pendekatan kritis terhadap agenda SDG inilah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari diakonia profetis, seperti yang telah dijabarkan dalam *Development Strategy of ACT* dan WCC, dalam dokumen yang disusun untuk Sidang Raya ACT Alliance di Uppsala (Oktober 2018).

SDGs PBB, sebagian besarnya merupakan sasaran-sasaran yang patut didukung untuk diakonia oikoumenis. Beberapa di antaranya, khususnya SDGs 8, 9, dan 12, membutuhkan pengawasan yang cermat dan berisiko disalahgunakan untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan ekonomi yang kuat di negara-negara industri dengan mengorbankan planet ini dan banyak orang yang telah dieksploitasi. Namun demikian, tujuan-tujuan tersebut menunjukkan keinginan komunitas global untuk bergerak menuju tatanan dunia yang berkelanjutan dan mendorong proses-proses yang akan memperkuat hak asasi manusia dan kesejahteraan.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses dan juga tujuan, yang mengarah pada kehidupan yang bermartabat bagi manusia dalam hubungannya dengan keseluruhan konteks komunitas dan lingkungan yang menopangnya. Pembangunan yang mengasingkan manusia dari kehidupannya sendiri, dari komunitasnya, atau dari ekosistem yang mendukung kehidupannya, tidaklah berkelanjutan. Demikian pula, pembangunan wilayah lokal yang tidak terkait dengan keberlanjutan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup manusia juga tidak berkelanjutan.

Pembangunan bukanlah sebuah konsep baru bagi komunitas oikoumenis. Gereja-gereja dan lembaga-lembaga diakonia berpengalaman selama puluhan tahun dalam pembangunan. WCC dan FBOs lainnya telah berkecimpung dalam bidang-bidang yang dibahas dalam SDGs jauh sebelum SDGs dirumuskan. Pergeseran wacana menuju pengakuan yang lebih baik terhadap peran agama dalam proses pembangunan bertepatan dengan pergeseran dari United Nation's *Millennium Development Goals* (MDGs) yang bersifat teknis dan terbatas ke agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bersifat holistik,

terintegrasi, dan universal. Perpaduan kedua tren ini memiliki potensi yang besar, tetapi juga menantang gereja-gereja, komunitas-komunitas iman, dan organisasi diakonia untuk menemukan cara dan metode yang tepat untuk terlibat dalam kerangka kerja ini.

Umat beriman merupakan komunitas penting bagi perubahan, seperti yang telah ditunjukkan sepanjang sejarah kekristenan (seperti peran utama yang dimainkan oleh orang-orang Kristen dalam mengampanyekan penghapusan perbudakan pada abad ke-19). Iman telah menuntun umat Kristen, sepanjang sejarah kekristenan, untuk menyatakan kepedulian diakonia; iman terus memotivasi miliaran orang di seluruh dunia untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Mr. David Nabarro, yang pada 2016 menjabat sebagai Penasihat Khusus PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, mengharapkan komunitas umat beriman dapat melakukan hal-hal berikut ini sehubungan dengan agenda baru:

- Mengedepankan inklusi, bukan eksklusivitas, dari kelompok-kelompok yang berbeda yang dapat dilibatkan dalam kegiatan semacam ini;
- Menyediakan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik, sehingga mengurangi risiko kekerasan ketika terjadi perbedaan pendapat;
- Menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang paling rentan, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal;
- Mengingatkan para pemimpin politik akan tugas mereka, untuk memastikan bahwa semua orang dapat menyadari hak-hak mereka;
- Membantu memastikan bahwa investasi terjadi di dalam masyarakat, dengan orang-orang di tingkat lokal yang melakukan investasi tersebut dengan sumber daya mereka sendiri;
- Menggerakkan orang di mana saja, terutama kaum muda, sehingga mereka dapat menggunakan elemen-elemen agenda 2030 dalam kiprah mereka untuk membuat dunia menjadi lebih baik;
- Berbagi keahlian tentang bagaimana memberikan layanan kepada mereka yang sulit dijangkau.

Dari perspektif diakonia oikoumenis, SDGs menyediakan sebuah platform yang penting untuk dilakukan. Agenda SDG layak mendapatkan dukungan

dari berbagai pihak, baik secara politis maupun praktis. Agenda ini merupakan agenda universal yang berlaku untuk semua negara, terintegrasi, tidak terpisahkan, dan didasarkan pada seperangkat prinsip-prinsip yang jelas. Agenda ini ditetapkan dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat sipil dan organisasi relawan, termasuk komunitas agama, serta mempromosikan kewarganegaraan yang aktif.

Aliansi ACT, bersama dengan komunitas oikoumenis dan komunitas agama lainnya, terlibat dalam wacana pembangunan berkelanjutan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan SDGs, serta bergabung dalam gerakan untuk melobi pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan, tata kelola pemerintahan, perubahan iklim, serta konflik dan kerentanan. Advokasi, mobilisasi massa, dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Komunitas-komunitas agama dapat membantu menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan, memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung dan berkesinambungan di tempat mereka tinggal.

Menyadari pentingnya wacana baru ini, para anggota ACT Alliance berkumpul untuk membentuk *Community of Practice on Religion and Development* pada 2015. Baik WCC maupun ACT dilibatkan dalam beberapa gerakan kemitraan berbasis agama yang sangat penting terkait dengan SDGs, termasuk *Moral Imperative to End Poverty* yang diselenggarakan oleh Bank Dunia (MI), *International Partnership on Religion and Development* yang mempertemukan badan-badan PBB, lembaga donor bilateral, dan para tokoh keagamaan. Pertemuan tersebut sepakat untuk berfokus pada tiga alur kerja utama, yaitu kesehatan reproduksi (SDG 3), perdamaian (SDG 16), serta gender dan pemberdayaan (SDG 5).

Tugas penting saat ini adalah memperlengkapi gereja-gereja dan para agen diakonia di tingkat nasional dan lokal untuk terlibat dalam proses SDG. Semua prioritas ACT disajikan dalam 17 tujuan yang diusulkan, termasuk tujuan-tujuan tersendiri mengenai kesetaraan gender, ketidaksetaraan, perubahan iklim, perdamaian, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan penegakan hukum, serta target-target di berbagai bidang seperti pengurangan risiko bencana, perlindungan sosial, dan antikorupsi. Forum Nasional ACT akan

belajar menggunakan indikator SDGs dalam karya mereka, dan mencari cara untuk berkoordinasi yang lebih baik dengan masyarakat sipil dan pemerintah. Terdapat juga kebutuhan untuk merevisi kurikulum teologi untuk memasukkan pemahaman yang lebih baik tentang mandat diakonia gereja, dan apa artinya hal tersebut dalam konteks sosial-politik dunia saat ini.

5.4 Migrasi dan Pengungsi

Selama umat manusia hidup, manusia telah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam perspektif sejarah, migrasi merupakan hal yang wajar. Dokumen ACT Alliance, *The Changing Development Paradigm*, menyatakan bahwa:

Perpindahan manusia merupakan ciri khas globalisasi. Saat ini, sekitar satu miliar orang bermigrasi secara internal atau melintasi batas negara untuk meningkatkan jumlah pendapatan mereka, menghindari dari kemiskinan atau konflik, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan keluarga, atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dampak dari perubahan iklim dan ketidakstabilan ekonomi.

Dokumen ini terus menegaskan bahwa migrasi adalah fenomena global dan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, bagi jutaan orang, migrasi merupakan kenyataan pahit oleh karena menghindari kemiskinan dan kekerasan, serta harus menghadapi situasi baru yang penuh dengan ketidakamanan, permusuhan, dan diskriminasi. Sangat mengkhawatirkan bahwa jumlah pengungsi terus meningkat secara drastis selama beberapa tahun terakhir, dan bahwa para pengungsi kurang mendapatkan perlindungan ketika tiba di negara-negara yang mereka harapkan memberikan keamanan. Tidak hanya konflik yang memaksa orang-orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka; perubahan iklim dan lingkungan juga memaksa jutaan orang di seluruh dunia untuk mengungsi. Menurut perkiraan yang dilaporkan oleh UNHCR, rata-rata 26,4 juta orang per tahun mengungsi dari tempat tinggalnya akibat bencana yang disebabkan oleh kerusakan alam sejak tahun 2008. Jumlah ini setara dengan satu orang mengungsi setiap detik. Bila tidak ada langkah-

langkah mitigasi dan adaptasi iklim yang serius di seluruh dunia, termasuk kewaspadaan terhadap bencana dan pengurangan risiko bencana, tren ini diperkirakan akan terus meningkat. Perlu diingat bahwa migrasi juga memiliki konsekuensi negatif bagi negara-negara yang mendapati banyak warga negaranya yang memiliki keahlian tertentu berpindah. *Brain drain* (perpindahan orang-orang yang sangat terlatih atau berkualifikasi dari suatu negara) menyiratkan bahwa negara-negara yang kaya mendapatkan para pekerja yang kompeten yang pendidikannya justru dibiayai oleh negara-negara miskin.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 2, diakonia oikoumenis memiliki pengalaman yang panjang terlibat dalam karya-karya bagi para pengungsi, dan hal ini masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia. Banyak jemaat yang secara aktif terlibat dalam karya ini. Mereka menerima pengungsi di rumah dan tempat ibadah mereka, menjadi relawan dalam kegiatan-kegiatan yang terorganisasi, dan mendukung para pengungsi dengan dana.

ACT Alliance membentuk sebuah kelompok bernama Community of Practice (CoP) on Migration and Development. Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan berbagai bentuk tindakan yang bermanfaat bagi perlindungan hak-hak migran. Isu-isu yang menjadi fokus kerja kelompok ini meliputi hak-hak migran, status tanpa kewarganegaraan, migrasi dan mata pencarian, migrasi dan perubahan iklim, dan orang-orang yang diperdagangkan selama dalam pengungsian. Kelompok ini juga bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan pengaruh struktur oikoumenis yang terkait dengan migrasi dan pembangunan.

WCC terus mengadvokasi hak-hak migran dan pengungsi, dengan menyatakan bahwa perdagangan manusia dan penyelundupan migran merupakan bentuk perbudakan modern. Pada September 2016, WCC menyelenggarakan sebuah acara pada Sidang Umum PBB dengan tema "*Bearing Witness: Combating Human Trafficking and Forced Migration*" yang memperlihatkan fakta bahwa selama tahun 2015 lebih dari 65 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena khawatir akan keselamatan. Menanggapi fakta bahwa terlalu banyak yang mengalami penolakan dan pengucilan, WCC mendesak negara-negara "untuk menahan diri dari kebijakan-kebijakan yang melemahkan dan tidak menghormati kewajiban-kewajiban yang relevan di bawah hukum

pengungsi dan hak asasi manusia internasional” dan menyerukan “solidaritas internasional yang jauh lebih besar dan lebih efektif dalam merespons secara kolektif krisis global ini”.

SDGs tidak membahas migrasi dan tantangan sosial yang dihadapi, meskipun ada beberapa kaitan dengan masalah ini. SDGs juga tidak merujuk pada situasi pengungsi dan kurangnya mekanisme internasional untuk menangani krisis ini. Kurangnya perhatian akan hal ini dapat ditafsirkan sebagai penurunan tanggung jawab internasional untuk membantu para pengungsi dan kewajiban pemerintah bangsa-bangsa untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang mencari tempat berlindung dan masa depan baru di negara mereka.

Ketika hak-hak dasar para migran dan pengungsi terancam, gereja-gereja dan para agen diakonia harus terlibat dalam advokasi dan aksi publik, sebagai bagian dari panggilan untuk membela martabat manusia. Aksi tersebut harus mencakup praktik-praktik penerimaan dan pendampingan, berbagi dan merayakan berbagai karunia yang dibawa oleh para migran dan pengungsi. Hal ini merupakan cara untuk menyatakan “hak untuk berharap” yang disebut oleh Sekretaris Jenderal WCC Olav Fykse Tveit dalam berbagai kesempatan, sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, dan juga sebagai penegasan atas Ziarah Keadilan dan Perdamaian gereja-gereja.

5.5 Keadilan Ekonomi

Ekonomi dapat didefinisikan sebagai “proses atau sistem yang digunakan untuk memproduksi, menjual, dan membeli barang dan jasa di suatu negara atau wilayah”. Ekonomi global saat ini telah mengembangkan sistem yang menumpuk sumber daya di tangan segelintir elite. Laporan tahunan Oxfam tentang kemiskinan tahun 2016 mengungkapkan bahwa 62 orang kaya memiliki kekayaan yang sama banyaknya dengan separuh populasi termiskin di dunia. Satu tahun kemudian, Oxfam memperbarui jumlah orang kaya menjadi delapan orang, dan semuanya adalah laki-laki. Laporan ini, yang berjudul *An Economy for the 99%*, menuliskan bahwa pertumbuhan dalam sistem ekonomi saat ini hanya menguntungkan orang-orang terkaya, sementara masyarakat lainnya—terutama

yang termiskin—menderita. Laporan tersebut menyimpulkan: “Desain ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi kita telah membawa kita ke titik ekstrem, yang tidak berkelanjutan dan tidak adil.” Tren peningkatan perbedaan antara yang terkaya dan termiskin ini tidak hanya terlihat di tingkat global, tetapi juga di sebagian besar negara.

Ekonomi global dan finansial saat ini telah memunculkan distribusi kekayaan, barang, dan jasa yang tidak adil. Institusi dan kebijakannya mencerminkan struktur kekuasaan yang melindungi orang kaya dan mengorbankan orang miskin saat berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Beberapa konsekuensi dari meningkatnya ketidaksetaraan adalah pengangguran, upah yang rendah, pekerjaan yang tidak aman, penggelapan pajak, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rusaknya kohesi sosial, kekerasan, kejahatan, dan rasa tidak aman yang makin meningkat.

Meskipun penyebab utama meningkatnya ketidaksetaraan bersifat multi-dimensi, keadilan ekonomi merupakan respons penting terhadap berbagai masalah ini. Keadilan ekonomi menyadari bahwa keadilan sosial dan pembangunan yang transformatif tidak akan terwujud kecuali para pengambil keputusan politik mengambil langkah-langkah, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mereformasi dan mentransformasi sistem ekonomi, menjamin distribusi sumber daya yang lebih adil (termasuk aliran dana), dan struktur kekuasaan. Pandangan ini dengan jelas ditegaskan dalam Konfesi Accra, yang diadopsi oleh para delegasi Sidang Raya ke-24 World Alliance of Reformed Churches di Accra, Ghana (2004) yang menyatakan (#19–20):

Oleh karena itu, kami menolak tatanan ekonomi dunia saat ini yang dijalankan oleh kapitalisme neoliberal global dan sistem ekonomi lainnya, termasuk ekonomi absolut yang terencana, yang menentang perjanjian Allah dengan mengucilkan kaum miskin, kaum rentan, dan seluruh ciptaan dari kepenuhan kehidupan. Kami menolak segala bentuk penguasaan ekonomi, politik, dan militer yang merongrong kedaulatan Allah atas kehidupan dan yang bertentangan dengan pemerintahan Allah yang adil.

Kami percaya bahwa Allah telah membuat sebuah perjanjian dengan seluruh ciptaan (Kej. 9:8–12). Allah telah mewujudkan sebuah komunitas di bumi berdasarkan visi keadilan dan perdamaian. Perjanjian ini merupakan

anugerah kasih karunia yang tidak dijual di pasar (Yes. 55:1). Perjanjian ini merupakan sebuah ekonomi kasih karunia bagi seluruh ciptaan. Yesus menunjukkan bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang inklusif di mana yang miskin dan terpinggirkan adalah mitra istimewa dan mengundang kita untuk memberikan keadilan bagi “yang terkecil” (Mat. 25:40) sebagai pusat dari komunitas kehidupan. Seluruh ciptaan diberkati dan diikutsertakan dalam perjanjian ini (Hos. 2:18 ff).

Gerakan oikoumenis berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan ekonomi. Pada 1990-an, Advisory Group on Economic Matters (AGEM) WCC melakukan kajian tentang kekristenan dan ekonomi dunia. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan proses *Alternative Globalisation Addressing People and Earth* (AGAPE), sebuah proses studi global selama tujuh tahun dengan dukungan dari seluruh wilayah dunia dan keterlibatan sejumlah persekutuan Kristen dunia, yang berujung pada Sidang Raya WCC di Porto Alegre, Brasil, pada 2006. Fokusnya, untuk menyatukan isu-isu ekonomi dan ekologi, dilanjutkan melalui proses *Poverty, Wealth and Ecology* WCC. Pada 2012, WCC bersama dengan mitra oikoumenis lainnya mengundang para ekonom, pemimpin gereja, aktivis, politisi, dan teolog untuk menghadiri konferensi global di São Paulo, Brasil, dengan tujuan untuk mengembangkan rencana aksi untuk membangun struktur finansial dan ekonomi global yang adil, peduli, dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut diakhiri dengan menyerukan *International Financial Transformation for the Economy of Life*. Pertemuan tersebut mengusulkan sebuah bangunan finansial dan ekonomi yang:

- didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi, sosial dan iklim;
- menyajikan perekonomian yang sesungguhnya;
- memperhitungkan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- menetapkan batasan yang jelas terhadap keserakahan, dan sebaliknya mengedepankan kebaikan bersama.

Sejak saat itu, sebuah Panel Oikoumenis Global dibentuk dengan tujuan untuk keberlanjutan Perjanjian São Paulo. Pada 2014, panel ini menyampaikan sebuah laporan berjudul *Economy of Life for All Now: An Ecumenical Action*

Plan for a New International Financial and Economic Architecture, dan menyerukan kepada para mitra oikoumenis untuk mengimplementasikannya.

Economy for Life menantang para pelaku diakonia oikoumenis untuk memperkuat komitmen mereka terhadap keadilan ekonomi. Pernyataan dari ACT Alliance berikut ini mewakili pandangan para anggota ACT Alliance tentang kemiskinan dan pentingnya mengatasi akar penyebabnya:

Memberantas kemiskinan tidak hanya tentang mengatasi gejala-gejala seperti berkurangnya pendapatan atau aset materiel yang dimiliki individu, tetapi juga membahas tentang faktor-faktor sistemik dan struktural yang penting untuk mengatasi kemiskinan, faktor-faktor yang merampas martabat perempuan dan laki-laki, hak asasi, dan hak lainnya. Berbagai kebijakan yang diharapkan dapat memberantas kemiskinan juga perlu berfokus pada proses-proses yang menyebabkan terjadinya pengucilan dan eksploitasi sosial, diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya produktif, serta pengucilan dari partisipasi dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang menghalangi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya secara penuh. Selain itu, pemberantasan kemiskinan juga membutuhkan peningkatan kesempatan kerja yang layak dan kompensasi yang adil bagi semua orang dalam perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diakonia berbasis hak berupaya mencari bentuk-bentuk aksi yang mengedepankan keadilan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan para pemegang hak untuk terlibat sebagai warga negara yang aktif, untuk menuntut hak-hak ekonomi dan sosial. SDGs berfungsi sebagai titik acuan yang relevan, khususnya ketika terlibat dalam advokasi dan debat publik.

Sebagian SDGs menegaskan keadilan ekonomi sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuannya.

SDG 1, *Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun*, menunjukkan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan akses terhadap layanan mendasar, serta mendukung mereka yang terancam akibat kejadian ekstrem terkait iklim serta ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta bencana.

SDG 8, *Mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkesinambungan, lapangan kerja yang produktif dan menyeluruh serta*

pekerjaan yang layak untuk semua, mendorong pemerintah “untuk mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif dalam menghapus kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia, serta menjamin larangan dan penghapusan segala bentuk terburuk dari pekerja anak ...”.

SDG 10, *Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara*, menyerukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di dalam suatu negara. SDG ini juga membahas ketidaksetaraan di antara negara-negara, dan menyarankan untuk membangun lembaga-lembaga yang akuntabel dan inklusif yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ekonomi sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat; hal ini tidak bisa menjadi tanggung jawab para ekonom saja. Para politisi harus ikut berperan. Begitu juga dengan orang-orang beriman, gereja, dan para pelaku diakonia.

Dari perspektif iman, ekonomi adalah sebuah sarana untuk memperoleh kepenuhan hidup, seperti yang dimaksudkan dalam pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaan. Ekonomi tidak pernah menjadi sebuah tujuan dalam dirinya sendiri; ekonomi harus dilihat sebagai sebuah realitas yang otonom, yang bebas untuk menentukan norma-norma dan tujuan-tujuannya sendiri. *Economy of Life* menolak kepercayaan mutlak terhadap pasar dan mekanismenya, dan mengutuk kepercayaan terhadap Mamon sebagai penyembahan berhala. *Economy of Life* mengakui bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Allah (Mazmur 24:1), dan semua kebutuhan kita akan tercukupi jika kita berbagi sumber daya milik Allah.

5.6 Keadilan Iklim

WCC, bersama dengan para anggota dan mitra oikoumenisnya, sejak lama dalam agendanya menaruh perhatian terhadap ciptaan dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Pada 1970-an, WCC mulai menyadari hubungan antara keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan ekologi. Pada Sidang Raya Vancouver tahun 1983, WCC mendorong gereja-gereja anggotanya untuk secara terbuka berkomitmen untuk menangani masalah lingkungan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memajukan Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan

Ciptaan (*Justice, Peace, and the Integrity of Creation*), yang kemudian dikenal sebagai proses JPIC. Pada 1988, WCC meluncurkan *Climate Change Program* untuk mendorong transformasi struktur sosial ekonomi dan pilihan gaya hidup pribadi yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pada 1990-an, sebuah proses studi tentang “*theology of life*” mengundang gereja-gereja dan kelompok-kelompok lokal untuk merefleksikan apa artinya hal ini dalam konteks mereka, dan bagaimana mereka dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam isu-isu keadilan, perdamaian, dan ciptaan. Terdapat fakta yang menarik di antara para anggota WCC bahwa telah muncul apa yang dapat kita sebut sebagai “diakonia ekologis”, yang kemudian menjadi pusat kesaksian dan misi gereja-gereja di dunia dalam merawat ciptaan dan segala isinya. Pertimbangan PBB tentang bagaimana mengembangkan sistem baru untuk Yurisprudensi Bumi (*UN Global Dialogue Process on Harmony with Nature from 2016*) dan mekanisme untuk melindungi dan mendefinisikan hak-hak alam dalam peradaban manusia membutuhkan perhatian khusus dari semua gereja-gereja Kristen dan konsep diakonia ekologis yang diperluas.¹

Pada pertemuan COP 17 di Durban, Afrika Selatan, tahun 2011, WCC bersama dengan kelompok-kelompok keagamaan lainnya mengadakan reli lintas agama yang mengumpulkan ribuan orang dengan tema: “We have faith! Act now for climate justice!” Dalam kesempatan tersebut, Uskup Agung Desmond Tutu menyampaikan sebuah petisi dengan 200.000 tanda tangan kepada pimpinan COP.

Konsep “keadilan iklim” telah mendapatkan tempat sejak tahun 2000, ketika *Alternative Summit* diselenggarakan bersamaan dengan pertemuan COP 6 di Den Haag, Belanda. Dalam pertemuan tersebut, para pembicara menyerukan penyelesaian masalah perubahan iklim yang mengedepankan hak asasi manusia, kesetaraan, hak-hak buruh dan keadilan lingkungan. Konsep keadilan iklim kemudian menjadikan pemanasan global dan perubahan iklim sebagai sebuah isu etis dan politis; keadilan iklim mengakui bahwa mereka yang tidak turut bertanggung jawab terhadap permasalahan ini akan menanggung akibat yang paling berat.

¹ Lihat: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/266.

Gerakan oikoumenis menganut pemahaman tentang keadilan iklim ini, dan berusaha untuk melandasinya dengan argumen-argumen teologis. Allah dalam Alkitab adalah Allah keadilan yang melindungi, mengasihi dan memperhatikan mereka yang paling rentan di antara ciptaan-Nya; Alkitab mengajarkan keutuhan ciptaan dan memanggil manusia untuk memelihara taman Eden (Kej. 2:15).

Oleh karena itu, keadilan iklim telah menjadi perhatian utama dalam diakonia oikoumenis, yang menegaskan bahwa gereja-gereja dan orang-orang Kristen dipanggil untuk menyuarakan dan bertindak ketika ciptaan terancam, sebagai perwujudan dari komitmen mereka terhadap kehidupan, keadilan, dan kasih. Keterlibatan tersebut menjadi sangat nyata selama COP 21 di Paris pada 2015 dan memberikan kontribusi atas hasil positif dari pertemuan ini. Sebelum pertemuan, lebih dari 150 pemuka agama menandatangani sebuah pernyataan yang mendorong para peserta untuk mengambil keputusan yang berani, menunjukkan “kepemimpinan yang nyata dan visioner”, mengulangi apa yang telah disampaikan dalam *Interfaith Summit* di New York:

Sebagai perwakilan dari berbagai agama dan tradisi religius, kita berdiri bersama untuk menyatakan keprihatinan yang mendalam atas dampak perubahan iklim terhadap bumi dan manusia, semua diamanatkan, seperti yang diungkapkan oleh agama kita, untuk menjadi perhatian kita bersama. Perubahan iklim memang merupakan ancaman bagi kehidupan, sebuah anugerah berharga yang telah kita terima dan perlu kita rawat.

Selama pertemuan di Paris, para “peziarah iklim” dan pemimpin gereja benar-benar aktif terlibat dalam berbagai bidang untuk menentukan hasilnya. Sekretaris Jenderal WCC Olav Fykse Tveit sempat berpidato di hadapan para pejabat tinggi dalam konferensi tersebut, dan mendesak mereka untuk “melayani dunia dengan menunjukkan kreativitas dan kapasitas terbaik manusia”. Ia menyimpulkan dengan mengatakan, “Kami percaya bahwa Anda harus, bisa, dan akan melakukannya. Kita memiliki harapan. Kita memiliki alasan untuk berharap. Kita memiliki hak untuk berharap.”

ACT Alliance banyak terlibat dalam advokasi perubahan iklim. ACT memantau dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan COP, dan melakukan

beberapa program peningkatan kapasitas bagi para anggotanya. ACT meluncurkan Kampanye *Act Now for Climate Justice* bersama dengan para anggotanya, untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat miskin dan terpinggirkan. ACT juga menyelenggarakan pelatihan mengenai politik iklim internasional untuk para anggotanya, membangun inisiatif, juga dengan tujuan untuk mendukung para anggota dengan pengetahuan praktis dan teknis.

Aksi penting lainnya yang dilakukan oleh ACT Alliance adalah mendorong para anggotanya untuk membangun program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam karya-karya mereka. Hal ini merupakan bagian integral dari rencana untuk memberikan dukungan yang memadai dalam membangun masyarakat yang tangguh dan mendorong solusi yang berkelanjutan untuk pembangunan yang lebih baik, serta memberantas kemiskinan dalam jangka panjang.

SDG 13, *Mengambil langkah cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*, tidak menggunakan istilah “keadilan iklim” tetapi menegaskan agendanya:

- Memperkuat ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap bahaya iklim dan bencana alam di semua negara;
- Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional;
- Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan kapasitas manusia dan kelembagaan dalam mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim.

Diakonia oikoumenis, dalam dimensi khusus ini dipahami sebagai diakonia ekologis, memiliki peran penting dalam agenda ini, baik sebagai pendukung maupun agen. Kekhasannya sebagai aktor berbasis iman dan hak asasi manusia memberikannya posisi istimewa dalam memobilisasi gereja-gereja dan umat beragama lainnya, mendorong keterlibatan untuk keadilan iklim. Hal ini membutuhkan respons teologis melalui diskursus ekodiakonia yang sedang berkembang.

5.7 Keadilan Gender

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup secara bermartabat dan bebas, dan menjadi subjek dalam kehidupan mereka sendiri. Diakonia oikoumenis menegaskan pentingnya keadilan gender secara mendasar, mengakui bahwa keadilan gender sangat diperlukan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dan dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan untuk keadilan dan perdamaian. Perjuangan untuk keadilan gender mensyaratkan adanya analisis kritis terhadap struktur kekuasaan sosial, budaya, dan agama, yang memungkinkan terwujudnya kesetaraan dalam cara perempuan dan laki-laki berbagi kekuasaan dan tanggung jawab, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di komunitas yang lebih luas.

Masih banyak perempuan yang kehilangan hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya mereka. Lebih banyak perempuan yang kelaparan dibandingkan laki-laki, dan mereka lebih sering mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Perempuan masih kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun di lembaga-lembaga yang mengklaim diri sebagai lembaga yang demokratis. Dalam situasi konflik dan ketidakamanan sosial, perempuan adalah pihak yang paling menderita.

SDG 5 secara eksplisit merujuk pada keadilan gender: *Mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan*. Targetnya antara lain adalah:

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana pun;
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya;
- Menghapuskan semua praktik-praktik yang berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini, pernikahan paksa, dan sunat perempuan;
- Mengakui dan menghargai pekerjaan mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik;

- Memastikan partisipasi penuh dan efektif dari perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik;
- Memastikan akses yang merata terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi;
- Melaksanakan perbaikan untuk memberikan hak yang setara kepada perempuan atas sumber daya ekonomi.

Menjamin hak-hak perempuan melalui kerangka hukum adalah langkah pertama dalam mengatasi diskriminasi yang dialami perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan melanggar hak asasi mereka dan menghambat pembangunan. Survei menunjukkan bahwa 21 persen anak perempuan dan perempuan berusia antara 15 dan 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya dalam 12 bulan terakhir. Perdagangan manusia menyerang terutama perempuan dan anak perempuan; 70 persen dari semua korban yang terdeteksi di seluruh dunia adalah perempuan.

Pernikahan dini dan pernikahan paksa paling sering terjadi di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara, dengan masing-masing 44 dan 37 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik sunat perempuan yang berbahaya merupakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang memengaruhi anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia. Untungnya, angka keseluruhan sunat perempuan telah menurun selama beberapa dekade terakhir.

Pelecehan seksual di gereja adalah masalah yang sangat serius. Ini merupakan dosa, penyalahgunaan kekuasaan spiritual dan pengkhianatan kepercayaan terhadap yang sakral. Dampaknya sangat menghancurkan, terutama ketika anak-anak menjadi korban. Pelecehan seksual adalah bentuk yang lebih luas dari penyimpangan seksual; yang mencakup berbagai ucapan, rayuan, atau ajakan seksual yang tidak dikehendaki, baik secara verbal maupun fisik, yang secara sadar dirasakan oleh korban sebagai sesuatu yang merendahkan, mengintimidasi, atau memaksa. Banyak gereja sekarang menangani masalah ini secara terbuka dan menetapkan langkah-langkah untuk mengakhiri dan mencegah pelecehan, serta membela martabat dan hak-hak para korban. Masalah ini terus menjadi tugas serius diakonia, yang membutuhkan transfor-

masi atas tradisi, ajaran, dan praktik patriarki yang melekat dan telah berlangsung lama, serta menjadi bagian penting dari aksi diakonia internasional. Pada 2006, WCC menerbitkan sebuah tanggapan pastoral dan edukatif terhadap pelecehan seksual, *When Christian Solidarity Is Broken*. LWF menetapkan Kode Etik mengenai pelecehan dan eksploitasi seksual bagi para peserta dalam acara-acaranya pada 2010.

WCC memiliki tradisi yang panjang dan komitmen yang kuat terhadap keadilan gender dan advokasi bagi komunitas yang adil bagi perempuan dan laki-laki di dalam gereja dan masyarakat. Pada 1953, WCC memulai *Program Perempuan dalam Gereja dan Masyarakat*, yang menyatakan bahwa pembaruan kehidupan yang bermartabat setelah Perang Dunia II hanya mungkin terjadi jika perempuan menjadi bagian aktif dalam setiap upaya keadilan dan perdamaian yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam masyarakat. WCC berperan utama dalam mengorganisasi WCC Ecumenical Decade of Churches in Solidarity with Women (1988–1998) dan dalam memusatkan perhatian pada kekerasan terhadap perempuan sebagai fokus dari WCC Decade for Overcoming Violence (2000–2010). WCC berkolaborasi dengan gereja-gereja, jejaring perempuan, organisasi masyarakat sipil, meningkatkan kesadaran dan menawarkan pelatihan di lapangan mengenai analisis gender, kesadaran akan kekerasan berbasis gender, hak-hak perempuan, dan pengetahuan tentang HIV di bidang kesehatan dan pelayanan pastoral.

Komitmen ini mencakup kesaksian publik dan advokasi. Pada 2014, WCC membentuk sebuah kelompok advokasi gender dan Human Sexuality Reference Group yang mewakili gereja-gereja anggota WCC, dengan tujuan mengembangkan berbagai prosedur dan kebijakan untuk membantu WCC mewujudkan keadilan gender di berbagai lembaga, komunitas dan masyarakat—sebuah tujuan yang menjadi inti dari visinya tentang “Ziarah Keadilan Gender”.

LWF juga telah lama berkomitmen terhadap keadilan gender. LWF membentuk departemen perempuan pada 1970, yang kemudian meluncurkan sebuah program yang dinamakan Women in Church and Society (WICAS). Dua hal yang menjadi pilar utama dalam karyanya adalah pemberdayaan perempuan dan keadilan gender, dengan penekanan yang kuat pada kepemimpinan perempuan. Pada 1984, LWF menetapkan kebijakan dasar tentang

partisipasi perempuan minimal 40 persen dalam persidangan, sebuah kebijakan yang ditegaskan kembali pada 2010 ketika Sidang Raya ke-11 menetapkan prinsip-prinsip inklusivitas dan kebijakan gender. Pada 2013, LWF menerbitkan *Gender Justice Policy* dengan tujuan mendorong gereja-gereja anggota untuk mengambil langkah konkret dalam menerapkan keadilan gender.

Pada Juni 2010, Dewan Pengurus ACT Alliance menyetujui *Humanitarian Protection Policy*; beberapa prinsip di dalamnya mengacu pada keadilan gender. Kebijakan tersebut mewajibkan semua anggota ACT untuk “Memprioritaskan keselamatan, martabat, dan pemberdayaan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan semua orang tanpa diskriminasi” (Prinsip 1), dan untuk “Membuat ‘komitmen inti’ untuk mengarusutamakan gender dan perlindungan ke dalam semua program bantuan kemanusiaan” (Prinsip 2). Karya kemanusiaan harus mencakup karya perlindungan, yang membutuhkan analisis gender dan pengarusutamaan gender. Dokumen kebijakan tersebut mendesak para anggota ACT untuk “Memastikan adanya mekanisme untuk mencegah dan merespons terjadinya eksploitasi dan pelecehan seksual serta bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya” (Prinsip 5). Hal ini berarti bersikap proaktif dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, dan membangun proses rujukan dan pelaporan yang aman kepada organisasi yang kompeten di mana para anggotanya tidak memiliki keahlian, pengalaman, atau sumber daya yang dibutuhkan.

Sebagai tindak lanjut, ACT Alliance menerbitkan buku panduan berjudul *Gender Inclusive Rights Based Manual* untuk para anggota dan mitranya pada 2015. Panduan ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi program pembangunan berbasis hak dan kesetaraan gender. Panduan ini berisi materi pelatihan yang mengeksplorasi konsep-konsep kunci, memperkenalkan perangkat analisis praktis, dan memfasilitasi upaya-upaya untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip serta standar-standar hak asasi manusia.

Menanggapi seruan dari Sidang Raya ke-10 Dewan Gereja-gereja se-Dunia (2013), WCC membentuk Reference Group on Human Sexuality. Tugas Kelompok Referensi ini terpisah dari dokumen diakonia oikoumenis ini. Oleh karena itu, dokumen ini tidak bermaksud untuk menampilkan secara detail karya yang dilakukan oleh Reference Group on Human Sexuality.

Kekristenan mengakui keyakinan dasar bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Oleh karena itu, memperjuangkan keadilan gender dalam perspektif iman berarti menegaskan martabat dan karunia-karunia yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada setiap manusia, baik perempuan maupun laki-laki.

5.8 Keadilan Kesehatan

Seperti yang dijelaskan dalam Bab 2, kesehatan dan pemulihan selalu menjadi agenda pelayanan kepedulian dan pengutusan gereja ke dalam dunia. Di banyak negara, gereja-gereja dan lembaga misi, melalui pelayanan diakonianya, memelopori pendirian pelayanan kesehatan modern. Gerakan oikoumenis juga memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan kesehatan; Christian Medical Commission (CMC) memainkan peran penting ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sedang dalam proses merumuskan prinsip-prinsip universal untuk kesehatan dasar, dan menetapkan definisi kesehatan yang dikenal luas pada Konferensi Alma-Ata pada 1978, yang menegaskan bahwa:

Kesehatan, yang merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan bahwa upaya mencapai tingkat kesehatan setinggi mungkin adalah tujuan sosial terpenting di seluruh dunia yang realisasinya membutuhkan peran dari berbagai sektor sosial dan ekonomi lainnya sebagai pelengkap sektor kesehatan.

CMC memberikan usulan untuk memasukkan sebuah referensi terhadap dimensi spiritual dari kesejahteraan, dan kemudian merumuskan sebuah definisi alternatif, yang sering disebut sebagai definisi WCC tentang kesehatan:

Kesehatan adalah keadaan yang dinamis dari kesejahteraan individu dan masyarakat, baik fisik, mental, spiritual, ekonomi, politik, maupun sosial— untuk dapat hidup selaras satu sama lain, dengan lingkungan sekitar, dan dengan Allah.

Kedua definisi di atas menekankan pemahaman holistik tentang kesehatan, sesuai dengan sifat manusia yang multidimensi. Definisi CMC menekankan

bahwa kesehatan adalah sesuatu yang dinamis, suatu keadaan yang membutuhkan perhatian dan hubungan yang harmonis; definisi ini menunjukkan relasi dengan Allah sebagai sumber daya yang khas untuk kesejahteraan dan harapan. Definisi WHO menekankan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar; pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang relevan untuk semua warga negara; ini bukan merupakan persoalan derma atau kemampuan untuk membayar layanan tersebut.

Dalam dunia global saat ini, keadilan kesehatan telah menjadi masalah yang mendesak. Kenyataan ini meyakinkan WCC dan badan-badan oikoumenis lainnya untuk terlibat dalam diskusi publik tentang kesehatan global. Salah satu tugas penting yang dilakukan adalah memfasilitasi jejaring dan advokasi mewakili jejaring kesehatan yang terhubung dengan gereja, yang memungkinkan gereja-gereja untuk berpartisipasi dalam pertemuan resmi WHO dan acara-acara serupa, dengan tujuan untuk membuka jalan bagi masyarakat sipil untuk memengaruhi tata kelola sumber daya global untuk kesehatan bagi semua.

Isu penting lainnya adalah membantu gereja-gereja dan jejaring terkait untuk menghadapi tantangan kesehatan yang mendesak. Di beberapa negara, misalnya di Malawi, Asosiasi Kesehatan Kristen dibentuk dengan tujuan mengedepankan pengembangan dan keberlanjutan pelayanan kesehatan berbasis gereja. Tugas untuk membangun kesadaran dan kompetensi dalam menangani HIV menjadi tugas utama bagi gerakan oikoumenis. Tugas ini mencakup studi teologis tentang HIV, dan menyusun, menerbitkan, dan menyebarkan informasi tentang aksi gereja dan pelajaran yang dapat dipetik. Diakonia Oikoumenis menantang gereja-gereja untuk melibatkan orang yang hidup dengan HIV dalam kehidupan gereja dan mendorong gereja-gereja untuk terlibat dalam advokasi yang memastikan bahwa orang yang hidup dengan HIV mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. The African Network of Religious Leaders living with or personally affected by HIV and AIDS (ANERELA+) (sekarang menjadi INERELA+) memberdayakan banyak orang untuk bersuara dan mengadvokasi untuk pemulihan martabat manusia. The Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Africa (EHAIA) memainkan peran penting dalam karya ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pengalaman dan

praktik diakonia tentang HIV dan AIDS telah menciptakan ruang-ruang baru untuk mendiskusikan stigma dan seksualitas di dalam gereja, dan dengan demikian menjadi sebuah konteks yang mendorong gereja-gereja dan para pelaku diakonia untuk membahas isu-isu sensitif tentang seksualitas manusia.

Kesehatan mental adalah isu lain yang menjadi tantangan bagi diakonia oikoumenis. Setidaknya, 10 persen dari populasi dunia, termasuk 20 persen anak-anak dan remaja, menderita beberapa jenis gangguan kesehatan mental. Di banyak belahan dunia, orang-orang dengan gangguan kesehatan mental tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, mereka terus menjadi korban prasangka dan diskriminasi, yang sering kali berasal dari pemahaman agama. Kenyataan ini mengharuskan gereja dan komunitas agama lainnya untuk terlibat dalam kegiatan yang berupaya menyediakan layanan kesehatan yang relevan bagi kelompok penderita ini, dan menyediakan ruang untuk perawatan dan pendampingan.

Gangguan kesehatan mental sangat rentan terjadi di daerah konflik dan di daerah-daerah di mana banyak orang menderita karena peperangan. Tugas untuk mengupayakan pemulihan dan rekonsiliasi makin meningkat. Kenyataan ini menantang diakonia oikoumenis untuk terlibat dalam pemulihan psikososial dan rekonstruksi sosial pascakonflik, dan untuk mendukung dan melengkapi gereja dan komunitas keagamaan untuk dapat menjadi ruang yang aman bagi orang-orang untuk mencari dan mendapatkan pengampunan, sehingga mendorong budaya pemulihan dan rekonsiliasi.

SDG 3, *Memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia*, berupaya untuk melanjutkan hasil-hasil baik yang telah dicapai dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan kesehatan MDGs. Laporan akhir mengungkapkan bahwa angka kematian balita di seluruh dunia telah menurun lebih dari setengahnya, turun dari 90 menjadi 43 kematian per 1.000 kelahiran antara tahun 1990 dan 2015. Infeksi baru HIV turun sekitar 40 persen antara tahun 2000 dan 2013, dari sekitar 3,5 juta kasus menjadi 2,1 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin terjadi, dan bahwa jangkauan kesehatan universal, salah satu target SDG 3, adalah tujuan yang realistis. Namun, hal ini membutuhkan komitmen dari para pemimpin politik dan aksi

solidaritas dari komunitas internasional; ini adalah persoalan yang membutuhkan keterlibatan dan advokasi oleh masyarakat sipil dan diakonia oikoumenis.

MDGs menysasar isu-isu yang sangat spesifik, sementara bidang-bidang lain terabaikan keberadaannya. MDGs diimplementasikan secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat di tingkat lokal secara signifikan.

Di bidang kesehatan, misalnya, dikatakan bahwa HIV dan AIDS menyedot dana dalam jumlah besar dan mengalihkan perhatian para profesional kesehatan dari bidang-bidang lain, terutama dari lembaga-lembaga gereja, sehingga sistem kesehatan justru melemah bukan menguat. Oleh karena itu, salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari era MDG adalah bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan sebuah sistem dan pendekatan yang *bottom-up*. Kenyataan ini menjadi peluang bagi gereja-gereja untuk menjadi mitra penting pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Sementara MDGs dikembangkan dan diimplementasikan dengan kontribusi yang minim dari gereja-gereja, pemerintah sekarang melihat bahwa organisasi-organisasi non pemerintah adalah mitra untuk perubahan.

SDG 3 bertujuan untuk “memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional”. Diakonia oikoumenis juga memiliki keprihatinan yang sama, dengan mengakui bahwa ada tradisi keagamaan yang menghalangi anak perempuan dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam bidang ini. Oleh karena itu, gereja-gereja dan para pelaku diakonia perlu terlibat dalam kampanye untuk mengakhiri praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti sunat perempuan (*female genital mutilation/FGM*), pernikahan dini, dan pernikahan paksa, dan bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan.

Kesehatan bukan hanya masalah mendiagnosis dan memberikan perawatan medis. Kesehatan juga merupakan masalah kesejahteraan dan menikmati anugerah kehidupan. Oleh karena itu, keadilan kesehatan juga mencakup advokasi untuk orang-orang dan kelompok-kelompok yang didiskriminasi karena kesehatan fisik atau mental mereka. EHAIA menangani masalah remaja yang terlahir dengan HIV-positif dan yang kini menghadapi tantangan dalam

menjalin hubungan, pernikahan, dan keinginan untuk memiliki anak yang terlahir dengan HIV-negatif. Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN) adalah sebuah program WCC yang diberi mandat untuk melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas agar mereka dapat diikutsertakan, berpartisipasi, dan terlibat secara aktif dalam kehidupan rohani, sosial, ekonomi, dan struktural gereja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada 2016, program ini menyajikan dokumen *Gift of Being: A Church of All and for All*, yang diadopsi oleh komite sentral WCC dan disampaikan kepada gereja-gereja anggota untuk dipelajari lebih lanjut.

Beberapa contoh tersebut menunjukkan relevansi keadilan kesehatan dan pentingnya diakonia oikoumenis untuk dilibatkan sebagai agen berbasis iman dan hak asasi manusia.

5.9 Kesimpulan

Bab ini telah menyajikan beberapa bagian dari lanskap yang berubah di mana diakonia oikoumenis berlangsung; bagian-bagian tersebut merupakan isu-isu yang kompleks dan lebih banyak fakta serta perspektif yang dapat ditambahkan pada masing-masing bagian. Topik-topik penting lainnya dapat dimasukkan dalam paparan ini; beberapa di antaranya, misalnya situasi masyarakat adat dan kelompok minoritas, rasisme, dan ujaran kebencian, merupakan agenda utama dalam gerakan oikoumenis dan juga menjadi tantangan bagi diakonia oikoumenis. Ruang yang terbatas tidak dapat memberikan keadilan bagi seluruh nuansa perubahan lanskap aksi diakonia. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa sebagian besar isu-isu tersebut saling terkait; perubahan iklim berdampak pertama-tama pada masyarakat miskin; kelompok-kelompok yang terpinggirkan lebih sering menjadi korban ketidakadilan dan target kekerasan.

Kenyataan ini menantang para pelaku diakonia untuk mengevaluasi secara kritis pendekatan, tujuan, dan metode kerja mereka. Diakonia oikoumenis harus memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai mekanisme di dunia saat ini yang memarginalkan orang dan menyebabkan bentuk-bentuk kemiskinan baru, serta mampu merespons tantangan-tantangan atas keadilan dan martabat manusia.

SDGs merupakan kesempatan yang istimewa untuk memperkuat keterlibatan publik dan politik demi keadilan global. Komitmen untuk “tidak seorang pun yang tertinggal” adalah visi yang menarik yang sesuai dengan apa yang menjadi doa dan harapan umat Kristiani dan berusaha untuk mencapainya melalui aksi diakonia. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang, akan menjadi tugas utama untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung agenda SDG. Hal ini mencakup advokasi dan membangun kapasitas untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen mereka, serta membangun kesadaran dan kapasitas di antara para pelaku diakonia untuk terlibat dalam SDGs.

SDG 16, *Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat*, bertujuan untuk “mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan”. Tujuan ini mengingatkan semua orang yang berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan, untuk membela hak-hak dan martabat para migran dan pengungsi, dan untuk memperjuangkan keadilan dalam kaitannya dengan ekonomi, iklim, gender, dan kesehatan, serta pentingnya dasar dari perdamaian yang adil. Tanpa perdamaian, stabilitas, hak asasi manusia, ruang untuk aksi sipil dan pemerintahan yang akuntabel, berdasarkan aturan hukum—kita tidak dapat berharap untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen ini juga mengingatkan diakonia oikoumenis akan panggilan untuk menjadi agen rekonsiliasi dan perdamaian, khususnya dalam konteks di mana “politisasi” agama dan “religiositas” politik menumbuhkan rasa tidak saling percaya di antara orang-orang dan menyebabkan konflik terbuka. Gereja-gereja dan para agen diakonia harus mengambil peran utama dalam membangun ruang-ruang yang aman untuk dialog antaragama dan forum-forum antaragama untuk mempromosikan keadilan sosial dan pembangunan.

Meningkatnya pengakuan akan peran agama dalam pembangunan merupakan sebuah peluang bagi diakonia oikoumenis. Dari total populasi dunia, 85 persen merupakan bagian dari komunitas keagamaan; iman menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka; iman membentuk motivasi dan komitmen mereka ketika terlibat dalam perjuangan untuk masa depan yang

lebih baik. Bagi para pelaku diakonia oikoumenis, hal ini merupakan sebuah kesempatan yang istimewa untuk membangun persekutuan dengan orang-orang beriman dan komunitas-komunitas keagamaan, menegaskan harapan dan potensi yang mereka miliki. Selain itu, hal ini juga menegaskan identitas dan kompetensi yang berbeda dari para aktor berbasis iman, dan menambah energi pada komitmen untuk menyelamatkan kehidupan dan memperjuangkan keadilan.

B A B 6

Kekhasan Praktik Diakonia

6.1 Pendahuluan

Bab ini membahas apa yang menjadi ciri khas dari diakonia dan praktik diakonia. Di satu sisi, hal ini merujuk pada identitas diakonia yang berbeda, yang berakar pada keberadaan dan misi gereja. Di sisi lain, hal ini juga mengandaikan bahwa identitas ini menandai cara para pelaku diakonia melakukan pelayanan mereka, dalam mengembangkan metode kerja dan menetapkan tujuan. Kedua perspektif ini menyiratkan pernyataan bahwa diakonia adalah berbasis iman dan berbasis hak, serta keterkaitan di antara keduanya.

Pada Bab 4, telah dipaparkan elemen-elemen dasar dari hakikat teologis diakonia dengan pernyataan bahwa diakonia mengekspresikan sebuah hubungan yang erat antara siapa dan apa yang dilakukan oleh gereja. Dalam bab ini, fokusnya adalah bagaimana identitas diakonia diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan cara apa orang dapat mengenali tindakan mereka sebagai diakonia?

Perlu diperhatikan bahwa kekhasan aksi diakonia bukan berarti menyiratkan sebuah klaim superioritas, bahwa agen-agen diakonia lebih baik dan lebih dapat dipercaya daripada agen-agen sosial lainnya. Kekhasan hanya berarti mengenali apa yang telah memotivasi orang-orang Kristen untuk mengambil

inisiatif dan mendirikan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi, dan mempertanyakan bagaimana tradisi dan nilai-nilai mereka, ikatan-ikatan sosial dan kemitraan mereka dapat dijalankan dan menjadi aset yang berharga dalam pelaksanaan pelayanan diakonia sehari-hari.

6.2 Tujuan Aksi Diakonia

Tujuan yang ingin dicapai dari aksi diakonia adalah untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, membela martabat manusia dan hak-hak yang mereka miliki sebagai warga negara, tanpa memandang kewarganegaraan atau kebangsaan mereka, dan untuk mendukung proses-proses yang mengedepankan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Diakonia, baik yang dilakukan oleh gereja-gereja lokal, lembaga-lembaga diakonia, maupun lembaga-lembaga internasional, bertujuan untuk mengutamakan kebaikan bersama. Aksi diakonia ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada orang Kristen. Melayani umat manusia, memajukan kehidupan, memiliki makna tersendiri dalam diakonia; ia tidak boleh direduksi menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik itu tujuan ideologis, sosio-politis maupun religius.

Diakonia tidak memiliki agenda terselubung. Iman Kristen menegaskan perintah untuk mengasihi sesama tanpa syarat, seperti yang diilustrasikan dengan jelas dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dalam praktiknya, Yesus merespons kebutuhan manusia. Dia tidak pernah menuntut kepatuhan pada ajaran-Nya atau bahwa mereka yang Ia tolong harus mengikut-Nya.

Pemahaman yang mendasar ini membutuhkan beberapa refleksi lebih lanjut. *Pertama*, hal ini berkaitan dengan fakta bahwa semua aksi sosial, termasuk karya pembangunan dan diakonia oikoumenis, tidak dapat dimungkiri mengandung pandangan-pandangan dunia dan sistem nilai. Pandangan-pandangan ini memengaruhi perumusan tujuan, motif, dan bagaimana aksi-aksi dapat dibenarkan. Tidak ada agen sosial yang “netral”, tetapi selalu digerakkan oleh cita-cita dan keprihatinan, yang merefleksikan keyakinan ideologis, religius, atau sekuler. Tidak ada alasan untuk meremehkan peran visi dan nilai-nilai; sebaliknya, keduanya merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan kewarganegaraan yang aktif dan pembangunan masyarakat sipil. Masalahnya

di sini lebih pada mempertanyakan dampaknya terhadap relasi kekuasaan. Sejarah telah membuktikan bahwa ide dan konsep dapat mengarah pada praktik-praktik di mana orang menjadi alat ketika berjuang untuk tujuan-tujuan yang “lebih tinggi”.

Yang berbeda dari para pelaku diakonia adalah bahwa mereka merujuk pada konsep-konsep keagamaan, sebagai pelengkap yang sekuler, ketika menjelaskan tindakan dan tujuannya. Hal ini merupakan ekspresi dari sifat interdisipliner dari diakonia; diakonia merupakan aksi sosial yang berakar pada pengetahuan dan analisis sosial-politik, dan pada saat yang sama merupakan aksi yang berbasis iman dan hak asasi manusia. Praktiknya berpedoman pada norma-norma dan nilai-nilai dasar dari basis tersebut. Karena itu, diakonia membutuhkan kemampuan untuk mengekspresikan dirinya secara tepat, dengan menggunakan jenis terminologi sekuler yang dibutuhkan untuk aksi sosial yang teratur dan juga bahasa iman dalam wujud bahasa teologis yang teratur. Hanya dengan demikianlah kita dapat mengomunikasikan sifat khas karya diakonia secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, dan sebagai tambahan, kita dapat melakukan refleksi yang luas dan kritis terhadap praksis diakonia.

Kemampuan untuk mempertahankan identitasnya sebagai pelaku berbasis iman dan hak asasi manusia sangat penting dalam memahami hubungan antara diakonia dan pembangunan. Apakah benar jika dikatakan bahwa pembangunan adalah tujuan dari diakonia oikoumenis? Istilah itu sendiri sarat dengan nilai; beberapa pengamat menganggap bahwa istilah ini terlalu berpusat pada ekonomi dan bergantung pada ideologi Barat. Namun demikian, organisasi-organisasi berbasis iman, dan sebagian besar anggota ACT Alliance, tetap memilih untuk menggunakan istilah ini, pertama-tama karena fungsinya yang luas, terutama di arena publik. Sebagian lainnya, terutama suara-suara kritis dari negara-negara Selatan, yang berpandangan bahwa istilah “pembangunan” tidak dapat mengatasi struktur-struktur yang tidak adil di dunia, yang kebanyakan berakar pada masa kolonial. Mereka lebih memilih konsep-konsep seperti pembebasan, dan menyatakan perlunya terminologi yang menegaskan pentingnya mengubah sistem kekuasaan dan dominasi global secara radikal.

ACT Alliance mengekspresikan kegelisahannya ketika menggunakan istilah “pembangunan”, dan kemudian menambahkan kata “transformasional”, yang mengindikasikan bahwa pembangunan tidak dapat dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Pembangunan mencakup aspek politik, sosial, dan budaya, yang seluruhnya patut dipertimbangkan. Selain itu, transformasi menantang semua mitra yang terlibat untuk secara kritis menguji sikap, gaya hidup, dan pola aksi mereka. Dalam hal ini, transformasi memiliki konotasi teologis yang jelas karena merefleksikan nasihat dalam Roma 12:2 untuk tidak “menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu”, memahami kehendak Allah “yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna”.

Perlu dipertanyakan apabila satu istilah tunggal dapat sepenuhnya mengekspresikan tujuan dari aksi diakonia, baik itu pembangunan, transformasi, perubahan, maupun pembaruan. Semua istilah tersebut mengungkapkan kebutuhan untuk menanggapi isu-isu kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan ekologi yang sedang hangat, untuk membela martabat manusia dan mengusung visi dunia yang lebih adil dan damai. Seperti yang dinyatakan dalam sebuah usulan dari Africa and Middle East Regional Consultation saat menanggapi proses konsultasi ACT mengenai perubahan paradigma pembangunan:

Dalam konteks di saat masyarakat mengalami eksklusi, konflik, dan persekusi, ACT Alliance ditantang untuk berkarya untuk restorasi, transformasi, dan pembaruan harapan.

Alih-alih membangun satu tujuan yang lebih luas, akan lebih bermakna jika menetapkan serangkaian tujuan, seperti halnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Tujuan-tujuan ini menunjuk pada realitas yang kompleks di mana diakonia oikoumenis berlangsung, seperti halnya semua agen pembangunan. Dalam konteks ini, tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan apa yang seharusnya menjadi tujuan dan sasaran mereka. Diakonia oikoumenis akan dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merumuskan visi mereka sendiri untuk masa depan yang lebih baik, dan menjadi agen utama untuk memperjuangkannya.

Selain bantuan dan pembangunan, diakonia oikoumenis juga mendorong pembangunan komunitas yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Komunitas yang harmonis bergantung pada hubungan yang sehat dan saling menghormati, bukan pada eksploitasi, sektarianisme, atau diskriminasi. Oleh karena itu, dimensi oikoumenis dalam diakonia menjadi sangat penting untuk mendorong stabilitas tersebut.

Dari perspektif iman, masa depan sepenuhnya adalah milik Allah. Diakonia diilhami oleh janji Allah tentang harapan dan masa depan (Yeremia 29:11). Kerajaan yang telah didatangkan oleh Yesus, memberitakan “kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus” (Roma 14:17). Kerajaan itu masih akan datang dalam arti yang sesungguhnya. Sebagai bagian integral dari misi gereja, diakonia memiliki mandat untuk memberitakan kedatangannya, pertamanya dengan mempersiapkan dan menyebarkan nilai-nilainya. Dari perspektif ini, iman akan selalu menjadi sumber utama bagi aksi diakonia, yang memberikan spiritualitas resistensi terhadap semua kekuatan jahat—tetap teguh dalam pengharapan dan keyakinan di dalam Allah Kehidupan. Dari perspektif yang sama, diakonia akan selalu berkomitmen pada keadilan sebagai bagian integral dari pengharapan yang diberikan Allah kepada ciptaan. Tema Sidang Raya ke-10 WCC di Busan, “*God of Life: Lead Us to Justice and Peace*”, mengartikulasikan dengan baik apa yang diperjuangkan dalam aksi diakonia, sebagai aksi yang berbasis iman dan hak asasi manusia.

6.3 Keterkaitan antara apa sebenarnya gereja dan apa yang dilakukan gereja

Diakonia adalah bagian dari esensi menjadi gereja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari misinya. Menurut mantan Sekretaris Jenderal LWF, Ismael Noko, diakonia adalah bagian dari struktur DNA keberadaan gereja. Oleh karena itu, gereja tidak dapat melimpahkan diakonia kepada lembaga atau organisasi tersendiri. Gereja-gereja memainkan peran penting, termasuk dalam diakonia oikoumenis, dan karena itu pula, diakonia merupakan karya gereja-gereja. Namun demikian, jika gereja-gereja menyerahkan mandat

diakonia kepada lembaga-lembaga tersendiri, gereja-gereja akan kehilangan sebuah dimensi fundamental dari keberadaan mereka.

Gereja bersifat lokal dan global; setiap jemaat Kristen adalah gereja dalam arti yang sesungguhnya, dan pada saat yang sama terhubung secara erat dengan komunitas Kristen di seluruh dunia. Secara teologis, kedua dimensi tersebut mengekspresikan sifat keanggotaan dalam tubuh Kristus. Diakonia menyatukan gereja, baik secara lokal maupun global. Saling berbagi sumber daya dan aksi solidaritas serta saling membantu menegaskan bahwa kita terkait satu sama lain.

Hal ini tidak berarti bahwa karya diakonia hanya ditujukan kepada anggota gereja atau persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia. Sebagai orang Kristen, kita memiliki panggilan yang sama untuk melayani dan memperhatikan semua orang yang membutuhkan dan untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian ketika martabat manusia terancam serta menjadi penatalayan yang bertanggung jawab atas ciptaan Allah.

Pemahaman tentang keterkaitan satu sama lain sebagai gereja melampaui aksi bersama. Kita mengakui satu sama lain sebagai anggota dari keluarga yang sama dan dalam ikatan iman, pengharapan, doa, dan kemuridan yang setia, sebelum kita terlibat bersama-sama dalam karya diakonia yang konkret. Ikatan-ikatan tersebut berpotensi untuk menambah kualitas aksi diakonia; ikatan-ikatan tersebut dapat memupuk rasa saling menghormati, praktik-praktik partisipatoris, dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, kemitraan dalam diakonia oikoumenis adalah sebuah anugerah; kemitraan lebih dari sekadar membangun relasi untuk tujuan-tujuan praktis. Kemitraan terbuka untuk saling memperkaya dan belajar; kemitraan membutuhkan rasa saling menghormati dan kepekaan terhadap keprihatinan masing-masing mitra. Perbedaan di antara para mitra haruslah menjadi kekuatan, bukan menjadi hambatan. Yesus mengajarkan murid-murid-Nya untuk merombak sistem nilai yang berlaku dan mengakui karunia serta kemampuan kaum miskin (Markus 12:41-44; Lukas 18:1-8). Hal ini sesuai dengan temuan dalam Konsultasi Kolombo, yang mencoba untuk memahami kembali diakonia dari sudut pandang masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Hubungan yang erat antara keberadaan dan perbuatan berlangsung dalam dua arah; praktik diakonia memperdalam pemahaman diri kita sebagai sebuah komunitas iman, dan memanggil kita untuk melakukan pertobatan dan pembaruan diri. Diakonia Oikoumenis, bersama dengan berbagai wujud solidaritas internasional lainnya, merawat kehidupan gereja-gereja, kehidupan ibadahnya, pemahamannya akan pertanyaan-pertanyaan etis dan proses pembentukan anggota-anggota gereja sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

6.4 Diakonia sebagai Aksi Berbasis Iman dan Hak

Iman merupakan sesuatu yang alkitabiah, dan penafsiran atau penerapannya dalam hal perlindungan hak asasi manusia didefinisikan dengan *agape*. Iman memberikan pemahaman yang mendalam dan penghayatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemahaman dan penghayatan tersebut terungkap dalam integritas teologis, kedalaman spiritual, dan kekuatan moral, yang mungkin tidak dimiliki oleh cara pandang sekuler. Komunitas-komunitas iman percaya bahwa semua orang diciptakan menurut gambar Allah. Komunitas-komunitas iman tidak akan pernah berhenti menegaskan martabat setiap orang.

Hak asasi manusia mempertajam wawasan iman, sehingga lingkup struktural dari berbagai kebutuhan dunia dapat dilihat. Hak asasi manusia membantu membingkai karya diakonia untuk dapat mencapai perubahan yang lebih baik. Hal ini menarik perhatian kita pada skala universal; melampaui batas-batas wilayah kita sendiri hingga ke skala regional dan global. Hal ini menghindarkan kita dari tren untuk menjadi mangsa partikularisme atau sektarianisme. Oleh karena itu, tindakan berbasis iman dan berbasis hak saling menguatkan satu sama lain.

Menegaskan martabat semua orang berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki hak. Pengungsi dapat kehilangan hampir semua hal, tetapi tidak pernah kehilangan hak mereka atas keadilan.

Advokasi adalah bagian integral dari diakonia. Dalam praktiknya, diakonia mencari cara-cara untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan terlibat dalam proses-proses yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan sosial, dan kesejahteraan

bagi semua orang sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai aksi berbasis hak, diakonia juga berpegang pada prinsip bahwa hak asasi manusia yang universal dan tak terpisahkan merupakan landasan dari undang-undang hak asasi manusia internasional, seperti yang ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 1948, dan ditegaskan kembali dalam berbagai konvensi, deklarasi, dan resolusi hak asasi manusia internasional. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa gereja-gereja pendiri Dewan Gereja-gereja se-Dunia berperan aktif dalam pembentukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini. Para pelaku diakonia siap untuk bekerja dengan semua pihak yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan berusaha untuk membangun jejaring dan platform strategis untuk menerapkan dan mempraktikkan hak asasi manusia.

Unsur-unsur utama dari iman kristiani memberikan pemahaman yang mendalam dan penghayatan terhadap aksi berbasis hak asasi manusia: citra Allah sebagai Allah yang penuh kasih dan kepedulian; citra manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan diciptakan untuk hidup dalam komunitas bersama dengan sesamanya; memori tentang Yesus dan pelayanan profetis-Nya; janji Roh Allah yang memberikan kehidupan dan kekuatan untuk aksi yang membebaskan. Unsur-unsur ini memotivasi aksi diakonia. Unsur-unsur ini memengaruhi pembentukan etos dan cara kerjanya. Selain itu, basis iman para agen diakonia menghubungkan mereka dengan jejaring gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia, yang berpotensi untuk membangun kemitraan dan komitmen untuk mewujudkan keadilan. Salah satu aset penting dari diakonia oikoumenis adalah bahwa diakonia merupakan bagian dari jejaring gereja-gereja global, yang di satu sisi secara aktif menghubungkan gereja-gereja di tingkat lokal dengan keterlibatan diakonia mereka, dan di sisi lain mengorganisasi berbagai inisiatif advokasi di tingkat internasional.

Diakonia yang berbasis hak mengacu pada keadilan sebagai tema sentral dalam tradisi Alkitab. Dalam perspektif biblis, keadilan adalah anugerah Allah, bukan pencapaian manusia atau fenomena eksternal. Keadilan adalah komitmen Allah kepada umat-Nya; keadilan “muncul dari hubungan yang setia antara Allah dan manusia, dan dimanifestasikan dalam bentuk kasih, kebenaran, dan pembebasan dalam kehidupan umat Allah”. Keadilan Allah bersifat menyelamatkan; tujuannya adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa,

ketidakadilan dan penderitaan. Para nabi dalam Perjanjian Lama mengkritik keras ketidakadilan sistemik dan cara para penguasa menyalahgunakan kekuasaan mereka. Yesus menegaskan tradisi kenabian ini dan menyatakan keadilan sebagai sebuah tindakan yang lebih dari sekadar menaati hukum Taurat (Lukas 10:42). Memperjuangkan keadilan adalah dimensi inti dari kemuridan yang hidup, sebagai sebuah mandat untuk membangun hubungan yang benar di antara sesama manusia, dalam hubungannya dengan seluruh ciptaan Allah, dan juga dengan Allah.

Tradisi ini mengamanatkan diakonia agar bersifat profetis, mengecam segala bentuk ketidakadilan, dan mengusung pandangan Alkitab tentang keadilan dan perdamaian. Istilah Ibrani untuk keadilan, *sedaqah*, menyatakan sebuah kehidupan bersama di mana kebenaran berkuasa, yang mengakui setiap individu sebagai sesama dan warga dunia, dengan akses yang merata terhadap aset bersama. Keadilan dan perdamaian adalah milik bersama; istilah Ibrani *shalom* memiliki makna yang jauh lebih luas daripada damai sebagai lawan kata dari perang. Kata ini berarti kesejahteraan dan kehidupan bersama yang harmonis. Dari perspektif ini, tidak ada keadilan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Oleh karena itu, diakonia oikoumenis sebagai aksi berbasis hak berkomitmen pada keduanya.

Bagaimana pelaksanaan diakonia oikoumenis merefleksikan basis iman dan haknya? Hal ini akan memengaruhi cara merumuskan visi dan tujuan dari karya diakonia. Selain itu, hal ini juga akan memengaruhi pilihan bidang-bidang aksi, kemitraan, dan metode kerja. Refleksi ini haruslah “disipliner”, baik dalam pengertian bahwa ia didasarkan pada pemahaman interdisipliner mengenai sifat dan peran yang berbeda dari diakonia oikoumenis, maupun berorientasi pada praksis, dalam pengertian bahwa ia dapat memperkuat kompetensi profesional para pelakunya.

6.5 Kekhasan organisasi berbasis iman

Organisasi berbasis iman (FBO) pertama kali muncul sebagai istilah di Amerika Serikat pada 1970-an. Saat ini istilah ini banyak digunakan untuk organisasi yang mendasarkan misi dan nilai-nilai mereka pada keyakinan agama ketika

mengambil peran sebagai agen sosial. Bank Dunia telah memberikan kontribusi besar dalam pengakuan terhadap FBO sejak tahun 1998 dengan mengundang para pemuka agama untuk berdialog tentang peran para aktor agama dalam pembangunan.

FBOs, di antaranya lembaga diakonia, merupakan aktor penting dalam masyarakat sipil, khususnya dalam karya pembangunan. Baik sistem PBB maupun negara-negara di dunia melibatkan mereka ke dalam rencana kerja dan siap membiayai kegiatan-kegiatannya. Ada banyak alasan untuk hal ini. Salah satunya adalah reputasi sebagai aktor yang profesional dan efisien di garis depan dalam memerangi kemiskinan ekstrem, melindungi mereka yang rentan, memberikan layanan mendasar, dan meringankan penderitaan; yang lainnya adalah pengakuan yang makin kuat terhadap peran agama dalam pembangunan. Selanjutnya, hal ini akan direfleksikan dalam kaitannya dengan FBO secara umum, tetapi juga dengan mengacu pada lembaga-lembaga diakonia.

Lembaga bantuan pemerintah mengakui FBO sebagai “nilai tambah”, terkait dengan cara kerja dan pengorganisasiannya. FBO berorientasi pada akar rumput, menjangkau masyarakat miskin dan memobilisasi masyarakat sipil. Selain itu, FBO mempekerjakan orang-orang yang berkomitmen, dengan biaya administrasi yang lebih sedikit, fleksibel, dan mampu menangani proyek-proyek kecil. Masyarakat memercayai mereka dan otoritas moral mereka. Kehadiran mereka tidak terbatas pada periode pelaksanaan program dan proyek—relasi saling terkait terjalin sebelum, selama, dan setelah terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Namun demikian, reputasi ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan, dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa jadi merupakan hasil dari ketidakpercayaan terhadap karya pembangunan pemerintah dan kebijakan publik. Oleh karena itu, FBO harus kritis terhadap diri sendiri ketika menegaskan kekuatan dan nilai-nilai khasnya. Pada saat yang sama, FBO juga harus menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah dan kebutuhan akan sistem kesejahteraan publik.

Dari sudut pandang FBO, lebih masuk akal untuk membicarakan “nilai inti” daripada “nilai tambah”. Poin-poin yang disebutkan di atas mengungkapkan apa yang dinyatakan oleh sebagian besar FBO dalam visi mereka dan menggambarkan inti dari apa yang memotivasi mereka untuk bertindak. Maksudnya

di sini bukan untuk mengeklaim bahwa FBO lebih efektif dan lebih mampu mempraktikkan nilai-nilai, misalnya, dibandingkan dengan LSM lain. Hal ini lebih untuk menekankan potensi khusus dari organisasi-organisasi ini ketika berhubungan dengan komunitas religius, dan pemahaman mendalam mereka tentang iman sebagai pendorong perubahan sosial.

Meskipun selama beberapa dekade agama tidak menjadi isu dalam pembangunan, hal ini telah berubah semenjak pergantian milenium. Ada banyak alasan atas tumbuhnya kesadaran akan pentingnya agama dalam pembangunan. Di sini kita hanya akan berfokus pada dua hal: peran pemuka agama sebagai pemegang otoritas moral, dan pentingnya iman sebagai motivasi dan energi dalam kehidupan masyarakat.

Kampanye penanggulangan HIV dan AIDS menunjukkan peran penting para pemuka agama dalam pembangunan, baik untuk hal yang baik maupun yang buruk. Selama mereka membungkam realitas pandemi, dan bahkan berkontribusi dalam kecaman moral terhadap para korbannya, kampanye ini menemui hambatan besar. Hal ini berubah ketika para pemuka agama mulai bersuara dan menggunakan otoritas mereka untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan tes HIV dan menjadi teladan, serta memberikan pendampingan untuk mendapatkan akses perawatan medis. Dalam kampanye melawan FGM, dan dalam upaya mencegah penyebaran Ebola, para pemuka agama mengambil peran yang sama.

Hal yang sama juga terjadi ketika FBO terlibat dalam karya kemanusiaan. Hal ini ditegaskan dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh UNCHR di Jenewa pada 2012 dengan tema "*Faith and Protection*", di mana Komisioner Tinggi menyoroti peran penting yang dimainkan oleh organisasi-organisasi berbasis keagamaan dan komunitas-komunitas keagamaan lokal dalam melindungi para pencari suaka, pengungsi, para pengungsi internal dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dalam pertemuan ini, sebuah kesepakatan dihasilkan terkait prinsip-prinsip utama karya kemanusiaan, termasuk kemanusiaan, ketidakberpihakan, non-diskriminasi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain, keberagaman, pemberdayaan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap segala bentuk ketergantungan.

Iman sangat penting dalam kehidupan orang-orang awam. Iman mengarahkan pandangan dunia dan sistem nilai manusia, harapan dan perjuangan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, para pelaku pembangunan, khususnya para agen diakonia, tidak dapat mengabaikan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu elemen yang penting adalah potensi untuk membentuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Iman akan membentuk identitas seseorang. Ketika kita bertanya kepada diri sendiri, “Siapakah saya? Untuk apakah saya?”, hal ini akan menciptakan relasi dan memupuk rasa saling memiliki. Iman akan membuka ruang-ruang aksi, tempat pelatihan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan keterampilan kepemimpinan.

Karena FBOs berakar pada komunitas iman, mereka memiliki akses yang cukup mudah ke para pemuka agama dan dapat melibatkan mereka dalam karya-karya FBO, dengan menghargai integritas mereka. Banyak FBOs juga melibatkan para pemuka agama yang berbeda, yang dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan politik lokal.

Agen pembangunan membutuhkan kompetensi dalam hal iman dan agama. Di masa lalu, hal ini tidak sepenuhnya berlaku, bahkan bagi orang-orang yang dipekerjakan oleh FBO. Hal yang penting adalah untuk memahami masalah-masalah agama dan iman sebagai elemen integral dari kompetensi profesional. Bagi para agen diakonia, hal yang terjadi adalah sebaliknya: mereka harus menyadari dan mampu mengartikulasikan dalam bahasa sekuler kekhasan dan nilai-nilai inti dari karya diakonia ketika (secara kritis) bermitra dengan para agen pembangunan. Dengan kata lain, untuk membangun kemitraan yang bermanfaat dengan pemerintah dan organisasi-organisasi sekuler lainnya, para pelaku diakonia diharapkan dapat “bilingual”: berbicara dalam bahasa iman dan bahasa sekuler.

6.6 Aset-Aset Diakonia

Dalam karya pembangunan, telah terjadi pergeseran fokus dari pendekatan berbasis kebutuhan ke pendekatan berbasis aset, yang berarti menekankan pada sumber daya dan kompetensi lokal yang dimiliki bukan pada apa yang kurang.

Ketika mengacu pada aset, kita berbicara tentang berbagai jenis modal sosial yang mungkin dimiliki oleh sebuah komunitas, kelompok, atau bahkan organisasi. Modal sosial dapat terkait dengan pengalaman dan wawasan kolektif, praktik sosial, iman dan keragaman bakat, serta keterampilan individu. Penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mengungkapkan realitas kompleks dari aset kesehatan yang dipergunakan oleh masyarakat saat sakit. Aset-aset tersebut tidak hanya mencakup aset berwujud seperti rumah sakit dan dokter, tetapi juga aset tidak berwujud, yang kebanyakan terkait dengan imannya, seperti doa dan berkat. Tenaga kesehatan yang mengabaikan aset tak berwujud ini berarti memiliki pemahaman yang terbatas tentang “dunia kesehatan” pasiennya, dan kemampuan yang dimiliki untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan.

Bagaimana kita dapat menerapkan wawasan ini dalam kaitannya dengan praktik diakonia? Sebagai sebuah aksi bersama, diakonia oikoumenis menjadi sebuah arena bagi berbagai mitra yang berbeda untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Gereja-gereja lokal, lembaga-lembaga dan departemen diakonia, serta lembaga-lembaga internasional berkontribusi dengan sumber daya yang beragam, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aset-aset diakonia tersebut, sebagaimana kita menamainya, menegaskan keunikan aksi diakonia, nilai-nilai utamanya dan dasar kekuatan profesionalnya.

Umumnya aset-aset diakonia berwujud. Misalnya, *praktik kepedulian terhadap orang-orang yang sakit dan membutuhkan* yang telah berlangsung lama, yang selalu menjadi bagian integral dari pelayanan pastoral gereja. Belakangan ini, pelayanan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk berbagai program dan proyek, pemberian layanan, program-program pendidikan, advokasi dan penegakan hak-hak asasi manusia. Pelayanan ini melibatkan sejumlah besar lembaga dan struktur, berbagai macam fasilitas diakonia seperti rumah sakit, pusat pelatihan, kantor, dan fasilitas lainnya didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan. Organisasi-organisasi diakonia dan pelayanan-pelayanan khusus—lokal, nasional, dan internasional—juga merupakan aset-aset tersebut, begitu pula dengan jemaat-jemaat lokal, gereja-gereja nasional, dan badan-badan oikoumenis.

Praktik diakonia sering kali menjadi *pelopor*; ini juga merupakan aset. Praktik diakonia memperkenalkan pelayanan kesehatan dan sosial yang baru. Pada abad ke-19, lembaga-lembaga diakonia adalah pihak yang pertama kali mendirikan pelayanan-pelayanan bagi para penyandang disabilitas fisik dan mental, yang membawa perubahan yang signifikan dalam situasi kehidupan orang-orang yang dilayani, dan pengakuan terhadap mereka sebagai bagian dari masyarakat. Karya diakonia juga mendorong peran perempuan dan karenanya pula turut menyuarakan tentang kesetaraan gender. Dalam banyak konteks, inisiatif diakonia adalah respons terhadap situasi diskriminasi, pengabaian atas hak asasi manusia, dan marginalisasi sosial oleh karena kepemimpinan politik yang tidak bertanggung jawab.

Aset utama dari pelayanan diakonia adalah orang-orang Kristen secara individu. Perempuan dan laki-laki Kristen, yang dimotivasi oleh iman untuk menyatakan panggilan kasih kristiani dalam perbuatan, baik secara individu maupun kolektif, sangat diperlukan dalam layanan diakonia. Banyak diakonia yang diam-diam dilakukan oleh individu (sering kali secara sukarela, bahkan menggunakan biaya sendiri), namun sangat penting bagi kepedulian sosial. Kunjungan ke seorang tetangga lansia yang kesepian atau orang yang sedang dirawat di rumah sakit merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Yesus: “ketika Aku sakit, kamu melawat Aku ...” (Matius 25:36). Interaksi kepedulian antarmanusia semacam ini tidak dapat digantikan oleh mesin atau teknologi.

Dengan merefleksikan kontribusi orang Kristen secara individu, *sumber daya manusia* merupakan bagian besar dari aset yang berwujud. Aksi diakonia bergantung pada tenaga-tenaga yang terampil. Banyak dari mereka memadukan kompetensi profesional dengan motivasi pribadi yang kuat yang dilandasi oleh iman mereka. Beberapa orang menyebutnya sebagai etos pelayanan.

Lebih jauh lagi, diakonia bergantung pada *sumber daya ekonomi*. Aksi diakonia dimungkinkan berkat adanya dana dan yayasan, properti, juga para donor dan penyandang dana, baik swasta maupun publik. Gereja-gereja di belahan bumi Selatan makin menyadari pentingnya menggalang dana lokal sebagai sebuah ekspresi untuk membangun kemandirian dan martabat.

Terakhir, terdapat *sumber daya komunikasi*. Publikasi, materi pendidikan dan bentuk komunikasi lainnya adalah aset yang digunakan untuk mengem-

bangkan sikap, tanggung jawab, kesempatan, dan kompetensi yang relevan untuk mengupayakan perubahan.

Pemaparan aset-aset berwujud ini mungkin memberi kesan bahwa karya-karya tersebut sangat bergantung pada pola-pola Barat dalam mengorganisasi karya diakonia, dengan ketergantungan pada sumber daya keuangan dan kinerja profesional. Dari perspektif ini, aksi diakonia dapat terlihat sebagai sesuatu yang diimplementasikan “dari atas”. Fokus pada aset-aset tidak berwujud memberikan sudut pandang yang berbeda dan membuka ruang untuk melihat diakonia “dari bawah”, dengan perhatian utama pada peran dan sumber daya kaum awam.

Aset tak berwujud lebih sulit untuk dikelompokkan. Berikut ini adalah beberapa indikasinya:

Memori kolektif masa lalu. Hal ini mencakup berbagai narasi, terutama kisah-kisah tentang Yesus di dalam Alkitab, yang memberi teladan saat merawat orang sakit, lapar, dan miskin. Ada juga kisah-kisah lain, termasuk perempuan dan laki-laki awam yang dikenal dari sejarah dan komunitas mereka sendiri. Mereka mungkin adalah para pendiri, orang-orang yang memelopori aksi diakonia. “Kumpulan kesaksian” ini mendorong dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menumbuhkan keyakinan bahwa merupakan sesuatu yang mungkin untuk membuat perubahan. Kisah-kisah tentang pemulihan, transformasi, rekonsiliasi, dan pemberdayaan di masa lalu akan membuat orang yakin bahwa hal yang sama juga dapat dilakukan saat ini.

Selanjutnya, terdapat *ritus* dan *ritual*. Orang-orang berbagi momen-momen sakral yang menumbuhkan dan memperkuat iman, harapan, dan kasih mereka. Hal ini dialami dalam ibadah di gereja, saat bernyanyi dan menari bersama, bahkan saat pemakaman. Sakramen-sakramen dan ritus-ritus doa syafaat, pemberkatan, dan pengudusan sering kali menumbuhkan panggilan untuk melayani sesama, bahkan di saat-saat penderitaan dan pergumulan.

Terkait dengan hal ini, ada *etos diakonia*, yang didasarkan pada konsep martabat manusia, kehidupan yang sakral, dan panggilan untuk melindungi dan membela kehidupan manusia. Komunitas-komunitas iman akan menyebarkan sistem nilai dan sikap yang mendukung praktik keadilan, kejujuran, inklusivitas, belas kasihan, dan kepedulian. Kekhasan diakonia kristiani sering

kali terwujud dalam sikap-sikap yang hanya dapat digambarkan secara spiritual (atau sebagai aset yang tidak terlihat), seperti sikap penuh belas kasihan, kesabaran, kerendahan hati, penghargaan yang tinggi terhadap martabat manusia yang ditunjukkan kepada para korban kekerasan, orang yang sakit, orang yang sedang sekarat, dan sikap teguh berpengharapan dalam situasi keputusan. Sikap-sikap ini tidak dapat diukur seperti nilai-nilai ekonomi atau standar medis profesional dalam pelayanan sosial, namun sikap-sikap ini memberikan cita rasa dan kualitas serta profil yang khas dari diakonia kristiani.

Sebagai tambahan, *rasa saling memiliki dan menjadi bagian dari sebuah keluarga besar*. Hubungan semacam ini mampu menumbuhkan gagasan bahwa masing-masing adalah subjek yang memiliki tugas untuk dipenuhi. Hubungan semacam ini memotivasi praktik-praktik hospitalitas dan visitasi sebagai ekspresi saling peduli dan memberdayakan orang-orang untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Seluruh elemen ini membentuk cara pandang masyarakat dan pemahaman dasar tentang apa yang nyata, apa yang masuk akal, dan apa yang memberi makna. Mereka adalah aset diakonia karena mereka memiliki kemampuan untuk memobilisasi orang-orang awam untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama, dan memberdayakan mereka untuk terlibat dalam proses-proses yang menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

Pemaparan tentang aset ini mungkin terlihat terlalu idealis, tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang Kristen tidak selalu berkomitmen seperti yang diperlihatkan dalam uraian di atas, dan jemaat juga tidak selalu sepenuh hati terlibat dalam karya diakonia. Lembaga-lembaga juga tidak selalu mengutamakan kerja sama dengan gereja-gereja lokal, dengan mengakui aset-aset yang mereka miliki. Pengamatan kritis seperti ini penting, tetapi seharusnya tidak mengarah pada sikap meremehkan aset-aset diakonia, atau mengabaikannya. Sebaliknya, pengamatan tersebut harus memotivasi semua mitra yang terlibat untuk terlibat dalam dialog tentang bagaimana menggerakkan aset-aset diakonia tersebut dan memperkuat peran mereka dalam kegiatan-kegiatan yang konkret.

Para agen diakonia *dipercaya sebagai agen sosial*, dan sebagai juru bahasa solidaritas internasional, oleh masyarakat pada umumnya dan oleh gerakan-gerakan kerakyatan, otoritas lokal, dan lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga-lembaga pemerintah. Kepercayaan ini juga merupakan aset lain dan merupakan hasil dari komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. *Kewibawaan moral* adalah aset lainnya, yang digunakan ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif, dan ketika mendorong perilaku etis, misalnya ketika menangani korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik. Harus diakui, gereja dan para agen diakonia tidak selalu menerapkan peran profetis ini dan dalam beberapa kasus. Mereka justru menggunakan wibawa moral mereka untuk tujuan-tujuan lain. Selama aset-aset seperti itu ada, peluang untuk kehadiran dan kesaksian profetis akan terus ada.

Sangat penting bagi para aktor profesional diakonia untuk memahami potensi aset-aset diakonia dan mengetahui bagaimana mereka terhubung dengan aset-aset tersebut ketika melakukan karya. Aset-aset diakonia sering kali kurang dikomunikasikan atau bahkan diabaikan, terutama aset-aset yang tidak berwujud. Konsekuensinya adalah hilangnya kesempatan untuk mengartikulasikan kekhasan aksi diakonia profesional dan nilai-nilai intinya. Pendekatan berbasis aset yang mengakui keragaman aset diakonia berpotensi untuk meningkatkan kualitas karya diakonia, untuk memastikan tingkat partisipasi lokal yang lebih tinggi dan rasa memiliki ketika mengimplementasikan proyek dan program. Bagaimanapun, keberlanjutan dan dampak jangka panjang bergantung pada sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut tertanam dalam pandangan hidup dan sistem nilai orang-orang yang dilibatkan.

6.7 Bahasa Diakonal

Bahasa sungguh berharga; memiliki kekuatan untuk menamai seseorang. Ada perbedaan besar antara menamai seseorang sebagai penerima atau sebagai pemegang hak. Penamaan kegiatan mengandung kekuatan yang sama dalam hal definisi. Ada perbedaan apakah sebuah kegiatan disebut sebagai diakonia atau karya pembangunan.

Di masa lalu, banyak lembaga diakonia berbasis gereja yang ragu-ragu dalam menggunakan istilah diakonia dan menggunakan bahasa “diakonal” ketika menjelaskan kegiatan mereka. Alasan utamanya adalah pandangan bahwa terminologi diakonia tidak dapat dikomunikasikan dengan baik, khususnya dengan kalangan luar gereja, misalnya kalangan donatur dari pemerintah. Dalam banyak konteks, istilah diakonia masih belum dikenal. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menggunakan bahasa umum yang berkembang saat menulis proposal dan laporan yang berkaitan dengan karya mereka. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa bahasa sekuler ini tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk mengekspresikan identitas aksi diakonia. Hal ini menjadi jelas ketika para donor dari pemerintah meminta lembaga-lembaga berbasis iman untuk menjelaskan nilai lebih dan kekhasan mereka sebagai agen pembangunan. Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh gereja-gereja lokal, yang menanyakan apa yang membedakan karya lembaga diakonia dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekuler.

Laporan dari *Ecumenical Conversation 21* selama Sidang WCC di Busan pada 2013 membahas masalah ini:

Para peserta menegaskan bahwa gereja-gereja, mitra oikoumenis, dan WCC harus merespons tanda-tanda zaman dengan mengembangkan bahasa diakonal yang sama. Kita berbasis iman dan berbasis hak dan kita perlu mengidentifikasi apa artinya hal ini dalam praktiknya, termasuk dalam mendefinisikan mandat dan nilai-nilai inti kita serta memetakan aset-aset diakonia kita.

Pernyataan ini menunjukkan manfaat dari pengembangan sebuah bahasa diakonal; yang menyediakan sebuah platform bersama bagi semua mitra yang terlibat dalam diakonia oikoumenis, yang mengungkapkan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengartikulasikan sifat yang berbeda dari karya diakonia, yang mencakup dasar-dasar teologisnya dan refleksi yang teratur atas aksinya dari sudut pandang ilmu-ilmu sosial.

Bahasa diakonal, dengan kata lain, menyiratkan kemampuan untuk menggunakan terminologi religius dan sekuler, bukan sebagai bahasa yang

terpisah, tetapi dengan cara yang interdisipliner. Pendekatannya bersifat dialektis dalam arti bahwa pendekatan ini mengakui “dialek” religius dan sekuler sebagai sesuatu yang sah dan penting dalam proses membangun profesionalisme diakonia, yang berarti untuk dapat berkompeten dalam pelaksanaannya, dalam kemampuan untuk menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan.

Kemampuan untuk menggunakan lebih dari satu bahasa akan memperkuat kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam pendengar. Namun, hal ini tidak boleh dipahami sebagai berbicara dengan dua bahasa, dalam arti bahwa pesannya akan berbeda sesuai dengan konteks sekuler atau religiusnya. Pendekatan interdisipliner dan dialektika menyiratkan komunikasi kritis di antara keduanya. Bahasa sekuler akan mempertanyakan keabsahan dan jangkauan dari istilah-istilah religius, begitu juga sebaliknya. Hal ini terkait dengan fakta bahwa kata-kata tidak dapat menangkap realitas secara utuh, karena kata-kata yang berbeda memberikan wawasan yang lebih luas untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia dan kehidupan sosial.

6.8 Profesionalisme Diakonia

Di beberapa gereja, khususnya gereja-gereja Reformasi, terdapat tradisi panjang tentang pelatihan diakonia. Gerakan diakonia modern yang muncul di Jerman pada 1830-an menjadikan pelatihan diakones dan diaken sebagai sebuah elemen yang fundamental; lembaga-lembaga diakonia memberikan pendidikan untuk menjadi perawat dan pekerja sosial, yang selalu disertai dengan studi teologi. Pelatihan diakonia sejak saat itu memiliki ciri “kualifikasi ganda”, dan mengembangkan sebuah profesionalisme yang berupaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu.

Alasan utama dari pendekatan ini adalah bahwa kehidupan manusia, khususnya penderitaan manusia, bersifat multidimensi. Hal ini terbukti dalam hal penyakit, yang sering kali mencakup sisi fisik, mental, sosial, dan spiritual manusia, yang sering kali saling terkait, yang dapat menambah tingkat penderitaan. Oleh karena itu, profesionalisme diakonia meningkatkan pengetahuan interdisipliner dan pengembangan keterampilan yang memandang manusia

sebagai manusia seutuhnya. Tidak hanya tenaga kesehatan yang menyadari pentingnya pendekatan holistik ketika melakukan tindakan pemulihan dan pemberdayaan orang yang sakit. Dengan cara yang sama, ketika berkarya bagi perubahan sosial dan pemberantasan kemiskinan, pendekatan holistik ini membuat perbedaan, karena kemiskinan memiliki banyak sisi, tidak hanya sisi ekonomi dan politik, tetapi juga sisi mental dan spiritual. Untuk alasan yang sama, profesionalisme diakonia harus belajar bagaimana menggerakkan berbagai macam aset diakonia, dan tidak hanya menekankan pada beberapa aset.

Pelatihan diakonia menghubungkan teori dan praktik. Diakones dan diakon sering menghabiskan sebagian besar waktu pelatihan mereka di berbagai rumah sakit dan berbagai tempat yang serupa di mana mereka dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan praktis dan pada saat yang sama memperoleh pengetahuan teoretis. Karunia-karunia profesional yang digunakan dalam pelayanan-pelayanan diakonia ini terbentang mulai dari pengalaman dan pelatihan sebagai pendidik, pengurus komunitas, perawat, petani, penggerak ekonomi masyarakat, pendeta, pelayan jemaat, pekerja sosial, konselor, manajer, dan administrator. Dengan mengakui karunia-karunia yang mereka miliki secara profesional dan organisasi-organisasi tempat mereka bekerja menunjukkan kredibilitas bahwa hal ini perlu menjadi prioritas bagi diakonia oikoumenis. Diakoniat, sebagaimana disampaikan oleh DIAKONIA World Federation, telah mengembangkan pemahaman dan beragam ekspresi serta program diakonia selama lebih dari seratus tahun. Wawasannya merupakan aset yang berharga bagi lembaga pendidikan teologi dan lembaga pendidikan lainnya yang terlibat dalam pelatihan diakonia. Pernyataan ini mengungkapkan pandangan bahwa profesionalisme diakonia pada dasarnya bersifat praktis. Selain itu, pandangan ini menyatakan bahwa praksis merupakan sumber utama untuk mendapatkan wawasan yang baru dan inovatif. Dalam kerangka pengetahuan diakonia, teori merupakan refleksi kritis atas praktik, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitasnya.

Refleksi kritis secara khusus berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang metodologi dan cara kerja. Layaknya semua intervensi profesional, karya diakonia terkadang mengambil bentuk paternalistik yang menyebabkan kepasifan dan ketergantungan. Saat ini, diakonia oikoumenis berkomitmen

pada praktik berbasis hak yang menganggap manusia sebagai pemegang hak dan memandang mereka yang berkuasa sebagai pengemban tugas. Hal ini berarti preferensi untuk metode kerja yang menjamin partisipasi dan pemberdayaan. Pada saat yang sama, hal ini juga mencakup advokasi dan penyadaran sebagai bagian integral dari panggilan profetisnya. Kesadaran gender dan analisis gender merupakan komponen kunci dalam pembentukan profesionalisme diakonia.

Kompetensi diakonia membutuhkan perhatian dan pelatihan. Para pemimpin gereja pada umumnya akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan dasar tentang sifat dan praktik diakonia, namun sebagian besar seminari teologi belum memasukkan diakonia dalam program studinya. Demikian pula, hanya sedikit pemimpin kegiatan diakonia yang memiliki kesempatan untuk mempelajari diakonia dan membangun kompetensi profesional mereka dengan cara yang interdisipliner dalam merefleksikan praksisnya. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua pelaku diakonia oikoumenis untuk membuat rencana untuk membangun kompetensi diakonia, dan secara khusus mendorong lembaga-lembaga pelatihan untuk menawarkan program-program studi dalam bidang ini.

6.9 Kesimpulan

Bab ini telah menyajikan beragam perspektif tentang kekhasan diakonia oikoumenis. Ditegaskan pula, diakonia sebagai sebuah ekspresi dari hakikat dan misi gereja, sebagai sebuah konsep yang menyatukan apa yang menjadi panggilan gereja dan apa yang harus dilakukannya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun oikoumenis/global. Pemahaman akan identitas diakonia menyiratkan konseptualisasi tindakan diakonia yang berbasis pada iman dan hak. Keduanya merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat ditawar dari keberadaan dan tindakannya. Keduanya bersifat normatif dalam proses mengidentifikasi tujuan-tujuan untuk karyanya dan untuk mengembangkan sistem nilai dan metode kerja. Sebagai aksi yang berbasis iman dan hak, diakonia berkewajiban untuk membela martabat manusia dan mempromosikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan.

Dua ribu tahun praktik diakonia dalam berbagai konteks yang berbeda telah memberikan kekayaan pengalaman dan wawasan; semuanya merupakan sumber daya yang disajikan dalam bab ini sebagai aset diakonia. Bab ini lebih lanjut mengemukakan bahwa para pelaku diakonia, di semua tingkatan, memiliki akses terhadap aset-aset tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan merekomendasikan sebuah pendekatan berbasis aset yang berusaha untuk menggerakkan mereka ketika terlibat dalam berbagai kegiatan.

Badan-badan diakonia direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan keragaman aset diakonia dan mengakui peran yang mereka miliki, juga dalam karya diakonia profesional. Bab ini menjelaskan sebuah argumen untuk mengembangkan sebuah bahasa diakonia yang dapat mengomunikasikan identitas yang khas dari karya diakonia, dengan menggunakan wacana teologis dan wacana sekuler secara interdisipliner, dengan tujuan untuk membangun kompetensi diakonia, terutama bagi para praktisi diakonia. Referensi diberikan pada contoh-contoh pelatihan diakonia formal, dengan menunjukkan komponen-komponen yang harus dimasukkan.

Tujuan dari fokus pada kekhasan identitas dan praktik diakonia bukanlah untuk mengklaim superioritas dibandingkan dengan agen-agen sosial lainnya. Juga bukan untuk membayangkan sebuah masyarakat di mana para aktor berbasis gereja mendapatkan peran politik atau sosial yang dominan. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan kesan klerikalisme dan teokrasi yang tidak ada hubungannya dengan semangat diakonia. Dalam jangka pendek, tujuan diakonia adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan; dalam jangka panjang, tujuannya adalah untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, sebagai salah satu dari sekian banyak agen di dalam masyarakat sipil. Oleh karena itu, diakonia mengakui hak dan kewajiban pejabat publik dan sama sekali tidak berusaha untuk menggantikan atau melemahkannya. Pada saat yang sama, diakonia mengakui peran publiknya sebagai aktor sosial. Pemahaman yang jelas akan identitas dan aset-asetnya yang khas dimaksudkan untuk memberdayakan para pelaku diakonia agar dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.

B A B 7

Tantangan Kontemporer

7.1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh diakonia oikoumenis saat ini. Beberapa di antaranya berkaitan dengan faktor-faktor eksternal, seperti perubahan lanskap yang dijelaskan dalam Bab 5. Faktor-faktor ini mengharuskan para pelaku diakonia internasional untuk meninjau kembali tujuan dan strategi mereka. Secara khusus, agenda SDG merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan reorientasi dan membangun jejaring kerja sama. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, diakonia oikoumenis harus menyusun strategi sesuai dengan perannya yang khas sebagai agen berbasis iman dan hak, sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6.

Berikut ini, tiga bidang fokus perhatian akan dipaparkan. *Pertama*, berkaitan dengan sumber daya, dengan mengakui bahwa sumber daya yang ada terbatas. Bagaimana para pelaku diakonia dapat menjadi penatalayan yang bertanggung jawab atas sumber daya dan bekerja sama dengan lebih baik untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara yang terbaik? *Kedua*, yang membahas masalah ini dari perspektif kerja sama dengan orang lain; hal ini menunjukkan pentingnya jaringan strategis di dalam dan di luar kelompok

Kristen. Fokus *ketiga*, advokasi, menegaskan dimensi profetis dari diakonia oikoumenis sebagai strategi kunci dalam menjawab tantangan dalam lanskap yang terus berubah saat ini.

7.2 Sumber Daya yang Terbatas—Berbagi Sumber Daya

Bantuan antargereja, yang diorganisasi untuk menanggapi krisis pengungsi setelah perang dunia, bergantung secara khusus pada kampanye yang ditujukan kepada jemaat-jemaat dan individu-individu, yang mendorong mereka untuk mendukung karya ini secara finansial. Badan-badan nasional didirikan dengan tujuan untuk mengoordinasi kegiatan ini, dan untuk mengirimkan dana kepada badan-badan oikoumenis di Jenewa. Salah satu sumbangan yang diterima LWF untuk mendukung programnya terkait dengan pengungsi, yang dimulai pada 1947, berasal dari jemaat-jemaat di Namibia saat ini, yang menunjukkan sifat oikoumenis dari karya ini.

Sepanjang sejarah gereja, kegiatan diakonia bergantung pada kemurahan hati orang-orang Kristen yang setia, mengikuti teladan Rasul Paulus dan pengumpulan dana yang ia lakukan untuk membantu orang-orang miskin di Yerusalem.

Di Eropa, banyak lembaga diakonia yang didanai oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan sosial. Sejak tahun 1960-an, dengan fokus yang makin besar pada bidang pembangunan, banyak lembaga diakonia yang berbasis di negara-negara belahan bumi Utara mencari dana dari publik, terutama dari pemerintah-pemerintah nasional. Sistem PBB juga telah menjadi mitra pendanaan yang penting, khususnya UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). LWF World Service merupakan salah satu mitra terbesarnya secara global dan pada 2012, UNHCR dapat membantu pendanaan bagi 1,4 juta pengungsi. Pada 2014, UNHCR menandatangani nota kesepahaman dengan LWF, yang dalam kesempatan tersebut Janet Lim, Asisten Komisioner Tinggi UNHCR, memberikan tanggapannya mengenai tingkat pengungsian paksa yang tinggi secara global, dan mendeskripsikan LWF sebagai “mitra yang karib dan telah lama menjalin hubungan baik, dan kami sangat senang melihat cakupan kerja sama kami yang makin luas”.

Meskipun lembaga-lembaga diakonia masih dapat mengandalkan dukungan publik untuk karya-karya pengungsian dan bantuan kemanusiaan, tidak demikian halnya dengan karya-karya pembangunan jangka panjang dan kegiatan-kegiatan advokasi. Lembaga Belanda ICCO (Inter-Church Organisation for Development Cooperation) mengalami pengurangan dana pemerintah yang cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mereka harus mengurangi jumlah staf dan kegiatannya. Banyak lembaga lain yang mengalami tren yang sama dalam masalah pengurangan dana publik. Hal ini membuat beberapa lembaga mencari mitra pendanaan alternatif, misalnya perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap *corporate social responsibility* (CSR).

Sebagian besar dana untuk diakonia oikoumenis masih berasal dari jemaat dan perorangan. Meskipun pendanaan dari pemerintah mewajibkan untuk mengikuti syarat-syarat umum yang ketat, dana yang terkumpul biasanya tidak diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu, sehingga agen-agen memiliki lebih banyak keleluasaan dalam mengalokasikannya, misalnya dalam kemitraan dengan gereja-gereja dan badan-badan oikoumenis.

Namun demikian, donasi dari gereja juga perlahan menurun. Banyak gereja mengalami penurunan jumlah anggota. Hal ini terjadi di Jerman, di mana volume pajak gereja berkurang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Gereja-gereja lain, misalnya di negara-negara wilayah Nordik, menghadapi tantangan baru karena relasi mereka dengan negara berubah, dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengelola perekonomian gereja.

Kemungkinan tren ini akan terus berlanjut dan makin sedikit dana yang tersedia untuk diakonia oikoumenis di masa depan. Hal ini memengaruhi agen-agen dan kemampuan mereka untuk terlibat. Banyak yang telah memulai proses pengurangan jumlah negara tempat mereka berkarya, sementara ada juga tren untuk mengurangi jumlah kegiatan dan beralih dari proyek-proyek besar ke berbagai proyek yang lebih kecil dan lebih tepat sasaran.

Situasi ini menantang semua mitra yang terlibat dalam diakonia oikoumenis untuk mengupayakan koordinasi yang lebih baik. ACT Alliance membentuk sebuah kerja sama rutin yang berfungsi dengan baik dalam memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Hal ini juga terkait proses kerja sama dalam karya pembangunan jangka panjang dan kesaksian publik dan advokasi. Upaya

ini memungkinkan adanya pembagian sumber daya secara oikoumenis. Tampak jelas bahwa strategi-strategi baru harus disusun untuk menemukan cara terbaik dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, dan untuk membangun struktur yang memadai untuk berbagi dan bekerja sama. Dalam konteks di mana para donor mempertanyakan peran perantara dalam karya pembangunan, menjadi tugas yang mendesak untuk menjelaskan manfaat aktor multilateral dan mekanisme koordinasi.

Tugas penting lainnya adalah mengembangkan strategi dan mekanisme penggalangan dana yang terkoordinasi. Agen-agen juga akan menjadi internasional dalam arti bahwa mereka melakukan penggalangan dana secara global, bahkan di negara-negara belahan bumi Selatan. Hal ini mungkin akan menciptakan situasi ketegangan di antara para agen. Agen-agen yang terlibat dalam diakonia oikoumenis harus menghindari persaingan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang sama dan tunduk pada bahasa pasar. Strategi penggalangan dana harus melibatkan perusahaan-perusahaan komersial dan tanggung jawab sosial mereka. Para pelaku diakonia juga harus menyampaikan kepada pemerintah lokal bahwa karya diakonia adalah untuk kepentingan publik, dan oleh karena itu berhak mendapatkan dukungan dana dari publik.

Merupakan tugas yang penting pula untuk mendidik masyarakat, khususnya anggota gereja, untuk memberi dan berbagi sumber daya mereka dalam solidaritas dengan orang lain. Penatalayanan terus menjadi tema yang relevan, terutama di masa yang makin menonjolkan individualisme dan konsumerisme. Persembahan dan kepedulian terhadap sesama merupakan dimensi kemuridan Kristen yang membutuhkan landasan teologis, pengajaran dan khotbah, di semua gereja dan dalam semua konteks sosial.

Penatalayanan bukan hanya tentang uang. Gereja-gereja mampu untuk menggerakkan secara signifikan sumber daya manusianya melalui keterlibatan para sukarelawan, dan ini merupakan aset yang membutuhkan pengakuan dari para pelaku profesional. Meskipun sumber daya finansial merupakan hal yang mendasar bagi banyak kegiatan diakonia oikoumenis, akan sangat keliru jika kita menganggap uang sebagai satu-satunya sumber daya yang penting. Dalam beberapa dekade terakhir, diakonia oikoumenis mungkin memiliki akses yang sangat mudah untuk mendapatkan dana publik, sehingga para

pelaku diakonia kurang memperhatikan sumber daya nonfinansial yang menjadi syarat keberhasilan karya diakonia, seperti partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat sekitar.

Diakonia oikoumenis dapat belajar dari orang Samaria yang baik hati, yang menggunakan sumber daya yang ada ketika menolong korban kekerasan. Rasul Petrus tidak membiarkan ketiadaan perak dan emas menghambatnya ketika bertemu dengan seorang pengemis, di dalam nama Yesus Kristus ia menolong pengemis tersebut untuk berdiri di atas kakinya sendiri (Kisah Para Rasul 3:1-10). Selain itu, aksi diakonia masa kini dapat mengambil hikmat dari pernyataan St. Lawrence, seorang diakon di Roma, ketika ditantang oleh Kaisar yang mengeklaim diri sebagai harta gereja. St. Lawrence menyatakan bahwa orang miskin dan iman mereka adalah “harta sejati Gereja”.

7.3 Karya Diakonia Bilateral atau Multilateral?

Bantuan antargereja didirikan oleh gereja-gereja yang yakin bahwa aksi bersama akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan manusia pada masa setelah perang. Selain itu, gereja-gereja hendak bersaksi tentang kesatuan gereja. Khususnya, pada masa ketika peperangan telah menyebabkan kebencian di antara manusia, mereka berharap bahwa kerja sama dalam memberikan bantuan akan mendorong rekonsiliasi dan hubungan yang saling percaya.

Diakonia oikoumenis dalam bentuknya yang modern kemudian dimulai sebagai aksi multilateral. Badan-badan oikoumenis, yang berada di Jenewa, berperan untuk mengoordinasi karya yang didukung oleh sumber daya yang dihimpun dari berbagai negara dan gereja, dan untuk mengimplementasikannya melalui kerja sama dengan gereja-gereja lokal di daerah-daerah yang membutuhkan bantuan.

Kemudian, ketika lembaga-lembaga berbasis gereja mulai mengembangkan kapasitas profesional mereka dan terlibat aktif dalam karya pembangunan jangka panjang, diakonia oikoumenis mengubah bentuk operasionalnya dari aksi multilateral menjadi bilateral.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh WCC dan mitra-mitra oikoumenis pada 2003, agen-agen pembangunan yang terkait dengan gereja meng-

galang dan menyalurkan dana sebesar 740 juta dolar AS setiap tahunnya. Jumlah ini tidak termasuk kegiatan kelompok misi individu, kemitraan antarjemaat, dll. Lima puluh persen lebih dari jumlah tersebut digunakan untuk proyek-proyek pembangunan jangka panjang; 14 persen untuk bantuan bencana dan darurat, dan hanya 6 persen untuk advokasi. WCC hanya menerima 3 persen dari dana yang terkumpul; 4 persen disalurkan kepada ACT, dan 6 persen kepada LWF. Pembentukan ACT Alliance telah mengubah sebagian gambaran ini dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan, terutama yang berkaitan dengan tanggap darurat, kini lebih terkoordinasi dengan baik. Sebuah survei dari tahun 2016 menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak dana yang dihabiskan untuk tanggap darurat—laporan anggota ACT menunjukkan bahwa 18 persen dari total pengeluaran mereka (486 juta USD) digunakan untuk bidang ini. Mereka menghabiskan 215,7 juta USD (77 persen) untuk karya pembangunan, dan 144 juta USD (5 persen) untuk advokasi. Pengeluaran untuk advokasi tampaknya menurun, akan tetapi pada kenyataannya persoalan ini kini telah diintegrasikan dalam berbagai bentuk diakonia oikoumenis.

WCC memperkenalkan praktik meja bundar (*round table*) sebagai mekanisme untuk mendorong kerja sama dan komunikasi serta untuk mengurangi dampak negatif dari meningkatnya bilateralisme. Beberapa pertemuan meja bundar tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Pembentukan ACT Alliance telah memberikan para anggotanya, gereja-gereja dan lembaga-lembaga baik di Selatan maupun di Utara, sebuah kerangka kerja yang terstruktur untuk sebuah kerja sama. Dibandingkan dengan bantuan antargereja sebelumnya, ketika dana disalurkan melalui Jenewa, ACT Alliance memainkan peran koordinasi dan komunikasi, sementara para anggota tetap bertanggung jawab atas penggalangan dana dan pelaksanaan program.

Pada saat yang sama, sejumlah entitas oikoumenis yang mengekspresikan kerja sama diakonia multilateral terus memainkan peran penting. Berikut ini adalah beberapa contohnya: The Ecumenical Advocacy Alliance (WCC-EAA) adalah sebuah jaringan global gereja-gereja dan organisasi-organisasi terkait yang berkomitmen untuk bersama-sama mengampanyekan isu-isu HIV dan AIDS, ketahanan pangan, dan agrikultur yang berkelanjutan. EHAIA (Ecumenical HIV and AIDS Initiatives and Advocacy) mendorong kompetensi terkait

HIV di kalangan gereja-gereja dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga teologi untuk mengintegrasikan isu HIV ke dalam kurikulum teologi, serta mengatasi akar penyebab pandemi. EDAN (Ecumenical Disability Advocates Network) mendukung karya individu, gereja, dan organisasi gereja yang berfokus pada isu-isu yang berdampak pada penyandang disabilitas di seluruh dunia.

Para pendukung pendekatan multilateral terhadap diakonia oikoumenis akan menunjukkan beberapa kelebihan berikut ini:

- Pendekatan seperti ini mempertemukan lebih banyak aktor. Aksi bersama menegaskan kesatuan gereja-gereja yang terlibat dalam diakonia oikoumenis, menghadirkan ruang yang sama bagi semua mitra, tanpa memandang jumlah atau kekuatan ekonomi mereka;
- Prosesnya memiliki dampak yang lebih luas, pembelajaran bersama akan menjangkau lebih banyak orang;
- Mengupayakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan diakonia;
- Mempromosikan hubungan yang saling menguntungkan dan meningkatkan relasi kuasa yang lebih seimbang;
- Menyajikan cakrawala yang lebih luas untuk bertindak, yang memudahkan untuk menyertakan kesaksian dan advokasi publik.

Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan multilateral ini juga memiliki kelemahan:

- Hal ini dapat menimbulkan struktur perantara yang membuat pekerjaan menjadi kurang efisien, dengan prosedur yang memakan waktu
- Struktur seperti itu akan menyebabkan lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk urusan administrasi
- Struktur tersebut juga dapat mengarah pada sentralisasi dan pemusatan kekuasaan, sehingga menghambat upaya untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi di tingkat bawah.

Para pendukung bilateralisme mengemukakan beberapa keuntungan berikut ketika menerapkan pendekatan ini:

- Kontak langsung mempercepat komunikasi yang efisien, yang pada gilirannya memudahkan penggalangan dana secara aktif;
- Hubungan kelembagaan dan pribadi dikembangkan, dan hubungan tersebut dapat diperkuat dengan mengadakan perkunjungan satu sama lain serta bertukar visi dan pengalaman;
- Memungkinkan pemantauan yang lebih dekat dan lebih cepat terhadap manajemen proyek;
- Lebih mudah memfasilitasi prosedur yang menjamin transparansi dan akuntabilitas bersama ketika melaksanakan proyek.

Di sisi lain, bilateralisme juga memiliki kelemahan:

- Hubungan kekuasaan yang asimetris dapat berkontribusi dalam memelihara pemisahan secara tradisional antara “donor” dan “penerima”, yang di masa lalu sering membangun struktur ketergantungan dan sikap tunduk pada tujuan, sasaran, dan metode yang ditentukan oleh lembaga donor.
- Ketergantungan pada satu mitra tunggal dapat menimbulkan dampak yang serius jika mitra tersebut tiba-tiba menarik dukungannya atau mengajukan persyaratan baru untuk bermitra.
- Dalam kasus-kasus di mana sebuah gereja lokal atau lembaga diakonia di belahan dunia Selatan menjalin hubungan kerja dengan banyak mitra di belahan dunia Utara, dibutuhkan kompetensi administratif yang kompleks, karena adanya perbedaan rezim dan persyaratan yang berbeda yang ditetapkan oleh para mitranya.

Beberapa keuntungan tampaknya dapat menjadi kerugian, dan sebaliknya. Oleh karena itu, diakonia oikoumenis perlu berusaha untuk membangun struktur yang memperhitungkan keuntungan-keuntungan dari kerja sama multilateral dan bilateral dengan memahami apa yang menjadi perhatian para mitra, baik di Selatan maupun di Utara.

7.4 Kerja Sama dan Kemitraan dalam Diakonia Oikoumenis

Undangan kegiatan “Konsultasi Internasional tentang Hubungan antara Gereja dan Pelayanan Khusus,” di Malawi, September 2014, berkaitan dengan “meningkatkan ketegangan dalam gerakan oikoumenis antara pelayanan khusus dan gereja-gereja di berbagai belahan dunia”. Pertemuan tersebut menyatakan keprihatinannya mengenai “gesekan di dalam keluarga Oikoumenis yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan putusya komunikasi yang berarti”.

Terdapat beragam alasan di balik ketegangan-ketegangan ini. Beberapa pemimpin gereja, khususnya di Afrika, menyatakan bahwa mereka memandang ACT Alliance sebagai aliansi lembaga-lembaga yang berbasis di negara belahan bumi Utara, dan karena itu mereka lebih suka bekerja sama dengan LSM-LSM sekuler daripada dengan gereja-gereja lokal. Hal ini membuat gereja-gereja dan para pemimpinnya merasa tidak dilibatkan, dan kompetensi diakonia dan karya mereka diabaikan. Oleh karena itu, mereka mempertanyakan apakah ACT Alliance dalam praktiknya merupakan ekspresi dari gerakan oikoumenis dan semua gereja yang menjadi anggotanya.

Badan-badan khusus yang ada dalam ACT mengklaim bahwa mandat mereka tidak terbatas pada gereja-gereja; kelompok sasaran mereka adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan, tanpa memandang afiliasi agama. Mereka juga mengacu pada standar profesional yang harus mereka ikuti ketika melaksanakan proyek, menanggapi persyaratan dari para donor pemerintah. Menurut mereka, gereja-gereja lokal sering kali tidak memiliki kapasitas institusional yang dibutuhkan. Karena alasan-alasan tersebut, badan-badan tersebut sering kali lebih memilih LSM lokal yang profesional sebagai mitra.

Konsultasi di Malawi bertujuan untuk menyediakan ruang yang aman bagi dialog yang konstruktif mengenai isu-isu ini. Konsultasi tersebut mengusulkan poin-poin aksi yang berkaitan dengan tiga bidang: relasi, nilai-nilai, dan landasan, serta bidang-bidang kerja sama. Mengenai relasi, dan untuk memperkuat relasi tersebut, konsultasi ini menyadari adanya kebutuhan untuk:

- Memperjelas panggilan, identitas, mandat, dan peran masing-masing. Hal ini penting untuk mengatasi kesalahpahaman secara tepat;
- Mengembangkan dan mengomunikasikan dengan jelas pemahaman bersama mengenai sejarah dan tradisi multilateralisme serta pembagian sumber daya dalam berbagai konteks;
- Mengakui, menghargai, dan mendukung pemberian dan sumber daya masing-masing (aset berwujud dan tidak berwujud);
- Mengomunikasikan dengan jelas cara-cara yang berbeda di mana masing-masing organisasi dalam menjalankan fungsinya, termasuk konteks dan kendala masing-masing, dan memberikan kejelasan tentang ekspektasi dan relevansi terhadap hubungan yang terjalin dalam diakonia oikoumenis.

Mengomunikasikan dan mengakui peran yang saling melengkapi dan sumber daya yang ada merupakan strategi kunci untuk mencapai kerja sama yang lebih baik di antara gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan khusus. Semua mitra yang terlibat harus mengenali kekayaan mosaik para pelaku diakonia, di mana setiap bagian menampilkan kualitas dan kekhasannya, dan mereka bersama-sama membentuk sebuah gambaran yang tidak dapat ditampilkan oleh satu orang saja.

Salah satu kekuatan gereja-gereja lokal adalah keberakaran mereka dalam konteks dan kemampuan mereka untuk memahami apa yang terjadi sesuai dengan ekspektasi, sistem nilai, dan pengalaman lokal. Bab 6.6 menjelaskan beberapa aset diakonia yang dapat digunakan oleh gereja-gereja lokal ketika bekerja sama dengan agen-agen khusus. Salah satu aset yang penting adalah kemampuan untuk mengerahkan para sukarelawan, yang dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menjamin partisipasi lokal dan rasa memiliki ketika mengimplementasikan proyek-proyek. Hal lainnya adalah otoritas moral para pemimpin gereja, yang memungkinkan mereka untuk menangani isu-isu sosial dan politik yang krusial dan mengajak masyarakat untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik dengan mengintegrasikan kesaksian publik dan advokasi dalam karya diakonia.

Demikian pula, gereja-gereja harus mengakui kekuatan dan aset-aset yang khas dari badan-badan khusus. Mereka memiliki wawasan yang luas dan telah

mengembangkan berbagai macam kompetensi, baik yang berkaitan dengan teori maupun praktik. Pengetahuan mereka mencakup kemampuan untuk melakukan analisis sosial, untuk menguraikan rencana aksi yang jelas, untuk mengidentifikasi metode pendekatan yang tepat, untuk memantau pekerjaan yang sedang berlangsung, dan untuk melaporkan dan mengevaluasi. Selain itu, mereka juga sering menjadi bagian dari jejaring badan-badan profesional dengan potensi yang memiliki kemampuan untuk membagikan langkah-langkah yang baik dan terlibat dalam aksi bersama.

Diakonia oikoumenis jelas akan mendapat manfaat dari menghubungkan kompetensi gereja-gereja lokal dan badan-badan khusus. Pesan dari “Konsultasi Global tentang Diakonia” LWF, yang diselenggarakan pada 2008 di Addis Ababa, Ethiopia, menyatakan bahwa “sinergi dan konektivitas baru” akan membuat gereja-gereja, agen-agen, dan kelompok misi menjadi lebih efektif dalam karya-karya mereka. Oleh karena itu, konsultasi ini menyerukan “sebuah sikap yang merengkuh ‘budaya mendengarkan’ apa yang ada di lapangan dan menerapkannya dalam segala bentuk praksis diakonia” dengan menyatakan bahwa hal ini “terutama berlaku bagi para pelaku diakonia internasional”.

Agen-agen harus didorong untuk mengembangkan strategi untuk kerja sama yang lebih erat dengan gereja-gereja. Profesor Christoph Stückelberger, pendiri Globethics.net, menyatakan bahwa gereja-gereja sering kali dapat memainkan peran yang lebih luas dibandingkan dengan LSM-LSM tunggal dalam proses transformasi. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar agen-agen tersebut mendukung berbagai proses yang bertujuan untuk memperkuat praktik-praktik demokrasi di dalam gereja, mengembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, mengembangkan kompetensi, dan mewujudkan gereja yang bebas dari korupsi.

Demikian pula, gereja-gereja lokal harus didorong untuk bersikap sabar terhadap agen-agen khusus dan berkontribusi aktif dalam berbagai proses yang meningkatkan sinergi dan konektivitas yang baru. Hal ini termasuk menyadari peran dan potensi mereka yang berbeda sebagai agen diakonia, dan melihat peluang untuk koneksi dan menyatukan berbagai upaya. Selain itu, gereja-gereja harus mengklaim kepemilikan atas diakonia oikoumenis, khususnya ACT Alliance, yang dalam Dokumen Pendiriannya menyatakan

bahwa visinya adalah untuk menjadi “aliansi global” gereja-gereja anggota WCC dan LWF serta organisasi-organisasi terkait yang “berkomitmen untuk bekerja secara oikoumenis”. Gereja-gereja lokal memiliki andil dalam mewujudkan visi ini dan memperkuat ACT Alliance, agar dapat menjadi seperti yang diharapkan, yaitu sebuah ekspresi dari persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia dan mandat diakonianya.

Hal ini membutuhkan refleksi yang berkelanjutan tentang sifat dasar kemitraan dalam diakonia oikoumenis, dengan mengakui bahwa hal ini dibangun di atas hubungan timbal balik yang sudah ada sebelum dan sesudah para mitra bekerja sama. Kemudian, juga dibutuhkan pengakuan akan beragam karunia dan aset yang dimiliki oleh gereja-gereja lokal dan agen-agen khusus ketika bekerja sama, dan kekuatan untuk saling melengkapi dari kekayaan tersebut untuk karya diakonia. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula transparansi dan kebersamaan di sepanjang proses kerja sama, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Transparansi mencakup berbagi informasi di semua tingkatan, sesering mungkin, dan tidak menyerahkan kepada salah satu mitra untuk memutuskan kapan dan apa yang harus diinformasikan. Kebersamaan berarti hubungan kekuasaan yang seimbang, dalam arti tidak menjadikan salah satu mitra sebagai alat bagi mitra lainnya.

7.5 Kerja Sama dengan Organisasi Sekuler

Ziarah Keadilan dan Perdamaian WCC mengundang “semua orang yang berkehendak baik” untuk bergabung. Hal ini sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak lama dalam diakonia, yaitu menggalang dukungan dan kerja sama dengan individu-individu dan organisasi-organisasi di luar lingkup gereja, dan dengan pemerintah. Berdasarkan pemahaman bahwa semua orang memiliki citra Allah, diakonia meyakini bahwa semua orang dimampukan untuk menjadi rekan sekerja Allah yang mengusahakan kebaikan bersama dan kehidupan yang bermartabat bagi semua orang. Gagasan tentang “orang yang berkehendak baik” tidak boleh ditafsirkan seolah-olah mengacu pada individu-individu yang secara moral lebih unggul. Semua orang dipanggil untuk menjadi “orang yang berkehendak baik”. Sayangnya, tidak semua orang mau mengikuti panggilan

ini, yang seharusnya pula tidak menghentikan gereja untuk terus mengundang mereka untuk bergabung.

Masyarakat sipil memberikan ruang baru untuk kerja sama, dan juga bagi agen diakonia untuk membangun hubungan yang strategis dengan pihak lain, termasuk organisasi-organisasi sekuler. Hal ini sangat penting pada saat banyak organisasi sosial sipil dan LSM menghadapi penyempitan ruang politis dan operasional dalam karya mereka sehari-hari di lapangan. Para pelaku diakonia ditantang untuk mengidentifikasi platform dan jejaring strategis untuk memengaruhi proses sosial yang menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan bagi semua orang.

Dapatkah para pelaku diakonia bekerja dengan organisasi sekuler? Hal ini bergantung pada konteks dan sifat kerja sama. Pada prinsipnya, para pelaku diakonia harus siap untuk bekerja sama dengan setiap orang dan organisasi yang “berkehendak baik”. Namun, dalam praktiknya, perlu ditetapkan beberapa kriteria untuk memahami pengertian “kehendak baik” yang diperjuangkan oleh sebuah organisasi. Salah satu kriteria tersebut adalah sikap dan tindakannya atas hak asasi manusia, kriteria lainnya adalah cara organisasi tersebut memperjuangkan nilai-nilai dan cita-citanya, dan kriteria ketiga adalah struktur dan cara organisasi tersebut menjalankan kekuasaannya.

Sering kali, agen-agen diakonia lebih memilih untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang berpandangan sama, baik yang berbasis iman maupun sekuler. Ada kemungkinan bahwa praktik ini merupakan bentuk kehati-hatian, dengan konsekuensi bahwa diakonia tidak mengambil peran yang cukup berani sebagai agen perubahan dalam masyarakat sipil. Gerakan-gerakan rakyat, kelompok-kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, organisasi-organisasi yang mewakili minoritas atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan—ini adalah beberapa contoh mitra strategis ketika para agen diakonia terlibat dalam kesaksian dan advokasi publik.

Agen diakonia tidak bekerja sama dengan organisasi-organisasi sekuler dengan tujuan untuk menginjili mereka. Identitas sekuler mereka membutuhkan pengakuan dengan cara yang sama seperti organisasi berbasis iman mengharapkan identitas khas mereka dihargai. Tujuannya juga bukan untuk mengkristenkan ruang publik. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah “untuk

membuat semua bidang dalam ruang publik dapat diakses secara bebas oleh semua orang, tanpa perbedaan apa pun, seperti warna kulit, kasta, agama, dan jenis kelamin”. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman teologis bahwa tindakan Allah dalam relasi dengan ciptaan tidak dapat dibatasi pada gereja atau aksi orang Kristen. Kepedulian Allah terhadap manusia dimanifestasikan melalui pembentukan tatanan sosial, politik, dan hukum, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang membela martabat manusia serta mengedepankan keadilan dan perdamaian. Orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan akses yang sama terhadap kebutuhan-kebutuhan publik, keamanan bagi semua orang, khususnya bagi mereka yang rentan, dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari dan interaksi di antara semua kelompok di dalam masyarakat. Semua ini merupakan isu-isu utama dalam agenda diakonia oikoumenis, dan menantang para agen diakonia untuk bekerja dengan “semua orang yang berkehendak baik”, termasuk mencari peluang untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi sekuler.

7.6 *Diap Praxis*—Kerja Sama dengan Orang-Orang dari Agama Lain

Saat ini agama makin diakui sebagai faktor sosial dan politik yang penting, dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan karya pembangunan. Beberapa ahli menggambarkan “kembalinya agama” sebagai proses deprivatisasi ketika para pemuka agama berkomitmen untuk memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan bersama, sementara yang lain menunjukkan perlunya melibatkan para tokoh keagamaan dalam masyarakat sipil dan dalam proses membangun demokrasi dalam “masyarakat pascasekuler”.

Peran agama dan pemuka agama dalam pembangunan masih diperdebatkan. Beberapa pihak menganggap mereka sebagai kekuatan reaksioner yang menentang perubahan sosial dan dalam situasi tertentu dapat menyulut konflik sosial dan politik. Sementara itu, yang lain menunjukkan pentingnya peran mereka dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi sosial yang

bertanggung jawab, dan untuk mengedepankan pertimbangan etis, dengan konsekuensi bahwa para tokoh agama dapat memainkan peran penting dalam mengupayakan rekonsiliasi, keadilan, dan perdamaian.

Jelaslah bahwa para agen pembangunan tidak dapat mengabaikan agama dalam karya mereka. Literasi agama harus menjadi bagian dari kompetensi profesional mereka. Hal ini secara khusus penting bagi FBOs dan diakonia oikoumenis, yang harus mengambil peran utama dalam melibatkan orang-orang beriman dalam karya mereka, dan dalam bekerja sama dengan para pemuka agama dalam proses memperjuangkan kebaikan bersama. Dalam konteks ketidakpercayaan dan ketegangan agama, para agen diakonia dapat menyediakan ruang yang aman untuk aksi dan refleksi bersama dan dengan demikian memulai proses rekonsiliasi dan transformasi.

Diapaxis adalah sebuah metode untuk menyediakan ruang yang aman bagi orang-orang dari beragam latar belakang agama, untuk bertemu dan melakukan berbagai hal bersama, dengan tujuan mengatasi prasangka dan membangun rasa saling percaya. Istilah “*diapaxis*” diusulkan oleh teolog Denmark, Lissi Rasmussen, yang mengamati bahwa orang Kristen dan Muslim mengembangkan relasi koeksistensi yang baru ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi kepentingan bersama. Sebagai sebuah metode, *diapaxis* dimaksudkan untuk melibatkan orang-orang awam di tingkat lokal, dan dalam praktiknya, metode ini merupakan sebuah bentuk pelatihan kewarganegaraan, yaitu memberdayakan orang-orang untuk bekerja sama dengan melintasi batas-batas agama dan sosial.

Gerakan oikoumenis, dan khususnya WCC, memiliki sejarah panjang dalam hal dialog antaragama. *Diapaxis* menambah kualitas tradisi ini dengan berfokus pada isu-isu sosial yang sama yang menantang orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan dengan menegaskan manfaat dari aksi bersama.

Para agen diakonia oikoumenis dilibatkan dalam *diapaxis*, dan banyak anggota ACT Alliance yang bekerja sama dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi bantuan Muslim, khususnya di Timur Tengah. Pada 2014, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Lutheran World Federation (LWF), dan Islamic Relief Worldwide (IRW) menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam karya kemanusiaan. Ini merupakan kerja sama

resmi pertama antara organisasi kemanusiaan Kristen global dan organisasi kemanusiaan Islam global, dan memberikan pesan yang jelas tentang bagaimana orang-orang dari berbagai agama dapat bergabung berdasarkan visi dan nilai yang sama. Pandangan ini secara jelas dinyatakan dalam dokumen ACT Alliance yang berjudul *The Changing Development Paradigm*, yang menyatakan bahwa “perubahan paradigma pembangunan menghadirkan peluang baru untuk bekerja secara konkret, termasuk dalam hal advokasi, di antara dan lintas agama. ACT menyadari pentingnya tantangan dan peluang interreligius yang berkaitan dengan karya kemanusiaan dan pembangunan”.

Para pelaku oikoumenis dan diakonia mengambil beberapa inisiatif untuk menindaklanjuti hal ini. Mereka berpartisipasi dalam diskusi di UNCHR tentang peran iman dalam perlindungan pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang yang terlantar dan terusir. WCC telah memainkan peran aktif dalam kerangka kerja berbasis agama “*Ending Extreme Poverty: A Spiritual and Moral Imperative*” yang diluncurkan pada 2015 oleh lebih dari 40 pemuka agama dan pimpinan FBO di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem pada 2030, yang berkaitan dengan SDGs sebagai landasan dan komitmen bersama.

Masih menjadi tantangan untuk menghubungkan inisiatif-inisiatif ini di tingkat internasional dengan aksi diakonia yang konkret di tingkat lokal. Komitmen untuk menghasilkan dan berpedoman pada bukti nyata, untuk mengadvokasi dengan melibatkan otoritas moral para pemimpin agama dan konstituen mereka, serta untuk mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara aktor-aktor pembangunan agama dan aktor-aktor pembangunan lainnya, akan membuat perbedaan dan berkontribusi dalam mencapai tujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem.

7.7 Advokasi: Diakonia Profetis

Advokasi adalah bagian integral dari karya diakonia. Advokasi tidak dapat dibatasi hanya pada sebuah kepedulian ekstra yang bergantung pada situasi tertentu. Identitas yang khas dari diakonia, dasar alkitabiah dan panggilan kristiani, mendorong diakonia oikoumenis untuk menjadi profetis, berpihak

pada mereka yang miskin dan terpinggirkan, membuka tabir ketidakadilan sistemik dan mengedepankan martabat, keadilan, dan perdamaian. Gerakan oikoumenis, bersama dengan gereja-gereja dan para agen diakonia, makin berkomitmen untuk melakukan tugas di bawah ini. Berikut ini adalah salah satu contoh mandat yang dirumuskan:

Advokasi adalah sebuah aktivitas profetis dari gereja-gereja, yang di dalamnya kita mendampingi dan mendukung saudara-saudari kita yang berjuang dengan gigih demi keadilan dan perdamaian dalam konteks ketidakadilan dan kekerasan terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan. Advokasi termasuk menyuarakan mereka yang dibungkam dalam perjuangan menentang ketidakadilan. Hal ini menuntut keterlibatan kita dengan berbagai isu dan gagasan dari mereka yang berjuang untuk kehidupan, keadilan, kesetaraan, hak-hak, dan perdamaian. Advokasi adalah kegiatan misi gereja di dunia. Ini adalah salah satu cara bagi gereja untuk berpartisipasi dalam *missio dei* yang sedang berlangsung.

Upaya mewujudkan keadilan dan perdamaian telah menjadi bagian penting dari kehidupan dan panggilan WCC sejak didirikan pada 1948, demikian juga bagi gereja-gereja anggota dan mitra oikoumenis, yang telah dinyatakan dalam berbagai program dan keterlibatan di sepanjang sejarahnya, seperti yang dijelaskan dalam Bab 5. Ecumenical Advocacy Alliance (EAA), yang didirikan pada 2000, dan kini menjadi sebuah inisiatif oikoumenis di dalam WCC, terus mendukung gereja-gereja dan para mitra dalam karya advokasi mereka, dengan fokus pada berbagai kampanye yang berkaitan dengan HIV dan AIDS, ketahanan pangan, dan pertanian yang berkelanjutan.

Advokasi untuk perdamaian yang adil menjadi bidang penting lainnya dalam aksi oikoumenis. The WCC Decade to Overcome Violence (2001–2010) membahas kebutuhan untuk mengganti budaya kekerasan dengan budaya perdamaian. Dekade ini diakhiri dengan “Ecumenical Call for Just Peace” yang mendorong Sidang Raya di Busan pada 2013 untuk menetapkan sebuah pernyataan tentang “*The Way of Just Peace*”, yang menegaskan WCC sebagai penyelenggara dan fasilitator bagi perdamaian oikoumenis global dan karya-karya advokasi, berdasarkan keyakinan bahwa:

Gereja-gereja dapat membantu membangun budaya perdamaian dengan belajar untuk mencegah dan mentransformasikan konflik. Dengan cara ini gereja-gereja dapat memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat, memampukan perempuan dan laki-laki untuk menjadi pembawa damai, mendukung gerakan-gerakan non-kekerasan demi keadilan dan hak asasi manusia, mendukung mereka yang dianiaya karena menolak untuk berperang atas dasar hati nurani, serta memberikan dukungan bagi mereka yang menderita dalam konflik bersenjata, dan memberikan pendidikan perdamaian pada tempat yang semestinya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah.

Konsep perdamaian yang adil berakar pada pemahaman diri gereja-gereja, harapan akan transformasi spiritual dan panggilan untuk mengupayakan keadilan dan perdamaian bagi semua. Konsep ini dibangun di atas konsep keadilan sosial, yang menentang privilese; keadilan ekonomi, yang menentang kekayaan; keadilan ekologi, yang menentang konsumsi yang tidak bertanggung jawab; dan keadilan politik, yang menentang penyalahgunaan kekuasaan.

Pembangunan perdamaian, transformasi konflik dan advokasi untuk perdamaian yang adil terus menjadi tugas prioritas yang menantang diakonia profetis untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Tema-tema utama untuk advokasi adalah hak asasi manusia dan keamanan manusia, khususnya bagi perempuan dan anak-anak dalam konteks konflik sosial dan politik, akuntabilitas dalam pembangunan perdamaian dan supremasi hukum.

7.8 Pelecehan dalam Lembaga Diakonia

Pelecehan fisik (termasuk seksual) dan emosional terhadap orang dewasa dan anak-anak sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Injil. Beberapa kasus hukum yang mencuat ke permukaan menunjukkan bahwa para rohaniwan dan para pelaku diakonia dituntut dan dihukum. Di atas semuanya itu, akibat yang ditimbulkan bagi para korban sungguh menyedihkan.

Kasus-kasus pelecehan sangat berdampak pada kepercayaan terhadap lembaga-lembaga diakonia, badan-badan pembangunan dan organisasi-organisasi lainnya. Banyak karya diakonia yang baik kemudian dirusak atau bahkan dihancurkan oleh ulah jahat individu atau dirusak oleh karena peng-

awasan yang tidak memadai di tingkat institusional. Pemberian kompensasi kepada para korban tidak akan pernah dapat menggantikan penderitaan yang ditimbulkan, sementara pemberian semacam itu juga dapat merugikan organisasi diakonia secara finansial.

Panggilan Yesus untuk “hidup dalam segala kepenuhannya” (Yohanes 10:10) menantang semua lembaga diakonia untuk mencegah pelecehan, terlepas dari dampaknya terhadap reputasi (yang sering kali makin parah ketika ditemukan dan dilaporkan oleh media). Diakonia oikoumenis harus menyertakan pembelajaran dari berbagai konteks yang berbeda secara global. Berbagai praktik-praktik yang baik secara internasional, seperti langkah-langkah yang efektif dalam perlindungan anak dan pelatihan profesional untuk mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak wajar, dapat menjadi hal yang sangat penting dalam membantu mencegah pelecehan.

7.9 Kesimpulan

Bab ini telah menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh diakonia oikoumenis di dunia saat ini. Beberapa tantangan berkaitan dengan perubahan lanskap bantuan pembangunan, pengurangan dana publik karena meningkatnya skeptisisme terhadap efektivitas bantuan, yang mengharuskan badan-badan diakonia oikoumenis untuk mengembangkan praktik-praktik baru yang inovatif untuk mendanai karya-karya mereka. Hal ini juga mendorong badan-badan tersebut untuk mengembangkan strategi-strategi baru dalam hal koordinasi dan kerja sama, memperbarui visi berbagi sumber daya secara oikoumenis.

Analisis terhadap lanskap yang berubah ini kurang memperhatikan dimensi sosial dan politik ketika terlibat dalam karya untuk kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Di banyak tempat, keterlibatan semacam itu terhambat karena menyempitnya ruang publik dan kebijakan-kebijakan politik yang bertujuan untuk membatasi peran masyarakat sipil, khususnya para aktor berbasis hak. Hal ini menantang diakonia oikoumenis untuk terlibat dalam membangun jejaring dan membangun aliansi strategis, bermitra dengan gereja-gereja lokal, dengan organisasi-organisasi sekuler, dan dengan orang-orang dari agama-agama lain. Dalam semua bentuk, baik dalam karya bantuan

maupun lembaga diakonia, kekerasan fisik atau emosional tidak dibenarkan dan langkah-langkah perlindungan yang efektif harus diterapkan untuk mencegah hal ini.

Tantangan-tantangan ini mendorong diakonia oikoumenis untuk menegaskan sifatnya sebagai aktor berbasis hak, dan untuk mengembangkan strategi-strategi yang memperkuat peran profetisnya dalam kesaksian publik dan advokasi sebagai dimensi integral dari aksi diakonia.

B A B 8

Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Konfesional

8.1 Pendahuluan

Bab ini mencoba untuk melihat diakonia oikoumenis dalam beragam konteks konfesi, dengan menunjukkan kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan terhadap diakonia di dalam kekristenan. Dalam upaya untuk menunjukkan keragaman, orang-orang Kristen dari berbagai tradisi yang berbeda mungkin dapat memahami dan mengembangkan bidang-bidang yang memiliki kesamaan. Dengan kerendahan hati, upaya untuk saling memperkaya dan ketergantungan pada kasih karunia Allah, orang-orang Kristen dari berbagai tradisi, budaya dan latar belakang dapat saling berkontribusi dalam membangun sebuah diakonia yang sungguh-sungguh oikoumenis.

8.2 Pemahaman Ortodoks tentang Diakonia Oikoumenis

“Diakonia” Kristen berakar pada ajaran Injil yang menyatakan bahwa kasih kepada Allah dan sesama merupakan konsekuensi langsung dari iman. Misi diakonal gereja dan tugas setiap anggotanya untuk melayani terkait erat dengan pemahaman tentang gereja, dan bersumber pada teladan pengorbanan Tuhan kita, Imam Besar kita, yang sesuai dengan kehendak Bapa, “datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang” (Mat. 20:28). Gereja memperoleh ajaran-ajaran utamanya tentang menolong orang miskin dari Kitab Perjanjian Lama, memelihara doktrin-doktrin tersebut dan mengaitkannya dengan konteks yang baru dalam terang teladan pendirinya, Yesus Kristus, yang “datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani” (Markus 10:45). Para rasul hidup sesuai dengan ajaran Yesus, “membaktikan diri mereka dalam persekutuan, untuk memecahkan roti dan berdoa” (Kisah Para Rasul 2:42). Menurut Kisah Para Rasul (Pasal 6), para diaken adalah yang pertama kali dipanggil untuk melayani di dalam nama Kristus, yang berarti bahwa “diakonia” ini juga menjadi bagian dari tugas berbagai jabatan imam lainnya. Tugas diakon adalah sebagai “perpanjangan tangan uskup” sesuai dengan arahnya, sementara para imam bertanggung jawab untuk membantu uskup dalam menjaga dan mengajar kumpulan umat Kristen.

“Kesaksian, pengajaran dan diakonia” (pelayanan) tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan gereja mula-mula. Pentingnya “diakonia” juga diakui dalam kanon-kanon gereja yang tak terbagi (*the undivided church*), seperti Konsili Oikoumenis Pertama di Nicea (325). Gereja diutus ke dunia bukan hanya untuk memberitakan dan menyelamatkan umat manusia, tetapi juga untuk membangun komunitas-komunitas yang dapat melayani dunia untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Dalam hal ini, tindakan diakonia setara dengan pemenuhan tugas gereja untuk menolong orang-orang yang menderita di luar jemaatnya, atau untuk memberikan jawaban atas masalah dan keprihatinan umat manusia dalam kehidupan ekonomi, politik, pribadi atau keluarga.

Melalui diakonia semacam ini, gereja-gereja masuk ke dalam dunia dan memberikan kesaksian mereka tentang Tuhan mereka, yang nyata, jelas, dan realistis dalam praktiknya. Tanpa tindakan ini, gereja akan kehilangan ekspresi fundamental dari kehidupan spiritualnya.

Diakonia ini bukan sebuah tindakan moral yang muncul dari niat baik orang Kristen yang telah dilahirkan kembali, bukan pula sebuah ungkapan belas kasihan terhadap kesengsaraan umat manusia di luar gereja. Kepedulian gereja-gereja terhadap dunia bukanlah sebuah kendaraan bagi umat manusia yang tidak berpengetahuan. Bantuan gereja-gereja bukan semata-mata sebagai sebuah lembaga filantropi. Tindakan diakonia gereja bersifat eklesial, yaitu limpahan kasih karunia yang mengikat dan menggerakkan kehidupan batin mereka dalam sebuah persekutuan yang menyeluruh. Dengan kata lain, diakonia kepada dunia adalah gema dari firman Allah yang telah digenapi di dalam karisma gereja. Diakonia adalah ekspresi dari “*ergon theou*” (karya Allah) di dalam Roh Kudus-Nya melalui “*parergon*” (karya yang dibuat atau dihasilkan) manusia di dalam dunia dan untuk dunia. Diakonia adalah suara lain dari kebenaran yang dibuat dan diberikan oleh Allah kepada umat manusia sebagai persekutuan/koinonia. Ini adalah tindakan yang muncul dari peristiwa yang terus-menerus dihadirkan di dalam gereja.

Diakonia Ortodoks juga mengalir dari liturgi ilahi di mana persembahan kita dikuduskan oleh persembahan Kristus dan yang menuntut “kerja sama” aktif kita (*synergeia*) dengan Allah dalam pelaksanaan kehendak bebas kita yang berakar pada “kesepakatan” bersama (*symphonia*) (Mat. 18:19). Oleh karena itu, diakonia adalah ekspresi dari kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Demikian pula, setiap perayaan ekaristi lokal bersifat utuh dan universal, melibatkan seluruh ciptaan, dan dipersembahkan untuk kebutuhan material dan spiritual seluruh dunia.

8.3 Pemahaman Lutheran tentang Diakonia Oikoumenis

Gereja-gereja Lutheran menekankan bahwa diakonia adalah bagian dari keberadaan dan identitas gereja. Diakonia terbentang dengan jelas dalam kehidupan setiap orang Kristen, sebagai sebuah panggilan untuk melayani Allah, sesama manusia, dan berperan sebagai penatalayan ciptaan Allah. Diakonia secara intrinsik merupakan bagian dari kehidupan jemaat dan komunitas Kristen dan menyiratkan pelayanan kepada komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas. Di banyak negara, lembaga-lembaga diakonia, seperti rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan, didirikan dan menjadi bagian dari kehadiran diakonia Gereja Lutheran dalam konteks yang beragam. Di beberapa negara, lembaga-lembaga diakonia ini turut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, organisasi-organisasi diakonia antar-bangsa, yang menawarkan pelayanan darurat dan bantuan pembangunan, merupakan bagian dari diakonia oikoumenis Lutheran, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari gereja menurut esensinya.

Dalam teologi Lutheran, salah satu yang ditekankan adalah bahwa keselamatan dan pembenaran manusia di hadapan Allah, *coram Deo*, hanya bergantung pada Kristus dan bukan pada perbuatan dan pencapaian manusia. Pada saat yang sama, pengakuan iman Lutheran menekankan bahwa perbuatan baik adalah bagian dari seluruh kehidupan Kristen, sebagai bagian dari penguasaan orang Kristen dan seluruh kehidupan Kristen mengarah pada kemanusiaan, *coram hominibus*.

Oleh karena itu, diakonia adalah bagian intrinsik dari kehidupan gereja dan setiap jemaat, yang didasarkan pada panggilan Allah untuk menjadi gereja *di* dalam dunia, tidak terpisah dari dunia, dan untuk menghidupi panggilan ini dalam konteks yang beragam di mana gereja berada. Teologi Lutheran sangat menekankan bahwa orang Kristen tidak hanya menjadi orang Kristen di dalam ibadah dan iman gereja, atau “alam Allah”, tetapi mereka dipanggil untuk hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab di dalam lingkungan masyarakat masing-masing, yang disebut “alam duniawi”. Perbuatan baik, pelayanan kepada

dunia, diakonia, menurut teologi Lutheran, tidak hanya merupakan sebuah praktik di dalam komunitas Kristen, tetapi berdasarkan teologi penciptaan, adalah milik dunia. Umat Kristen diimbau untuk melayani dengan semua orang yang berkehendak baik demi kemanusiaan, bukan demi keselamatan. Teologi Lutheran juga menekankan bahwa diakonia tidak boleh menjadi instrumen konversi, tetapi memiliki nilai tersendiri dan berkontribusi pada kesaksian tentang kabar baik di dalam Kristus.

Lutheran World Federation menekankan diakonia sebagai bagian intrinsik dari eklesiologi Lutheran dan menjadi bagian dari misi Allah, *missio Dei*: Gereja-gereja anggota LWF dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Allah, yang meliputi pemberitaan Injil Kristus, melayani yang rentan (diakonia), dan mengadvokasi mereka.¹ Diakonia dimulai dengan pemahaman akan konteks, pemetaan kebutuhan dan aset, dan keyakinan yang mendalam bahwa melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan serta melayani Allah tidak dapat dipisahkan. Untuk melayani di dunia melalui diakonia, gereja perlu menggali pengetahuan tidak hanya dari teologi, tetapi juga dari berbagai bidang teori dan praktik, juga dari studi empiris, sebagai sebuah upaya interdisipliner. Teori diakonia dan aksi diakonia saling bergantung, dan tujuan dari ilmu-ilmu diakonia adalah untuk meningkatkan praktik diakonia.

Banyak gereja Lutheran memberdayakan para diaken yang terlatih untuk tugas khusus pekerjaan diakonia di jemaat mereka, dan di banyak gereja, diaken dikonsekrasi atau ditahbiskan untuk melayani dalam jabatan diakonat.

Sebagian besar diakonia di gereja-gereja Lutheran saat ini berkaitan dengan kebangkitan diakonia pada abad ke-18 di Eropa. Kebangkitan ini membawa fokus baru pada diakonia dan pelayanan diakonia serta dipengaruhi kuat oleh gerakan pietisme yang berkembang sebelumnya dan sebagian merupakan perlawanan terhadap hierarki gereja yang mapan, sebagai sebuah gerakan gereja arus bawah. Selama periode kebangkitan ini, ditekankan bahwa gereja harus merevitalisasi pelayanan diakonia, berdasarkan apa yang dipahami secara alkitabiah dan dalam pemahaman gereja mula-mula mengenai diakonia sebagai pelayanan yang rendah hati kepada mereka yang membutuhkan.

¹ Lihat: <https://www.lutheranworld.org/content/capacity-diakonia/>.

Perkembangan terkini dalam ilmu diakonia menekankan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam pemahaman diakonia dari pelayanan yang rendah hati, menjadi diakonia sebagai pelayanan yang menjembatani dan memberdayakan pelayanan “perantara” gereja di tengah-tengah dunia.

Beberapa gereja Lutheran terbesar di dunia, seperti Gereja Evangelical Mekane Yesu di Ethiopia, berfokus pada kebutuhan untuk mendefinisikan misi gereja sebagai pelayanan yang holistik, yang menjadikan pewartaan dan pelayanan sebagai sesuatu yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Hal ini menjadi pengingat yang bermanfaat bagi semua gereja Lutheran untuk menghindari pengkotak-kotakan dan terputusnya pelayanan gereja, misalnya bidang pembangunan, dari kehidupan sehari-hari gereja di dalam jemaat.

8.4 Pemahaman Reformed tentang Diakonia Oikoumenis

Bagi sebagian besar gereja yang termasuk aliran “Reformed” yang lebih luas, termasuk banyak Gereja Persatuan dan Penyatuan, menjadi Reformed berarti menjadi oikoumenis. Di satu sisi mereka memahami misi dan panggilan mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari satu gerakan oikoumenis dan gereja universal Kristus, dan di sisi lain mereka melihat diakonia (kasih dan pelayanan transformatif kepada sesama) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi Allah dan kehidupan serta kesaksian gereja-gereja. Tidaklah mengherankan jika kelompok Reformed telah memainkan peran utama dalam membentuk dan menghidupi diakonia oikoumenis seperti yang dipahami dan dipraktikkan di dalam WCC dan lingkaran oikoumenis yang lebih luas.

Sejak masa Reformasi, penafsiran ulang terhadap Alkitab menempatkan diakonia dan diakonat di dalam empat jabatan penting dalam pelayanan kristiani. Fokusnya sama-sama pada kepemimpinan institusional dalam mengelola berbagai bentuk kebajikan dan dalam aksi pelayanan secara langsung dan personal kepada mereka yang miskin dan menderita. Bagi kaum Calvinis, keduanya tetap menjadi bagian yang permanen dari karya gereja, sementara aliran yang dipelopori oleh Zwingli melihat bahwa otoritas sipil dapat dan harus memikul

tanggung jawab untuk diakonia sosial. Secara keseluruhan, tanggung jawab institusional tidak pernah dilihat sebagai pengganti dari tugas individu. Diaken memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, berdasarkan pemahaman Alkitab, kepada seluruh gereja. Di sini kontribusi Reformed mengarah pada fokus yang kontinu pada pelayanan individual dan institusional dan, lebih jauh lagi, penekanan pada derma dan keadilan. Pemahaman Reformed akan misi Allah ditekankan dengan berakar pada pemahaman dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa kasih sayang dan keadilan transformatif tidak dapat dipisahkan.

Dalam praktik dan kontribusi lokal mereka terhadap gagasan oikoumenis, gereja-gereja Reformed, Persatuan dan Penyatuan, bersama dengan gereja-gereja lain, turut membantu membentuk konsultasi dan deklarasi WCC, seperti Konsultasi Larnaca tahun 1986 tentang diakonia. Konsultasi ini memperkaya konsep diakonia untuk merangkul sepenuhnya hubungan antara diakonia dan pembangunan untuk keadilan, hak asasi manusia dan martabat, diakonia dan perdamaian, serta diakonia dan kerja sama antaragama. The El Escorial Consultation on Ecumenical Resource Sharing pada 1987 juga menyuarakan dampak dari diakonia profetis sebagai praktik keadilan transformatif yang berupaya untuk membalikkan relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam komunitas oikoumenis.

Keterlibatan kelompok Reformed yang lebih luas dalam perjuangan global untuk keadilan, sebagai dasar dari iman kepada Allah, dipertajam melalui peran gereja-gereja dalam memerangi rasisme dan meruntuhkan Apartheid, dan dalam perjuangan untuk keadilan ekonomi dan ekologi di tengah-tengah kehancuran akibat kapitalisme yang digerakkan oleh pasar. Perjuangan ini, yang sebagian besar dipimpin oleh gereja-gereja dari belahan bumi Selatan, menghasilkan rumusan Konfesi Belhar dan Accra, yang mengilhami dan memberikan kerangka alkitabiah dan teologis bagi hubungan antara diakonia dan keadilan sebagai elemen-elemen yang tidak terpisahkan dan tidak tergoyahkan dari ke-taatan pada Allah dan kesetiaan pada Injil Yesus Kristus. Hal ini kemudian membentuk perspektif banyak orang dalam komunitas Reformed untuk merangkul diakonia oikoumenis yang berfokus pada transformasi sistemik dan struktural, serta perhatian pada pengembangan manusia secara integral dan aksi langsung dalam bentuk pelayanan, cinta dan kasih. Karakternya, seperti

yang dipraktikkan oleh gereja-gereja, adalah kontekstual, berbelas kasih, mendamaikan, transformatif, menuntut keadilan, dan profetis.

8.5 Pemahaman Anglikan tentang Diakonia Oikoumenis

Lima Sasaran Misi, yang ditetapkan dalam *Anglican Consultative Council* pada 1984, dimaksudkan untuk menjadi kesimpulan dari seluruh misi, karena didasarkan pada kesimpulan misi Yesus sendiri:

1. Untuk memberitakan kabar baik tentang Kerajaan Allah;
2. Untuk mengajar, membaptis dan memelihara orang-orang yang baru percaya;
3. Untuk merespons kebutuhan manusia dengan pelayanan yang penuh kasih;
4. Untuk mentransformasi struktur masyarakat yang tidak adil, untuk menentang segala bentuk kekerasan dan mengupayakan perdamaian dan rekonsiliasi;
5. Untuk berusaha menjaga integritas ciptaan dan mempertahankan serta memperbarui kehidupan bumi.

Poin ketiga jelas diidentikkan dengan diakonia. Komitmen oikoumenis ditunjukkan dengan praktik-praktik yang dijelaskan dalam dokumen-dokumen, seperti *To Love and Serve the Lord – Diakonia in the Life of the Church* (2012) dan *The Jerusalem Report of the Anglican–Lutheran International Commission* (ALIC III). Dokumen ini menyatakan bahwa:

- Diakonia berakar kuat dalam Kitab Suci, sebagai bagian penting dari kemuridan dan identitas Kristen (Lukas 4:18–19). Pelayanan diakonia didasarkan pada ibadah, Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus, dan dihidupi dalam kemuridan. Melalui pelayanan diakonia, gereja menyuguhkan sebuah cita rasa kerajaan Allah.

- Diakonia adalah sebuah pelayanan yang menjadi milik setiap orang percaya karena berakar pada amanat apostolik yang diterima oleh setiap orang percaya dalam baptisan.
- Diakonia mengambil bentuk kesaksian profetis, advokasi, dan aksi pemberdayaan, serta kepedulian yang penuh kasih.
- Diakonia tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi juga melawan pemusatan kekuasaan dan kekayaan yang menjadi penyebab kemiskinan. Gereja yang diakonal menemani, mendukung, dan memberdayakan mereka yang lemah dan rentan secara ekonomi; bersama mereka, gereja yang diakonal menentang berbagai bentuk gerakan yang merampas hak-hak asasi mereka, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
- Diakonia bersifat politis sejauh ia menyingkap ketidakadilan struktural yang berdampak pada orang-orang karena jenis kelamin/gender, kelas, wilayah geografis, agama, dan asal-usul etnis. Gereja memberdayakan mereka yang terbungkam untuk bersuara dan berbicara dalam solidaritas dengan dan untuk mereka ketika mereka tidak dapat berbicara.

Perintah Raja Henry VIII dari Inggris pada 1536 mencakup sebuah instruksi bahwa sebuah kotak amal harus disediakan di setiap jemaat di Inggris. Selanjutnya, Ordinal 1550 mempertahankan struktur tiga-rangkap dalam jabatan tertahbis, yang mengatur susunan diaken serta imam dan uskup. Dengan demikian, semua imam dan uskup juga adalah diaken. Ada juga tatanan diakon dan diakones permanen, serta pelayanan pastoral yang dilaksanakan oleh kaum awam.

Revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 dan memasuki abad ke-19 mengakibatkan munculnya seruan untuk mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan di perkotaan. Beberapa contoh di antaranya pembentukan Church Army pada 1882, yang sekarang beroperasi di banyak provinsi di Persekutuan Anglikan, dan pembentukan ordo Diakones — seperti Anglikan Deaconess Ministries (ADM) Australia pada 1891. Ordo Diakones pada awalnya sebagian besar meniru praktik di Jerman.

Praktik di seluruh Persekutuan Anglikan bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Gereja-gereja Anglikan dan agen-agennya terus menjadi penyelenggara utama pelayanan. Contohnya adalah keterlibatan dalam kampanye pembe-

rantasan Malaria di Zambia, rumah sakit di Nigeria dan di tempat lain, proyek-proyek terkait isu HIV dan AIDS, dan banyak proyek lainnya. Gereja India Utara dan Gereja India Selatan, yang dibentuk dari persatuan oikoumenis, keduanya merupakan anggota Persekutuan Anglikan. Gereja India Selatan sendiri memiliki lebih dari 100 rumah sakit. Pembentukan National Health Service di Inggris pada 1948 telah mengurangi ruang lingkup karya diakonia di bidang kesehatan di Inggris, tetapi gereja-gereja Anglikan tetap menjalankan pelayanan diakonia seperti panti jompo. Salah satu bidang utama karya gereja-gereja Anglikan adalah meningkatkan kesadaran akan maraknya kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga, dan potensi gereja untuk berupaya menghapuskannya, menciptakan ruang-ruang yang aman, dan merawat para penyintas kekerasan.

8.6 Pemahaman Methodis tentang Diakonia Oikoumenis

Aliran Methodis muncul pada abad ke-18, dengan gerakan kebangunan rohani di Gereja Inggris yang dipimpin oleh John Wesley (1703–1791), saudaranya Charles (1707–1788), dan yang lainnya. Keluarga Wesley yakin bahwa kasih Allah yang menyelamatkan dimaksudkan untuk semua orang dan bahwa mereka yang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman akan ditransformasi untuk menjalani kehidupan yang kudus melalui sarana anugerah. Ketika berbicara tentang sarana anugerah, John Wesley tidak hanya mengacu pada perbuatan-perbuatan kesalehan seperti penyembahan dan doa. Ia juga mengidentifikasi perbuatan-perbuatan belas kasihan sebagai sarana yang melaluinya kita menerima anugerah Allah. Richard Heitzenrater, dalam bukunya yang berjudul *The Poor and the People Called Methodists*, menggambarkan penegasan Wesley untuk mengasihi Allah dan sesama sebagai berikut.

- (i) Wesley memasyarakatkan program pendampingan. Umatnya diharapkan untuk saling membantu dalam komunitas iman.
- (ii) Wesley memperluas konsep komunitas untuk mencakup semua orang, dari yang paling atas sampai yang paling bawah dalam skala ekonomi. Tidak ada lagi dikotomi kita dan mereka.

- (iii) Wesley mengelompokkan ulang konsep kemiskinan. Ia melihat kemiskinan dalam hal kebutuhan relatif berdasarkan skala bertingkat (kelebihan, kenyamanan, kebutuhan, ekstremitas) dengan setiap tingkatan didefinisikan dalam konteks yang spesifik.
- (iv) Wesley menguniversalkan konsep amal, sehingga tidak ada seorang pun yang dibebaskan dari tanggung jawab untuk menolong mereka yang membutuhkan.
- (v) Wesley mengajarkan teologi tentang motivasi kegiatan amal. Tujuan dasarnya dalam hal ini adalah agar orang-orang Metodis meniru kehidupan Kristus. Setiap orang di setiap lapisan masyarakat adalah anak Allah dan berhak untuk diperlakukan dengan layak.

Saat ini, sekitar 80 Gereja Methodis, Gereja Wesleyan, dan Persatuan atau Penyatuan dengan konstituensi sekitar 80 juta orang tergabung dalam World Methodist Council. Mereka menegaskan dalam Social Affirmation of the World Methodist Council:

“Kami berkomitmen secara individu dan sebagai komunitas untuk mengikuti jalan Kristus; memikul salib; mengupayakan kehidupan yang berkelimpahan bagi seluruh umat manusia; memperjuangkan perdamaian dengan keadilan dan kebebasan; mempertaruhkan diri kami sendiri dalam iman, pengharapan, dan kasih, berdoa kiranya kerajaan Allah datang.”

Agen-agen Methodis juga aktif terlibat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk dengan gereja-gereja lokal dan mitra oikoumenis.

Pelayanan diakonia adalah pelayanan seluruh umat Allah. Dalam dokumen *The Diaconal Plan of the United Methodist Church* (UMC) di Norwegia, panggilan ini dinyatakan sebagai berikut.

“Kepedulian terhadap orang lain adalah sebuah panggilan dan tanggung jawab bagi semua orang percaya melalui baptisan dan iman mereka kepada Kristus. Dengan kata lain, pelayanan diakonia tidak dilihat sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah fondasi bagi Gereja dan setiap orang percaya. Keterlibatan diakonia adalah karakteristik yang menentukan yang dengannya Gereja mengidentifikasi dirinya sebagai Gereja.”

Sebagian besar gereja dalam tradisi Methodis menahbiskan diaken. Beberapa, seperti Gereja Methodis di Inggris Raya, Gereja Methodis di Afrika Selatan atau Gereja Methodis Bersatu, membentuk kelompok diaken yang “terpisah dan berbeda, meskipun saling melengkapi” dengan kelompok presbiter atau penatua.

Banyak sekolah Methodis, rumah sakit, panti jompo, dan berbagai macam lembaga diakonia yang secara legal terpisah dari gereja, tetapi tetap memiliki hubungan, dan di banyak negara, lembaga-lembaga ini berfungsi seperti pos pelayanan gereja.

Kaum Methodis dan Wesleyan dipanggil untuk menghidupi teologi Wesleyan mereka, yang mendorong mereka untuk berjuang demi kekudusan personal dan sosial serta berjumpa dengan Kristus ketika mereka memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit, berkarya dengan (bukan untuk) orang miskin dan merawat ciptaan. John Wesley merumuskan harapannya terhadap orang-orang yang disebut Methodis dalam tiga rumusan aturan umum:

“Oleh karena itu, diharapkan dari semua orang yang terus berada di dalamnya agar mereka terus membuktikan keinginan mereka akan keselamatan. *Pertama:* Dengan tidak berbuat jahat, dengan menghindari kejahatan dalam berbagai bentuk ...; *Kedua:* Dengan ... berbuat baik dalam berbagai bentuk, dan, sedapat mungkin, kepada semua orang ...; *Ketiga:* Dengan mematuhi semua ketentuan Allah.”

Urutan ini bukanlah suatu kebetulan: tidak berbuat jahat dan berbuat baik sama pentingnya dengan doa, penyembahan, dan sakramen. Orang-orang Methodis semestinya dikenal karena “iman yang bekerja oleh kasih” (Galatia 5:6).

8.7 Pemahaman Pentakosta tentang Diakonia

Pentakostalisme adalah sebuah gerakan yang relatif baru dan berkembang pesat di dalam kekristenan. Terdapat keragaman yang sangat luas dalam pemahaman dan praktik Pentakosta terhadap diakonia. Hal ini juga mencerminkan keragaman yang sangat luas dalam gerakan Pentakosta. Secara umum, istilah

diakonia jarang digunakan, tetapi banyak orang Pentakosta yang terlibat dalam program-program pelayanan dan karya-karya bantuan.

The Pentecostal World Fellowship didirikan pada 1947, dengan Kantor Internasionalnya yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Persekutuan ini memiliki 61 gereja perwakilan yang mewakili 33 negara. Persekutuan ini menyatakan tujuannya sebagai berikut.

- BERBICARA kepada pemerintah dan bangsa-bangsa ketika dan di mana keadilan sosial dan hak-hak religius dikompromikan dan/atau dilanggar demi Injil.
- MEMPERTAHANKAN MISI DUNIA DAN MENDUKUNG upaya-upaya kemanusiaan dan jika memungkinkan, memberikan bantuan.

Bagian 8 dan 9 dari Pernyataan Iman Persekutuan Dunia Pentakosta menyatakan:

8. Kami percaya pada gereja Yesus Kristus dan kesatuan orang-orang percaya.
9. Kami percaya pada penerapan praksis dari iman Kristen dalam pengalaman sehari-hari dan pada pentingnya melayani orang-orang di setiap bidang kehidupan, yang tidak hanya mencakup spiritual tetapi juga sosial, politik, dan fisik.

Gereja-gereja Pentakosta dan karismatik sering kali menekankan pada kuasa penyembuhan Allah melalui doa, juga biasanya dalam hubungannya dengan (dan bukan dalam pertentangan dengan) pelayanan medis konvensional. Gereja-gereja Pentakosta terdiri dari berbagai kelompok, termasuk Sidang Jemaat Allah. Melihat keragaman dalam Pentakosta, tidak semua gereja Pentakosta merupakan bagian dari The Pentecostal World Fellowship. Beberapa, tetapi tidak semua, menantang struktur politik dan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan.

8.8 Pemahaman Baptis tentang Diakonia

Gereja-gereja Baptis di seluruh dunia memberikan penekanan yang besar pada panggilan bagi semua orang—baik awam maupun rohaniwan—untuk merevitalisasi kehidupan kemuridan yang berharga. Istilah diakonia jarang digunakan,

tetapi kesaksian dan pelayanan adalah prioritas gereja Baptis. Bentuknya berbeda-beda, tergantung pada budaya dan konteksnya, tetapi kesaksian dan pelayanan adalah inti dari misi, identitas, dan panggilan semua jemaat yang berdenominasi Baptis. Di Inggris, di mana kesaksian gereja Baptis pada mulanya berakar, 2.000 jemaat berusaha—di bawah bimbingan Kristus—untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesaksian dan pelayanan. Baptist World Alliance (BWA) didirikan pada 1905 dan berfungsi sebagai sebuah forum untuk berkolaborasi. BWA meliputi sebuah lembaga pengembangan Baptist World Aid.

Beberapa pelayan dalam tradisi Baptis ditahbiskan dalam pelayanan diakonia khusus—seperti pendeta di rumah sakit, sekolah, dan tempat kerja—tetapi pada umumnya pelayanan diakonia gereja diorganisasi di dalam jemaat-jemaat lokal dan dilakukan oleh kaum awam secara sukarela, yang memberikan waktu dan keahlian mereka secara cuma-cuma. Istilah diaken sudah tidak asing lagi di telinga semua jemaat Baptis. Diaken yang terpilih, yang terdiri dari para pendeta dan pemimpin awam, umumnya mengawasi jalannya kegiatan di gereja lokal. Biasanya, karya diakonia gereja-gereja Baptis lokal meliputi penjangkauan dan kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat: mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal; mereka yang mengalami masalah kesehatan mental; atau mereka yang dilecehkan dan dikucilkan atas dasar disabilitas, ras, atau jenis kelamin. Karya diakonia yang dilakukan oleh gereja-gereja Baptis biasanya tidak meliputi pengawasan, pengelolaan, atau pelayanan kesejahteraan sosial yang didanai oleh negara. Karya diakonia yang dilakukan lebih tepat digambarkan sebagai pelengkap dari pelayanan kesejahteraan yang dijalankan oleh negara. Kadang-kadang ada unsur kemitraan antara gereja-gereja Baptis dan pemerintah, seperti ketika mereka melaksanakan karya-karya yang sebagian didanai atau didukung oleh negara, tetapi sebagian besar proyek dan program-program ini ada dalam waktu yang terbatas.

Di banyak negara, jemaat-jemaat gereja Baptis memiliki gedung-gedung serbaguna yang luas, yang dibangun dengan dana dari para anggota dan secara strategis terletak di kota-kota besar dan kecil. Gedung-gedung ini berada di lokasi yang ideal untuk menjadi pusat keramahtamahan. Banyak gereja menggunakan aset bangunan ini untuk keperluan sehari-hari, dengan membuka pintu bagi orang-orang yang terpinggirkan, memperluas persahabatan kepada

orang asing, serta melawan isolasi dan kemelaratan yang dihadapi banyak orang dengan keramahan yang murah hati dan tempat yang aman. Pada musim dingin di Eropa dan Amerika Utara, ketika para tunawisma tidur di jalanan dengan suhu nol derajat Celcius, gereja-gereja menggalang tim sukarelawan untuk menyediakan tempat tinggal yang aman.

Dalam situasi-situasi tertentu, ketika kebebasan disangkal atau keadilan diabaikan, gereja Baptis secara historis merasa terdorong untuk terlibat dalam diakonia profetis. Pada abad ke-19, hati nurani orang-orang gereja Baptis diggerakkan untuk bergabung dalam kampanye penghapusan perbudakan. Demikian pula, hari ini, ketika penderitaan para pengungsi dan korban perdagangan manusia makin parah, jaringan gereja-gereja Baptis di seluruh dunia berusaha untuk menghubungkan aksi solidaritas praktis dengan jejaring strategis dan advokasi. Diakonia profetis membayangkan keselamatan secara holistik, menggabungkan aksi-aksi praktis dan politis dengan memenuhi kebutuhan dasar para korban dan pada saat yang sama, memampukan para korban untuk bersuara dan mengatasi akar-akar ketidakadilan.

8.9 Pemahaman Gereja Katolik Roma tentang Diakonia Oikoumenis

“Sifat dasar Gereja diekspresikan dalam tiga rangkap tanggung jawabnya: memewartakan Sabda Allah (*kerygma-martyria*), merayakan sakramen-sakramen (*leitourgia*), dan melaksanakan pelayanan cinta kasih (*diakonia*). Tugas-tugas ini saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan” (Benedict XVI, *Encyclical Letter Deus Caritas Est*, 25).

Selama berabad-abad, Gereja Katolik memperhatikan mereka yang malang melalui berbagai karya paroki dan keuskupan, serta keterlibatan ordo-ordo religius, kongregasi-kongregasi, dan lembaga-lembaga amal. Sejarah *missio ad gentes* Katolik, sejak abad ke-16 dan sesudahnya, menunjukkan bagaimana diakonia telah menjadi elemen penting yang memberikan kredibilitas pada pesan cinta kasih Gereja. Pada saat yang sama, persaingan antara umat Katolik dan kelompok-kelompok Kristen lainnya untuk menarik para petobat baru

sering kali mengubah pelayanan amal menjadi sarana proselitisasi, sebuah kesaksian tandingan atas doa Kristus “supaya mereka semua menjadi satu” (Yohanes 17:21).

Perkembangan eklesiologis yang besar muncul dengan adanya Konsili Vatikan II (1962–1965) yang menekankan pentingnya dialog, termasuk dialog oikoumenis dan kerja sama antara Gereja Katolik dengan semua gereja dan komunitas gerejawi. Dekret Konsili tentang Oikoumenisme menjabarkan visi Katolik tentang diakonia oikoumenis sebagai berikut.

“Di hadapan seluruh dunia, biarlah semua orang Kristen mengakui iman mereka kepada Allah Tritunggal. Pada masa sekarang ini, ketika kerja sama dalam masalah-masalah sosial begitu meluas, semua orang tanpa terkecuali dipanggil untuk bekerja sama, dengan alasan yang jauh lebih besar, yaitu semua orang yang percaya kepada Allah, tetapi yang terutama, semua orang Kristen karena mereka membawa nama Kristus. Kerja sama di antara orang-orang Kristen dengan jelas mengungkapkan relasi yang sebenarnya telah mempersatukan mereka, dan hal itu makin memperjelas ciri-ciri Kristus Sang Hamba. Kerja sama ini, yang telah dimulai di banyak negara, harus dikembangkan lebih jauh lagi, terutama di daerah-daerah yang sedang mengalami evolusi sosial dan teknis, baik dalam hal penilaian yang adil terhadap martabat manusia, pembangunan sarana-sarana perdamaian, penerapan prinsip-prinsip Injil dalam kehidupan sosial, kemajuan seni, dan ilmu pengetahuan dalam semangat kristiani yang sejati, maupun dalam hal penggunaan berbagai sarana untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang ada pada zaman ini, misalnya kelaparan, bencana alam, buta huruf, kemiskinan, keterbatasan tempat tinggal, serta ketidakmerataan distribusi kesejahteraan. Semua orang yang percaya kepada Kristus, melalui kerja sama ini, dapat dituntun untuk memperoleh pengetahuan dan penghargaan yang lebih baik terhadap satu sama lain, dan dengan demikian membuka jalan menuju kesatuan kristiani.”
(Konsili Vatikan II, *Decree Unitatis Redintegratio*, 12)

Secara progresif, gagasan dan pengalaman konkret dari dialog oikoumenis dan antaragama membantu evolusi misiologi gereja Katolik menuju penolakan terhadap proselitisme sebagai sarana penginjilan.

Berdasarkan hasil Konsili, Gereja Katolik makin memahami dengan lebih baik pentingnya komitmen terhadap masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan dan terabaikan. Seluruh isi ajaran sosial Katolik saat ini dirangkum dalam *Compendium of the Social Doctrine of the Church* (2004).

Pada akhir Konsili pada 1967, Paus Paulus VI merestorasi pelayan tertahbis diakonat permanen, termasuk tugas-tugas para diakon: “melaksanakan, atas nama kepemimpinan, tugas-tugas amal dan administrasi serta karya-karya bantuan sosial” (Paul VI, *Motu Proprio Sacrum Diaconatus Ordinem*, 21). Takhta Suci juga mendorong pengembangan jaringan internasional organisasi-organisasi Katolik yang didedikasikan untuk pelayanan amal, atas nama dan di bawah pengawasan para uskup dan konferensi-konferensi uskup nasional. Jejaring Caritas ditugaskan untuk menyatakan kepedulian gereja terhadap kaum miskin dan rentan di tingkat paroki, keuskupan, nasional, dan internasional. Saat ini, Konfederasi Caritas Internationalis memiliki 168 negara anggota yang berkarya pada lebih dari 200 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Takhta Suci telah menegaskan kembali tanggung jawab para uskup dalam memimpin karya-karya amal di gereja masing-masing (lih. Benediktus XVI, *Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura*). Hal ini makin memperkuat hubungan antara para uskup setempat, Caritas nasional mereka, dan semua lembaga Katolik lainnya yang melakukan karya amal.

Sebagai lembaga resmi Katolik yang bertugas membantu mereka yang membutuhkan, Caritas secara aktif mempromosikan diakonia oikoumenis di semua tingkat Konfederasi. Momen yang sangat penting dalam perjalanan ini adalah pada 31 Oktober 2016—selama kunjungan Paus Fransiskus ke Swedia untuk memperingati 500 Tahun Reformasi—ketika Caritas Internationalis dan Lutheran World Federation’s World Services menandatangani sebuah deklarasi global untuk memperkuat kerja sama di seluruh dunia dalam rangka menegakkan martabat manusia dan kepedulian terhadap ciptaan.

Paus Fransiskus memperjuangkan gagasan bahwa meskipun hambatan teologis terhadap persatuan semua orang Kristen sangat dalam dan membutuhkan waktu dan upaya untuk diselesaikan, persatuan oikoumenis yang sejati sudah dimungkinkan dan sering kali nyata dalam dua bidang: “oikoumenisme

dalam darah” dan “oikoumenisme dalam derma”. Pada Juni 2018, Paus Fransiskus mengunjungi kantor Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Jenewa dan dalam pidatonya beliau menyampaikan visinya kepada para anggota Komite Sentral Dewan Gereja se-Dunia:

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa karya komunitas Kristen kita didefinisikan dengan tepat oleh kata *diakonia*. Ini adalah cara kita mengikuti Sang Guru yang datang ‘bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani’ (Mrk. 10:45). (...) Kredibilitas Injil diuji dengan cara orang-orang Kristen merespons jeritan semua orang, di setiap bagian dunia, yang mengalami ketidakadilan akibat pengucilan yang menyebar luas, sehingga menimbulkan kemiskinan dan konflik. (...) Marilah kita melihat apa yang dapat kita lakukan secara konkret, daripada berkecil hati atas apa yang tidak dapat kita lakukan. Marilah kita juga melihat kepada saudara-saudari kita di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah, yang menderita karena mereka adalah orang Kristen. Marilah kita mendekati mereka. Semoga kita tidak pernah lupa bahwa perjalanan oikoumenis kita diawali dan disertai oleh sebuah oikoumenisme yang telah diwujudkan, yaitu oikoumenisme darah, yang mendorong kita untuk terus maju. Marilah kita saling mendorong satu sama lain untuk mengatasi godaan untuk memutlakkan paradigma budaya tertentu dan terjebak dalam kepentingan-kepentingan partisan. Marilah kita membantu kaum laki-laki dan perempuan yang berkehendak baik untuk bertumbuh dalam kepedulian terhadap peristiwa-peristiwa dan situasi-situasi yang memengaruhi sebagian besar umat manusia tetapi jarang tampil di permukaan. Kita tidak bisa melihat ke arah lain. Adalah sebuah masalah ketika orang-orang Kristen terlihat acuh tak acuh terhadap mereka yang membutuhkan. Yang lebih meresahkan lagi adalah keyakinan sebagian orang, yang menganggap berkat-berkat mereka sendiri sebagai tanda-tanda yang jelas dari kemurahan Allah dan bukan sebagai panggilan untuk melayani umat manusia secara bertanggung jawab dan perlindungan terhadap ciptaan. Tuhan, Orang Samaria yang Baik Hati bagi umat manusia (bdk. Luk. 10:29–37), akan menguji kita dalam hal kasih kita kepada sesama kita, kepada setiap orang di sekeliling kita (bdk. Mat. 25:31–46). Jadi, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri: Apa yang dapat kita lakukan bersama? Jika suatu bentuk pelayanan tertentu memungkinkan, mengapa tidak merencanakan dan

melaksanakannya bersama-sama, dan dengan demikian mulai mengalami suatu rasa persaudaraan yang lebih erat dalam pelaksanaan cinta kasih yang konkret?”²

8.10 Pemahaman Lembaga-Lembaga Gereja di Afrika tentang Diakonia Oikoumenis

Gereja-gereja Independen Afrika (The African Independent Churches/AIC), yang merupakan anggota dari Organization of African Instituted Churches (OAIC), merupakan gerakan yang didirikan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Gerakan ini hadir pada saat Afrika mengalami perubahan sosial-politik dan ekonomi yang cepat yang menghasilkan dominasi budaya, politik, dan ekonomi. Para pendiri AIC memutuskan untuk membaca Kitab Suci dengan cara yang berbeda yang memungkinkan mereka untuk menemukan Kristus Sang Pembebas yang tidak setuju dengan bentuk-bentuk kekristenan yang telah disembarkan. Hal ini telah dan tetap menjadi visi yang beragam dari akar rumput dan merupakan faktor pendorong utama bagi partisipasi AIC dalam masyarakat.

Bagi OAIC, visi-visi inilah yang berperan dalam kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan pada 2030. Visi AIC ini, dan upaya dari berbagai aktor yang bekerja untuk kesejahteraan hidup, berinteraksi dengan lingkungan di mana: penumpukan kekayaan yang tidak terkendali mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang parah; nasionalisme dan etnisitas menjadi dasar mobilisasi untuk menyingkirkan yang lain; ketidaksetaraan gender dan generasi membuat kemiskinan menjadi makin kompleks; terdapat ketidakharmonisan ekologi yang disebabkan oleh pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan; fokusnya lebih kepada keamanan daripada perdamaian. Bahkan, upaya-upaya untuk mengatasi kemiskinan dan isu-isu lain yang merendahkan martabat manusia dan keutuhan ciptaan masih belum lepas dari kerangka patronasi

² *Ecumenical Pilgrimage of His Holiness Francis to Geneva To Mark the 70th Anniversary of the Foundation of the World Council of Churches*. https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180621_pellegrinaggio-ginevra.html.

politik dan ekonomi. Inilah yang memotivasi OAIC untuk menyerukan diakonia liberatif.

Diakonia liberatif dimulai dari sudut pandang keberdayaan, bahkan dalam situasi ketika orang-orang tampaknya sangat membutuhkan pertolongan. AIC, terutama dalam konteks lokal, adalah komunitas yang memulai dari titik keberdayaan bahkan di tengah situasi yang dipandang sebagai kemiskinan. Memberi, berbagi, dan peduli yang terjadi dalam konteks lokal di mana AICs berkarya, dengan sendirinya merupakan kesaksian profetis bagi dunia—terutama bagi mereka yang hidup dalam kehidupan ekonomi yang penuh dengan kesenjangan. Kesaksian ini menyoroiti bahwa kita semua dapat menjadi baik ketika kita melampaui diri kita sendiri untuk peduli kepada orang lain di sekitar kita. Berbagi dilakukan atas dasar persekutuan dan pembangunan komunitas yang mengupayakan martabat bersama. Berbagi semacam ini didasarkan pada motivasi dari dalam dan rasa kesadaran yang mendalam akan sebuah komunitas yang seharusnya menjadi lebih baik.

Diakonia liberatif menyerukan proses yang melampaui pengentasan kemiskinan, untuk berjalan bersama mereka yang tertinggal, sampai mereka masuk ke dalam kelimpahan. Keutuhan adalah pusatnya. Diakonia liberatif menyerukan untuk mempertanyakan kembali apa yang telah kita lakukan, apakah kita telah meruntuhkan fondasi-fondasi yang menjadi dasar dari kemiskinan dan keberlanjutan kemiskinan. Diakonia liberatif mentransformasi kerangka kerja pemberi dan penerima. Diakonia liberatif berfokus pada pengembangan kehidupan masyarakat sehingga mereka dapat mandiri dan menegaskan peran mereka dalam menemukan dan mewujudkan sebuah komunitas yang utuh.

Sistem nilai inilah yang menyerukan dunia untuk ditata dengan menegaskan fakta bahwa “Bumi dan segala isinya adalah milik Allah”. Hal ini akan membawa kita ke dalam arena pembangunan dengan kerendahan hati, penatalayanan, dan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang untuknya kelimpahan hidup harus diwujudkan.

8.11 Pemahaman Gereja-Gereja Perdamaian tentang Diakonia Oikoumenis

Istilah “*historic peace churches*” merujuk pada *Church of Brethren*, *Religious Society of Friends* (Quaker) dan *Mennonite*, nama kolektif yang muncul setelah konferensi yang diadakan di Kansas, Amerika Serikat, pada 1935. *Historic peace churches* diwakili oleh kelompok yang sama dengan Moravian Church di dalam WCC. Gereja-gereja ini berupaya untuk melakukan pelayanan diakonia dalam berbagai bentuk, termasuk di tengah-tengah konflik. Kaum Quaker mengatur pengiriman makanan dan obat-obatan ke Kuba dan Vietnam Utara pada 1960-an dan 1970-an, yang secara langsung bertentangan dengan embargo Amerika Serikat. Mennonite Central Committee (MCC) memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana dan perang, termasuk dalam konteks yang dianggap oleh pemerintah Barat sebagai wilayah musuh, seperti Iran dan Korea Utara. *Historic peace churches* ini berkomitmen dalam karya diakonia mereka untuk memulihkan dampak perang tanpa pilih kasih. Berikut ini adalah daftar singkat, meski tidak lengkap, dari organisasi-organisasi yang melakukan karya diakonia atas nama *historic peace churches* dan Moravia Church:

- Bantuan, pembangunan dan upaya membangun perdamaian yang dilakukan oleh American Friends Service Committee dan Mennonite Central Committee;
- Christian Peacemaker Teams, yang didukung oleh Quaker, Church of Brethren, dan Mennonite (antara lain), yang bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan ketidakadilan sistematis di daerah konflik.
- Church of Brethren’s Global Food Initiative.
- Pelayanan Diakonia Mennonite di Indonesia.
- Aksi Sosial Quaker di Inggris Raya.
- The Community Outreach Ministries of the Moravian Church.

Keterlibatan gereja-gereja perdamaian dalam relasi oikoumenis memiliki dampak langsung terhadap diakonia oikoumenis, melalui pertukaran anggota, sumber daya, ide, dan komitmen mereka untuk menciptakan perdamaian dalam konteks pelayanan diakonia.

B A B 9

Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Regional

9.1 Pendahuluan

Bab ini mencoba untuk menunjukkan bagaimana berbagai tantangan sosio-ekonomi, sosio-politik, lingkungan, sejarah, dan budaya yang berbeda dapat memengaruhi pendekatan terhadap diakonia. Isu-isu seperti konflik, ideologi politik, bencana alam, kekayaan, kemiskinan, warisan kolonialisme, dan status hukum gereja hanyalah beberapa isu yang dapat berdampak langsung pada penyelenggaraan diakonia. Pembentukan sebuah etika global diakonia oikoumenis harus mempertimbangkan keragaman tersebut, dalam konteks yang universal dari kasih Allah, yang dinyatakan dalam Kristus.

9.2 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Amerika Latin

Ada yang mengatakan bahwa Amerika Latin adalah wilayah yang paling tidak setara di dunia dan, pada saat yang sama, merupakan wilayah yang penduduknya mayoritas Kristen. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pernyataan ini ke-

pada kita tentang diakonia oikoumenis? Apakah kekristenan merupakan bagian dari masalah, bagian dari solusi, atau keduanya?

Menurut Marcelo Justo, “Terlepas dari pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir dan penerapan kebijakan redistribusi, Amerika Latin tetap menjadi wilayah yang paling tidak setara di planet ini, yang hanya dapat dikalahkan oleh wilayah yang dilanda perang dan kelaparan: Afrika Sub-Sahara. Kemajuan sosialnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama 15 tahun terakhir, sekitar 100 juta orang Amerika Latin telah keluar dari kemiskinan. Namun, jarak yang memisahkan mereka dari orang-orang terkaya hampir tidak berubah. Berbagai indikator standar internasional untuk mengukur ketimpangan, yaitu *Gini Coefficient*, tampaknya mengonfirmasi hal ini. Menurut Bank Dunia dan Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS/Centre for Distributive, Labour and Social Studies), Afrika Sub-Sahara memiliki peringkat ketimpangan dengan nilai 56,5, disusul Amerika Latin dengan nilai 52,9, dan relatif jauh di atas Asia (44,7) serta Eropa Timur dan Asia Tengah (34,7).” Ketidaksetaraan ini termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, kejahatan, ketidakberdayaan, migrasi, terorisme, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, rendahnya standar pendidikan, makanan dan layanan kesehatan, serta perubahan iklim.

Mayoritas penduduk Amerika Latin adalah penganut agama Kristen (90%), sebagian besar beragama Katolik Roma (69%). Keanggotaan dalam denominasi Protestan (19%) makin meningkat, khususnya Pentakosta telah mengalami pertumbuhan besar-besaran. Gerakan ini makin menarik perhatian kelas menengah Amerika Latin. Anglikanisme juga memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang di Amerika Latin. Di beberapa negara, terdapat peningkatan jumlah penganut Injili dalam partai politik dan pemerintahan. Kepercayaan dan ritual suku asli dipraktikkan di negara-negara dengan persentase yang besar dari penduduk Amerindian. Berbagai tradisi Afro-Amerika Latin, seperti Santería, Candomblé, Umbanda, Macumba, dan agama-agama suku, Voodoo juga dipraktikkan, begitu juga dengan agama-agama dunia lainnya.

Gambaran yang agak berlawanan ini menantang berbagai gereja untuk mengupayakan sebuah diakonia oikoumenis yang mentransformasi diri mereka sendiri, untuk menjadi “garam dan terang” (Mat. 5:13-16), melayani “yang

paling hina” (Mat. 25:31-46), sehingga dapat mentransformasi berbagai konteks, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yaitu “keadilan, perdamaian, dan sukacita dalam Roh Kudus” (Rm. 14:17).

Bahkan, ketika jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang, berbagai gereja mengumandangkan dan mengupayakan diakonia profetis yang mencoba untuk menghibur mereka yang membutuhkan dan pada saat yang sama melawan kuasa-kuasa yang menyebabkan ketidaksetaraan. Terkait hal ini, kesadaran dan upaya menerapkan konsep ini makin meningkat di wilayah tersebut. Ada berbagai prakarsa, seperti model Diakonia yang Memberdayakan (yang berfokus pada dimensi visioner, normatif, berorientasi pada kebutuhan, kontekstual, dan transformatif); Diakonia sebagai berbagi di meja; Diakonia yang mengikuti teladan Yesus, seperti bersama anak-anak, orang sakit, perempuan, dan kaum miskin pada umumnya. Ada tren yang meningkat untuk bekerja sama dengan ACT Alliance (Action by Churches Together) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, untuk melayani secara lebih efektif dan bermitra dengan FBOs lain, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Bersamaan dengan itu, makin banyak lembaga teologi yang memasukkan diakonia sebagai sebuah disiplin ilmu dalam kurikulum mereka, sebagai bagian dari *Missio Dei* (misi Allah).

Gereja-gereja di Amerika Latin diilhami oleh komunitas ilahi yang diwahyukan oleh Allah sebagai sumber kekuatan, oleh Yesus sebagai kehadiran kekuatan Allah di dunia, dan oleh Roh Kudus sebagai penjangkauan kuasa Allah, dalam rangka melayani melalui berbagai perbuatan kasih yang efektif, demi transformasi individu, sosial, dan ekologi menuju *koinonia* yang utuh dari kerajaan Allah.

9.3 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Kepulauan Karibia

Agama Kristen telah menjadi agama yang dominan di seluruh Karibia selama sekitar lima abad. Filosofi Eropa sebelumnya yang melandasi teologi di Karibia menganggap bahwa penderitaan ekstrem yang dialami oleh penduduk asli

Indian, orang-orang Afrika yang diperbudak, dan korban perdagangan manusia dari Asia harus ditanggung dengan kesabaran, karena akan ada upah yang besar di surga.

Pandangan ini ditentang dan terus dilawan oleh teologi Karibia yang memahami bahwa kehidupan manusia bersifat holistik dan dibentuk oleh sistem dan campur tangan manusia. Perkembangan sejarah kekristenan di Karibia penuh dengan kontradiksi. Karenanya, ketika para pemilik perkebunan mengendalikan mayoritas penduduk dalam perbudakan dan bentuk-bentuk penindasan lainnya, beberapa perwakilan gereja berusaha untuk melakukan aksi diakonia, secara khusus, tetapi tidak secara eksklusif di bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun ada pandangan yang sah bahwa kepentingan kolonial dalam bidang pendidikan adalah untuk mempertahankan *status quo*, beberapa lembaga pendidikan dan rumah sakit yang terkenal masih ditemukan dan, dalam beberapa kasus, terus dijalankan oleh gereja-gereja dan agen-agenya.

Di antara kenyataan pahit yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan di Karibia, terdapat berbagai tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi, hubungan ekonomi global yang tidak bersahabat, kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, perubahan iklim, dan perampasan lahan yang luas, yang dihadapi terutama oleh masyarakat adat. Realitas-realitas ini membutuhkan tanggapan yang spesifik dari gereja.

Konteks Sosial dan Teologis bagi Diakonia

Memahami konteks kontemporer Kepulauan Karibia perlu didasari oleh pemahaman bahwa kemiskinan materi yang terlihat di wilayah tersebut saat ini merupakan hasil dari akar sejarahnya yang kelam. Meskipun ada kecintaan yang kuat terhadap Allah di antara orang-orang di wilayah ini, ada banyak orang yang menolak firman Allah dan ada banyak orang yang tidak secara aktif berpartisipasi dalam kekristenan, agama utama. Oleh karena itu, kebutuhan akan penginjilan yang berkesinambungan tetap kuat.

Konteks sosial bagi karya diakonia oikoumenis di wilayah ini biasanya adalah perekonomian yang tidak berkembang dengan baik, dan Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga-lembaga lain, serta negara-negara dengan sistem

politik yang kuat di dunia merupakan bagian dari tatanan sosial di wilayah ini. Dengan demikian, ada beberapa kelompok yang hidup di taraf yang sangat tinggi, kelas menengah yang relatif kecil, tetapi banyak orang yang berada di sekitar garis kemiskinan. Populasi umumnya terdiri dari orang-orang muda, tetapi sistem kesehatan yang makin baik juga mendukung persentase kaum lansia yang makin meningkat, dan banyak di antaranya tidak memiliki dana pensiun formal.

Dalam situasi ini, orang-orang memiliki hasrat untuk berpegang teguh pada Allah yang menyelamatkan mereka, tetapi realitas kehidupan menyebabkan beberapa orang, terutama di antara kaum muda, menjadi putus asa.

Contoh yang Menonjol dan Berpengaruh

Gagasan dan praktik diakonia telah dikenal di wilayah ini sejak lama. Ketika berbagai denominasi didirikan dan terus mendapatkan kekuatan di wilayah ini, pemberitaan firman Allah biasanya disertai dengan berbagai bentuk kegiatan amal. Tindakan-tindakan ini sering kali diselaraskan dengan Kisah Para Rasul dan telah menjadi bagian dari berbagai aktivitas sosial dan proyek-proyek fisik yang dirancang untuk memulihkan penderitaan dan kemerosotan manusia.

Sebagian besar denominasi di Kepulauan Karibia mampu menunjukkan contoh-contoh keterlibatan yang telah mereka buat untuk memancarkan terang Kristus ke dalam kondisi-kondisi yang dialami oleh masyarakat. Berikut disajikan dua contoh secara ringkas.

The Theodora Project

Migrasi dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik adalah ciri khas kehidupan Karibia. Mengingat banyaknya pariwisata di Karibia, wajar jika banyak orang yang berniat mencari nafkah di sektor ini. Namun, ada unsur penipuan dan janji-janji palsu, seperti tawaran pekerjaan di luar negeri, yang membuat banyak orang menjadi korban. Perdagangan seks dan budaya hiburan yang aktif telah menarik beberapa kaum muda dan lugu ke dalam perangkap perdagangan manusia. The Theodora Skills Training Project, yang didirikan oleh Rev. Dr Margaret Fowler dari United Church in Jamaica

and the Cayman Island, menyelamatkan, melindungi, dan membimbing para korban di jalan menuju kemandirian dan pemulihan.

Missionaries of the Poor

Missionaries of the Poor adalah organisasi Gereja Katolik Roma di Jamaika yang telah berusia empat puluh tahun. Didirikan oleh Pastor Richard Ho Lung, seorang imam asal Jamaika, organisasi ini merupakan ordo monastik internasional yang dilayani oleh para frater dari berbagai negara. Selama periode ini, gerakan ini telah membangun banyak rumah dan pusat-pusat pelayanan bagi kaum miskin di Jamaika dan sembilan negara lainnya.¹

9.4 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Eropa

Pemahaman tentang diakonia oikoumenis di Eropa Utara dan Barat sebagian besar ditandai oleh perkembangan gerakan diakonia yang muncul di Jerman pada 1830-an. Gerakan ini menunjukkan serangkaian keprihatinan yang sejak saat itu menjadi bagian dari praktik diakonia dan refleksi teologis:

- a. Panggilan untuk merespons tantangan sosial yang mendesak yang disebabkan oleh kemiskinan dan berbagai persoalan kebutuhan manusia lainnya, misalnya persoalan kesehatan yang dapat menstigmatisasi dan mengucilkan orang-orang yang rentan. Hal ini telah memberikan identitas yang jelas bagi aksi diakonia sebagai aksi publik, dengan mandat untuk membela martabat manusia dan berkontribusi pada proses pemulihan dan mengupayakan kebaikan bersama, jika memungkinkan, melalui kerja sama dengan pemerintah.
- b. Komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan profesional dalam praksis diakonia, terutama untuk menjamin kualitas, kepatutan, dan tanggung jawab ketika berhadapan dengan orang-orang yang rentan. Para pelaku diakonia menjadi pelopor dalam membangun lembaga-lembaga yang kompeten dan dalam menawarkan pelatihan

¹ <https://missionariesofthepoor.org/about-mop/contact-us/>.

profesional, dan telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan pelayanan kesehatan dan sosial di negara mereka. Ciri khusus dari perkembangan ini adalah peran perempuan, yang memberikan mereka peran-peran baru dalam gereja dan masyarakat.

- c. Gerakan diakonia diprakarsai dan didukung secara lintas konfesional, dan dengan demikian menjadi pembuka pintu bagi kerja sama Oikoumenis, dan kemudian bagi gerakan oikoumenis.
- d. Para pendiri gerakan diakonia bermaksud untuk memperbarui apa yang mereka pahami sebagai tradisi diakonia dalam Perjanjian Baru, khususnya pelayanan diakon dan diakones. Karya-karya diakonia sejak saat itu telah diilhami oleh tradisi ini, terutama oleh teladan Yesus; mereka telah menafsirkan panggilan untuk berdiakonia sebagai suatu kemuridan dan pelayanan. Hal ini mengekspresikan basis iman dari diakonia.

Diakonia oikoumenis dalam bentuk modern dan kontemporer muncul setelah perang dunia, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan para pengungsi dan korban perang lainnya. Hal ini mendorong lahirnya lembaga-lembaga khusus, seperti *DanChurchAid* (Denmark) dan *Christian Aid* (UK). Sebagai lembaga yang berbasis gereja, lembaga-lembaga ini mengupayakan kerja sama oikoumenis, sering kali dalam kerangka kerja Dewan Gereja-gereja se-Dunia, dan mengedepankan profesionalisme dan kualitas dalam karya-karya di ruang publik. Sejak akhir tahun 1950-an, lembaga-lembaga ini memperluas fokus mereka dari tantangan dalam lingkup Eropa ke tantangan global. Mereka terlibat dalam program-program pembangunan, dan kemudian juga dalam isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan ekologi. Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi misi menunjukkan komitmen yang sama terhadap diakonia oikoumenis. Berbagai perubahan muncul sejak tahun 1960-an dan setelahnya yang dapat dilihat baik sebagai kekuatan maupun tantangan bagi kinerja diakonia oikoumenis saat ini:

- a. Meningkatnya pendanaan publik menyiratkan ketergantungan yang makin besar pada prinsip-prinsip dan metode pemerintah/sekuler. Konsekuensinya dapat berupa melonggarnya hubungan dengan gereja-gereja dan “NGO-fication” atas agen-agen diakonia dan aktivitasnya.

- b. Terkait dengan hal itu, terlihat tumbuhnya proses profesionalisasi, yang sering kali mengikuti logika kerja pembangunan sekuler. Hal ini berarti berkurangnya ruang bagi gereja-gereja lokal dalam melaksanakan proyek-proyek, karena mereka sering dianggap tidak memiliki kemampuan profesional yang dibutuhkan.
- c. Tumbuhnya kesadaran akan dimensi politik dan pendekatan yang lebih komprehensif dalam karya diakonia membuka peluang untuk meningkatkan fokus pada dimensi profetis diakonia oikoumenis, dan memasukkan advokasi dan kesaksian publik dalam semua bentuk karyanya.

Eurodiaconia, yang berkantor di Brussel, adalah jaringan 51 gereja dan LSM Kristen di Eropa yang menyediakan pelayanan sosial dan kesehatan serta advokasi untuk keadilan sosial. Eurodiaconia terlibat dalam isu-isu dan kebijakan Uni Eropa dan dampaknya terhadap karya organisasi diakonia.

Keragaman dalam konteks Eropa juga harus dipahami. Sekularisasi yang meluas di sebagian besar wilayah Eropa dalam beberapa dekade terakhir ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dengan menurunnya jumlah kehadiran di gereja dan persentase orang Kristen dalam keseluruhan populasi. Undang-undang nasional juga memberi dampak: pembentukan National Health Service di Inggris pada 1948 secara efektif mengalihkan semua rumah sakit menjadi milik dan dikendalikan oleh negara; menyusul Revolusi Portugis pada 1974, rumah-rumah sakit yang dikelola oleh *misericórdias* yang terkait dengan gereja dialihkan ke dalam pengawasan negara. Pentingnya pelayanan diakonia Katolik Roma, khususnya di Eropa Selatan, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 8.9.

Rusia

Rusia adalah negara terbesar di Eropa, baik secara geografis maupun jumlah penduduknya. Semua badan amal yang dikelola gereja ditutup setelah Revolusi 1917. Pasca-Perestroika pada 1980-an, sebagian besar proyek baru diakonia diprakarsai dan didanai oleh orang-orang Kristen Barat. Sejumlah inisiatif bersama dikembangkan dengan beberapa jemaat Ortodoks, termasuk bantuan kemanusiaan dan berbagai bidang sosial yang dilarang untuk semua organisasi keagamaan selama era Soviet.

The Round Table for Religious Education and Diakonia didirikan pada 1992 oleh Dewan Gereja-gereja se-Dunia dan Gereja Ortodoks Rusia. Inisiatif diakonia oikoumenis regional yang signifikan adalah Christian Interchurch Diaconal Council of St. Petersburg (yang didirikan oleh gereja-gereja Ortodoks, Katolik, dan Lutheran). Sejak 2008, lembaga ini bekerja sebagai yayasan amal “Diakonia”.

Mayoritas penduduk Rusia (hingga 80%) mengidentifikasi dirinya dengan Gereja Ortodoks Rusia. Dokumen *On the principles of organization of social work in the Russian Orthodox Church* (2011) menekankan bahwa “pelayanan sosial gereja tidak boleh ditekan atau dibatasi oleh kerangka kerja agama, nasional, negara, dan politik atau sosial”. Dokumen ini menekankan perlunya “pertukaran pengalaman dengan organisasi amal asing, termasuk usaha sukarela, analisis, dan pemanfaatan pengalaman denominasi Kristen lainnya, yang lebih maju dalam bidang pelayanan sosial secara historis”. Meskipun tidak harus meniru model-model Barat, peluang untuk bekerja sama dan saling memahami dengan negara-negara dan gereja-gereja lain tetap ada.

9.5 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Afrika

Karya diakonia di Afrika berkembang pesat dalam konteks gereja-gereja yang bertumbuh dengan cepat di banyak negara. Gereja-gereja melakukan pelayanan diakonia dengan berbagai cara dan ekspresi, termasuk penggunaan terminologi yang berbeda untuk menamai apa yang mereka lakukan. Secara historis, banyak gereja yang terkenal dengan pelayanan diakonia mereka melalui sekolah, rumah sakit, dan klinik, proyek-proyek pertanian di perdesaan termasuk penggalian sumur bor, pelayanan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan gender, dan pengembangan keterampilan mata pencarian. Meskipun banyak pelayanan ini diorganisasi dari kantor pusat denominasi, pelayanan diakonia juga dilakukan melalui dewan gereja nasional, subregional, dan regional (Fellowships of Councils, All Africa Conference of Churches/AACC, dan Organization of African Instituted Churches/OAIC). Pelayanan ini mencakup pelayanan untuk pengungsi dan migrasi, pendidikan kewarganegaraan, gerakan perjuangan kemerdekaan dan pembebasan, advokasi untuk pembangunan perdamaian,

keadilan iklim, keadilan ekonomi, keadilan gender, dan dialog antaragama. Pelayanan diakonia yang signifikan dilakukan oleh kelompok-kelompok gereja, terutama oleh kaum perempuan dan pemuda.

Secara keseluruhan, Afrika dianugerahi kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman budaya, tradisi dan agama serta populasi kaum muda yang dinamis yang juga merupakan sumber peluang. Namun, hal ini juga menciptakan tantangan yang cukup besar bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga oikoumenis, tidak terkecuali keanekaragaman tradisi denominasi dan bahasa serta konflik antaragama dan etnis. Lebih jauh lagi, terlepas dari komitmen diakonal yang besar dari gereja-gereja dan mitra oikoumenis, distribusi sumber daya yang tidak merata di tingkat nasional, tata kelola pemerintahan yang buruk, kekerasan, dan eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa dan perusahaan multinasional (dengan dukungan dari kelompok kecil pemimpin di benua ini), menggagalkan penatalayanan yang efektif atas kekayaan Afrika.

Sejak berdirinya Konferensi Gereja-gereja se-Afrika pada 1963, tantangan untuk memberikan pelayanan diakonia yang efektif telah menjadi isu utama bagi organisasi ini dan para anggotanya. Secara keseluruhan, tingkat komitmen dari gereja-gereja dan lembaga diakonia di Afrika sangat besar—sekaligus mencerminkan tantangan dan kesempatan yang besar untuk peduli dan melayani dalam nama Kristus.

Francophone

Wilayah Afrika yang berbahasa Prancis memiliki komunitas Kristen dan Muslim yang cukup besar. Prancis memberikan kemerdekaan kepada hampir semua wilayah bekas jajahannya di Afrika pada awal tahun 1960-an, tetapi sering kali masih memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan sosial yang cukup besar di wilayah tersebut.

The Fellowship of Christian Councils and Churches in West Africa (FECCIWA) adalah salah satu contoh ruang untuk mengalami diakonia oikoumenis. FECCIWA berkarya untuk perdamaian yang berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia, kebebasan berekspresi bagi masyarakat dan partisipasi

mereka dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan masyarakat. FECCIWA berkontribusi pada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat di 13 negara. Kampanye antikorupsinya di sekolah-sekolah di Afrika Barat telah memungkinkan pelatihan terhadap rekan sebaya bagi anak-anak sekolah. Contoh lainnya adalah kampanye advokasi untuk ketahanan pangan di antara lembaga-lembaga pemerintah di ECOWAS dan di gereja-gereja: “Makanlah apa yang Anda tanam dan tanamlah apa yang Anda makan”. Kampanye ini telah membantu gereja-gereja untuk memperhatikan kebijakan ketahanan pangan dengan mengintegrasikan ketahanan pangan dan kebijakan pertanian ke dalam rencana pembangunan mereka, dengan komitmen dari gerakan kaum muda dan perempuan.

Lusophone

Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, dan São Tomé & Príncipe sebelumnya dikuasai oleh Portugal, yang berdampak pada budaya negara-negara ini—terutama warisan bahasa Portugis yang masih ada. Tidak seperti Inggris, Belgia, dan Prancis, Portugal yang menolak permintaan dekolonisasi pada 1960-an, yang mengarah ke perang pembebasan. “Carnation Revolution” melawan kediktatoran Salazar dan Caetano di Portugal pada 25 April 1974, yang dengan cepat mengarah pada kemerdekaan setiap koloni Portugal di Afrika.

Warisan penjajahan membuat negara-negara tersebut menjadi salah satu negara termiskin di dunia, meskipun belakangan ini penggalian sumber daya mineral (terutama minyak di Angola) mulai mengubah situasi—walau hanya berdampak kecil bagi masyarakat miskin. Kurangnya sumber daya negara untuk penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan membebankan tanggung jawab besar pada lembaga-lembaga diakonia dan badan-badan pembangunan untuk memfasilitasi layanan, seperti klinik. Agama Kristen (terutama Katolik Roma) adalah agama mayoritas pada masing-masing negara. Dengan tidak adanya layanan publik yang berfungsi, tanggung jawab komunitas agama untuk menyediakan pelayanan dasar dan kesejahteraan cukup besar.

Anglophone

Ada 24 negara di Afrika yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, karena mereka dijajah oleh Inggris. Pemilihan umum demokratis Afrika Selatan pada 1994 menandai era baru kebebasan politik di Afrika. Gereja-gereja di Anglophone Afrika memainkan peran penting dalam mencapai pemerintahan politik yang demokratis. Gereja-gereja terus berjuang untuk kemandirian ekonomi negara-negara Afrika. Didirikan pada 1980, The Fellowship of Christian Councils in East and Southern Africa (FOCCESA)—yang berganti nama menjadi FOCCISA pada 1999—telah memajukan karya diakonia oikoumenis terutama dengan fokus pada pembangunan perdamaian, mengawasi perusahaan-perusahaan tambang multinasional dan mengawasi bagaimana pemerintah menggunakan dana. Badan-badan oikoumenis telah menunjukkan kemajuan dalam bidang kesehatan dan pemulihan, terutama terkait isu HIV dan AIDS dan malaria, melawan kekerasan berbasis gender dan pernikahan anak melalui *Tamar Campaign* dengan menggunakan studi Alkitab yang kontekstual.

9.6 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Asia

Kekristenan adalah agama minoritas di sebagian besar negara Asia. Namun demikian, Asia memiliki beberapa gereja yang sangat besar (dalam hal keanggotaan), beberapa gereja yang lebih kecil dan komitmen diakonia yang aktif di banyak negara. Christian Conference of Asia diresmikan pada 1959. Mencerminkan keragaman di Asia, bagian ini akan membahas pendekatan-pendekatan diakonia dalam konteks Cina, Asia Timur, Asia Selatan, dan Australia.

Cina

Keterbukaan dan reformasi yang terjadi di Cina setelah tahun 1978 telah memberikan lebih banyak kesempatan bagi gereja-gereja di Cina untuk terlibat dalam diakonia oikoumenis. Dewan Kristen Cina didirikan pada 1980 dan termasuk sebuah pelayanan sosial, yang memberikan kursus-kursus pengembangan kapasitas di tingkat provinsi dan pengelolaan kepedulian terhadap para lansia.

Pada awal tahun 1985, Uskup K.H. Ting mendirikan Amity Foundation sebagai sebuah LSM yang memungkinkan umat Kristen Cina berkontribusi dalam pembangunan Cina. Ting sangat percaya bahwa kasih adalah atribut utama Allah dan bahwa diakonia adalah cara untuk mengekspresikan kasih Allah dalam tindakan. Oleh karena itu, diakonia merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari misi Kristen. Hal ini akan membuat Kekristenan lebih dipahami dan diterima di Cina, dan menghilangkan stigma sebagai “agama asing” yang merupakan produk imperialisme Barat.

Dalam situasi kemiskinan ekstrem yang dihadapi masyarakat Cina pada 1980-an dan 1990-an, simbol-simbol diakonia sering kali berupa lima roti dan dua ikan. Orang-orang Kristen Cina kerap kali melihat peran mereka sebagai penyedia makanan rohani dan jasmani bagi sesama manusia. Ketika gereja-gereja di Tiongkok muncul sejak Revolusi Kebudayaan, orang-orang Kristen berbagi apa yang mereka miliki satu sama lain, meskipun mereka miskin. Seiring dengan bertambahnya anggota dan sumber daya mereka, mereka mulai mendirikan taman kanak-kanak, panti asuhan, klinik kesehatan, dan panti jompo sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang sangat besar di sekitar mereka. Usaha-usaha tersebut sering kali masih dalam skala yang sangat kecil, karena organisasi-organisasi keagamaan dilarang untuk memberikan pelayanan sosial hingga tahun 2003.

Pendirian Amity pada 1985 menawarkan sebuah wadah untuk berbagi sumber daya secara oikoumenis dengan gereja-gereja di luar negeri. Wadah ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengembangkan sebuah jenis hubungan pascakolonial baru yang berpusat pada kesetaraan, saling menghormati dan saling bertukar gagasan. “Awal yang baru” dari diakonia oikoumenis ini memupuk pembelajaran bersama, kesetaraan, dan persahabatan. Amity Foundation adalah sebuah organisasi independen Cina yang menjunjung tinggi tiga prinsip, yaitu manajemen diri, pengembangan diri, dan pembiayaan diri. Pembagian sumber daya secara oikoumenis berarti bahwa semua mitra memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hal keuangan, keahlian, tenaga kerja, maupun pelayanan. Umat Kristen Cina juga menekankan “sikap sebagai hamba” dan kerendahan hati dalam praktik diakonia. Sikap rendah hati dan penekanan pada partisipasi

dalam pembangunan sering kali membuat pemerintah setempat terkesan dan mendorong perubahan pola pikir.

Sejak tahun 1990-an dan sesudahnya, Amity terlibat dalam karya pembangunan di daerah perdesaan yang berfokus pada sistem pengairan, energi terbarukan, layanan kesehatan preventif, dan pencegahan HIV dan AIDS. Gereja-gereja lokal di berbagai daerah telah beralih ke proyek-proyek berskala lebih besar, mengupayakan pelatihan profesional untuk meningkatkan pelayanan mereka yang mencakup fasilitas layanan lansia, rumah sakit, dan layanan bagi penyandang disabilitas. Saat ini, seiring dengan tantangan perubahan iklim, meningkatnya kesenjangan kesejahteraan dan polusi yang dihadapi masyarakat Cina, terdapat pemahaman yang berkembang bahwa diakonia harus menjadi sarana untuk mengadvokasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, dan karenanya membutuhkan kerja sama antaragama dan antarbudaya agar efektif.

Asia Timur

Globalisasi telah membawa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Asia Timur, namun juga membawa penderitaan. Ada kesenjangan yang makin lebar antara si kaya dan si miskin karena pertumbuhan dan persaingan di pasar. “Mamonisme” perusahaan-perusahaan raksasa membawa konsekuensi sosial yang menguntungkan dan merugikan. Degradasi lingkungan, seperti pembangunan bendungan, penggundulan hutan, bencana di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang (2011) dan proses industrialisasi yang digerakkan oleh pasar, dapat menimbulkan konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi. Komodifikasi budaya, media berteknologi tinggi, dan pasar komunikasi telah menyebabkan erosi budaya tradisional Asia Timur dalam hal identitas, nilai, dan sensibilitas. Dunia estetika keindahan dan dunia spiritual yang penuh misteri dihancurkan oleh komersialisasi dan komodifikasi warisan dan kreasi budaya. Agama juga dapat disalahgunakan untuk memecah belah, seperti menekan keadilan gender dan menegakkan rasisme. Fundamentalisme agama meningkat dan agama sebagai institusi yang menindas menjadi makin kuat dalam pusaran ideologi politik dan pasar.

Terjadi peningkatan ketegangan antara gerakan demokrasi rakyat dan rezim otoriter di Asia Timur. Secara geopolitik, Perang Dingin belum berakhir di Asia Timur, yang paling jelas digambarkan oleh perpecahan Semenanjung Korea. Hal ini memiliki konsekuensi yang mendalam bagi keluarga-keluarga yang terpisah akibat perpecahan tersebut, ditambah lagi dengan konteks regional yang lebih luas dan kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan mengupayakan rekonsiliasi.

Dalam semua konteks tersebut, diakonia harus mengambil inisiatif untuk keadilan ekonomi, untuk partisipasi langsung dan keterlibatan dalam proses pasar, dan untuk tindakan-tindakan ekonomi untuk kehidupan yang berkelanjutan.

Kepenuhan hidup terancam oleh rezim globalisasi di Asia Timur; bahaya ini datang dari keserakahan yang tak terbatas akan kekuasaan dan uang. Dalam konteks ini, diakonia mencari sebuah visi alternatif untuk hidup dalam keramahan, kepenuhan, dan keamanan. Yesus sebagai hamba yang menderita adalah Diakon Kehidupan. Imanuel (Allah yang berdiam di antara yang hidup) adalah kemitraan antara Allah dan semua makhluk hidup. Ini adalah titik fokus dari diakonia untuk mengangkat semua makhluk hidup sebagai subjek dari keramahan. Dalam tradisi Asia, terdapat sumber-sumber religius, budaya dan filosofis yang kaya akan kehidupan baru. Menanggapi hal ini, dalam konteks keragaman agama dan budaya tersebut, merupakan tugas missiologis dan teologis yang besar bagi komunitas-komunitas Kristen Asia dalam praksis diakonia mereka.

Asia Selatan

Asia Selatan meliputi India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka. Ketika Inggris hengkang pada 1947, dibentuklah negara merdeka yang terpisah antara India (mayoritas beragama Hindu) dan Pakistan (mayoritas beragama Islam)—suatu pemisahan berdasarkan agama. Lebih dari setengah populasi Muslim India pergi ke Pakistan. Akibat pemisahan ini sangatlah memilukan, dengan ribuan orang terbunuh di kedua wilayah perbatasan atas nama agama.

Kekristenan di Asia Selatan, secara umum, merupakan minoritas kecil. Umat Kristen di India berjumlah sekitar 2,5% dari populasi (sekitar 28 juta). The National Council of Churches in India (NCCI) dibentuk oleh gereja-gereja Protestan dan Ortodoks di India pada 1914. Perdana Menteri India saat itu, Jawaharlal Nehru, meminta agar gereja-gereja di India turun tangan setelah pemisahan India. NCCI membentuk komite bantuan *ad hoc* yang kemudian menjadi Churches Auxiliary for Social Action (CASA), salah satu organisasi bantuan kemanusiaan dan pembangunan nasional berbasis agama terbesar. NCCI meliputi Anglikan, Reformed, Metodis, Baptis, Lutheran dan Ortodoks (termasuk Gereja Mar Thoma). Gereja India Selatan dan Gereja India Utara (gabungan Anglikan, Kongregasionalis, Methodis, dan Presbiterian) adalah yang terbesar. Gereja-gereja ini juga memiliki sejumlah besar lembaga pendidikan dan rumah sakit.

India telah menyaksikan kebangkitan partai-partai nasionalis Hindu, terutama Partai Bharatiya Janata (BJP) yang mulai berkuasa pada 2014. Terjadi peningkatan tajam serangan terhadap kaum minoritas di India, terutama Muslim. Wilayah India juga dipengaruhi oleh terorisme. Sri Lanka telah mengalami konflik etnis antara populasi Tamil dan Singhalese dan pengeboman teroris di gereja-gereja dan hotel-hotel pada Maret 2019 yang merenggut ratusan korban. Sebuah kelompok sayap kanan yang muncul di Bangladesh melakukan pembunuhan terhadap beberapa intelektual, seniman, dan aktivis perdamaian. Negara-negara di subbenua India saling terkait dalam masalah-masalah mereka, yang sering kali berhubungan erat dengan agama. Lebih jauh lagi, baik India maupun Pakistan memiliki senjata nuklir.

Subbenua India sangat khas dengan praktik kastaisme yang keji atau “tak tersentuh”. Komunitas-komunitas tertentu, hanya karena keturunan dan pekerjaan mereka (pekerjaan kasar), didiskriminasi selama beberapa generasi, termasuk kekejaman terhadap orang-orang yang disebut kasta rendah atau Dalit (orang yang tak tersentuh). Gereja India sebagian besar adalah gereja Dalit dan gereja masyarakat adat.

Australasia

Australia dan Selandia Baru memiliki konteks khusus, sebagai negara dengan penduduk asli yang telah lama ada, populasi mayoritas dari pendatang Eropa selama beberapa abad terakhir dan baru-baru ini pendatang dari Asia Timur. Kota-kota seperti Sydney, Melbourne, dan Auckland kini menjadi kota yang besar, makmur, kosmopolitan, dan multikultural, tetapi bukan berarti tidak ada kantong-kantong kemiskinan dan masalah sosial. Isu-isu lingkungan dan geografis, termasuk kerentanan Selandia Baru terhadap gempa bumi dan jarak yang sangat jauh antara komunitas-komunitas di Pedalaman Australia, menambah kerumitan. Lembaga-lembaga diakonia, seperti Diakonia UCA di Australia, merespons tantangan-tantangan yang beraneka ragam ini. Sidang Raya Diakonia World Federation berikutnya seharusnya diadakan di Darwin, Australia, pada 2021, tetapi harus dibatalkan karena COVID-19.

9.7 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Timur Tengah

Munculnya berbagai tantangan dan krisis baru dengan segala dampaknya sangat memengaruhi kehidupan dan misi gereja. Gereja-gereja dipanggil untuk bersaksi dalam situasi yang makin kompleks di dalam dunia dan merespons perubahan zaman dengan tetap relevan dan *up to date* dalam hal program, struktur, dan aksinya.

Runtuhnya rezim Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, supremasi Amerika dalam bidang teknologi, kekuatan militer dan ekonomi, peristiwa 9/11 dan perang melawan terorisme, terbatasnya peran PBB sebagai aktor internasional dalam tatanan dunia serta kegagalannya menjadi katalisator di antara negara-negara yang bertikai, merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peperangan, konflik, dan ketidakstabilan di seluruh dunia.

Selama beberapa dekade, perang etnis dan persekusi di Irak, Suriah, Israel, Palestina, Lebanon, dan pemberontakan Arab menunjukkan perpecahan di dalam Islam, perpecahan di antara etnis (seperti Arab, Turki, Iran, Kurdi, dan Baluch), antara Syi'ah dan Sunni, yang menimbulkan kebencian dan kekerasan, mengakibatkan gelombang pengungsi, kemiskinan, pengangguran, dan eksodus

penduduk dari negara asalnya. Penduduk di Timur Tengah sudah lelah dengan pertumpahan darah dan kekerasan; perekonomian terpuruk karena korupsi menjangkiti kehidupan masyarakat; tatanan sosial peradaban kuno terkoyak dengan merebaknya pelecehan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia.

Lebih dari 18 juta pekerja migran—sekitar 4 juta warga Palestina, 2 juta warga Irak, dan 5 juta pengungsi Suriah, serta 2 juta pengungsi internal di Irak dan 6 juta di Suriah—menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, yang menimbulkan rasa frustrasi, putus asa, dan kesedihan. Kondisi ini menciptakan sebuah era dan tantangan baru dalam kehidupan gereja-gereja, yang membutuhkan aksi politik sesegera mungkin di tingkat internasional, regional, dan lokal.

Untuk mengatasi situasi yang penuh gejolak ini, gereja-gereja perlu memahami sistem yang dibentuk oleh pemerintah dan struktur yang mengatur sistem sosial, ekonomi, dan politik di Timur Tengah. Gereja-gereja harus membiasakan diri dengan situasi globalisasi ekonomi yang baru dan kompleks, serta dampak kapitalisme yang memaksa orang untuk terlibat dalam peperangan, kekerasan, dan konflik. Gereja-gereja harus mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip Alkitab yang menekankan nilai-nilai keterbukaan, martabat manusia, dan hidup berdampingan dalam persaudaraan, sebuah visi yang dapat memahami realitas dan melahirkan kekuatan baru. Agar perubahan dan transformasi dapat terjadi, gereja-gereja harus mengembangkan kualitas diakonia yang baru dalam segala dimensinya: spiritual, material, preventif, dan profetis: diakonia yang diarahkan kepada individu, kelompok, dan institusi, untuk kebutuhan dan situasi lokal, regional, nasional, maupun internasional.

Sebuah visi baru tentang oikoumenisme perlu dimunculkan untuk mewujudkan sebuah oikoumenisme global yang mencerminkan, berkarya, dan bertindak bersama demi memperbaiki kondisi umat manusia: sebuah oikoumenisme global yang meningkatkan dialog, kolaborasi, dan aksi bersama. Hanya oikoumenisme semacam ini yang dapat memperkuat pelayanan profetis dan keterlibatan rekonsiliatif gereja-gereja.

Oleh karena itu, setiap orang Kristen dan juga gereja memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bereaksi terhadap situasi-situasi konkret penderitaan dan ketidakadilan, bereaksi terhadap pemerintah, menyerukan agar hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan, seperti yang dilakukan Stefanus dalam Kisah

Para Rasul 7:56: “Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.” Gereja dan setiap orang Kristen harus menerjemahkan pesan Injil ke dalam pelayanan yang konkret.

“Aku telah melihat kesengsaraan umat-Ku yang ada di Mesir, Aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Sungguh, Aku tahu penderitaan mereka. Aku telah turun untuk membebaskan mereka” (Kel. 3:7–8). Dengan cara yang sama, inkarnasi Allah dalam diri Yesus terjadi dalam konteks sosial, ekonomi, politik, agama, dan budaya tertentu yang membentuk karya pelayanan-Nya.

Demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan tidak dapat dipaksakan dengan kebencian dan pertumpahan darah. Hak asasi manusia bagi jutaan pengungsi dan migran juga tidak dapat ditegakkan dengan menumbuhkan rasa takut akan orang asing, diskriminasi atau pencekalan. Hal itu harus didefinisikan melalui prinsip kemanusiaan yang didasarkan pada kesetiaan kepada Allah dan Kristus—diakonia dalam tiga dimensi misinya: transformasi, rekonsiliasi, dan pemberdayaan.

9.8 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Pasifik

Dalam konteks Kepulauan Pasifik yang menghadapi dampak perubahan iklim dan meningkatnya minat terhadap industri ekstraktif, diakonia sebagai kepedulian terhadap ciptaan telah menjadi fokus gereja-gereja di Pasifik sejak berdirinya Pacific Conference of Churches pada 1961.

Pendekatan diakonia terhadap isu-isu di kawasan Pasifik merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip kristiani tentang keadilan, kepedulian terhadap ciptaan, dan keberpihakan kepada mereka yang rentan dan terpinggirkan di dalam masyarakat, serta pemahaman masyarakat adat tentang manusia sebagai bagian dari bumi, laut, dan langit, dan juga praksis hubungan timbal balik dan komunitas.

Dalam konteks globalisasi ekonomi—dengan bentuk pembangunan yang ekstraktif dan berbasis konsumen yang mereduksi ciptaan menjadi sumber daya ekonomi—dokumen WCC, *The Island of Hope—An Alternative to Economic Globalisation*, yang disusun berdasarkan konsultasi oikoumenis global

pada awal abad ke-21 masih menjadi pernyataan yang valid tentang bentuk diakonia di kawasan Pasifik, yaitu:

Spiritualitas, kehidupan keluarga, ekonomi tradisional, nilai-nilai budaya, saling menjaga dan menghormati adalah komponen dari konsep Pulau Harapan yang memprioritaskan hubungan, merayakan kualitas hidup dan menghargai manusia dan ciptaan di atas produksi barang-barang. Pulau Harapan adalah sebuah solusi alternatif dari proyek globalisasi ekonomi yang menciptakan dominasi melalui sistem ekonomi yang tidak adil.

Etika “Pulau Harapan” didasarkan pada rasa hormat yang mendalam terhadap seluruh komunitas kehidupan. Etika ini menumbuhkan budaya berbagi dan kepedulian, berdasarkan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mencerminkan kepedulian Allah terhadap ciptaan dan ajaran Kristus untuk saling mengasihi dan berbuat adil kepada yang miskin.

Bagi gereja-gereja di Pasifik, mendekati akhir dekade kedua abad ke-21 dengan sistem ekstraksi ekonomi yang makin meningkat dan lebih agresif serta penguasaan aset yang lebih intensif, militerisasi, dan konsumerisme, konsep Pulau Harapan perlu dikaji ulang sebagai sebuah model kelimpahan di saat model kelangkaan menjadi narasi yang dominan.

Saat ini digambarkan sebagai “Reweaving of the Ecological Mat” oleh Pacific Conference of Churches dan Pacific Theological College, bentuk diakonia ini melanjutkan panggilan untuk melayani Tuhan dan bukan Mammon, dengan terus memikirkan kembali pembangunan dan menawarkan bentuk-bentuk pembangunan alternatif yang melayani ciptaan dengan mengedepankan kesejahteraan manusia dan lingkungan.

Dalam konteks krisis iklim, laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change on Oceans and the Cryosphere menambahkan analisis sains pada realitas kehidupan masyarakat Kepulauan Pasifik, yang berada di garis depan perubahan iklim.

Samudra Pasifik, yang dipandang secara tradisional sebagai sumber kehidupan, sebagai ibu dan sebagai bagian integral dari identitas Pasifik, saat ini berada di bawah ancaman perubahan iklim. Meningkatnya kadar panas dan asam merusak ekosistem laut yang rentan dan mengurangi jumlah fito-

plankton yang merupakan penghasil 50% oksigen yang dihirup di planet ini. Perubahan iklim juga dipandang sebagai ancaman karena naiknya permukaan air laut, hilangnya sumber pangan, serta luapan air laut dan badai. Pola cuaca yang ekstrem, dari angin topan hingga kekeringan dan banjir, juga menjadi bagian dari fenomena perubahan iklim di Pasifik.

Dalam konteks ini, pendekatan diakonia bagi gereja-gereja di Pasifik terhadap masyarakat yang merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terendah, adalah dengan terus mengadvokasi kepedulian terhadap lautan, sebagai bagian dari kepedulian terhadap ciptaan. Respons pastoral perlu dipersiapkan bagi komunitas-komunitas yang mengalami kehancuran di darat dan laut, yang menghadapi penggusuran dan pengungsian secara paksa, serta bagi komunitas-komunitas Pasifik yang akan dipanggil untuk menerima saudara-saudari yang tergusur dari negara-negara kepulauan dan wilayah pesisir lainnya, sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi sebuah bentuk perpindahan dan bukan pengasingan.

9.9 Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Amerika Utara

Praktik religius kristiani dan bentuk diakonia di benua Amerika Utara, seperti kebanyakan penduduk Kanada dan Amerika Serikat, merupakan hasil transplantasi dari lingkungan dan konteks lain. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang pengalaman traumatisnya dibentuk oleh realitas perbudakan.

Sejarah keagamaan dan budaya diakonia di Amerika Utara sebagian besar dibentuk oleh komitmen iman para imigran dari Eropa, termasuk Inggris. Bersama dengan para pengungsi Protestan, Anabaptis, dan Katolik Eropa yang melarikan diri dari penganiayaan atau kesulitan ekonomi di “negara lama” mereka, muncullah komitmen-komitmen sosial yang didasari oleh iman dari tradisi-tradisi teologis yang sedang berkembang.

Meskipun pendidikan publik, layanan kesehatan dasar, rumah sakit umum dan panti asuhan, jejaring jaminan sosial dan berbagai program yang ditujukan untuk menjamin ketahanan pangan dan perumahan bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan telah lama dipahami sebagai komitmen-komitmen utama dari kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah, praktik iman orang-

orang yang menetap di Amerika Utara yang berasal dari tempat lainlah yang memulai karya ini dan menunjukkan cara bagaimana orang-orang yang merdeka dan berdaulat seharusnya peduli pada mereka yang “paling hina di antara mereka”. Gereja telah melanjutkan kesaksian profetis dan menyertakan kehadiran praktisnya dalam memperluas kepedulian tersebut, baik melalui kerja sama dengan pemerintah, dan terkadang, di wilayah-wilayah perbatasan yang sulit di mana pilihan-pilihan politis dan kemerosotan moralitas publik telah menelantarkan banyak orang.

Sumbangsih historis diakonia gereja tidak selalu menunjukkan hasil yang positif. Baik di Kanada maupun di Amerika Serikat, kebijakan-kebijakan marginalisasi dan genosida terhadap masyarakat adat didukung oleh gereja, dan didukung oleh upaya-upaya yang keliru dalam menyediakan pendidikan dan akses kepada anak-anak masyarakat adat. Demi nama Kristus, dan dengan kedok penjangkauan diakonia secara tradisional, anak-anak masyarakat adat dipindahkan dari rumah, komunitas, dan keluarga mereka, dan dikirim ke sekolah-sekolah berasrama yang kemudian menjadi tempat yang secara sistematis melucuti anak-anak tersebut dari tradisi, bahasa, dan adat istiadat mereka.

Di Kanada, laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disambut dengan baik terkait dengan pengungkapan kebenaran tentang sejarah dan pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Kanada terhadap masyarakat adat. Proses implementasinya sangat lambat. Masih ada keprihatinan yang sangat besar mengenai perempuan adat yang hilang dan dibunuh yang kasusnya tidak mendapatkan perhatian dan penyelidikan yang semestinya.

Di Amerika Serikat, penolakan terhadap *The Doctrine of Discovery* dan pengakuan untuk memulihkan luka masa lalu yang dialami oleh masyarakat adat merupakan upaya yang dipimpin oleh gereja. Hal ini menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perannya dalam penghancuran kehidupan, habitat, mata pencarian, dan budaya masyarakat adat.

Tahun 2019 menandai tahun ke-400 sejak orang pertama yang diperbudak ditempatkan di daratan Amerika Utara. Warisan perbudakan di Amerika merupakan kegagalan besar lainnya dari kesaksian diakonia profetis gereja. Menyadari adanya keterlibatan dan penyelewengan atas Alkitab dan teologi

untuk mendukung kejahatan ini, gereja makin kuat dan bersuara sebagai mitra yang mengakui kekuatan historis dan destruktif rasisme, supremasi kulit putih, dan peran historis, serta peran yang terus berlanjut dalam mendukung kebijakan-kebijakan penindasan kolonial, baik secara politik maupun ekonomi. Di Amerika Serikat, suara gereja kaum kulit hitam, yang diangkat dalam ratapan dan panggilan profetis serta kesediaan gereja kulit hitam yang penuh kasih karunia untuk terlibat dalam budaya kulit putih dan menantang gereja kulit putih, merupakan ekspresi diakonia yang kuat yang mendorong kita untuk melakukan evaluasi diri, pengakuan dosa, pertobatan, dan rekonsiliasi.

Ketika tradisi-tradisi Kristen yang bersejarah dan berakar dari Eropa makin berkurang jumlah dan pengaruhnya baik di Kanada maupun Amerika Serikat, tradisi-tradisi iman dari Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin, baik yang beragama Kristen maupun tidak, makin bertambah pengikutnya dan makin tampak kehadirannya di hadapan publik dalam hal iman dan praktik-praktik diakonia. Sementara kaum muda pada umumnya terus meninggalkan gereja dan berbagai ekspresi iman yang terbentuk, gereja-gereja yang tampaknya menarik bagi kaum muda pada umumnya adalah gereja-gereja yang terlibat dalam merawat dan memperkuat komunitas lokal mereka, berkomitmen untuk merawat ciptaan dan aksi terhadap perubahan iklim, serta terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang mengupayakan keadilan.

Karakter Diakonia Oikoumenis di Amerika Utara

Lanskap karya diakonia Kristen di Amerika Utara sangat beragam sebagaimana gereja-gereja dan persekutuan-persekutuanannya. Tidak seperti di Eropa, yang karya diakonia gerejanya dalam skala besar secara signifikan didukung oleh pajak gereja dan dikelola oleh para profesional, atau di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang jemaat-jemaat lokal dan anggota-anggotanya memikul tanggung jawab paling besar dalam hal keuangan dan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan atau mengalami kesulitan, sistem dukungan sosial dan ekspresi diakonia di Amerika Utara adalah perpaduan dari berbagai kemitraan oikoumenis, denominasi, jemaat, negara bagian, lembaga swadaya masyarakat, dan kemitraan filantropis.

Menjelang akhir abad ke-20, gerakan oikoumenis yang kuat pada dekade-dekade sebelumnya serta gereja-gereja pendukungnya mengalami penurunan keanggotaan, yang membawa konsekuensi finansial. Pada saat yang sama, para anggota gereja dan warga negara, yang makin dihadapkan secara “*real time*” lewat media dan media sosial terhadap bencana yang terjadi dan pengalaman penderitaan sesama mereka, mulai mendesak agar gereja-gereja dan denominasi mereka memfasilitasi para anggotanya untuk mempraktikkan belas kasih Kristus dengan cara yang lebih personal dan langsung. Karenanya, praktik-praktik lokal dari anggota gereja terhadap sesama mereka berkembang menjadi keterlibatan yang lebih luas, baik dalam pelayanan diakonia domestik maupun internasional.

The North America Forum of ACT Alliance merupakan salah satu badan pertemuan yang penting untuk praktik diakonia bersama bagi Kanada dan Amerika Serikat. Anggota-anggota Aliansi di Kanada mengoordinasikan lebih lanjut upaya-upaya mereka dan akses mereka terhadap dana bantuan dari pemerintah untuk memaksimalkan dampak dan kesaksian akan kesatuan kehadiran Kristus. Di Kanada, perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah terkait hibah internasional untuk pembangunan berdampak pada makin banyaknya jumlah hibah yang diberikan. Perubahan ini mendorong lebih banyak kerja sama antara lembaga-lembaga denominasi dalam mengajukan proposal bersama untuk mengakses dana pemerintah untuk program-program pembangunan dan bantuan kemanusiaan.

Di Amerika Serikat, di mana tanggap bencana dalam negeri merupakan salah satu bagian yang dijangkau oleh diakonia, Church World Service, salah satu ekspresi utama dari praktik diakonia bagi kalangan Protestan arus utama dalam hubungan persekutuan, kini berfungsi sebagai badan pertemuan bagi sejumlah mitra tanggap bencana dan pengungsi berbagai denominasi untuk membagikan ide tentang praktik-praktik unggulan, membahas kebutuhan yang mendesak, dan mengoordinasi berbagai upaya domestik dan internasional.

National Voluntary Organizations Active in Disaster (NVOAD) dan subkelompoknya di tingkat regional dan negara bagian, mengumpulkan semua aktor yang bersedia terlibat dalam penanggulangan bencana dalam negeri untuk melakukan koordinasi dan berbagi sumber daya di seluruh komunitas

relawan tanggap bencana. NVOAD juga merupakan wadah untuk koordinasi oikoumenis dan lintas agama dengan organisasi sukarela sekuler lainnya dan memiliki nilai lebih untuk menarik kelompok-kelompok agama nontradisional dan non-arus utama ke dalam keanggotaannya, meningkatkan kolaborasi kaum Injili dengan Katolik, Ortodoks, dan pelaku diakonia Protestan arus utama.

Xenofobia dan penolakan tanggung jawab untuk merespons kebutuhan mendesak dari jutaan orang yang sedang dalam pengungsian merupakan isu-isu yang paling mendesak dan meresahkan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas diakonia di Amerika Utara. Krisis politik dan ekonomi di Amerika Latin, pembatasan pergerakan pengungsi ke Eropa, dan masa depan yang dianggap lebih baik bagi para migran yang ingin berpindah ke Amerika Utara telah membuat krisis di Amerika menjadi salah satu krisis yang paling memilukan di belahan bumi utara. Sementara itu, di Amerika Serikat, kekuasaan politik dipegang oleh faksi-faksi anti-migrasi dan rasisme makin menyulut ketakutan dan kemarahan yang mendominasi respons AS terhadap krisis yang mendesak di perbatasan dengan Meksiko.

Di antara para anggota The North America Forum of ACT Alliance, koordinasi dengan rekan-rekan dan forum-forum di Amerika Latin dan Karibia merupakan strategi yang muncul untuk menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan para migran. Upaya untuk merespons sebagai praktisi diakonia yang efektif terhadap krisis global yang dahsyat di abad ke-21 ini terinspirasi dari koridor kemanusiaan di Eropa dan makin diperlengkapi dengan mendedikasikan suara-suara mereka yang sedang mengungsi.

B A B 1 0

Langkah Selanjutnya

10.1 Pendahuluan

Diakonia oikoumenis menghadapi banyak tantangan, seperti yang dijelaskan dalam Bab 7. Lanskap sosial dan politik yang baru mendesak gereja, agen diakonia, dan gerakan oikoumenis untuk mempertimbangkan kembali struktur dan praktik-praktiknya dan bersama-sama menyusun strategi dan praktik-praktik baru yang inovatif untuk merespons beragam tantangan masa kini.

Agen-agen diakonia memiliki catatan panjang dalam merintis praktik pelayanan, baik dalam pelayanan sosial dan kesehatan maupun keterlibatan dalam karya pembangunan. Oleh karena itu, inovasi tidak harus dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk menerapkan wawasan baru, membangun hubungan baru, dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik.

Bab terakhir ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa bidang utama perencanaan strategis dan langkah inovatif. Bab ini menunjukkan beberapa isu krusial yang membutuhkan perhatian dan yang memperlihatkan peluang-peluang untuk menyusun strategi diakonia oikoumenis dengan memperhatikan “tanda-tanda zaman” (Mat. 16:3).

10.2 Mengenali Momen *Kairos*

Dalam mencermati “tanda-tanda zaman”, diakonia berusaha menerapkan wawasan teologisnya. Perubahan sosial dan politik yang menimbulkan kekhawatiran dari perspektif sekuler, karena berbagai kemungkinan dampak negatifnya, dapat dilihat sebagai kesempatan untuk pembaruan dan transformasi dalam perspektif iman. Secara teologis, dapat dipahami sebagai momen *kairos*, suatu masa yang sarat dengan janji-janji akan masa depan yang baru dan lebih baik.

Dengan cara inilah orang-orang Kristen di Afrika Selatan menafsirkan masa apartheid dan perjuangan mereka untuk mengatasinya. *Dokumen Kairos*, yang diterbitkan pada 1985, menafsirkan masa krisis yang dahsyat sebagai “momen kebenaran” dan pengakuan akan pengharapan. Dokumen ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah teologi profetis yang memungkinkan orang Kristen untuk menganalisis konteks di mana mereka hidup dan menginterpretasikan “*kairos* ini” (Lukas 12:56) dalam terang kedatangan kerajaan Allah. Dokumen ini menawarkan pemahaman baru terhadap teks-teks Alkitab dan mempertanyakan segolongan gereja yang mendukung sistem apartheid, atau lebih memilih untuk tetap diam dalam menghadapi kekuasaan yang menindas dan mempertahankan *status quo*. Karena itu, momen *kairos* mencakup pertanyaan kritis tentang apa yang diperlukan untuk menjadi gereja pada masa krisis, untuk merefleksikan secara teologis, menafsirkan tanda-tanda, dan melakukan aksi diakonia yang memberitakan pengharapan dengan keadilan dan perdamaian.

Bagian ini menantang gereja-gereja, lembaga-lembaga dan badan-badan Oikoumenis untuk:

- Memfasilitasi ruang untuk refleksi interdisipliner tentang “tanda-tanda zaman” dan untuk mengembangkan sarana-sarana untuk menafsirkan tantangan-tantangan kontemporer secara teologis sebagai “momen kebenaran dan pengharapan”.
- Memperdalam pemahaman tentang diakonia profetis, memfasilitasi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan wawasan dari praktik diakonia yang dilakukan.

- Memberikan pendampingan dalam rangka pemeliharaan iman bagi para aktor diakonia yang berkarya dalam situasi gejolak sosial dan politik yang kacau.

10.3 Penegasan Diakonia sebagai Visi dan Mandat Bersama

Dokumen ini menegaskan pemahaman oikoumenis tentang diakonia sebagai sebuah dimensi integral dari sifat dan misi gereja. Bab 4 menyajikan dasar teologis dari pandangan ini, dengan menggali wawasan dari berbagai tradisi pengakuan iman dan merefleksikan proses-proses pembelajaran dalam gerakan oikoumenis. Bab ini menegaskan dimensi trinitas dari diakonia, yang berarti melihat diakonia sebagai sebuah ekspresi dari kepedulian Allah Tritunggal yang membawa keselamatan bagi ciptaan dan umat manusia. Hal ini juga menegaskan dimensi eklesial, yang berarti panggilan kepada semua gereja dan orang Kristen untuk terlibat dalam misi Allah yang holistik dalam pemulihan, rekonsiliasi, dan transformasi. Selain itu, bagian ini juga menekankan dimensi profetis dari diakonia sebagai panggilan untuk membela martabat manusia, menentang kejahatan, dan memperjuangkan keadilan dan perdamaian.

Diakonia oikoumenis mengekspresikan visi bersama gereja-gereja, agen-agen dan badan-badan oikoumenis serta mandat untuk bersama-sama bertindak. Mereka ditantang untuk melakukan hal berikut ini:

- Menegaskan visi dan mandat bersama dalam perencanaan strategis, dokumen kerja dan upaya komunikasi;
- Mengartikulasikan kekhasan diakonia sebagai aksi yang berbasis iman dan berbasis hak;
- Menyadari inisiatif-inisiatif yang meningkatkan koordinasi karya diakonia, seperti ACT Alliance dan badan-badan oikoumenis lainnya, sebagai sebuah dimensi yang tidak terpisahkan dari gerakan oikoumenis dan sebagai sebuah ekspresi dari mandat bersama untuk terlibat dalam diakonia;

- Meningkatkan pengakuan bersama atas peran dan tanggung jawab masing-masing, dengan mengupayakan koordinasi dan kerja sama yang memungkinkan.

10.5 Penegasan atas Keberagaman Karunia

Diakonia merengkuh keragaman sebagai suatu kekayaan sekaligus peluang. Bab 6 telah menjelaskan sebagian dari sekian banyak karunia yang dimiliki oleh gereja dan agen diakonia yang merupakan sumber daya yang penting bagi keterlibatan diakonia. Karunia tersebut meliputi aset yang berwujud dan tidak berwujud. Bab ini juga menunjukkan fakta bahwa beberapa dari aset-aset tersebut mungkin diabaikan atau diremehkan saat diakonia oikoumenis diselenggarakan, terutama karunia-karunia dari kaum awam yang terpinggirkan dalam masyarakat.

Para pelaku diakonia oikoumenis akan mendapatkan manfaat dengan memahami bahwa sumber daya diakonia saling melengkapi dan secara aktif menghubungkannya dengan berbagai macam karunia dan aset. Diakonia oikoumenis harus mengembangkan pendekatan-pendekatan dan metode-metode profesional yang memberikan ruang bagi diakonia “dari bawah” dan wawasan serta keterampilan jemaat-jemaat lokal dan para anggotanya.

Diakonia oikoumenis menegaskan adanya kompetensi diakonia yang saling melengkapi di antara gereja-gereja, agen-agen dan badan-badan oikoumenis. Mereka didorong untuk:

- Membangun kesadaran akan keragaman dan saling melengkapi aset dan kompetensi diakonia;
- Terlibat dalam proses pemetaan aset-aset diakonia, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- Mengembangkan jejaring, strategi dan metode untuk memberdayakan aset-aset diakonia lokal dalam kegiatan-kegiatan diakonia oikoumenis;
- Berbagai pengetahuan dan cara-cara terbaik yang berkaitan dengan isu ini, dan memasukkan materi ini dalam pelatihan profesional.

10.5 Penegasan atas Keadilan sebagai Prioritas

Diakonia adalah aksi berbasis hak, advokasi, dan kesaksian publik yang berupaya untuk mewujudkan keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aksi diakonia. Bab 5 menyajikan beberapa tujuan keadilan di dunia saat ini yang menantang diakonia oikoumenis, seperti keadilan ekonomi, keadilan iklim, keadilan gender, keadilan kesehatan, dan yang paling penting adalah isu perdamaian yang adil. Disimpulkan bahwa keadilan harus menjadi tujuan prioritas dalam rencana strategis diakonia oikoumenis, dengan berfokus pada mandat profetisnya.

Agen-agen diakonia memahami keadilan baik sebagai sebuah isu teologis maupun isu sosial-politik. Yang pertama berkaitan dengan pesan Alkitab tentang keadilan Allah yang menyelamatkan, yang memanggil semua orang untuk terlibat dalam membela martabat dan hak orang miskin dan tertindas. Yang kedua menegaskan pentingnya menetapkan peraturan perundang-undangan yang membela hak asasi manusia dan menggunakan pendekatan yang menempatkan mereka yang berada dalam situasi rentan sebagai pemegang hak dan mereka yang berkuasa sebagai pengemban tugas.

Diakonia oikoumenis menegaskan keadilan sebagai prioritas bagi gereja-gereja, agen-agen dan badan-badan oikoumenis, dan menyerukan agar:

- Memasukkan advokasi dan kesaksian publik dalam semua aksi dan kegiatan diakonianya;
- Membangun kompetensi dan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan karya keadilan; memperdalam refleksi interdisipliner tentang keadilan dan diakonia profetis;
- Memperkuat upaya-upaya advokasi dan kesaksian publik yang terkoordinasi; bergabung dalam kampanye-kampanye oikoumenis yang berkaitan dengan isu-isu keadilan;
- Mendampingi gereja-gereja lokal dalam rangka memperkuat kompetensi kesaksian publik dan advokasi.

10.6 Penguatan struktur aksi bersama

Diakonia oikoumenis membutuhkan struktur yang dapat memperlancar pelaksanaan karyanya. Badan-badan oikoumenis saat ini dengan baik bekerja sama dengan mitra-mitra lokal, baik secara bilateral maupun multilateral. Bab 7 telah memaparkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam kerja sama tersebut. Bab ini menunjukkan perlunya memperkuat struktur-struktur aksi diakonia bersama, yang menantang gereja-gereja, lembaga-lembaga dan badan-badan oikoumenis untuk:

- Memperdalam konsep kemitraan dalam diakonia oikoumenis melalui refleksi interdisipliner atas praktik;
- Mengumpulkan dan membagikan contoh praktik terbaik;
- Memperkuat struktur aksi bersama dalam dokumen-dokumen rencana strategis;
- Memperkuat kolaborasi di dalam dan di antara dewan-dewan Oikoumenis regional dan nasional serta forum-forum ACT.

10.7 Penguatan Jejaring Kerja Sama

Peran sebagai agen masyarakat sipil dan mandat untuk terlibat dalam advokasi dan kesaksian publik mendorong para pelaku diakonia oikoumenis untuk membangun aliansi dan jejaring kerja sama. Termasuk di dalamnya kerja sama dengan organisasi-organisasi sekuler, pemerintah, sektor swasta, dan dengan umat beragama lain. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil, partisipatif dan berkelanjutan dengan akses yang sama terhadap kebaikan bersama.

Gereja-gereja, lembaga-lembaga, dan badan-badan oikoumenis ditantang untuk:

- Mengembangkan strategi dan berbagi pengalaman tentang bagaimana berbagi sumber daya, membangun aliansi dan berpartisipasi dalam jejaring;

- Memperkuat kapasitas gereja-gereja lokal untuk berperan di dalam masyarakat sipil dan bergabung dengan jejaring advokasi dan kesaksian publik;
- Mengembangkan strategi untuk membangun aliansi dengan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Fokus pada *diapaxis* sebagai sebuah pendekatan dan metode dalam diakonia oikoumenis; berbagi sumber daya, baik finansial maupun manusia, serta pengetahuan dan praktik terbaik terkait *diapaxis*, dan memasukkan materi ini dalam pelatihan profesional.

10.8 Penguatan Komunikasi

Kerja sama yang baik dalam diakonia oikoumenis membutuhkan struktur yang kuat dan saluran komunikasi yang efektif. Tanpa hal ini, kesalahpahaman dapat terjadi dan mengakibatkan ketegangan dan kebingungan atas peran masing-masing pihak dan prinsip-prinsip dalam bekerja sama (bdk. Bab 7.4).

Agar kerja sama ini menjadi efektif antara ACT Alliance, dewan oikoumenis regional dan nasional, serta gereja-gereja lokal, dibutuhkan struktur yang memungkinkan akses terhadap informasi yang relevan bagi semua mitra yang terlibat, tersedianya ruang untuk bertukar pengalaman dan pandangan, dan untuk memastikan adanya peluang kerja sama. WCC memiliki peran yang istimewa untuk mendorong komunikasi yang lebih dari sekadar berbagi informasi, tetapi juga menyediakan ruang yang aman untuk saling memberi masukan, untuk refleksi diri secara kultural, dan untuk merefleksikan cara kerja, misalnya bagaimana satu sama lain diakomodasi saat terlibat dalam diakonia oikoumenis.

Gereja-gereja, lembaga-lembaga dan badan-badan oikoumenis ditantang untuk:

- Mengembangkan budaya dan cara kerja yang saling menghormati dan menghargai dalam semua hubungan kerja;
- Membangun saluran komunikasi yang efektif dengan kantor-kantor oikoumenis regional dan nasional;

- Mengembangkan strategi untuk meningkatkan komunikasi yang berkaitan dengan forum-forum ACT regional dan nasional;
- Mengembangkan strategi untuk berkomunikasi dengan gereja-gereja non-anggota, masyarakat sipil, masyarakat umum dan sektor swasta, dan dengan semua orang yang berkehendak baik.

10.9 Penguatan Kapasitas Diakonal

Diakonia oikoumenis membutuhkan para praktisi yang kompeten di semua tingkatan. Bab 6 menyajikan elemen-elemen yang membentuk diakonia secara profesional dan menunjukkan contoh-contoh pelatihan formal diakonia. Kapasitas diakonia mencakup kemampuan untuk mengartikulasikan keunikan praktik diakonia, sebagai sebuah aksi yang berbasis iman dan hak. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan yang menghubungkan teori dan praktik, interdisipliner dalam pendekatan dan metodologinya, serta relevan dan inovatif secara sosial. Tantangan-tantangan kontemporer yang dijelaskan dalam Bab 7 mendorong para agen diakonia oikoumenis untuk berinvestasi dalam pelatihan diakonia di berbagai tingkatan, termasuk para praktisi diakonia, khususnya yang berada dalam posisi kepemimpinan, pendeta dan pemimpin gereja, serta orang Kristen awam yang terlibat dalam karya diakonia.

Pelatihan diakonia di gereja-gereja lokal, lembaga-lembaga pelayanan khusus, dan agen-agen saat ini dikembangkan di tingkat yang jauh berbeda, tergantung sejarah, situasi sosial-politik, dan kerangka kerja struktural yang tersedia bagi organisasi masyarakat sipil. Di beberapa gereja, pengorganisasian dalam lembaga diakonia tidak dimungkinkan (misalnya pada masa Uni Soviet). Di gereja-gereja lain, ada kegiatan diakonia skala kecil yang mungkin dilakukan di dalam gereja-gereja lokal, tetapi belum ada lembaga diakonia yang lebih besar. Beberapa gereja memperoleh kesempatan untuk menerima sebagian dukungan negara untuk pelayanan diakonia sosial Kristen yang diberikan atas nama gereja, sementara di tempat lain hal seperti ini tidak dimungkinkan sama sekali. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dari tingkat pelatihan dan pendidikan diakonia yang sangat berbeda untuk pelayanan sosial Kristen. Ada beberapa negara yang memiliki sekolah, perguruan tinggi atau universitas yang kuat dan

mapan dalam bidang ilmu terapan untuk ilmu diakonia dan karya sosial, sedangkan di negara lain hampir tidak ada lembaga pelatihan dan pendidikan yang tersedia.

Namun, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal minat dan motivasi untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan pengembangan model kurikulum dalam studi diakonia dari gereja-gereja di berbagai konteks. Hal ini merupakan salah satu tugas utama dari gerakan oikoumenis di abad ke-21 untuk memperkaya dan memfasilitasi pembelajaran dan pendidikan diakonia di sebanyak mungkin gereja dan dalam konteks yang berbeda. Hal ini akan memungkinkan setiap gereja lokal untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pelatihan yang tepat untuk memperkuat kapasitas diakonal dan untuk terlibat dalam relasi timbal balik, pendidikan lintas batas, dan program-program kemitraan oikoumenis untuk pembelajaran diakonia, yang menuntut adanya komitmen penting bersama dari lembaga-lembaga diakonia, badan-badan pengembangan, badan-badan misi dan jejaring pendidikan.

Hal ini menjadi tantangan bagi gereja-gereja, lembaga-lembaga dan badan-badan oikoumenis untuk:

- Memasukkan pengembangan kapasitas dalam diakonia ke dalam rencana strategis dan programnya;
- Memberikan kesempatan pelatihan untuk pembelajaran dan pelatihan bersama bagi para karyawan dan pemimpin, untuk memperkuat kompetensi diakonia mereka;
- Mengelaborasi dan menyediakan materi pelatihan yang relevan;
- Mendorong seminari-seminari teologi dan lembaga-lembaga lain yang relevan untuk memasukkan diakonia ke dalam kurikulum dan program-program pelatihan mereka.

Melakukan upaya pengembangan kapasitas diakonia dan pembangunan juga mencakup peninjauan ulang secara substansial atas berbagai prioritas agen pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendanaan yang akan disediakan untuk proyek-proyek studi, pelatihan, dan beasiswa di bidang ini. Kegiatan-kegiatan tersebut harus bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan

integral antara teologi dan pembangunan, teologi, dan wacana diakonia oikoumenis, serta teologi dan etika sosial oikoumenis, yang dengan demikian akan meningkatkan pengembangan kapasitas gereja-gereja dalam diakonia dan memperkuat karya mereka dalam pelayanan sosial. Pemisahan teologi dari diakonia, pembangunan, dan etika sosial akan memberikan kerugian bagi efektivitas dan kekhasan pelayanan. Perubahan sosial hanya dapat berkelanjutan jika mencakup norma, nilai, dan konsep-konsep etis.

10.10 Praktik diakonia dan kode etik

Kode etik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etis dan sebagai panduan perilaku. Kode etik bukan sekadar kata-kata, namun merupakan contoh dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dalam bekerja sama.

Beragam profesi telah menetapkan standar etis dalam pekerjaan mereka. Para agen diakonia yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan mengikuti kode etik yang disusun dan ditetapkan oleh The International Red Cross dan Red Crescent Movement serta NGOs in Disaster Relief pada 1992. Kode etik ini berisi sepuluh komitmen utama, beberapa di antaranya:

- Bantuan diberikan tanpa memandang ras, keyakinan, atau kebangsaan dari penerima bantuan dan tanpa perbedaan yang merugikan dalam bentuk apa pun. Prioritas bantuan hanya ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- Bantuan tidak akan digunakan untuk menonjolkan sudut pandang politik atau agama tertentu;
- Kita bertanggung jawab kepada mereka yang kita bantu dan kepada mereka yang darinya kita menerima sumber daya.

Akuntabilitas adalah nilai yang mendasar dalam karya diakonia, seperti halnya dalam semua aksi gereja. Gereja dan agen-agen mungkin sudah menetapkan kode etiknya sendiri. ACT Alliance menerapkan *Code of Good Practice* yang menetapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan komitmen bersama yang akan membentuk karya kemanusiaan, pembangunan dan advokasi para anggota

ACT. Prinsip yang umum menyatakan bahwa setiap anggota ACT Alliance berkomitmen untuk:

- Bertindak dengan cara-cara yang menghormati, memberdayakan, dan melindungi martabat, keunikan, dan nilai intrinsik serta hak asasi manusia setiap perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki;
- Bekerja dengan komunitas dan individu berdasarkan kebutuhan dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, memastikan bahwa kapasitas dan kemampuan komunitas selalu diperhitungkan, dan secara khusus menyoal mereka yang mengalami diskriminasi dan mereka yang paling rentan;
- Bersuara dan bertindak melawan kondisi, struktur, dan sistem yang meningkatkan kerentanan dan melanggengkan kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perusakan lingkungan;
- Bekerja dengan cara-cara yang menghormati, memperkuat, dan memungkinkan kapasitas di tingkat lokal dan nasional;
- Tidak menggunakan bantuan kemanusiaan atau pembangunan untuk memajukan sudut pandang agama atau politik partisan tertentu
- Menjunjung tinggi standar akuntabilitas profesional, etika, dan moral tertinggi, menyadari tanggung jawab kepada mereka yang bekerja sama dengan kita, kepada mereka yang mendukung kita, satu sama lain, dan pada akhirnya kepada Allah;
- Memenuhi standar kejujuran dan integritas tertinggi dalam semua karya kita;
- Berusaha untuk tidak bertindak sebagai instrumen kebijakan luar negeri pemerintah.

ACT Alliance juga telah menetapkan *Code of Conduct Policy* bagi staf dari semua anggota ACT untuk mencegah pelanggaran, termasuk korupsi, penipuan, eksploitasi, dan pelecehan, termasuk pelecehan seksual.

Kode etik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etis dan memastikan perlindungan terhadap orang-orang yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Hal ini khususnya terjadi dalam situasi hubungan yang asimetris, ketika para pelaku diakonia menggunakan kekuasaan ekonomi,

sosial, dan bahkan agama dalam bekerja dengan orang-orang yang berada dalam situasi yang rentan. Risiko penyalahgunaan kekuasaan harus ditanggapi secara serius dengan menetapkan langkah-langkah pencegahan yang relevan. Prosedur standar yang mencakup kode etik di semua tingkat karya diakonia akan meningkatkan kesadaran akan isu ini dan menyediakan perangkat untuk menyikapinya jika diperlukan.

Hal ini menjadi tantangan bagi gereja-gereja, lembaga-lembaga dan badan-badan oikoumenis untuk:

- Menetapkan peraturan yang mencakup kode etik dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran etis dan memandu perilaku dalam semua bentuk karya diakonia;
- Memberi kesempatan pelatihan bagi para pengerja diakonia terkait etika dan perilaku profesional;
- Menyediakan ruang bagi para mitra diakonia oikoumenis untuk merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma bersama;
- Memulai sebuah proses untuk menjabarkan prinsip-prinsip dasar cara kerja yang menjadi panduan dalam cara untuk terlibat dan berkolaborasi dalam diakonia oikoumenis.

10.11 Krisis Lingkungan dan Ekodiakonia

Krisis lingkungan yang melanda Planet Bumi dapat menjadi beban yang berat bagi proses penyelenggaraan diakonia, dan juga pada pelayanan sosial lainnya. Krisis yang berpotensi terjadi antara lain adalah akses terhadap air yang aman untuk diminum, punahnya habitat, naiknya permukaan air laut, dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan polusi. Beberapa di antaranya sudah mulai terjadi, seperti ancaman keberadaan beberapa negara Kepulauan Pasifik. Tindakan selanjutnya perlu melibatkan sebuah perkembangan dari konsep “Eco-diakonia”, yang mengeksplorasi hubungan yang erat antara pelayanan diakonia dan lingkungan dalam konteks perubahan iklim.

10.12 Kesimpulan

Diakonia sering kali mengambil peran sebagai “perantara”. Bab ini telah menunjukkan sejumlah tantangan yang mendorong diakonia oikoumenis untuk terlibat dalam refleksi dan praktik yang inovatif serta mengembangkan strategi dan rencana yang menegaskan mandat bersama gereja-gereja, agen-agen khusus dan badan-badan oikoumenis. Tugas untuk menegaskan dan memfasilitasi relasi timbal balik, mengoordinasi aksi diakonia dan memperkuat praktik-praktik kerja sama merupakan gambaran penting dari peran “perantara”.

Spiritualitas keadilan dan perdamaian harus merasuk ke dalam diakonia oikoumenis, strukturnya, kerangka teoretis, dan praktiknya. Sebuah spiritualitas yang dalam iman mengakui keadilan dan perdamaian sebagai anugerah Allah yang penuh kasih karunia, sebagai kabar baik yang membebaskan bagi seluruh umat manusia, dan yang memberdayakan kita untuk bergabung dalam Ziarah Oikoumenis untuk Keadilan dan Perdamaian.

A D E N D U M

Karya Diakonia Gereja-Gereja dalam Konteks COVID-19

Dasar Pemikiran

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi ini telah menunjukkan kerapuhan dunia kita dan memperlihatkan berbagai risiko yang terabaikan selama beberapa dekade, termasuk sistem kesehatan yang tidak memadai, kesenjangan dalam perlindungan sosial, ketidaksetaraan struktural, degradasi lingkungan, dan krisis iklim. Seluruh wilayah yang tadinya mengalami kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, kini mengalami kemunduran hanya dalam hitungan bulan.¹

Alkitab (New Revised Standard Version) mencatat kata “kesehatan” sebanyak 37 kali, “penyakit” sebanyak 88 kali, “belas kasihan” sebanyak 80 kali,

¹ Antonio Guterres, “UN Secretary-General’s Nelson Mandela Lecture: ‘Tackling the Inequality Pandemic: A New Social Contract for a New Era’”, 18 July 2020, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/sekretaris-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%99Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%99D-delivered>.

dan “kepedulian” sebanyak 163 kali. Sebagai respons terhadap perintah Allah untuk mengasihi dan melayani, gereja-gereja dipanggil untuk merespons penderitaan orang lain:

“Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, ‘Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Dan bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan menyambut Engkau, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Dan bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?’ Dan Raja itu akan menjawab mereka: ‘Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.’” - Matius 25:37-40 (NRSV)

Dokumen ini bertujuan untuk memaparkan dampak COVID-19 terhadap karya diakonia gereja dan organisasi yang terkait dengan gereja dengan (1) menjabarkan konteks sosial, ekonomi, dan teologis, serta (2) menyoroti contoh-contoh praksis internasional, yang diharapkan dapat membantu gereja-gereja dan mitranya untuk mengupayakan praktik-praktik yang bermanfaat dalam respons diakonianya dan mengadvokasi dengan lebih baik mereka yang paling membutuhkan.

Perlindungan terhadap kehidupan dapat digambarkan sebagai sebuah vektor kasih karunia. Pelayanan diakonia gereja-gereja dan organisasi-organisasi yang terkait dengan gereja telah berusaha untuk merespons krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sumber daya (manusia, fisik, dan keuangan) mengalami krisis yang parah di banyak negara, namun perkataan dalam Injil Matius 25:37-40 mengingatkan untuk tidak berdiam diri. Isu-isu keadilan, kesetaraan, dan pengentasan kemiskinan, yang secara langsung berdampak pada kebutuhan, harapan, dan tuntutan akan pelayanan diakonia, tidak boleh diabaikan dalam menghadapi berbagai tantangan baru yang ditimbulkan oleh COVID-19. Sementara kebutuhan akan bantuan dan pertolongan telah meningkat secara global, kemampuan gereja dan masyarakat untuk bertindak terhambat karena adanya larangan untuk berkumpul, bekerja, dan berkegiatan. Namun demikian, krisis ini juga telah menunjukkan berbagai respons yang inspiratif

dari komunitas-komunitas iman kita untuk memetakan langkah selanjutnya dan membawa pemulihan serta transformasi dengan kasih, iman, harapan, keberanian, dan ketekunan.

Dokumen ini disusun dalam dua bagian: bagian pertama adalah gambaran umum tentang situasi saat ini, dan bagian kedua menunjukkan beberapa contoh karya diakonia dari seluruh dunia.

Bagian 1: Gambaran Umum

Hingga 23 Oktober 2021, lebih dari 243 juta orang terinfeksi COVID-19, dan jumlah kematian global mencapai hampir 5 juta orang.² Meskipun sebagian besar pasien telah pulih, kerugian yang ditimbulkan akibat pandemi ini—yang masih berlanjut hingga saat ini—sangat parah dan tragis; peristiwa kematian merupakan tragedi yang tidak terduga bagi keluarga dan kerabat. Dalam banyak kasus, kematian seseorang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan keluarga yang berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan, termasuk potensi kehilangan rumah, mata pencarian, layanan kesehatan, dan makanan. Jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut diperkirakan akan meningkat menjadi 265 juta pada 2020, meningkat 130 juta dari tahun 2019 karena dampak COVID-19.³ Hal ini terjadi dalam konteks di mana hampir 690 juta orang (8,9 persen dari populasi global) kelaparan setiap hari, siang dan malam, dan 2 miliar orang (26,4 persen dari populasi dunia) mengalami situasi kerawanan pangan yang sedang dan parah.⁴ Situasi pandemi juga menambah beban bagi 1,8 miliar orang yang saat ini harus bergantung pada sumber air minum yang terkontaminasi oleh tinja (23 persen dari populasi dunia) dan 2,5 miliar orang yang tidak memiliki

² “COVID-19 Dashboard”, Johns Hopkins University of Medicine Coronavirus Resource Center website, <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.

³ “WFP Chief Warns of Hunger Pandemic as COVID-19 Spreads (Statement to UN Security Council)”, World Food Programme website, 21 April 2020, <https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-COVID-19-spreads-statement-un-security-council>.

⁴ “The State of Food Security and Nutrition in the World 2020”, Food and Agriculture Organization of the United Nations website, <http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html>.

akses terhadap sanitasi yang layak (35 persen dari populasi dunia).⁵ COVID-19 terbukti lebih dari sekadar krisis kesehatan. Meskipun dampaknya berbeda-beda di setiap negara, pandemi ini telah menciptakan guncangan sosial dan ekonomi yang meningkatkan kemiskinan, khususnya dalam konteks yang dipenuhi sektor ekonomi informal. Kelompok-kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Pandemi juga telah memperlihatkan kelemahan dan ketidakmampuan sistem ekonomi global. Negara-negara yang sementara terus bergumul karena keterbatasan sumber daya kini berada dalam kondisi yang makin sulit. Kesombong-an modernitas dan ide-ide kemajuan tanpa batas telah hancur. Pandemi COVID-19 terjadi hampir satu abad setelah pandemi influenza global.

Gereja-gereja dan organisasi-organisasi yang terkait dengan gereja berusaha untuk merespons seefektif mungkin melalui pelayanan diakonia dan kesehatan. Dalam banyak kasus, infrastruktur diakonal yang terbatas (keuangan, fasilitas, sumber daya manusia) sangat memprihatinkan, khususnya di negara-negara yang secara ekonomi paling kurang beruntung di dunia. Karena kebijakan pembatasan sosial, banyak negara melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat secara dramatis, termasuk kekerasan terhadap pasangan dan pelecehan seksual. Rumah telah menjadi tempat yang menakutkan bagi banyak perempuan dan anak-anak, dengan pembatasan aktivitas, masalah finansial, dan ketidakpastian yang makin besar mendorong para pelaku kejahatan dan memberi mereka kekuatan dan kontrol tambahan.⁶

Ketidakmampuan banyak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal—terutama di daerah yang tidak memiliki fasilitas komputer dan komunikasi—dapat menyebabkan ketertinggalan pendidikan jangka panjang dan berakibat kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan di masa depan. Penutupan sekolah akibat pandemi juga menyebabkan 370 juta

⁵ Lisa Guppy and Kelsey Anderson, *The Global Water Crisis: The Facts* (Hamilton, Ontario: United Nations University Institute for Water, Environment and Health, 2017), <https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2017/11/Global-Water-Crisis-The-Facts.pdf>.

⁶ “Joint Statement by the Special Rapporteur and the EDVAW Platform of Women’s Rights Mechanisms on COVID-19 and the Increase in Violence and Discrimination against Women”, 14 July 2020, UN Human Rights Office of the High Commissioner, at: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26083&LangID=E>.

anak (dari 1,3 miliar anak yang tidak bersekolah) tidak mendapatkan makanan sekolah (*school meals*) dan membatasi akses mereka terhadap makanan bergizi dan program bantuan kesehatan. Bagi banyak anak, makanan tersebut merupakan satu-satunya makanan yang mereka andalkan.⁷

Terlepas dari tantangan COVID-19, penyakit yang lazim terjadi di belahan bumi Selatan—seperti meningitis Sahel, demam Lasse, Ebola, dan malaria—tidak boleh diabaikan. Di banyak negara di belahan bumi Selatan, bukan hanya penyakit dan dampak medis dan kesehatan yang menimbulkan kekhawatiran dan biaya sosial yang besar; yang lebih berdampak lagi adalah efek samping dari kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) yang sering kali diberlakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonominya. Di Nigeria, ratusan sekolah ditutup, harga makanan sehari-hari meningkat empat hingga enam kali lipat, dan sebagian penduduk terancam kelaparan. Hal ini dapat memberi dampak yang lebih berat daripada dampak langsung terkait kesehatan—sebagai konsekuensi yang tidak terduga akibat pandemi. Pandemi COVID-19 juga mengurangi liputan media global tentang masalah-masalah serius lainnya. Berbagi tanggung jawab dan wawasan dalam sebuah jejaring diakonia oikoumenis dari mitra-mitra yang setara mungkin juga membutuhkan sebuah upaya yang terencana untuk menyediakan informasi tandingan dan yang memungkinkan semua gereja untuk menceritakan kisah mereka tentang penderitaan dan kebangkitan.

Pandemi COVID-19 juga memperlihatkan kurangnya penelitian dan produksi vaksin di negara-negara Selatan. Ketergantungan pada impor obat-obatan menimbulkan tantangan besar dalam hal pasokan, logistik, dan keuangan, seperti yang disoroti oleh African Vaccine Manufacturing Initiative (AVMI).⁸

Dampaknya terhadap target yang ditetapkan dalam UN Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030 belum dapat diukur atau diperkirakan. Bagaimanapun, dunia tidak sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai agenda ambisius keberlanjutan tahun 2030, belum lagi perjanjian iklim dan tujuan lingkungan hidup yang telah disepakati secara internasional untuk

⁷ “WFP and UNICEF Joint Response to COVID-19”, World Food Programme website, <https://www.wfp.org/school-health-and-nutrition>.

⁸ African Vaccine Manufacturing Initiative website, <https://www.avmi-africa.org>.

tahun 2050. Kemungkinan besar pandemi seperti COVID-19 akan terulang atau bahkan lebih sering terjadi jika komunitas global gagal dalam agenda SDGs. Gereja-gereja dan semua orang yang berkehendak baik tidak dapat membiarkan SDGs dilupakan atau diremehkan.

1. Refleksi Teologis

Pandemi adalah sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di era kontemporer, yang memperlihatkan kerapuhan dan kerentanan eksistensi umat manusia.

a. Satu Tubuh

Kita tidak dapat mengatasi krisis ini secara terpisah. Kita hanya dapat mengatasi pandemi ini jika kita berdiri bersama dalam solidaritas dan mengingat pesan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12:12 bahwa kita adalah “satu tubuh”⁹ Solidaritas harus melampaui konteks lokal karena pandemi ini secara dramatis berdampak pada populasi yang rentan di setiap masyarakat. Pandemi ini melumpuhkan kehidupan dan mata pencarian masyarakat dan negara yang secara sosio-ekonomi sudah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, bantuan, pemberdayaan, advokasi, dan pendampingan harus ditingkatkan.

b. Kompleksitas yang tersirat dalam istilah “Pelayanan” dan “Solidaritas”

Perumpamaan Yesus tentang Orang Samaria yang Baik Hati (Lukas 10:25–37) membantu kita untuk merefleksikan pertanyaan “Siapakah orang-orang yang harus kita kasih dan pedulikan?” dan memberikan petunjuk tentang kompleksitas yang tersirat dalam istilah “pelayanan” dan “solidaritas”. Yesus menceritakan kisah ini dalam konteks perintah untuk mengasih sesama. Orang yang singgah dan menolong itu adalah orang Samaria—yang berasal dari komunitas yang selama berabad-abad berselisih dengan komunitas Yesus mengenai identitas

⁹ “Dr Beate Jakob: ‘We are One Body’”, 15 April 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/dr-beate-jakob-we-are-one-body>.

religius, cara beribadah yang benar, dan hak untuk berpartisipasi dalam urusan politik. Dalam konteks pandemi, perumpamaan ini merupakan undangan untuk merenungkan perlunya melampaui batas-batas dalam melayani dan bersolidaritas dengan mereka yang menderita. Perumpamaan ini juga merupakan panggilan untuk menghilangkan asumsi-asumsi negatif yang mungkin kita miliki dan mengakui dengan kerendahan hati dan rasa syukur bahwa “yang lain” dapat menunjukkan kepada kita arti sebenarnya dari pelayanan dan solidaritas.¹⁰

c. Memulihkan relasi yang rusak antara Allah, Manusia, dan Ciptaan

Mazmur 104:14–18 mengingatkan kita bahwa Allah menganugerahkan kehidupan, kenikmatan, dan rezeki kepada seluruh ciptaan—tumbuhan, hewan, dan semua bentuk kehidupan—tidak hanya kepada manusia. Ruang hidup yang utuh untuk keanekaragaman hayati sangat penting tidak hanya bagi setiap organisme yang hidup, tetapi juga bagi manusia. Sayangnya, situasi di dunia saat ini sangat mengerikan dan menunjukkan disrupsi yang dengan cepat merusak relasi ini, yang membutuhkan transformasi yang mendesak. Pemulihan dan transformasi diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan dan martabat diwujudkan dalam relasi manusia satu sama lain, dengan ciptaan, dan dengan lingkungan.¹¹

Pandemi ini merupakan panggilan yang mendesak untuk melakukan refleksi baru tentang bagaimana memperbaiki relasi yang tidak seimbang antara manusia dan alam, serta antara peradaban teknologi dan ekologi. Perusakan habitat liar, perdagangan hewan liar, dan perubahan iklim makin meningkatkan interaksi dengan alam yang membuat manusia terpapar berbagai macam

¹⁰ “Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: a Christian Call to Reflection and Action During COVID-19 and Beyond”, 27 August 2020, World Council of Churches and Pontifical Council for Interreligious Dialogue, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/serving-a-wounded-world-in-interreligious-solidarity-a-christian-call-to-reflection-and-action-during-covid-19-and-beyond>.

¹¹ Manoj Kurian, “The Broken Relationship Between Humanity and Creation”, NCC Review 140:5 (June 2020), 233–243, <https://seafle.ecucenter.org/f/5bef62a4751349baae78/?dl=1>.

penyakit hewan¹² yang tidak banyak kita ketahui dan dapat menjadi pangkal pandemi baru. Selama 30 tahun terakhir, sekitar 60–70 persen penyakit baru yang muncul pada manusia berasal dari hewan. Tiga sampai empat penyakit menular jenis baru muncul setiap tahunnya, yang sebagian besar berasal dari satwa liar,¹³ salah satunya COVID-19 yang merupakan wabah terbaru setelah wabah lainnya, yaitu Ebola, sindrom pernapasan akut parah (*severe acute respiratory syndrome/SARS*), flu burung, dan Zika. Kebutuhan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mempertahankan sejumlah zona khusus bagi satwa liar adalah salah satu pelajaran penting dari pandemi global ini. Tantangan teologis yang utama adalah menafsirkan kembali hubungan antara ekologi, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan “One Health”¹⁴ yang diusulkan oleh PBB dan WHO merupakan pendekatan yang penting bagi banyak pihak. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berdampak langsung untuk merencanakan sebuah respons diakonal yang efektif.

d. Teologi yang menyesatkan

Pandemi juga memudahkan penyebaran berbagai ideologi yang keliru dan menegaskan kebutuhan bagi gereja-gereja untuk memahami dengan jelas tema-tema utama Injil. Hal ini berarti menolak (1) pandangan teologis yang eksploitatif dan penggunaan virus sebagai alat untuk menimbulkan rasa takut, (2) stigmatisasi terhadap mereka yang rentan, dan (3) konseptualisasi infeksi virus sebagai hukuman atau murka Tuhan terhadap kelompok-kelompok tertentu atau sebagai pertanda akhir zaman. Namun, banyak gereja juga menyadari bahwa COVID-19 dan penyakit mematikan lainnya yang telah ada dalam konteks non-Barat selama beberapa dekade memunculkan pertanyaan-pertanyaan pastoral dan teologis yang serius yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Gereja-

¹² Kate E. Jones et al., “Global Trends in Emerging Infectious Diseases”, *Nature* 451 (2008), 990–993, <https://doi.org/10.1038/nature06536>.

¹³ COVID 19: Urgent Call to Protect People and Nature (Gland, Switzerland: World Wide Fund For Nature, 2020), https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/1348/files/original/FINAL_REPORT_EK-Rev_2X.pdf?1592404724.

¹⁴ “One Health”, World Health Organization website, 21 September 2017, <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health>.

gereja perlu meninjau kembali teks-teks dan gambaran eskatologis dan apokaliptis kuno, menafsirkannya secara bertanggung jawab, untuk menemukan cara bagaimana merespons dengan bijaksana harapan-harapan termasuk kecemasan dan ketakutan manusia.

Sejak Oktober 2019, All Africa Conference of Churches (AACC) telah menyelenggarakan simposium tahunan yang membahas teologi yang menyedatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedepankan teologi kontekstual yang relevan dalam menghadapi perkembangan teologi yang beraneka ragam dan kesalahan penafsiran atas Kitab Suci yang mengarah pada ajaran dan praktik pengajaran yang salah. Langkah ini sangat penting dalam konteks kesehatan dan pemulihan, terutama dalam menanggapi berbagai tantangan baru yang diakibatkan oleh COVID-19.¹⁵ WCC juga telah menghasilkan materi yang relevan, seperti studi Alkitab “Telling Unwelcome Truths: True and False Prophecy”.¹⁶

e. Restorasi Keadilan Intergenerasional

Banyak kebijakan yang diberlakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 telah menyulitkan anak-anak dan remaja. Kebanyakan kaum remaja merasakan kesulitan yang berat selama masa karantina wilayah. Remaja sering kali terdampak oleh kurangnya sarana *e-learning* sebagai pengganti program reguler dari lembaga pendidikannya. Kaum remaja dan anak-anak mengalami dampak negatif dari penutupan taman kanak-kanak, sekolah, dan universitas. Kesenjangan pendidikan yang sangat besar, yang tidak dapat diatasi, dapat berdampak pada kematangan dan pendidikan seluruh generasi, dengan konsekuensi yang sangat serius bagi anak-anak migran dan pengungsi. Oleh karena itu, bagaimana mengembangkan konsep perlindungan dan kesehatan yang ramah anak serta menghormati hak pendidikan anak-anak dan hak mereka yang membutuhkan perhatian dan perlindungan (terutama orang tua) merupakan pertanyaan pen-

¹⁵ World Council of Churches, “African church conference tackles misleading theologies in faith and healing”, <https://www.oikoumene.org/news/african-church-conference-tackles-misleading-theologies-in-faith-and-healing>.

¹⁶ Pauline Wanjiru Njiru, “Telling Unwelcome Truths: True and False Prophecy”, 12 August 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/telling-unwelcome-truths-true-and-false-prophecy-bible-study-by-pauline-wanjiru-njiru>.

ting bagi banyak gereja. Bagaimana kita dapat bergumul dengan tantangan teologis bahwa sebagian besar populasi dunia hidup secara tidak berkelanjutan dalam hal sumber daya lingkungan dan keuangan? Gaya hidup kontemporer seperti itu mungkin mengorbankan peluang masa depan untuk kehidupan yang layak bagi generasi muda. Apakah generasi yang lebih tua berhak mengorbankan kesejahteraan anak perempuan dan laki-laki mereka? Bagaimana hal ini dilihat dalam konteks alkitabiah yang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus bagi umat manusia dilakukan “untuk selama-lamanya” (Ibrani 10:11–14)?

2. *Dampak Pandemi terhadap Gereja-Gereja, Agen-Agen Pembangunan yang Terkait dengan Gereja dan Agen Diakonia*

Gereja-gereja dan organisasi-organisasi berbasis iman Kristen (FBOs) memberikan layanan konseling spiritual, layanan doa, pendampingan, dan penghiburan bagi mereka yang menderita dan sekarat. Kebutuhan akan pelayanan diakonia sebagai respons terhadap pandemi justru meningkat pada saat pendanaan dan pendapatan berada di bawah tekanan yang besar.

Dr. Mathews George Chunakara, Sekretaris Jenderal Christian Conference of Asia, mengatakan, “Meskipun ketidakadilan yang masih terjadi dalam berbagai bentuk sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan, kita harus terus memelihara harapan dan melangkah maju. ... Ketika lonjakan COVID-19 terus menyebabkan masalah yang serius, kita tertekan tetapi tidak putus asa, kita kebingungan tetapi tidak terpuruk. Mari kita perkuat kolaborasi dan dukungan kita di setiap tingkat—di antara gereja-gereja dan dewan-dewan, [organisasi masyarakat sipil] dan FBO, negara dan aktor-aktor non-negara—saat kita bergerak maju menuju pemulihan dan pembangunan kembali dari dampak terburuk pandemi global.”⁷⁷

Pandemi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan dan karya gereja. Disrupsi terjadi dalam kehidupan peribadahan umat, yang

⁷⁷ “WCC-CCA Joint Asia Regional Consultation Urges Churches to Deepen Accompaniment amidst COVID-19 Pandemic”, Christian Conference of Asia website, 8 June 2021, <https://www.cca.org.hk/news-and-events/wcc-cca-joint-asia-regional-consultation-urges-churches-to-deepen-accompaniment-amidst-covid-19-pandemic/>.

berdampak negatif terhadap kehidupan sakramental dan pelayanan pastoral kepada masyarakat. Bagi banyak tradisi, kondisi ini menjadi pukulan yang sangat berat, karena layanan *online* kemudian menjadi alternatif yang kurang memuaskan atau bahkan tidak menjadi alternatif sama sekali. Banyak jemaat lokal mulai merintis bentuk-bentuk baru untuk hadir melalui sarana komunikasi digital: mengirimkan kata-kata penghiburan, bimbingan, dan dorongan kepada para anggotanya; menyediakan jaringan untuk saling mendukung dalam komunitas-komunitas; dan mengorganisasi peribadahan dalam berbagai bentuk sebagai alternatif, di ruang-ruang terbuka di luar ruangan, atau melalui klip video. Namun, layanan semacam ini mungkin akan berdampak kecil atau bahkan tidak berdampak sama sekali apabila terjadi keterbatasan akses terhadap teknologi baru yang canggih dan mahal.

Jika tersedia, pendanaan publik untuk pelayanan diakonia dan bantuan pembangunan kemungkinan besar akan mengalami tekanan yang makin besar karena berkurangnya pendapatan pajak di banyak negara sebagai akibat dari kemerosotan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Pemerintah Inggris juga telah mengumumkan pemotongan anggaran bantuan luar negerinya dari 0,7 persen menjadi 0,5 persen dari pendapatan nasional brutonya.¹⁸

Pemasukan gereja telah berkurang di banyak negara, terkadang akibat terhentinya ibadah hari Minggu. Konsekuensi yang tidak diinginkan dan sangat tidak diinginkan dari pandemi bagi gereja-gereja adalah berkurangnya pelayanan dan karya yang berkaitan dengan teologi publik, etika sosial, misi global, dan kerja sama oikoumenis. Pendapatan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kristen di Eropa berada di bawah tekanan yang berat, dengan konsekuensi negatif yang tak terelakkan bagi pelayanan, pekerjaan, penjangkauan, karya pembangunan, dan—yang paling disesalkan dari semuanya—para calon penerima manfaat (agen perubahan) dari karya-karya tersebut di beberapa negara termiskin di dunia. Namun, kata “penerima manfaat” cukup bermasalah karena kata tersebut dapat memberikan kesan yang keliru bahwa orang-orang hanya menunggu untuk menerima bantuan dari tempat lain. Pada praktiknya,

¹⁸ Patrick Wintour, “Foreign Office Minister Resigns as Sunak Cuts Aid Budget”, *The Guardian*, 25 November 2020, <https://www.theguardian.com/global-development/2020/nov/25/uk-foreign-aid-budget-cut-chancellor-announces>.

banyak karya yang telah dilakukan—yang sering kali dengan sumber daya yang sangat terbatas.

3. *Karya Dewan Gereja-Gereja se-Dunia dan ACT Alliance dalam Mendukung Karya Diakonia*

Dewan Gereja-gereja se-Dunia (WCC) dan ACT Alliance aktif dalam menangani pandemi. WCC dan ACT Alliance berusaha untuk memberikan saran praktis dan koordinasi kepada para anggota dan mitra mereka. Di atas semua itu, tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan. WCC tidak mengklaim sebagai pelopor dalam upaya ini, tetapi memiliki pengalaman yang memungkinkannya untuk memberi respons. WCC menyediakan informasi dan sumber daya, tetapi bukan wewenang WCC untuk memberikan saran. WCC tidak dapat menawarkan bantuan keuangan secara langsung, tetapi dapat menawarkan bantuan dengan cara lain, termasuk sumber daya *online* melalui *website* WCC. Bantuan tersebut termasuk dokumen, publikasi, dan saat ini *webinar* dan *podcast*, seperti *webinar* “COVID-19 Vaccination: How Churches Can Ensure that Stateless People Are Not Left Behind”¹⁹ dan *podcast* yang membahas tentang kematian dan ajal selama pandemi.²⁰ WCC telah mengembangkan program-program untuk membangun kapasitas kepemimpinan untuk diakonia dan pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan dengan beberapa organisasi oikoumenis regional, terutama di Afrika²¹ dan Asia.²²

¹⁹ “Webinar: ‘Covid-19 Vaccination: How Churches Can Ensure that Stateless People Are Not Left Behind’-Speakers”, 15 March 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/webinar-covid-19-vaccination-how-churches-can-ensure-that-stateless-people-are-not-left-behind-speakers>.

²⁰ “WCC Podcast Deals with Death and Dying”, 15 December 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/wcc-podcast-deals-with-death-and-dying>.

²¹ “WCC Seminar in Mozambique Shows Vital Role of Diakonia”, 20 June 2019, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/wcc-seminar-in-mozambique-shows-vital-role-of-diakonia>.

²² “WCC Contributes to Capacity Building in Diakonia and Development in Asia”, 9 December 2019, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/wcc-contributes-to-capacity-building-in-diakonia-and-development-in-asia>.

Pada 13 Oktober 2021, Rev. Prof. Dr Ioan Sauca, Sekretaris Jenderal WCC, menyampaikan pidato tentang pandemi, WCC, dan kesehatan global dalam sebuah pertemuan antara WCC, *the Evangelical Church in Germany* (EKD), *the German Federal Foreign Office*, dan *the TransAtlantic Network*.²³ WCC sudah sejak lama memiliki program kerja tentang kesehatan dan pemulihan yang mencakup kesehatan mental dan fisik. Program ini berfokus pada peran jemaat di gereja-gereja yang mengedepankan kesehatan, yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesadaran tentang faktor sosial penentu kesehatan, advokasi, dan pendampingan pastoral. Ketika jemaat-jemaat lokal memahami dinamika yang ada, mereka (dengan berbagai kelompoknya seperti persekutuan perempuan, kelompok pemuda, paduan suara, dan sebagainya) sering kali menawarkan solusi yang dikembangkan sendiri dan yang hemat biaya. Karya tersebut mencakup kesiapsiagaan dan kesadaran akan perencanaan darurat dan mengikuti prinsip-prinsip alkitabiah dalam memperhatikan tanda-tanda zaman. WCC telah menerbitkan buku panduan, *Health-Promoting Churches Volume II: A Handbook to Accompany Churches in Establishing and Running Sustainable Health Promotion Ministries*, untuk mendampingi gereja-gereja dalam membangun dan menjalankan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan.²⁴

Pada awal pandemi, WCC menerbitkan secara *online* sebuah buku berjudul *Health and Hope: The Church in Mission and Unity*, sebuah kumpulan artikel yang telah diterbitkan sebelumnya yang beresonansi dengan pergumulan di seluruh dunia di tengah pandemi COVID-19.²⁵ Publikasi-publikasi WCC lainnya telah diproduksi yang secara khusus berfokus untuk memperlengkapi gereja-gereja dalam merespons tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Materi *Ecumenical Global Health COVID-19 Response Framework*

²³ “Rev. Prof. Dr Ioan Sauca: The Pandemic, the World Council of Churches, and Global Health”, 13 October 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/rev-prof-dr-ioan-sauca-the-pandemic-the-world-council-of-churches-and-global-health>.

²⁴ Mwai Makoka, ed., *Health-Promoting Churches: Volume II* (Geneva: WCC Publications, 2021), <https://www.oikoumene.org/resources/publications/health-promoting-churches-volume-ii>.

²⁵ “WCC releases ‘Health and Hope’ online publication as a resource amid COVID-19 pandemic”, 3 April 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/wcc-releases-health-and-hope-online-publication-as-a-resource-amid-covid-19-pandemic>.

menjabarkan parameter-parameter kepedulian.²⁶ Publikasi dengan judul *Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian Call to Reflection and Action during COVID-19 and Beyond* diterbitkan bersama dengan *Pontifical Council for Interreligious Dialogue*.²⁷

Healing the World: Eight Bible Studies for the Pandemic Era mengundang orang-orang Kristen untuk menggumuli ketakutan, kesedihan, dan ketidakpastian mereka dari sudut pandang Alkitab.²⁸ Sebuah edisi khusus dari jurnal WCC, *The Ecumenical Review*, lebih lanjut berfokus pada tantangan pastoral dan teologis yang ditimbulkan oleh pandemi.²⁹

The WCC Ecumenical HIV and AIDS Initiatives and Advocacy (WCC-EHAIA) mendorong kompetensi terkait isu HIV di antara gereja-gereja dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga teologis untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan persoalan HIV ke dalam kurikulum teologis serta mengatasi akar penyebab pandemi HIV. Pengalaman dalam bidang ini juga dapat memberikan masukan bagi respons diakonia terhadap COVID-19 melalui berbagai pelajaran yang diperoleh dari penanganan HIV dan AIDS. Peran pertemuan WCC sangat penting dalam mempertahankan fokus yang berkelanjutan pada penanggulangan HIV meskipun ada prioritas lain yang mendesak. Gereja-gereja dapat menjadi lembaga yang berpengaruh karena berakar kuat dalam masyarakat di seluruh dunia. Gereja-gereja dapat menjadi kekuatan untuk transformasi—membawa pemulihan, harapan, dan pendampingan bagi semua orang yang terkena dampak HIV serta COVID-19. Program WCC-EHAIA telah menunjukkan

²⁶ “Ecumenical Global Health COVID-19 Response Framework”, 13 August 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/publications/ecumenical-global-health-covid-19-response-framework>.

²⁷ *Serving a Wounded World in Interreligious Solidarity: A Christian Call to Reflection and Action During COVID-19 and Beyond* (Geneva: WCC Publications; Vatican City: Pontifical Council for Interreligious Dialogue, 2020), <https://www.oikoumene.org/resources/publications/serving-a-wounded-world-in-interreligious-solidarity>.

²⁸ *Healing the World: Eight Bible Studies for the Pandemic Era* (Geneva: WCC Publications, 2020), <https://www.oikoumene.org/resources/publications/healing-the-world>

²⁹ “Ecumenical Review Focuses on ‘Christ’s Love in the Midst of Pandemic’”, 4 February 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/ecumenical-review-focuses-on-christs-love-in-the-midst-of-pandemic>. Further information about the WCC’s work on health and healing is available online at <https://www.oikoumene.org/what-we-do/health-and-healing>.

keberhasilan menghubungkan aktor akar rumput, nasional, dan regional dengan para pengambil keputusan dan kebijakan internasional.³⁰

Pengalaman telah menunjukkan bahwa ketika perempuan hanya ditugaskan dalam urusan memasak dan menyediakan makanan, realitas meningkatnya krisis pangan akan menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang berisiko tinggi mengalami kekerasan. Peningkatan kekerasan berbasis gender dan seksual selama pandemi digambarkan oleh UN Women sebagai “Pandemi Bayangan”.³¹ WCC menangani kekerasan berbasis gender dan seksual melalui program *Just Community of Women and Men*,³² khususnya kampanye *Thursdays in Black* yang bertujuan untuk mempromosikan dunia tanpa kekerasan dan pemerkosaan.³³

Melalui program Komitmen Gereja terhadap Anak, WCC mengadvokasi perlindungan dan kesejahteraan anak-anak melalui proyek-proyek di tingkat lokal, nasional, dan global, termasuk kerja sama dengan UNICEF. Hal ini sangat penting selama COVID-19 ketika eksploitasi terhadap anak-anak dan hilangnya kesempatan pendidikan karena penutupan sekolah menjadi perhatian serius. Tujuannya adalah untuk mempromosikan perlindungan anak, partisipasi anak, dan keadilan iklim intergenerasional.³⁴ Kampanye *Out of the Shadows* juga menyertakan sumber daya *online* untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap anak.³⁵

³⁰ Further information about EHAIA is available online at <https://www.oikoumene.org/what-we-do/ehaia>.

³¹ “The Shadow Pandemic: Violence against Women during COVID-19”, UN Women website, <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>.

³² “Just Community of Women and Men”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/what-we-do/just-community-of-women-and-men>.

³³ “Statement on the Dual Pandemics of COVID-19 and Sexual and Gender-Based Violence”, 23 April 2020, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/statement-on-the-dual-pandemics-of-covid-19-and-sexual-and-gender-based-violence>.

Further information is available online at <https://www.oikoumene.org/what-we-do/thursdays-in-black>.

³⁴ “WCC’s Engagement for Children”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children>.

³⁵ Material on this campaign is available at <https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children/out-of-the-shadows>.

Sebuah *support group* COVID-19 yang terdiri dari staf WCC dibentuk untuk mendukung karya gereja-gereja di tahun pertama pandemi. Selain memberikan respons yang terkoordinasi, kelompok ini telah menghasilkan berbagai sumber daya, seperti buku doa, informasi praktis, contoh-contoh pertanyaan dan jawaban, podcast, dan lain sebagainya.³⁶

Dimensi spiritual dari karya gereja-gereja sangat penting, yang menopang semua karya lainnya. WCC menerbitkan sumber-sumber rohani seperti doa dan pendalaman Alkitab secara internasional.³⁷ Salah satu publikasi WCC yang baru-baru ini diterbitkan berjudul *Voices of Lamentation, Hope, and Courage: A Week of Prayer in the Time of the COVID-19 Pandemic*.³⁸

Tantangan besar di bidang-bidang lain juga berdampak pada respons terhadap COVID-19, seperti yang ditekankan dalam konteks hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan SDGs—khususnya dalam mengatasi kemiskinan (SDG 1). WCC berkarya dalam berbagai bidang seperti pengadaan air bersih (SDG 6) melalui Ecumenical Water Network³⁹ dan ketahanan pangan (SDG 2) melalui Ecumenical Advocacy Alliance,⁴⁰ termasuk berpartisipasi dalam UN Food Systems Summit.⁴¹

ACT Alliance dan para anggotanya merespons pandemi COVID-19 dengan berbagai cara, termasuk mengeluarkan seruan.⁴²

Dalam beberapa dekade terakhir, makin banyak krisis kesehatan global yang terjadi, dan meningkatnya arus perjalanan global serta pariwisata massal turut mempercepat penyebaran virus dan patogen. Krisis COVID-19 tidak sepe-

³⁶ These resources are available online at <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources>.

³⁷ “COVID-19 Resources”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources>.

³⁸ The publication is available online at <https://www.oikoumene.org/resources/publications/voices-of-lament-hope-and-courage>.

³⁹ “Ecumenical Water Network”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/what-we-do/ecumenical-water-network>.

⁴⁰ “Ecumenical Advocacy Alliance”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/programme-activity/ecumenical-advocacy-alliance>.

⁴¹ “At Webinar on Food Systems, “the Times Are Too Dire to Not Speak Truth”, 11 October 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/at-webinar-on-food-systems-the-times-are-too-dire-to-not-speak-truth>.

⁴² Further information about the ACT Alliance response is available online at <https://actalliance.org/covid-19/>.

nuhnya mengejutkan, tetapi pandemi global merupakan krisis yang paling kompleks untuk perencanaan tanggap darurat. *Pertama*, infrastruktur kemanusiaan yang tidak dirancang untuk ditingkatkan pada skala global. *Kedua*, aglomerasi perkotaan dan pemukiman informal serta “kamp-kamp besar” pengungsi (seperti yang ada di wilayah Darfur di Sudan dan Cox’s Bazar di Bangladesh) telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sehingga menjadi semacam bom waktu dalam hal krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19.

Berdasarkan pendekatan yang direkomendasikan sebagaimana dibahas dalam Inter-Agency Standing Committee (IASC)⁴³ dan badan koordinasi kemanusiaan global lainnya, respons ACT Alliance terhadap COVID-19 menggunakan pendekatan multisektoral untuk melengkapi upaya yang dipimpin oleh WHO dan pemerintah. Respons ACT Alliance berfokus pada bantuan langsung kepada masyarakat dan memprioritaskan penyediaan air, sanitasi, dan kebersihan,⁴⁴ bantuan tunai, penyuluhan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual.

Dalam merancang *Respons Total ACT Alliance*, ACT Alliance mengacu pada prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh IASC dalam draf *COVID-19 Global Humanitarian Response Plan*:

- Memaksimalkan hubungan yang saling melengkapi dan sinergi antara berbagai respons dan rencana yang sedang berjalan;
- Memastikan fleksibilitas untuk menyesuaikan respons dan target dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang dengan cepat;
- Mengembangkan mekanisme koordinasi yang sudah ada;
- Memastikan penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan;
- Memastikan keterlibatan semua orang—terutama masyarakat yang rentan, terstigma, sulit dijangkau, telantar, dan populasi yang berpindah-pindah yang sering kali tidak diikutsertakan dalam rencana nasional atau tidak diikutsertakan secara memadai dalam rencana tersebut.

⁴³ Inter-Agency Standing Committee website, <https://interagencystandingcommittee.org/>.

⁴⁴ “Water, Sanitation and Hygiene (WASH)”, UNICEF website, <https://www.unicef.org/wash>.

ACT Alliance mengeluarkan seruan dana respons cepat (*rapid response fund*/RRF) kepada para anggotanya, yang menghasilkan 21 proyek di 18 negara di seluruh dunia. Dampak COVID-19 yang meluas juga memengaruhi negara-negara donor, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan finansial untuk sektor kemanusiaan, termasuk FBO. ACT Alliance menerbitkan sebuah pamflet yang menekankan pentingnya peran FBO selama masa epidemi dan pandemi, yang berisi beberapa rekomendasi kepada para donor:

a. Pendekatan multisektoral yang terlokalisasi dan dipimpin secara lokal adalah yang paling efektif

Para aktor dan pemuka agama terus membangun komunitas yang tangguh dan siap serta memainkan peran kunci dalam memperkuat kapasitas di tingkat lokal. Donor dan lembaga kemanusiaan harus melibatkan komunitas lokal dan para aktor dan pemuka agama untuk memastikan kontekstualisasi dan penerapan pesan dan praktik perilaku, mengalihkan perhatian dari respons internasional ke respons lokal.

b. Penting untuk menggunakan pendekatan holistik

Perpaduan antara dukungan secara teologis dan teknis yang diberikan oleh para pemuka agama dan aktor berbasis agama memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara holistik dalam menghadapi kepercayaan takhayul dan ketakutan seputar Ebola. Informasi yang disampaikan pemerintah yang akurat secara klinis tidak memiliki keterkaitan dengan kekhawatiran masyarakat dan tidak dapat menciptakan titik tolak perubahan perilaku. Penggunaan teks-teks religius dan kepercayaan masyarakat terhadap para pemuka agama mereka membantu mengubah pikiran dan hati, serta memberikan harapan dan menyentuh langsung jantung identitas masyarakat. Krisis Ebola pada akhirnya mengarah pada penguatan hubungan antara WCC dan ACT Alliance serta WHO; kerja sama semacam itu sangat diharapkan untuk secara efektif dan cepat menjangkau banyak komunitas secara global—dengan demikian membantu respons kemanusiaan dan diakonia.

c. Karya para aktor berbasis keagamaan akan sangat penting baik dalam tahap pencegahan maupun penanggulangan COVID-19

Selama krisis Ebola, para aktor berbasis keagamaan memainkan peran penting dalam menyalurkan informasi medis yang layak dengan menggunakan bahasa lokal. Ribuan orang dilatih untuk mendukung upaya kemanusiaan dan kesehatan. Pada fase perlambatan COVID-19, penerapan langkah-langkah keamanan selama pertemuan, pemakaman, dan acara keagamaan akan membantu memperlambat penularan. Akses para aktor berbasis agama terhadap mereka yang tersisih dan terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan mereka yang memiliki kemampuan baca tulis yang rendah, serta kepercayaan yang telah mereka kembangkan dengan masyarakat akan berkontribusi untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Selama fase mitigasi, para pemuka agama dan adat membantu mengurangi stigma dan mendukung para penyintas COVID-19.

d. Aktor berbasis keagamaan dan pemuka agama harus diikutsertakan dalam merencanakan tanggapan

Selama respons Ebola, terdapat keterlambatan dalam melibatkan para pemuka agama, yang kemudian terbukti berperan penting dalam menekan epidemi dan memastikan pemulihan yang cepat. Para aktor dan pemuka agama harus dilibatkan dalam tahap perencanaan dan perancangan karena mereka memiliki pengetahuan yang dimiliki yang lain, tentang kebutuhan dan tantangan lokal, mereka mendapatkan kepercayaan dari penduduk setempat, dan dapat dengan cepat mendorong perubahan perilaku yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran virus.

e. Aktor berbasis agama harus mendapatkan dana yang sesuai untuk membantu menjangkau masyarakat di seluruh dunia

Peran aktor berbasis agama selama krisis kesehatan tidak dapat diremehkan. Para pendonor harus menetapkan jalur masuk praktis bagi organisasi dan aktor berbasis keagamaan untuk berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam

koordinasi dan pengambilan keputusan tentang respons dan pemulihan COVID-19 serta upaya kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian yang lebih luas di tingkat nasional dan daerah.

f. Literasi keagamaan di antara staf kemanusiaan harus diperkuat

Lembaga kemanusiaan dan pembangunan harus meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh para staf, terutama di tingkat lapangan, tentang para pemuka agama, dan memanfaatkan literatur seputar Ebola, HIV, dan epidemi lainnya untuk bermitra secara strategis dengan para pemuka agama dan tokoh-tokoh adat dan tradisional untuk meningkatkan akses ke masyarakat.

Krisis COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi WCC dan ACT Alliance, namun keduanya telah berusaha untuk memanfaatkan sumber daya mereka seefektif mungkin dalam menanggapi pandemi ini.⁴⁵

Sebuah dokumen WCC, *COVID-19 and Sexual and Gender-Based Violence*, telah dikembangkan.⁴⁶

4. *Tantangan dalam Mempraktikkan Diakonia di Masa Pembatasan secara Fisik*

Kepedulian antara satu manusia dengan manusia lainnya sering kali membutuhkan pertemuan dan kehadiran secara fisik. Bagi para pelaku diakonia, seperti staf di panti jompo, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam konteks COVID-19. Biaya, tingkat kepraktisan, dan ketersediaan alat perlindungan diri (APD) juga harus dipertimbangkan—terutama di negara-negara termiskin di dunia. Pada awal pandemi, terjadi kelangkaan APD yang sangat parah di banyak negara, sehingga menciptakan risiko tambahan bagi staf serta pengguna layanan.

Penanganan masalah kesepian, terutama di antara para lansia yang hidup sendiri, merupakan aspek utama dari pelayanan diakonia di banyak negara.

⁴⁵ More information on the WCC's response to COVID-19 is available online at <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources>.

⁴⁶ It is available at https://www.oikoumene.org/sites/default/files/File/31032020_COVID-19and%20SGBV.pdf.

Tidak adanya kontak dengan manusia juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental. Banyak pelayanan diakonia (dan pelayanan kepedulian sosial lainnya) tidak dapat menyediakan pelayanan semacam ini karena pembatasan jumlah pertemuan.

Ketika pelayanan diakonia terkait erat dengan kegiatan gereja lainnya, khususnya ibadah dan kelompok doa, kemungkinan untuk menyelenggarakan pelayanan semacam itu juga terbatas. Ketiadaan alat komunikasi yang memadai, menyebabkan banyak orang yang membutuhkan pelayanan diakonia tidak terjangkau oleh para penyedia pelayanan.

5. *Diakonia dalam Konteks Pengangguran*

Dampak ekonomi dan sosial dari pandemi ini juga memengaruhi peningkatan jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dan menambah kerentanan mata pencarian masyarakat. Hal ini terjadi dalam konteks di mana 2 miliar pekerja—lebih dari 60 persen tenaga kerja dunia—berada dalam pekerjaan informal.⁴⁷ (Di Afrika, 80 persen tenaga kerja memiliki pekerjaan informal.) Sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses ke jaminan sosial sebagai perlindungan ketika mereka kehilangan mata pencarian. Kondisi semacam ini memiliki beberapa implikasi terhadap respons diakonia:

- a. Dampak langsung terhadap individu yang kehilangan pendapatan serta tanggungan mereka. Dengan tidak adanya subsidi pemerintah atau subsidi yang terkait dengan asuransi, kehilangan pendapatan berpotensi mengakibatkan kemelaratan bahkan kelaparan. Respons yang diberikan pun dapat berupa bantuan bencana.
- b. Pengaruh pengangguran terhadap kesehatan mental. Perasaan kehilangan martabat dan harga diri karena menganggur dapat berdampak buruk bagi individu—termasuk meningkatnya risiko kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, bunuh diri, melukai diri sendiri, dan kekerasan (termasuk perempuan dan anak-anak yang menjadi korban). Pelayanan

⁴⁷ Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, 3rd ed. (Geneva: International Labour Office, 2018), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf.

diakonia dapat menjadi yang terdepan dalam upaya menolong individu-individu tersebut.

- c. Dampaknya terhadap pendanaan untuk pelayanan diakonia. Pengangguran juga dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari pajak, yang—dalam banyak kasus—berdampak langsung pada pendanaan pelayanan sosial, yang ironisnya, justru ketika tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan diakonia cenderung meningkat secara signifikan.

6. *Pelayanan Online*

Pelayanan diakonia secara *online* dapat membantu beberapa orang, khususnya apabila tersedia akses yang mudah dan terjangkau terhadap teknologi. Demikian pula, doa bersama secara *online* diapresiasi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun demikian, jutaan orang lainnya mengalami kesulitan atau bahkan tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut—terutama di komunitas-komunitas termiskin di dunia. Karenanya, pandemi juga berisiko memperbesar kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

7. *Perspektif Medis dan Kesehatan Masyarakat dari Pandemi COVID-19*

Mengapa COVID-19 menyebar begitu luas dan cepat? *Pertama*, COVID-19 adalah virus yang baru bagi manusia, dan tubuh kita tidak memiliki imun khusus yang dibutuhkan untuk melawannya. *Kedua*, virus ini mudah menular dari satu orang ke orang lainnya melalui droplet pernapasan, permukaan, dan kemungkinan melalui udara. *Ketiga*, orang yang terinfeksi dapat menularkan virus ke orang lain selama sehari-hari sebelum mereka merasa sakit atau tanpa merasa sakit sama sekali. *Keempat*, dunia saat ini sangat saling terhubung dengan tingginya tingkat perjalanan antarnegara dan antarbenua.

Meskipun banyak orang hanya menderita gejala ringan, COVID-19 dapat menyebabkan penyakit yang mengancam nyawa kaum lanjut usia, yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah (misalnya, penderita HIV atau kanker), atau yang memiliki penyakit bawaan (misalnya, diabetes atau penyakit paru-paru dan

jantung). Dengan tidak adanya atau tertundanya vaksinasi, pencegahan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi ini. Langkah-langkah pencegahan termasuk menjaga jarak fisik, kebersihan tangan dan pernapasan, dan isolasi (karantina) orang yang sakit atau dicurigai terinfeksi. Bahkan orang yang sehat dan berisiko rendah pun harus mengikuti langkah-langkah ketat ini untuk melindungi mereka yang lemah dan rentan.

Sumber penularan kepada manusia dan konsekuensi medis dan sosio-ekonomi dari pandemi COVID-19 telah menjadi topik dari banyak spekulasi, tuduhan, dan sanggahan, teori konspirasi, dan ilmu kedokteran yang dapat dipercaya maupun yang gadungan. COVID-19 telah mengungkap kesenjangan dalam sistem kesehatan yang selama ini tertutupi dan juga menyoroti bagaimana kesehatan bukan hanya urusan sektor medis. Sistem politik-ekonomi global yang ada saat ini sebagian besar bertanggung jawab atas dampak sosial-ekonomi COVID-19 dan, oleh karena itu, harus ditinjau ulang dengan kejujuran dan keberanian.

Nilai-nilai kasih, bela rasa, solidaritas, dan keadilan telah memotivasi orang-orang beriman di seluruh dunia untuk melakukan tindakan positif. Pertanyaannya adalah bagaimana gereja-gereja dapat mengerahkan aset yang dimiliki dalam bidang kesehatan di tengah tantangan pandemi, perubahan iklim, dan distribusi sumber daya yang tidak merata, tidak terkecuali sumber daya yang berhubungan dengan kesehatan. WCC, melalui karyanya di bidang kesehatan dan pemulihan, memainkan peran dalam mendorong praktik-praktik yang baik dan pemanfaatan aset-aset gereja untuk meningkatkan kesehatan.⁴⁸ Rumah sakit gereja dan asosiasi kesehatan Kristen (Christian Health Associations/CHAs) memainkan peran yang sangat penting; banyak rumah sakit—baik di negara maju maupun negara berkembang—dikelola oleh gereja atau lembaga diakonia. Pdt. Dr. Fidon Mwombeki, Sekretaris Jenderal All Africa Conference of Churches (AACC), menuliskan:

⁴⁸ “Dr Mwai Makoka: Harnessing Religious Health Assets for a Better Post-COVID World”, 13 October 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/resources/documents/dr-mwai-makoka-harnessing-religious-health-assets-for-a-better-post-covid-world>.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Afrika, gereja-gereja memberikan kontribusi yang besar dalam pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil dan perdesaan. Dengan cara ini, gereja-gereja menggunakan fasilitas medis mereka sebagai garda terdepan. Kami bersyukur kepada Allah bahwa sejauh ini, virus COVID-19 hanya ada di kota-kota besar di Afrika. Akan tetapi, trennya jelas bahwa virus ini menyebar bahkan ke perdesaan. Gereja-gereja secara serius mempersiapkan fasilitas mereka agar layak dan siap untuk menolong mereka yang membutuhkan pengobatan dan perawatan. Banyak dari fasilitas-fasilitas ini tidak dilengkapi atau dipasok secara memadai. Gereja-gereja membutuhkan kapasitas tambahan untuk siap menghadapi tugas besar ini.”⁴⁹

8. Vaksinasi

Gereja dapat memainkan peran kunci dalam mendorong vaksinasi. Hal ini dapat, bagi banyak pihak, membantu menghilangkan rasa curiga. Para pemimpin gereja juga telah bertindak sebagai Duta Vaksin.⁵⁰ WCC berkolaborasi dengan UNICEF dalam mempromosikan Pekan Imunisasi Dunia.⁵¹ Prof. Dr. Sauca mengatakan:

“Ketika program vaksinasi COVID-19 diluncurkan, para pemuka agama dari semua agama memainkan peran penting dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan layanan kesehatan, serta terhadap vaksin yang telah teruji. Sebagai persekutuan Kristen, adalah tugas dan kewajiban moral kita untuk secara terang-terangan menentang rumor dan mitos dan menjawabnya dengan fakta. Meskipun masalah moral dan etika juga membayangi pola akses dan distribusi vaksin, kita perlu mengambil tanggung jawab dan mendukung apa yang benar dari sudut pandang medis, etika, dan hak asasi manusia.”⁵²

⁴⁹ Fidon Mwombeki, “Faith Responses to COVID-19: Listening to Representatives of Religious Communities”, All Africa Conference of Churches website, 30 April 2020, <https://www.piron.global/en/fidm-04-2020-featured-actors/>.

⁵⁰ “Vaccine Champions”, World Council of Churches website, <https://www.oikoumene.org/resources/covid-19-resources#vaccine-champions>.

⁵¹ “Simple Vaccination Message: ‘Do to Others, What You Want Them to Do to You’”, 29 April 2021, World Council of Churches, at: <https://www.oikoumene.org/news/simple-vaccination-message-do-to-others-what-you-want-them-to-do-to-you>.

⁵² “Vaccine Champions”, WCC.

Pembuatan vaksin untuk melawan COVID-19 berlangsung dengan begitu cepat. Meskipun patut dipuji dan disambut baik, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengapa penyakit yang hampir tidak ada di belahan bumi Utara, seperti malaria, belum ditangani dengan upaya yang sama. Sampai semua orang divaksinasi, terlepas dari kebangsaannya, risiko COVID-19 dan variannya tetap menjadi kenyataan yang mematikan bagi seluruh dunia.

Sebagai umat Kristen, prinsip Injil tentang mengasihi sesama sangat penting bagi pemahaman kita tentang rasa kemanusiaan. Pada awal tahun 2021, hampir semua negara kaya telah memulai program vaksinasi secara luas, dengan perdebatan yang sengit mengenai prioritas usia dan kelompok risiko. Hal ini terutama dikarenakan daya beli negara-negara tersebut. WHO dan Gavi, the Vaccine Alliance, berinisiatif membuat COVAX⁵³ untuk memfasilitasi ketersediaan vaksin di negara-negara belahan bumi Selatan. Namun, vaksinasi berlangsung jauh lebih lambat daripada di negara-negara di Utara dan kebanyakan baru dimulai pada Oktober 2021. Dominasi penelitian, pengembangan, dan produksi vaksin di belahan bumi Utara juga menyoroiti minimnya sektor farmasi di belahan bumi Selatan. Pastor Peter Noteboom, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Kanada, mengatakan:

“Pada masa pandemi ini, adakah cara yang lebih baik untuk mengasihi Allah Sang Pencipta dan mengasihi sesama selain melakukan vaksinasi, mengadvokasi vaksinasi untuk semua orang, serta menyumbangkan waktu dan uang untuk memastikan semua orang di seluruh dunia memiliki akses terhadap vaksin? Virus COVID-19 tidak membedakan. Respons kita juga tidak boleh diskriminatif. Kita harus menyediakan vaksin untuk semua orang di mana pun.”⁵⁴

9. *Dampak Potensial Jangka Panjang*

Selama bencana tsunami pada 2004, strategi *build back better* (BBB) diterapkan dalam proses pemulihan. Strategi ini bertujuan untuk membangun kembali masyarakat yang lebih baik dan membantu komunitas-komunitas religius

⁵³ “COVAX”, Gavi website, <https://www.gavi.org/covax-facility>.

⁵⁴ “Vaccine Champions”, WCC.

menjadi lebih tangguh dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi kembali. Gerakan oikoumenis dapat membantu mempromosikan beberapa elemen umum dalam strategi global untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan dan rekonstruksi sistem sosial dan masyarakat di tengah pandemi yang masih berlangsung. Tantangannya adalah menghentikan pola pikir yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu hari pandemi akan berakhir, dan karena itulah kita baru dapat memulai proses yang sungguh-sungguh untuk membangun kembali masyarakat kita agar lebih tangguh, mengikuti pendekatan *One Health* yang lebih terintegrasi, dan lebih siap dalam model pembangunan alternatif. Kita dihadapkan pada tugas untuk menyusun strategi dalam membangun kembali sistem kesehatan, sistem gizi, dan sistem jaminan sosial yang lebih baik selama pandemi masih berlangsung.

Prioritas BBB jangka panjang perlu mencakup kebutuhan untuk menanggulangi kemiskinan, ketahanan pangan, cara hidup yang lebih ramah lingkungan, dan perhatian terhadap kesehatan, baik fisik maupun mental. Diperlukan gerakan global untuk dialog oikoumenis tentang strategi BBB, yang mengarahkan pada masyarakat dan komunitas religius yang lebih tangguh dan lebih sehat sambil tetap mengatasi dampak pandemi yang berat.

10. *Rangkuman Bagian 1*

Hingga akhir 2021, respons terhadap pandemi masih didominasi oleh respons secara medis, dengan program vaksinasi yang meluas di negara-negara kaya yang dikombinasikan dengan langkah-langkah darurat dan larangan dari pemerintah. Kegagalan untuk mendistribusikan vaksin secara adil adalah skandal yang harus terus disoroti oleh gereja-gereja.

Respons diakonia harus berfokus pada meringankan beban dan penderitaan manusia, serta memberikan bantuan pelayanan medis, termasuk memfasilitasi vaksinasi. Oleh karena itu, respons diakonia harus bersifat jangka panjang, karena pandemi ini akan terus memberikan dampak yang buruk selama bertahun-tahun yang akan datang. Pelayanan diakonia bagi mereka yang mengalami trauma atau kehilangan orang yang dicintai mungkin akan dibutuhkan selama beberapa dekade.

Dampak perekonomian global dari pandemi ini mungkin akan mengakibatkan peningkatan pengangguran, dengan implikasi yang merugikan (baik secara finansial maupun harga diri) bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan dengan konsekuensi bagi masyarakat yang lebih luas. Keberlangsungan hidup beberapa penyedia layanan diakonia menjadi perhatian serius, terutama ketika permintaan akan layanan diperkirakan akan meningkat. Namun, terbuka peluang untuk membangun kembali dengan lebih baik dan mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh pandemi ini. Gereja-gereja dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan gereja harus merencanakan respons jangka panjang diakonia terhadap pandemi; respons yang efektif harus mencakup kolaborasi oikoumenis dan internasional. Tantangan untuk mengatasi kemiskinan, perubahan iklim, dan kerawanan pangan, serta memberikan perhatian pada kesehatan mental dan fisik merupakan tantangan besar bagi semua pihak dalam dekade mendatang, termasuk gereja-gereja. Dalam pembukaan dokumen ini disebutkan tentang pemulihan dan transformasi dengan kasih, iman, pengharapan, keberanian, dan ketekunan. Meskipun COVID-19 terlihat sebagai masalah yang sangat besar, hal tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bertindak. Dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk beriman, berharap dan mengasihi. Dalam menghadapi berbagai dampak dari COVID-19 dan dalam segala kesulitan hidup, gereja, dengan mengandalkan kasih karunia dan belas kasihan Allah, adalah dan harus tetap menjadi tempat untuk berdoa, meratap, dan berharap.

Doa

*Kita mengingat di hadapan Allah,
mereka yang telah meninggal,
dan kita berdoa agar kasih Allah melingkupi
semua orang yang berduka,
sekarang dan selamanya.⁵⁵*

⁵⁵ “Archbishops Invite Nation to Join Them in Daily Prayer from this Evening amid Covid-19 Pandemic”, 1 February 2021, The Church of England website, <https://www.churchofengland.org/news-and-media/news-and-statements/archbishops-invite-nation-join-them-daily-prayer-evening-amid>. Prayer from The Church of England.

*Allah yang murah hati,
saat kami mengingat di hadapan-Mu
ribuan orang yang telah meninggal,
lingkupilah kami dan semua orang yang berduka
dengan belas kasih-Mu yang begitu kuat.
Sayangilah kami dalam kedukaan kami,
lindungilah kami dari keputusasaan,
dan anugerahilah kami kekuatan untuk bertahan
dan menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan
dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah bangkit.
Amin.*

Bagian 2: Contoh-Contoh

Respons Gereja-Gereja: Bagaimana Kita Melayani Umat Manusia?

Dr. Mwombeki menulis:

“Gereja-gereja mengambil langkah-langkah praktis untuk mendukung sistem pemerintahan dan melalui pelayanan diakonia secara langsung. Gereja-gereja hadir, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Gereja-gereja telah menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya dan bagaimana cara mencuci tangan dan penggunaan cairan pembersih. Pada saat yang sama, banyak gereja memulai pelayanan diakonia lokal, menyediakan makanan dan kebutuhan lainnya untuk keluarga yang sangat rentan, terutama karena pemerintah Afrika tidak memiliki sistem yang terstruktur untuk mengenali identitas mereka yang paling rentan atau bahkan bagaimana melayani mereka. Jemaat-jemaat mengumpulkan dan mendistribusikan makanan dan bahan-bahan pembersih kepada mereka yang rentan di komunitas mereka.”⁵⁶

Di bawah ini adalah sebagian kecil dari contoh-contoh praktis dari respons diakonia di seluruh dunia.

⁵⁶ Mwombeki, “Faith Responses”.

Argentina

Pandemi melanda Argentina pada saat negara ini sedang mengalami kerentanan sosial-ekonomi yang besar, darurat pangan, dan krisis utang nasional. Menurut data resmi, pada akhir tahun 2019, 35,5 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan di ibu kota, Buenos Aires, 40,5 persen hidup dalam kemiskinan. Terinspirasi dari perumpamaan Alkitab tentang lima roti dan dua ikan (Mat. 14:14-25), Evangelical Methodist Church of Argentina (IEMA) dan Regional Ecumenical Advisory and Service Centre (CREAS) mengembangkan sebuah inisiatif kerja sama dan diakonia oikoumenis yang disebut “Roti dan Ikan untuk Keberlangsungan Kehidupan”, yang mengandung kesaksian tentang iman dan kehidupan yang berkelimpahan di dalam Yesus.

Dalam menghadapi kenyataan COVID-19 yang menyebar dengan cepat, kerja sama ini bertujuan untuk mendukung keluarga dan masyarakat yang terkena dampak krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi di Argentina, dengan memastikan ketahanan pangan. Dari Mei sampai dengan Juli 2020, makanan dan layanan kesehatan diberikan kepada 665 keluarga, 104 ton makanan serta barang-barang sanitasi dan biosekuriti telah disalurkan kepada 20 komunitas. Hal ini dapat terlaksana berkat dukungan dari 60 relawan. Solidaritas semacam ini bertujuan untuk menyatukan umat manusia: meskipun kekurangan uang, ada kehidupan yang berkelimpahan (lihat Yohanes 10:10).

Cina

Laporan ini berdasarkan wawancara dengan Rev. Shen Zhanqing, Director of the church and social service unit of the Amity Foundation.

Di Cina, Provinsi Hubei dan ibu kotanya, Wuhan, merupakan pusat wabah COVID-19, gereja-gereja, sama seperti organisasi lainnya, terkena dampak yang parah. Karantina wilayah dimulai pada akhir Januari 2020, dan larangan mengadakan pertemuan mengakibatkan kunjungan rutin tidak mungkin untuk dilakukan. Ada beberapa pelayan pastoral yang terinfeksi dan jemaat yang membutuhkan perawatan. Ada banyak orang yang membutuhkan perawatan dan dukungan rohani selain kebutuhan APD. Meskipun menghadapi kesulitan

dan tantangan yang besar, umat Kristen di Hubei dan jemaat-jemaat lokal mengerahkan dana dan tenaga untuk melawan epidemi ini. Doa bersama dibagikan di media sosial. Tugas-tugas pastoral dilakukan secara *online* atau melalui panggilan telepon. Jika memungkinkan, para pendeta mengunjungi para lansia maupun mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan teknologi.

Dewan Kristen Cina and Yayasan Amity berbagi informasi dan terus bekerja sama. Gereja-gereja menyumbangkan 16 juta yuan Cina (2,3 juta dolar AS) kepada yayasan untuk mendukung karya penanggulangan, sebuah kontribusi tunggal terbesar bagi yayasan hingga saat ini. Warga gereja membantu dalam pengadaan pasokan dan memeriksa kualitas dan keamanannya. Para pengusaha Kristen memberikan sumbangan dalam bentuk barang. Jemaat-jemaat lokal secara aktif bekerja sama dengan yayasan untuk mendistribusikan disinfektan, peralatan, dan alat pelindung diri ke rumah sakit-rumah sakit kecil, komunitas lokal, dan panti jompo. Seminari-seminari berpartisipasi dalam kegiatan serupa, menanggapi kebutuhan lokal.

Di perdesaan, kehidupan menjadi makin sulit bagi mereka yang tertinggal. Orang-orang Kristen menjadi lebih peduli akan kebutuhan tetangga mereka dan merespons secara aktif. Zhanqing mengatakan bahwa jika sebelumnya umat Kristen dikenal hanya “membaca Alkitab dan berdoa” selama memerangi COVID-19, tetapi kemudian kegiatan sosial dan pelayanan mereka yang penuh keramahan memperlihatkan bagaimana “berbagi kasih tanpa syarat”. Upaya aktif yang dilakukan gereja ini bertujuan untuk mempraktikkan keyakinan bahwa Allah adalah kasih. Menurut Zhanqing, Yayasan Amity harus membantu mengembangkan kemampuan jemaat lokal untuk melayani masyarakat sehingga gereja dapat menjadi “gereja yang melayani” dan para anggotanya dapat mempersonifikasikan “kasih yang hidup”.

Mesir

Mayoritas penduduk Mesir yang berjumlah lebih dari 100 juta jiwa adalah Muslim, tetapi Gereja Ortodoks Koptik (Coptic Orthodox Church/COC) secara substansial hadir dan telah lama ada di negara ini. The Bishopric of Public, Ecumenical, and Social Services (BLESS) didirikan pada 1962 sebagai bagian

dari COC. BLESS berperan penting dalam memberikan pelayanan diakonia kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan di seluruh Mesir.

BLESS mengembangkan rencana aksi sebagai respons terhadap pandemi, yang dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan serta prinsip-prinsip inklusi-vitas, gender, perlindungan, dan pelibatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk:

- Memberikan bantuan darurat untuk menyelamatkan nyawa; makanan; kebersihan; dan perlengkapan sanitasi kepada orang-orang yang paling membutuhkan sesuai dengan prioritas nasional;
- Menyebarluaskan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang langkah-langkah penting untuk menghindari infeksi COVID-19, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, remaja, dan kelompok rentan;
- Memberdayakan para pemangku kewajiban dan pengasuh untuk memberikan bantuan yang memadai dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan;
- Memenuhi kebutuhan psikososial bagi masyarakat dan kelompok sasaran, terutama mereka yang kehilangan orang yang dikasihi;
- Menangkal penyebaran rumor, kesalahpahaman, dan stigma yang terkait dengan identitas sebagai korban COVID-19.

Tantangannya meliputi:

- Pendanaan untuk aksi kemanusiaan yang tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan, yang berujung pada situasi yang sulit dan dalam tekanan yang berkepanjangan;
- Ketakutan akan penularan infeksi yang mungkin dialami oleh mereka yang bertanggung jawab di lapangan selama merespons pandemi;
- Akses yang buruk terhadap perangkat dan platform digital dan kompetensi digital yang tidak memadai.

Jerman

Diakonie Deutschland adalah layanan kesejahteraan sosial dari gereja-gereja Protestan di Jerman. Lembaga ini merupakan lembaga utama penyedia layanan

perawatan seperti layanan tempat tinggal bagi para lansia. Sehubungan dengan itu, COVID-19 telah memberikan dampak yang besar terhadap operasional, pengeluaran, dan pendapatan. Peraturan yang berbeda juga harus diikuti di berbagai negara bagian. Informasi lengkap (dalam bahasa Jerman) tentang karya Diakonie Deutschland dalam menangani pandemi tersedia secara *online* di <https://www.diakonie.de/coronavirus-hilfe-und-infos>.

Berbagai fasilitas layanan diakonia menyiapkan rencana darurat dan menerapkan protokol kebersihan dan keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan. Tantangan khusus bagi karya diakonia adalah keharusan untuk mengurangi kontak sosial. Kurangnya APD mengakibatkan sejumlah penularan pada saat awal pandemi. Karena penghuni panti jompo termasuk dalam kelompok yang berisiko, terdapat banyak kasus penyakit dan kematian di beberapa lembaga diakonia. Sejak saat itu, APD yang layak untuk staf maupun pasien disediakan. Cukup sulit untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap penghuni dan staf perawat dengan kualitas hidup serta kemandirian penghuni dan keluarganya.

Meskipun ada desakan untuk mengurangi kontak sosial, banyak orang menunjukkan sikap saling menolong dan solidaritas. Kantor diakonia lokal dan jemaat-jemaat setempat, bersama dengan yang lainnya, membentuk jejaring dukungan lingkungan.

Selain menyediakan layanan diakonia di Jerman, Diakonie Deutschland—melalui organisasi Diakonie Katastrophenhilfe—memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia. Organisasi ini juga didukung oleh anggota ACT Alliance, Brot für die Welt (Roti untuk Dunia).

India

Sebanyak 30 gereja anggota Dewan Gereja Nasional India⁵⁷ aktif dalam menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi. Mereka menyediakan berbagai layanan:

⁵⁷ “NCCI Constituents Responding to COVID-19”, National Council of Churches in India website, <https://nccii1914.com/02-03-04-constituent-response/>.

- Sembako, bahan makanan, dan paket makanan, serta bantuan dapur umum yang melayani orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan pekerja migran;
- Tempat tinggal bagi para tunawisma di sekolah dan gedung gereja lainnya;
- APD untuk komunitas yang rentan;
- Kampanye peningkatan kesadaran di seluruh India;
- Dukungan psikologis bagi mereka yang terisolasi dan miskin, serta perawatan untuk kaum lanjut usia dan kaum yang termarginalkan;
- Memobilisasi rumah sakit dan apotek untuk menanggapi kebutuhan perawatan kesehatan tertentu yang ditimbulkan oleh pandemi, dalam kerja sama dengan layanan kesehatan pemerintah.

Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat COVID-19, tidak hanya dalam hal kesehatan, ekonomi, dan pengangguran, tetapi juga dalam hal pendidikan. Pemerintah Indonesia mendorong pembelajaran jarak jauh, tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi siswa yang tidak mampu membeli ponsel pintar atau akses komputer lainnya. Hal ini berdampak pada melebarnya kesenjangan pendidikan dan, terutama, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Bencana alam lainnya meningkatkan kebutuhan akan layanan diakonia, karena itu gereja-gereja, termasuk inisiatif oikoumenis dan lintas agama, secara aktif bekerja di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kenya

Gereja-gereja merespons pandemi melalui pelayanan diakonia dan peningkatan kesadaran serta kepatuhan terhadap anjuran pemerintah (seperti menunda aktivitas peribadahan dan mendorong praktik kebersihan). Mengingat bahwa gereja biasanya dapat menjangkau masyarakat perdesaan bahkan komunitas terpencil dengan lebih efektif dan komprehensif daripada organisasi lainnya, otoritas dan tanggung jawab gereja menjadi sangat penting dalam memerangi pandemi.

Christian Aid—anggota ACT Alliance—memiliki catatan panjang dalam melakukan kegiatan di Kenya. Selama pandemi, organisasi ini berfokus pada penyediaan informasi kesehatan yang jelas tentang COVID-19 dan meminimalkan dampak karantina wilayah. Bekerja sama dengan pemerintah Kenya, organisasi mitra mengoordinasikan kampanye penyuluhan dalam bahasa lokal tentang bagaimana virus ini dapat menular dan menyebar. Christian Aid menyiapkan tempat cuci tangan dan mengarahkan agar ketika mereka sakit dapat segera menghubungi saluran langsung (*hotline*) dan fasilitas kesehatan. Organisasi ini berjuang untuk memastikan bahwa masyarakat perdesaan terus menerima barang dan jasa yang mendasar serta memberikan berbagai saran dan bantuan bagi perempuan yang berisiko tinggi mengalami kekerasan fisik dan seksual selama karantina wilayah.

Timur Tengah

Setelah pandemi merebak, Dewan Gereja-gereja Timur Tengah (The Middle East Council of Churches/MECC) merespons cepat dengan bekerja sama dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk membantu orang-orang yang rentan dan memberikan pengetahuan tentang protokol kebersihan yang baik kepada keluarga maupun masyarakat. MECC mengorganisasi kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan COVID-19 di antara para pengungsi yang rentan dan pengungsi internal (*internally displaced persons/IDP*), melatih staf, menyediakan alat pelindung diri (APD), dan mematuhi protokol Organisasi Kesehatan Dunia (misalnya, menjaga jarak).

MECC mengeluarkan imbauan khusus kepada para mitranya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan bahan-bahan kebersihan, bantuan tunai tanpa syarat, dan mendistribusikan brosur panduan. MECC memfasilitasi penyediaan kebutuhan dasar melalui pusat-pusat distribusi, yang dalam beberapa kasus dilengkapi dengan distribusi dari rumah ke rumah. Dalam koordinasi dengan penasihat keamanan, MECC juga melakukan analisis risiko untuk kegiatan-kegiatan—terutama di tempat-tempat yang terkena dampak paling banyak. Selain itu, organisasi ini juga menerbitkan laporan

mingguan COVID-19—yang dibagikan kepada para mitra dan dipublikasikan secara online.

Contoh spesifiknya adalah The Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and All the East (GOPA). Universitas Balamand, yang dimiliki oleh Patriarkat, membuka pusat vaksinasi di lokasi universitas di Lebanon. Pusat vaksinasi ini memberikan ribuan dosis vaksin kepada masyarakat Lebanon dan Suriah. Departemen Hubungan Oikoumenis dan Pembangunan (Department of Ecumenical Relations and Development/DERD), yang didirikan pada 1994 dan berafiliasi dengan GOPA, bekerja untuk membantu penduduk miskin di Suriah selama dan setelah perang. Kebutuhan untuk kegiatan ini makin besar oleh karena COVID-19.

Inggris

Banyak gedung gereja yang digunakan sebagai pusat vaksinasi, termasuk beberapa katedral bersejarah.⁵⁸ National Health Service (NHS) yang dikelola oleh pemerintah adalah penyedia layanan kesehatan utama di Inggris, sementara beberapa lembaga yang dikelola oleh gereja menyediakan layanan diakonia. Salah satu contohnya adalah CrossReach, layanan kepedulian sosial dari Gereja Skotlandia. Lembaga ini merupakan penyedia layanan perawatan, seperti perawatan di rumah bagi para lansia, dan para stafnya harus beradaptasi dengan tantangan COVID-19. Risiko yang dihadapi staf menyebabkan beberapa layanan harus ditunda untuk sementara waktu, seperti Tom Allan Centre di Glasgow yang menyediakan layanan konseling konfidensial.⁵⁹

Zambia

Dewan Gereja-gereja di Zambia (The Council of Churches in Zambia/CCZ) mengizinkan penggunaan gedung sekolahnya, David Livingstone College of

⁵⁸ “Blackburn Cathedral Now Hosts One of New COVID-19 Mass Vaccination Centres”, Blackburn Cathedral website, <https://blackburncathedral.com/blackburn-cathedral-now-hosts-one-of-new-covid-19-mass-vaccination-centres/>. Blackburn Cathedral (Church of England) is one of the cathedrals in the UK being used as a vaccination centre.

⁵⁹ Further information is available online at <https://www.crossreach.org.uk>.

Education di Livingstone, sebagai fasilitas karantina oleh pemerintah. Rev. Emmanuel Yona Chikoya, Sekretaris Jenderal CCZ, mengatakan, “Kami bekerja sama dengan Konferensi Waligereja Zambia dan Persekutuan Injili Zambia. ... Kami telah mengeluarkan pernyataan pastoral terhadap negara yang menyerukan kepada gereja untuk mengikuti dan mematuhi anjuran pemerintah mengenai perang melawan COVID-19.”⁶⁰

Federasi DIAKONIA Dunia

Disusun dari laporan yang dikirim oleh Rev. Sandy Boyce, Presiden Federasi DIAKONIA Dunia dan seorang diaken dari Uniting Church Australia.

Pandemi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi mereka yang sudah rentan dan berjuang untuk bertahan hidup. Sebagai tanggapan, komite eksekutif Federasi DIAKONIA Dunia (Diakonia Weltbund e.V.) memutuskan untuk mengeluarkan dana dari anggaran DIAKAID untuk hibah tanggap darurat guna mendukung proyek-proyek yang diprakarsai oleh anggota asosiasi untuk merespons tantangan dan gejala yang muncul akibat pandemi.

Anggota asosiasi secara individu memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek di negara lain. Komunitas diakones Bethesda di Basel, Swiss, tetap berkomitmen pada karya diakonia, meskipun komunitas kecil yang terdiri dari 20 suster lansia ini tidak lagi dapat melaksanakan proyek-proyek mereka sendiri. Tiga proyek yang diuraikan di bawah ini menunjukkan dukungan mereka yang tulus dan praktis kepada orang-orang yang rentan.

Dalam kerja sama dengan Connexio, badan kemanusiaan dan pembangunan United Methodist Church di Swiss, para suster Bethesda memberikan bantuan darurat dan berfokus pada meringankan penderitaan orang-orang yang rentan dan kerawanan pangan. Di Argentina, paket makanan didistribusikan kepada orang-orang di daerah kumuh yang kehilangan pendapatan karena kebijakan karantina. Di Makedonia Utara, pakaian pelindung dan peralatan makan sekali pakai disediakan untuk melanjutkan pemberian makanan

⁶⁰ “Knowing COVID-19 was on its way, Africa’s churches prepared”, World Council of Churches website, 7 May 2020, <https://www.oikoumene.org/news/knowning-covid-19-was-on-its-way-african-churches-prepared>.

dan pelayanan perawatan di rumah bagi lansia dan orang sakit. Di Republik Demokratik Kongo, keluarga para pendeta yang penghasilannya berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan hidup dengan penghasilan itu, masing-masing menerima satu karung besar tepung jagung. Berkat cinta kasih para suster Bethesda, ribuan orang telah ditolong dengan cepat dan efisien.

Para suster Bethesda juga mendanai proyek bantuan yang dilakukan oleh Osteuropa Mission Schweiz (OEM), sebuah lembaga bantuan Kristen independen yang mengadvokasi etnis minoritas dan mereka yang kurang beruntung secara sosial. Lembaga ini berkomitmen untuk memerangi kemiskinan yang berdampak pada mereka yang paling rentan. Gereja anggota OEM mempersiapkan sup untuk orang-orang yang membutuhkan di jalanan. Saat paket makanan dibagikan, anggota gereja berdoa bersama dan memberkati mereka.

Para suster Bethesda juga mendukung berbagai usaha bantuan di Filipina bekerja sama dengan Yayasan Onesimo Bulilit, sebuah FBO yang berkarya bagi anak-anak jalanan dan keluarga mereka serta kaum muda yang berisiko di Manila. Yayasan ini membantu kaum muda yang hidup dengan keputusan di daerah kumuh maupun di jalanan. Selama karantina wilayah COVID-19, Onesimo mendistribusikan paket makanan kepada ribuan keluarga. Meskipun ada pandemi, sekitar 400 anak muda masih diasuh dalam program berbasis komunitas di gereja-gereja kumuh. Karena sekolah-sekolah ditutup, anak-anak remaja mengandalkan sistem sekolah alternatif seperti yang disediakan oleh program-program berbasis komunitas. Banyak dari gereja-gereja kumuh tidak memiliki komputer atau jaringan internet. Mereka sangat berterima kasih atas dukungan finansial sehingga kaum muda dapat melanjutkan pelatihan mereka melalui pembelajaran online.

Di Winnipeg, Kanada, seorang pelayan diakonal dari United Church of Canada melayani sebagai pelayan komunitas di St. Matthews Maryland Community Ministry, sebuah pelayanan yang memberikan dukungan dan membangun komunitas bersama dengan sejumlah orang yang paling rentan di kota tersebut. Ketika COVID-19 pertama kali muncul, sebagian besar program dukungan harus dihentikan. Ada tim yang menyediakan layanan antar-jemput makanan pada bulan pertama pandemi, yang mengalami peningkatan permintaan hingga dua kali lipat dari sekitar 70 menjadi 150 makanan per hari.

The Methodist Deaconess Order Fiji menghadapi dampak COVID-19 dan siklon Harold pada April 2020. Mereka dapat menyediakan bahan makanan untuk dua diakones yang melayani di pulau-pulau terluar. Beberapa keluarga terlindung di tempat para diakones setelah rumah mereka hancur. Komunitas ini juga menyediakan makanan untuk orang-orang yang rentan di jalanan. Selain itu, para diakones juga menyadari bahwa anak-anak di sebagian besar sekolah Methodis datang ke kelas tanpa makan siang karena sebagian besar orang tua mereka telah diberhentikan dari pekerjaannya. Para diakones yang melayani di sekolah-sekolah kemudian didorong untuk bekerja sama dengan para guru dan orang tua untuk memahami penderitaan para siswa dan menyediakan paket makan siang.

Selama pandemi, seorang pendeta hospis dan anggota dari Lutheran Diaconal Association in Michigan di Amerika Serikat, terus mendampingi mereka yang mendekati ajal. Di rumah sakit, lorong-lorong kosong, tidak ada pengunjung dan tidak ada pemeriksaan rutin, namun unit-unit perawatan penuh dan disibukkan dengan pasien-pasien yang kesepian. Salah satu pelayanan diakones adalah mendoakan pasien COVID-19 di ruang isolasi, menggunakan telepon perawat di lorong, dan menghibur serta meyakinkan orang-orang yang mereka kasih melalui telepon. Ia menceritakan bahwa baru-baru ini ia duduk di samping tempat tidur seorang pasien yang sekarat dan memegang telepon sementara putrinya, dan kemudian putranya, lalu kemudian istrinya, masing-masing menelepon dan mengucapkan selamat tinggal.

Pandemi dan dampak dari karantina wilayah, isolasi sosial, tekanan keuangan, dan ketidakpastian akan masa depan telah berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Seorang diaken di Australia mengajak jemaatnya untuk memikirkan cara-cara untuk mendukung orang-orang di lingkungan mereka. Respons yang diberikan sangat kreatif dan menjawab kebutuhan akan keterhubungan dengan komunitas meskipun ada aturan untuk mengisolasi diri secara sosial. Setelah bercakap-cakap dengan seorang pemilik kafe lokal yang menghadapi banyak pelanggan yang merasa tertekan, cemas, dan stres, gereja merespons dengan memberikan donasi untuk sebuah program *pay-it-forward* yang menyediakan kopi bagi orang-orang yang datang ke kafe tersebut. Para asisten toko yang terus bekerja meskipun mengalami

tekanan akibat pelanggan yang kasar dan ancaman COVID-19 sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan dengan pemberian sekotak coklat yang diberikan kepadanya oleh staf supermarket setempat. Guru sekolah dan staf sekolah lainnya yang diharapkan untuk terus bekerja meskipun ada karantina wilayah mengalami stres karena mereka mencoba menyeimbangkan antara pembelajaran tatap muka dan tantangan untuk beralih ke pembelajaran *online*. Gereja memberikan paket kartu kesehatan kepada para guru di empat sekolah untuk membantu mereka fokus merawat diri sendiri dan juga murid-murid mereka. Gereja juga memberikan paket aktivitas sehingga keluarga dapat membuat kerajinan tangan dengan anak-anak mereka di rumah dan memajang hasilnya di jendela dan pintu gedung gereja. Walaupun tidak ada ibadah di dalam gedung gereja karena karantina wilayah, gereja menemukan cara-cara kreatif untuk berada di tengah-tengah masyarakat, membawa sukacita dan memberikan kelegaan bagi mereka yang hidup dengan stres, kecemasan, dan ketidakpastian keuangan akibat disrupsi yang ditimbulkan oleh COVID-19.⁶¹

⁶¹ Further information is available online at <http://www.diakonia-world.org/>.

KONTRIBUTOR

Kelompok Referensi Diakonia Oikoumenis (2015–2018)

Rev. Professor Dr. Kjell Nordstokke (Convener), Church of Norway

Dr. Agnes Abuom, Moderator of the WCC Central Committee, Anglican Church of Kenya

Rev. Dr. Sushant Agrawal, Moderator of ACT Alliance Governing Board, Church's Auxiliary for Social Action (CASA), Baptist, India

Rev. Cornelia Füllkrug-Weitzel, Bread for the World, Protestant Church in Germany (EKD)

Rev. Professor Beverley G. Haddad, Anglican Church of Southern Africa

Rev. Dr. Carlos Ham, Presbyterian-Reformed Church in Cuba

Dr. Karen Nazaryan, Armenian Apostolic Church (Mother See of Holy Etchmiadzin)

Ms. Pauliina Parhiala, ACT Alliance, Evangelical-Lutheran Church of Finland

Ms. Zo Ramiandra Rakotoarison, Malagasy Lutheran Church, Madagascar

Rev. Rolf Steffansson, Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM), Finland

Kelompok Referensi Diakonia Oikoumenis (2018–2022)

Dr. Agnes Abuom, Moderator of the WCC Central Committee, Anglican Church of Kenya

His Eminence Metropolitan Professor Dr. Gennadios of Sassima, Vice-moderator of the WCC Central Committee, Orthodox – Ecumenical Patriarchate

Rev. Dr. Sushant Agrawal, Church's Auxiliary for Social Action (CASA), Baptist, India

Rev. Dr. Henriette Hutabarat-Lebang, Gereja Toraja Indonesia (Reformed)

Rev. Dr. Laurie Kraus, Presbyterian Church (USA)

Rev. Cibele Kuss, Lutheran Foundation of Diakonia, Brazil

Dr. Hani Riad, Bishopric of Public, Ecumenical and Social Services (BLESS), Orthodox, Egypt

Ms. Corrie van der Ven, Kerk in Actie/ACT Alliance, Netherlands

Ms. Miriam Weibye, Church of Scotland

Rev. Professor Dr. Dietrich Werner, Bread for the World/Protestant Church in Germany (EKD), Germany

Kontributor lain (yang belum terdaftar dalam Kelompok Referensi)

Dr. Souriya Bechealamy, Middle East Council of Churches

Mr. Davide Bernocchi, Caritas Internationalis, Roman Catholic Church

Rev. James Bhagwan, Pacific Council of Churches

Rev. Dr. Myra Blyth, Baptist Union of Great Britain

Rev. Sandy Boyce, Uniting Church in Australia/Diakonia World Federation

Mr. Ghassan Chahine, Middle East Council of Churches

Dr. Theresa Carino, Amity Foundation, China

Monsignor Pierre Ciambo, Caritas Internationalis, Roman Catholic Church

Rev. Dr. Stephanie Dietrich, Lutheran World Federation

Rev. Ted Dodd, United Church of Canada/Diakonia of the Americas and Caribbean

Rev. Dr. Chris Ferguson, World Communion of Reformed Churches

Ms. Nina Hallak, Middle East Council of Churches

Rev. Fifamé Fidèle Houssou-Gandonou, Protestant Methodist Church of Benin

Rev. Professor Dr. Jooseop Keum, Presbyterian Church of Korea

Very Rev. Professor Dr. Jack Khalil, Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East

Rev. Dr. Vladimir Khoulap, Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)

Ms. Kerstin Kollander, ACT Alliance

Rev. Nicta Lubaale Makiika, Organisation of African Instituted Churches

Mrs. Jennifer Martins, Caribbean and North American Council on Mission (CANCOM)

Mr. Alain Epp Weaver, Mennonite Central Committee, USA

Bishop Rosemarie Wenner, United Methodist Church

Staf WCC

Professor Dr. Isabel Apawo Phiri, WCC Deputy General Secretary

Rev. Dr. Dong Sung Kim†, WCC Programme Executive

Rev. Dr. David Marshall, WCC Programme Executive

Rev. Dr. Nyambura Njoroge, WCC Programme Executive

Dr. Fulata Lisungu Moyo, WCC Programme Executive

Ms. Athena Peralta, WCC Programme Executive

Rev. Dr. Martin Robra, WCC Programme Executive

Rev. Matthew Ross, WCC Programme Executive (Secretary to the Reference Group since 2018 and Editor)

Mr. Dinesh Suna, WCC Programme Executive

DESKRIPSI DAN KREDIT FOTO

(Foto yang tercantum pada bagian ini tidak digunakan dalam edisi Indonesia, kecuali foto pada bagian sampul buku)

Sampul

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2017)

Evelyn Nkhambule, bersama dengan cucunya Jesse yang digendongnya, sambil menata cabai yang dijemur di bawah sinar matahari di rumahnya di Edundu, Malawi. Keluarga-keluarga di desa tersebut banyak mendapatkan manfaat dari praktik tumpang sari, rotasi tanaman, dan pembuatan kompos yang mereka pelajari dari proyek *Malawi Farmer-to-Farmer Agro-Ecology* yang merupakan bagian dari program *Livingstonia Synod of the Church of Central Africa Presbyterian*.

Ringkasan Eksekutif, hlm. xv

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2011)

Nelayan di Gaza menurunkan jaring dari perahu sebelum fajar menyingsing. Sejak militer Israel memberlakukan blokade laut pada 2007, mereka hanya bisa menangkap ikan sejauh tiga mil laut dari garis pantai. Meskipun memiliki garis pantai sepanjang 40 kilometer dan tradisi panjang sebagai nelayan, banyak

nelayan yang menganggur dan penduduk Gaza terpaksa mengimpor ikan dari Israel. Karena penangkapan ikan di dekat pantai sebagian besar menghasilkan ikan yang belum waktunya dipanen, para ahli biologi memperingatkan akan adanya dampak negatif terhadap stok ikan di wilayah tersebut.

Pendahuluan, hlm. 1

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2021)

Mercusuar Cape Blanco di pesisir Samudra Pasifik di Cape Blanco, Oregon, Amerika Serikat.

Sejarah Diakonia Oikoumenis, hlm. 20

Kredit foto: Albin Hillert/WCC (2016)

Tembikar di Anaphora Institute, sebuah tempat peristirahatan dan pusat pendidikan Ortodoks Koptik yang terletak di barat laut Kairo, Mesir.

Diakonia dalam Gerakan Oikoumenis Polisentris Saat Ini, hlm. 50

Kredit foto: Albin Hillert/Life on Earth (2019)

Hari pasar di kamp Minawao untuk pengungsi Nigeria di Mokolo, Kamerun, ketika para pengungsi dan masyarakat setempat berkumpul untuk menjual dan membeli barang. Kamp Minawao di wilayah utara negara itu menampung sekitar 58.000 pengungsi dari Nigeria Timur Laut, yang didukung oleh *Lutheran World Federation* bersama dengan berbagai mitra.

Refleksi Teologis tentang Diakonia, hlm. 62

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2019)

Seorang anak perempuan berdoa sambil memegang lilin dalam sebuah Misa Katolik di St. Ignatius, Guyana. St. Ignatius adalah sebuah desa Amerindian di

wilayah Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana, yang awalnya didirikan oleh para imam Yesuit.

Perubahan Lanskap Aksi Diakonia, hlm. 84

Kredit foto: Albin Hillert/WCC (2018)

Deab Abu Malik, 40 tahun, menggembalakan dombanya di Lembah Yordan, Tepi Barat, di Wilayah Pendudukan Palestina. Relawan dari Program Pendampingan Oikoumenis Dewan Gereja-gereja se-Dunia di Palestina di Israel mendampingi para gembala di banyak bagian Tepi Barat, memastikan kehadiran internasional yang dikenal memiliki efek mitigasi terhadap konfrontasi antara penduduk Israel dan Palestina. Mengelola lahan mereka secara teratur sangat penting bagi masyarakat dan ternak mereka.

Kekhasan Praktik Diakonia, hlm. 114

Kredit foto: Sean Hawkey/Life on Earth (2012)

Khady Waylie, seorang petani kapas di Sitaoulé Bananding, Senegal, melemparkan kapas yang baru dipetik ke atas tumpukan. Panen adalah perayaan yang menandai akhir dari kerja keras selama satu musim. Khady menanam kapas yang bersertifikasi Fairtrade dan diekspor oleh FNPC, Federasi Produsen Kapas Nasional.

Tantangan Kontemporer, hlm. 136

Kredit foto: László Lehel/HIA (2022)

Pendistribusian bantuan pada akhir pekan Paskah di The Orthodox Church of the Nativity of the Blessed Virgin in Borodyanka, Ukraina. Bantuan yang terdiri dari makanan dan produk kebersihan ini diberikan oleh Hungarian Inter-church Aid, anggota ACT Alliance. Perang agresi Rusia di Ukraina telah menyebabkan kematian dan penderitaan dalam skala yang dramatis, menyebabkan setidaknya 15 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan

dan perlindungan. Lebih dari seperempat populasi Ukraina telah meninggalkan rumah mereka, dengan hampir dua pertiga dari anak-anak di Ukraina kini mengungsi.

Diakonia Oikoumenis dalam konteks konfesional, hlm. 156

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2014)

Hien Nguyen, seorang biarawati Katolik dari Vietnam, menyalakan lilin pada kebaktian lintas agama di Katedral Santo Paulus (Anglikan) di Melbourne, Australia. Upacara peringatan bagi mereka yang telah meninggal karena HIV dan AIDS ini melibatkan beberapa delegasi Konferensi AIDS Internasional ke-20. Kebaktian ini diadakan setelah pawai di Melbourne yang menuntut diakhirinya stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang hidup dengan virus tersebut, dan sebuah seremoni penyalaan lilin di alun-alun di dekatnya.

Diakonia Oikoumenis dalam Konteks Regional, hlm. 177

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2017)

Seorang perempuan mengoperasikan alat tenun tradisional untuk menenun kain di Kalay, sebuah kota di Myanmar.

Langkah Selanjutnya, hlm. 202

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2017)

Menikmati suasana damai untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, seorang anak laki-laki menyusun kerangka atap jerami sebuah gubuk. Proses perdamaian yang dimulai pada 2006 telah membawa harapan bagi dua juta orang di Uganda Utara yang mengungsi akibat perang panjang dengan Tentara Perlawanan Tuhan. Di Desa Amuca, keluarga-keluarga telah kembali dan mengumpulkan hasil panen, membangun rumah, dan menikmati suasana damai untuk pertama kali selama lebih dari 20 tahun.

Karya Diakonia Gereja-gereja dalam Konteks COVID-19, hlm. 215

Kredit foto: Ash Mills/Katedral Salisbury (2021)

Di tengah pandemi COVID-19, sebuah pusat vaksinasi massal didirikan di Katedral Salisbury, Inggris. Berjam-jam lamanya, mulai dari musik klasik hingga musik pertunjukan, para musisi di Katedral memainkan musik untuk orang-orang yang sedang menerima vaksin. Album musik yang dimainkan selama vaksinasi kemudian direkam, yang berjudul *Salisbury Meditations*, untuk mengumpulkan dana bagi NHS.

p. 118

Kredit foto: Sean Hawkey/Life on Earth (2012)

Peringatan jaga jarak sosial di London, saat orang-orang beradaptasi dengan pembatasan dan kebijakan terkait pandemi COVID-19.

p. 130

Kredit foto: Paul Jeffrey/Life on Earth (2011)

Seorang anak mengintip dari balik pintu ke dalam rumah mereka di Batey Bombita, sebuah komunitas di barat daya Republik Dominika yang populasinya terdiri dari imigran Haiti dan keturunannya.

Kesaksian dan pelayanan sangat penting bagi Gereja: misi, diakonia, dan oikoumenisme adalah satu kesatuan dan merupakan inti dari apa artinya menjadi Gereja. Dewan Gereja-Gereja se-Dunia dan ACT Alliance telah bekerja sama untuk menghasilkan sumber daya ini, yang kami tawarkan bagi gereja-gereja dan pelayanan diakonia mereka di seluruh dunia. Kami berharap, program ini akan mengarahkan kita untuk saling berbagi ide lintas kepercayaan dan perbatasan, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan.

Rev. Professor Dr Ioan Sauca
Plt. Sekretaris Jenderal, Dewan Gereja-Gereja se-Dunia

Diakonia merupakan “bagian integral dari keberadaan dan misi gereja”. Tidak ada gereja tanpa diakonia, dan tidak ada diakonia tanpa “kekhasan tindakannya yang berbasis iman”. Dalam konteks ini, tidak ada kontradiksi antara pendekatan dalam diakonia yang berbasis iman dan yang berbasis hak asasi, karena keduanya saling menguatkan: “tindakan berbasis iman maupun yang berbasis hak asasi saling meneguhkan”.

Rudelmar Bueno de Faria
Sekretaris Jenderal, ACT Alliance

Misi, diakonia, dan oikoumenisme adalah satu kesatuan dan merupakan inti dari apa artinya menjadi gereja. Dokumen ini mendorong dialog dan kerja sama antara gereja, mitra oikoumenis, dan WCC. Untuk itu, dokumen ini ditawarkan kepada gereja-gereja di seluruh dunia dan pelayanan diakonianya sebagai panduan untuk merencanakan sebuah bentuk pertukaran gagasan lintas konfesi dan lintas batas, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Di sini diuraikan garis besar pelayanan diakonia secara teologis dan praktis. Komponen-komponen teologis tersebut disusun berdasarkan praktik gereja-gereja dan -organisasi oikoumenis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dokumen ini juga memperlihatkan titik temu antara gereja dan pelayanan-pelayanan khusus untuk memandu berbagai aksi, praktik, dan pengembangan kebijakan.

